



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: <b>HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd</b> <b>alias GILDUS</b>
Tempat Lahir	: Ende
Umur/tanggal Lahir	: 57 tahun / 05 November 1966
Jenis Kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Samratulangi RT.002/RW.005, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende
Agama	: Khatolik
Pekerjaan	: PNS (Kepala Sekolah SMK N 1 Ende)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023. sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
10. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
11. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A. Luis Balun, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman – Kuanino, RT.17/RW.03, Kelurahan Nunleu Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Kode Pos 851119 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 69/LGS/TPK/2023/PN. KPG tertanggal 4 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana nomor register : PDS-04/N.3.14/Ft.2/05/2023 tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah” secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 2 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd berupa :
  - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  - Menghukum Terdakwa membayar Uang Denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
  - Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp. 1.419.665.000,- (satu milyar empat ratus Sembilan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara.
5. Menyatakan Barang Bukti dalam perkara ini sebagai berikut:
  1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
  2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
  3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
  4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;

Halaman 3 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
7. 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
9. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.

## **Dirampas untuk negara dan diperhitungkan untuk membayar uang pengganti.**

10. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
11. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
12. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
13. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :
  - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
14. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
  - 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 15. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
  - (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

**Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti An. Terdakwa Hermin Gildus Rangga, S.Pd dan An. Terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd.**

- 16. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;
- 17. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;
- 18. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
- 19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.

**Dikembalikan kepada Sdr. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.**

- 20. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;
- 21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;
- 22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;
- 23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
- 24. 2 (dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;

Halaman 5 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
28. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;
29. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
30. 5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;
32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;
34. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
35. 4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022. (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).
36. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
37. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
38. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.

Halaman 6 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
40. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
43. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
44. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
47. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
48. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
51. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
52. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
55. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
56. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
63. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
66. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
67. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
68. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
70. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
71. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
74. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
78. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri  
1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar  
Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK  
negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar  
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
82. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS  
dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar  
Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1  
Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar  
Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri  
1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,-  
(satu juta seratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK  
negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar  
Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
86. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-  
ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019  
sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar  
Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
88. 55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah  
sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu  
rupiah);
89. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga  
sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah),  
dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata  
niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat  
ratus ribu rupiah);
  - Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar  
Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
90. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:
- Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
  - Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
91. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500,- (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
94. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;
95. 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
98. 2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
99. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
100. 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
101. 5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
105. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar nota pembelian Flash Disk pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 13 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
112. 1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
113. 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
114. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
115. 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebesar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
116. 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
117. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
118. 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
121. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
124. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
126. 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
127. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
128. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
133. 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
134. 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas photo peserta ujian Nasional tanggal 14 januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
138. 3 (tiga ) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
139. 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
140. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi penguji ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
143. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
144. 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
145. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
146. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
147. 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
148. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
149. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende

Halaman 16 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

150. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
151. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;
152. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
153. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da Silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.
154. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
156. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
157. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
158. 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :
  - Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Januari 2021;
  - Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021.
159. 1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;
160. 1 (satu ) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;
161. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;
162. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
  - Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021
163. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 Maret 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 18 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 19 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catridge sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;

Halaman 20 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.
164. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
165. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.
166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020

Halaman 21 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;
168. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,
169. 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;
170. 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;
171. 5 (lima) lembar kwiutansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
173. 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
174. 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;
175. 3 (tiga) lembar biaya insentif kelebiha jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;
176. 4 (empat )lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
177. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;
178. 11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
179. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
180. 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;
181. 12 (dua belas ) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
182. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;

Halaman 22 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



183. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
184. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
188. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
190. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
191. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp.150.000;
192. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
193. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
194. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
195. 1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;
197. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
198. 1 (satu) lembar kwitansi nota makan
199. Satu bundel nota konsumsi;
200. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin photocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
202. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
203. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
205. 1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
206. 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
207. 1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
208. 1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
210. 4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
212. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
213. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
215. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,
217. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,
218. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
219. 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
220. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,
221. 1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
222. 1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,

Halaman 24 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
224. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
225. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,
226. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
227. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
228. 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
229. 5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
230. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
  - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;
231. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :
- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
  - 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
232. 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
233. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
234. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;
235. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 25 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;
237. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
238. 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
239. 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua ) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empatjuta seratus ribu rupiah);
240. 3(tiga) lebar nota DARI eliza);
241. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
242. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebsar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
243. 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
244. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;
245. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
246. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyokong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
247. 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
248. 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;

Halaman 26 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
250. 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
251. 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
252. 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
253. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
254. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
255. 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
256. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
257. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
259. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
260. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;

Halaman 27 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

261. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
262. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020.
264. 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
265. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
266. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
267. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
268. Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Smester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;
- 269. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
- 270. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILLI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;

Halaman 30 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 31 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMELIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.

271. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil documentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
272. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
273. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
274. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lham belas juta rupiah);
277. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
278. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
279. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
280. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
281. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
282. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
283. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
284. 1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
285. 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
286. 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
289. 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 33 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisoner BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
292. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
293. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
294. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
295. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
296. 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
297. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
298. 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
299. 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
300. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
301. 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
302. 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
303. 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
304. 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

Halaman 34 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



305. 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
306. 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
307. 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
308. 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorer teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
309. 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
310. (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
311. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;
312. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;
313. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;
314. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
315. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
316. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada Saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd**

317. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000.  
(satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

318. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
319. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
320. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D Sebesar Rp. 1.050.000 ( satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
321. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
322. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
323. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
324. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
325. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta

Halaman 36 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

326. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

327. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

328. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

329. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

330. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

331. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

332. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

333. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp.

Halaman 37 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

334. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

335. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

336. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

337. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

338. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

339. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

340. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

Halaman 38 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





341. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
342. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
343. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
344. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
345. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
346. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021.

**Dikembalikan kepada Sdr. FLORENTINA NOVITA TANDA, S.AP.**

347. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).

**Dikembalikan kepada Sdr. FAKHRUDDIN UMAR, S.Pd.**

348. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;
349. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020.

**Dikembalikan kepada Sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M.**



350. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. MARIA CESILIA DHALE, S.S.

351. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.

352. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.

**Dikembalikan kepada Sdr. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd.**

353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;

354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;

355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;

356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

**Dikembalikan kepada Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.**

6. Menetapkan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana  
jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

2. Menyatakan Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd Alias GILDUS** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
3. Membebaskan Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd Alias GILDUS**, sebagaimana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
4. Memulihkan Harkat dan martabat Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd Alias GILDUS** seperti semula.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum/Replik yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/N.3.14/Ft.1/05/2023 tertanggal 08 Mei 2023 sebagai berikut:

#### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama **HERMIN GILDUS RANGGA** sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan saksi **WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah)** selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum telah membentuk dan mengangkat kepengurusan komite SMKN 1 Ende** berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** adalah sebagai berikut:

- Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
- Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
- Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende.

Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)

- 2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Halaman 42 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
  - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
  - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

**Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)**

- 1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
- 2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

**Pasal 7**

- 1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.
- 2) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.
- 3) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- 4) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
  - c. keanggotaan dan kepengurusan;

**Pasal 8 Ayat (1)**

- 1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Bahwa Kemudian Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar **Rp. 2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar **Rp. 1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar **Rp. 1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran YANG dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu Saksi WENSLAUS DERTA atau para siswa





juga bisa langsung mengumpulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelasan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori pungutan.

- Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2021. Semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende Bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.
- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar **Rp. 2.732.150.000**. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar **Rp. 2.182.220.000**. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 1.166.100.000**. dengan total penerimaan uang komite sebesar **Rp. 6.080.470.000**. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah), Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam



berkas terpisah) dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

- 1) Aliran Dana Komite dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi Isi arisan pak albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk urusan bapak kecil kepek yang meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi urus anak sambut baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangamboa	permintaan untuk keperluan pribadi beli sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar Listrik ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Anggapan uang sisa tahun lalu)	
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	permintaan untuk antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk bayar utang beli babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi beli sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Robert yang ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	permintaan antar uang untuk modal main kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu ke Tangerang Katanya kasi Aweng 3 jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	antar untuk keperluan pribadi	Ambrosius More

Halaman 46 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya pinjam untuk isi arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi kerja kubur di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	permintaan untuk antar modal main kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	kupang	permintaan waktu belanja dengan istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan modal main kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	29/12/2019	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya mau pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan uang 2 juta yang katanya Dana BOS pinjam untuk pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang yang katanya mau dikirim ke anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	permintaan pinjaman untuk acara kedukaan keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi isi arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	rumah pak wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi (katanya isi arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi waktu UNBK hari pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe

Halaman 48 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi katanya mau kirim ke anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	rumah pak gildus	antar karena permintaan untuk isi arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan modal main kartu dan keperluan pribadi yang lain	Wens yang antar langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan keperluan pribadi (katanya 2 juta untuk tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di ogan (tukang) untuk beli besi keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi (anggapannya uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba

Halaman 49 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	dealer, jln el tari	permintaan pembelian motor aeror	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan kerluan pribadi katanya piknik ke nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	perintah pengambilan uang di malam hari : 1 juta untuk keperluan pribadi	Mohamad Roman
				dan 1 juta dikasih kepek ke Sandi Matutina (kata saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi katanya beli anting-anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk beli pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More

Halaman 50 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi mau bayar listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
118	bulan tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk isi arisan pak wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER

Halaman 51 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah pengambilan untuk keperluan pribadi di rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan kepek) karena 2 Bendahara keluar kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang saku perjalanan dinas ke kupang persiapan ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi mobil pickup (Robert Roga yang ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	sekolah	Mengambil uang langsung dari Bendahara BOS, yang dimana uang itu	Ivony Sarlota
				sebenarnya pengembalian pinjaman Dana BOS ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 52 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di skolasika untuk merayakan HUT pribadi	Skolasika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pembelian pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk hadir pesta nikah ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Rosari M Wulandari (anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk cucu mau test tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk mau buka usaha bola guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Yovita Ida Tena	
				Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	

Halaman 53 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk anggota koperasi kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan yang katanya bayar tukang gali pohon pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran bon KEPSEK di unit produksi sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan keuntungan bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang transportasi ke danau kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan BPN- MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan MOF- BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	

Halaman 54 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	pembelian tiket PHILOMENA PAO ENE- KOE	
		933.054.190			

Halaman 55 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- 2) Bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada guru yang menggunakan dana komite

	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa



		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

- 3) Berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;



- c) Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- d) Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- e) RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
- g) Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana Komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana Komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang Komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening Komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000

Halaman 59 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

- 4) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar **Rp. 2.732.150.000**. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar **Rp. 2.182.220.000**. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 1.166.100.000**. dengan sebesar **Rp. 6.080.470.000**. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Uang tersebut atas perintah Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Penuntutan dalam berkas terpisah) :

- Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:

- Uang Tunai Rp 570.500.000,-
- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
- 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
- Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
- Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
- Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
- Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite

- saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd

- Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
- Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
- sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Halaman 61 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Pasal 10

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
  - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
  - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
  - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

**Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- ( Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu serratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI atas dugaan tidak tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan komite**

Halaman 62 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**smk n 1 ende tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember sebagai berikut:**

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Ahli BPKP terkait dengan keuangan negara pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,
  - h. *kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum*
  - i. *kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 huruf h dan i diatas, dimana penjelasan atas kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Ende yang berstatus sebagai sekolah negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka sumbangan/penggalangan dana oleh Komite Sekolah dapat dikategorikan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Sehingga AHLI berpendapat bahwa sumbangan/ penggalangan dana oleh Komite Sekolah masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara.

sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 1 Nomor 1, yang menyatakan bahwa **Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah**. Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Sekolah Negeri merupakan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, **Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.**





Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pada Pasal 10 Ayat (1), **Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan** dan ayat (2) **Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.** serta pada ayat 4, yang menyatakan bahwa, **Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.**

Sesuai dengan peraturan diatas, AHLI berpendapat bahwa dana hasil sumbangan/penggalangan dana yang dimasukan kedalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Yang dalam perkara ini adalah SMK Negeri 1 Ende dengan status sekolah negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah, sehingga hasil penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup keuangan negara. Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa :

**Pertama, undang-undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.**

**Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan.**

**Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara**

Selain itu **Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020,**



2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai **Penerimaan Negara**. Oleh karea itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari **Keuangan Negara** dan penggunaan **Keuangan** tersebut harus mengacu pada **Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah**

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

a) Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

b) Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
  - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
  - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
  - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.739.540.151,-</b>

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

## SUBSIDIAR

Bahwa **Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan saksi **WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah)** selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku Kepala sekola SMK N 1 End. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan orang lain yaitu:**

1. Saksi Abraham Badu	5.000.000
2. Saksi Fakhrudin Umar	1.000.000
3. Saksi Maria Yosefina Wawo	2.000.000
4. Saksi Yudhi Heriyanto	1.450.000

Halaman 66 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



5. Saksi Yosefina Hati Seran	1.000.000
6. Saksi Emi Herawati	1.000.000
7. Saksi Fulbertus A Wenggo	4.000.000
8. Saksi Yuliana Mi	1.000.000
9. Saksi Wahyuni	2.500.000
10. Saksi Trisna Claudia Bona (siswa)	1.100.000
11. Saksi ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	14.275.598

**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:**

- Bahwa berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Pasal 15 kepala sekolah memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- Bahwa Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** adalah sebagai berikut:
  - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
  - Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
  - Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

5) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

- c. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
- d. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)

3) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 7

5) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

6) Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

7) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).

8) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

- d. nama dan tempat kedudukan;
- e. dasar, tujuan dan kegiatan;
- f. keanggotaan dan kepengurusan;

Pasal 8 Ayat (1)

5) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- Bahwa Kemudian Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar **Rp. 2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar **Rp. 1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar **Rp. 1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran YANG dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite

Halaman 68 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyeter kepada bendahara komite yaitu Saksi WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori pungutan.

- Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2021. Semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 End Bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.
- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar **Rp. 2.732.150.000**. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar **Rp. 2.182.220.000**. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 1.166.100.000**. dengan total penerimaan uang komite sebesar **Rp. 6.080.470.000**. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening prbadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah), Kemudian Terdakwa bersama



dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

- 1) Aliran Dana Komite dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi Isi arisan pak albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk urusan bapak kecil kepek yang meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi urus anak sambut baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangamboa	permintaan untuk keperluan pribadi beli sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar Listrik ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Anggapan uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	permintaan untuk antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk bayar utang beli babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi beli sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Robert yang ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	permintaan antar uang untuk modal main kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang

Halaman 71 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					antar langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu ke Tangerang Katanya kasi Aweng 3 jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	antar untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya pinjam untuk isi arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi kerja kubur di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	permintaan untuk antar modal main kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	kupang	permintaan waktu belanja dengan istrinya	Krispinus Pedang

Halaman 72 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan modal main kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya mau pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba

Halaman 73 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan uang 2 juta yang katanya Dana BOS pinjam untuk pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang yang katanya mau dikirim ke anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	permintaan pinjaman untuk acara kedukaan keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi isi arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	rumah pak wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi (katanya isi arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 74 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				waktu UNBK hari pertama	
63	11/04/2020	1.500.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi katanya mau kirim ke anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	rumah pak gildus	antar karena permintaan untuk isi arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan modal main kartu dan keperluan pribadi yang lain	Wens yang antar langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam

Halaman 75 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan keperluan pribadi (katanya 2 juta untuk tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di ogan (tukang) untuk beli besi keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi (anggapannya uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	dealer, jln el tari	permintaan pembelian motor aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan kerluan pribadi katanya piknik ke nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 76 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	perintah pengambilan uang di malam hari : 1 juta untuk keperluan pribadi	Mohamad Roman
				dan 1 juta dikasih kepek ke Sandi Matutina (kata saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi katanya beli anting-anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk beli pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi mau bayar listrik	Krispina Agnes Namba

Halaman 78 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
118	bulan tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk isi arisan pak wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah pengambilan untuk keperluan pribadi di rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan kepek) karena 2 Bendahara keluar kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang saku perjalanan dinas ke kupang persiapan ujian P3K	Krispina Agnes Namba

Halaman 79 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi mobil pickup (Robert Roga yang ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	sekolah	Mengambil uang langsung dari Bendahara BOS, yang dimana uang itu	Ivony Sarlota
				sebenarnya pengembalian pinjaman Dana BOS ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di skolastika untuk merayakakan HUT pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pembelian pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk hadir pesta nikah ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	

Halaman 80 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Rosari M Wulandari (anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk cucu mau test tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk mau buka usaha bola guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Yovita Ida Tena	
				Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	

Halaman 81 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk anggota koperasi kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan yang katanya bayar tukang gali pohon pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran bon KEPSEK di unit produksi sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan keuntungan bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang transportasi ke danau kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan BPN- MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE- KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE- ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI	

Halaman 82 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



				WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	





178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	pembelian tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
		933.054.190			

- 6) Bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada gugus yang menggunakan dana komite

	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe



8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

2) Berdasarkan keterangan Ahli AHLI Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh



dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);**
- Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
- Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru serta tunjangan jam mengajar atau insertif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS.

Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

N O	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000

Halaman 87 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000





33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
<b>Total Keuangan yang di Setor</b>			<b>Rp 196.000.000</b>	<b>Rp 181.600.000</b>

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

- 3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar **Rp. 2.732.150.000**. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar **Rp. 2.182.220.000**. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 1.166.100.000**. dengan sebesar **Rp. 6.080.470.000**. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Uang tersebut atas perintah Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Penuntutan dalam berkas terpisah) :

- Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:
  - Uang Tunai Rp 570.500.000,-
  - Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
  - 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
  - Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
  - Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
  - Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
  - Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
- saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd
  - Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
  - Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
  - sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
  - Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 10

Halaman 90 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 7) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
  - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
  - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
  - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

**Sehingga dari perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- ( Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu serratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI atas dugaan tidak tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan keuangan komite smk n 1 ende tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan penjelasan Ahli BPKP terkait dengan keuangan negara pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1,

*h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum*

*i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 huruf h dan i diatas, dimana penjelasan atas kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Ende yang berstatus sebagai sekolah negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka sumbangan/penggalangan dana oleh Komite Sekolah dapat dikategorikan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Sehingga AHLI berpendapat bahwa sumbangan/ penggalangan dana oleh Komite Sekolah masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara.

sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 1 Nomor 1, yang menyatakan bahwa **Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah**. Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Sekolah Negeri merupakan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, **Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.**

Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pada Pasal 10 Ayat (1), **Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber**

Halaman 92 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



*daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dan ayat (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. serta pada ayat 4, yang menyatakan bahwa, Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.*

Sesuai dengan peraturan diatas, AHLI berpendapat bahwa dana hasil sumbangan/penggalangan dana yang dimasukan kedalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Yang dalam perkara ini adalah SMK Negeri 1 Ende dengan status sekolah negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah, sehingga hasil penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup keuangan negara. Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa :

***Pertama, undang-undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.***

***Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan.***

***Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara***

Selain itu ***Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan***





**Negara. Oleh karea itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah**

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

**a) Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :**

**Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-**

**Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-**

**Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-**

**Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.**

**b) Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :**

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
  - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
  - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
  - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

**Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :**

- **Selisih RAPBS dan LPJ Rp. 583.715.767,-**
- **Selisih LPJ dan hasil uji petik Rp. 1.155.824.384,-**



Total

Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.  
atau

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, bersama-sama dengan saksi **WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah)** selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yang diangkat berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 yang dikeluarkan oleh Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End. Dimana pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Bulan Desember, bertempat di SMK N 1 Ende atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang bertentangan dengan kewajibannya** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** selaku selaku Kepala sekola SMK N 1 End membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** adalah sebagai berikut:

- Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
- Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
- Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i. Setelah itu Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd** mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMK N 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi ketua komite SMKN 1 Ende. Kemudian Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite

Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3)

2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

3) Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:

- a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
- b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;

Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2)

1) Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.

2) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 7

1) Anggota Komite Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah yang bersangkutan.

Penetapan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditetapkan oleh kepala Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak.

Halaman 96 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART).
- 3) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat hal sebagai berikut:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
  - c. keanggotaan dan kepengurusan;

**Pasal 8 Ayat (1)**

- 1) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- Bahwa Kemudian Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 sebesar **Rp. 2.300.000,-** (dua juta tiga ratus ribu rupiah) Pada TA. 2020/2021, sebesar **Rp. 1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Pada TA. 2021/2022 sebesar **Rp. 1.800.000,-** (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran YANG dilakukan diawal bulan Juli s/d Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan. Para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyetor kepada bendahara komite yaitu Saksi WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa lanung mengupulkan kepada bendahara komite. Dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelsakan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori pungutan.
  - Bahwa kemudian seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah komite sekolah yaitu saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i



selaku ketua Komite SMK N 1 Ende bukan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2022, semua tatacara atau mekanisme ditentukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 End Bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende.

- Bahwa Kemudian Penggalangan dana Komite Sekolah dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.
- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar **Rp. 2.732.150.000**. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar **Rp. 2.182.220.000**. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 1.166.100.000**. dengan total penerimaan uang komite sebesar **Rp. 6.080.470.000**. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Terdakwa dalam berkas terpisah), Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) dalam setiap penggunaan dana komite tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah, serta Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.
- Bahwa terdapat beberapa siswa yang belum melunasi pembayaran uang komite, kemudian pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi *tersangka Hermin GILDUS RANGGA, S.Pd pada saat apel Bersama guru-guru SMK N 1 Ende memberikan intruksi kepada guru-guru dan walikelas agar memberikan sanksi kepada siswa yang belum melunasi uang komite* **"Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak**





***membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite”***

- Bahwa terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:

- 1) Aliran Dana Komite dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi Isi arisan pak albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk urusan bapak kecil kepek yang meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi urus anak sambut baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangambo	permintaan untuk keperluan pribadi beli sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar Listrik ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Anggapan uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	permintaan untuk antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk bayar utang beli babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi beli sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Robert yang ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	permintaan antar uang untuk modal main kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu ke Tangerang Katanya kasi Aweng 3 jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More

Halaman 100 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	antar untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya pinjam untuk isi arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi kerja kubur di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	permintaan untuk antar modal main kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	kupang	permintaan waktu belanja dengan istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 101 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan modal main kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya mau pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan uang 2 juta yang katanya Dana BOS pinjam untuk pertemuan	Krispina Agnes Namba

Halaman 102 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	06/02/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang yang katanya mau dikirim ke anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	permintaan pinjaman untuk acara kedukaan keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi isi arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	rumah pak wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi (katanya isi arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi waktu UNBK hari pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi katanya mau kirim ke anaknya	Krispina Agnes Namba





66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	rumah pak gildus	antar karena permintaan untuk isi arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan modal main kartu dan keperluan pribadi yang lain	Wens yang antar langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan keperluan pribadi (katanya 2 juta untuk tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di ogan (tukang) untuk beli besi keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Marius F W Nobe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	08/07/2020	2.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi (anggapannya uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	dealer, jln el tari	permintaan pembelian motor aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan kerluan pribadi katanya piknik ke nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	perintah pengambilan uang di malam hari : 1 juta untuk keperluan pribadi	Mohamad Roman

Halaman 105 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



				dan 1 juta dikasih kepek ke Sandi Matutina (kata saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi katanya beli anting- anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk beli pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi mau bayar listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
118	bulan tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk isi arisan pak wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER

Halaman 107 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah pengambilan untuk keperluan pribadi di rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan kepek) karena 2 Bendahara keluar kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang saku perjalanan dinas ke kupang persiapan ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi mobil pickup (Robert Roga yang ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	sekolah	Mengambil uang langsung dari Bendahara BOS, yang dimana uang itu	Ivony Sarlota
				sebenarnya pengembalian	

Halaman 108 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				pinjaman Dana BOS ke Dana Komite	
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di skolestika untuk merayakan HUT pribadi	Skolestika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pembelian pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk hadir pesta nikah ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
145			Bank Mandiri	transfer ke no rekening Rosari M Wulandari (anaknya)	

Halaman 109 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	07/10/2021	1.000.000		BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk cucu mau test tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk mau buka usaha bola guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Yovita Ida Tena	
				Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk anggota koperasi kembang	Krispina Agnes Namba

Halaman 110 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan yang katanya bayar tukang gali pohon pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran bon KEPSEK di unit produksi sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan keuntungan bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang transportasi ke danau kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	

Halaman 111 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE- ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF- BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN- MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN- MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE- KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	

Halaman 112 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



181	25/06/2019	601.845	Traveloka	pembelian tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
		933.054.190			

- 2) Bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada gugu yang menggunakan dana komite

	Nama	Hari/Tangga I	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba



	Bona (siswa)			
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

2) Berdasarkan keterangan Ahli AHLI Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	





2	Iuran Musyawah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	
---	--	--

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
- Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);**
- Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada; RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
- Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Bahwa Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS. Berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komie yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000

Halaman 116 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
<b>Total Keuangan yang di Setor</b>			<b>Rp 196.000.000</b>	<b>Rp 181.600.000</b>

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

- 3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite yang tidak dibuat dengan cermat serta penggunaan dana komite yang dilakukan guna kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memperkaya orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar **Rp. 2.732.150.000**. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar **Rp. 2.182.220.000**. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 1.166.100.000**. dengan sebesar **Rp. 6.080.470.000**. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Terdakwa dalam berkas terpisah). Kemudian Uang tersebut atas perintah Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Penuntutan dalam berkas terpisah) :

- Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:
    - Uang Tunai Rp 570.500.000,-
    - Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
    - 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
    - Terdapat tranferan uang yang tidak wajar ke rekening HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama istri dan anaknya.
    - Pembelian tiket pesawat kepada keluarga (Istri dan Anak-anak)
    - Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
    - Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
  - saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd
    - Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
    - Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
    - sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
    - Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
- Maka hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite Pasal 10

Halaman 118 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
  - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
  - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
  - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

**Sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd selaku Kepala sekolah SMK N 1 End bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende memberikan keuntungan bagi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd selaku Kepala sekolah SMK N 1 End dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende sebesar Rp. 1.739.540.151,- ( Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA. dengan rincian sebagai berikut:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI maka didapatkan data sebagai berikut:

a) Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-

Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

b) Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
  - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
  - LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
  - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik Rp. 1.155.824.384,-
- Total Rp. 1.739.540.151,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-





**Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1)  
KUHPidana**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaannya Penuntut Umum selanjutnya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

**1. Saksi ALBERTHUS JAO NDU, SP.d,**

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, dasar dalam jabatan yaitu Surat Keputusan Gubernur NTT nomor : 816.2.1/316/ BKD.3.2, tanggal 10 Desember 2021.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 15 Ayat (1) Permendikbud no 6 Tahun 2018,
  - a. Melaksanakan tugas manajerial,
  - b. Pengembangan kewirausahaan,
  - c. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- Bahwa Kepala sekolah melaksanakan tugas manajerial untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, ruang lingkup antara lain mengawasi kegiatan proses belajar mengajar, memonitoring kegiatan literasi dan numerasi, melakukan supervise terhadap guru yang melaksanakan proses belajar mengajar, pengecekan administrasi surat-surat yang masuk dan keluar, memonitoring kebersihan sekolah, melaksakan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah.
- Bahwa maksud dari Pengembangan Kewirausahaan adalah Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kewirausahaan, terhadap guru mata pelajaran yang memberikan materi pelajaran kepada siswa dalam hal pengembangan kewirausahaan, ruang lingkup untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dibidang kewirausahaan.
- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah dalam hal supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan adalah bahwa Kepala sekolah melakukan supervise administrasi dan kegiatan proses belajar dalam kelas, serta penilaian terhadap kinerja para guru.
- Bahwa terkait pengelolaan keuangan yang harus dilakukan oleh kepala sekolah yaitu Melakukan Rapat kerja semua komponen pendidik yang ada di sekolah, dari



situ dapat melihat pembiayaan yang tidak bisa diakomodir oleh dana BOS dapat ditanggulangi dari dana komite sekolah, dalam hal monitoring Kepala sekolah melakukan monitoring / pemeriksaan kepada bendahara terkait pengelola keuangan, kepala sekolah melakukan evaluasi yaitu mempertanggungjawabkan keuangan kepada orang tua/wali siswa melalui bendahara.

- Bahwa Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus berdasarkan aturan sebagaimana diatas. Kepala sekolah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab diluar dari aturan Permendikbud no 6 Tahun 2018.
- Bahwa Sebagai kepala sekolah dalam hal pertanggung jawaban keuangan yang pertama kepada orang tua untuk dana komite, terkait dana bos dipertanggung jawabkan ke Kepala Dinas P&K Propinsi NTT. Bentuk pertanggung jawaban terhadap dana komite, bendahara yang melaporkan penerimaan dan pengeluaran kepada orang tua murid, terhadap dana bos bendahara melaporkan ke Dinas Propinsi NTT.
- Bahwa Keuangan BOS dilaporkan secara berkala sesuai tahapan pencairan bentuk laporan secara tertulis sedangkan untuk keuangan komite dilaporkan pada awal tahun ajaran baru dalam bentuk lisan / penyampaian secara langsung kepada orang tua.
- Bahwa berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Ende pada tanggal 27 Desember 2021, yang menggantikan saksi itu sdr. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd.
- Bahwa pengelolaan keuangan komite harus berpedoman pada Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa Kepala sekolah yang lama juga mengelola keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Komite dan Program Indonesia Pintar (PIP) hal tersebut saksi ketahui karena saksi sebelum jadi Kepala Sekolah saksi juga sebagai guru kelas di SMK N 1 Ende.
- Bahwa pada Saat itu saksi berpikir bahwa akan ada penyerahan memori serah terima setelah kegiatan serah terima kepala sekolah dan saksi tidak bertanya kepada sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa saksi menunggu penyerahan memori serah terima namun tidak diberikan oleh pajabat lama untuk itu pada tanggal 31 Desember 2021 saksi memerintahkan Bendahara Komite yang lama sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab bendahara kepada bendahara baru saksi. EPHIFANIA JE LOYA, S.Pd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hadir pada saat serah terima jabatan bendahara dari WENSESLAUS DEERTA, S.Pd, kepada EPHIFANIA JE LOYA, S.Pd. yang turut hadir dalam kegiatan serah terima yaitu Bendahara BOS Ibu. ISRATIH M. MAHAR, S.Pd, ibu AGNES MUDE, SE, Ibu NURHAFNI HASAN, S.Pd, dan Ibu SKOLASTIKA KAPI, SE.
- Bahwa yang diserahkan terimakan oleh bendahara lama WENSESLAUS DERTA S.Pd kepada EPHIFANIA JE LOYA, S.Pd, antara lain :
  - a. Uang Tunai Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah).
  - b. 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,-
  - c. 1 (satu) Unit laptop warna hitam merek Toshiba tipe Satellite C55t-B5249, nomor seri XE155868P, bersama 1 (satu) set alat cash laptop Toshiba.
  - d. 2 (dua) lembar Berita acara serah terima jabatan bendahara komite sekolah menengah kejuruan negeri 1 ende tanggal 31 Desember 2021.
  - e. 2 (dua) lembar rancangan anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK N 1 Ende Tahun 2021/2022.
  - f. 1 (satu) lembar foto copy hal : tindak lanjut temuan Dana Bos Reguler dan Komite Tahun anggaran 2020, nomor : 902/227/PK/2021, tanggal 20 Januari 2021 ;
- Bahwa laptop yang diserahkan dalam keadaan rusak berat, laptop tersebut adalah laptop milik komite SMK N 1 Ende, saksi mengetahui hal tersebut bahwa laptop tersebut adalah laptop komite karena yang menyerahkan adalah bendahara komite lama saksi WENSESLAUS DERTA (terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa pada saat serah terima ada hal yang saksi minta untuk dikonfirmasi kembali yaitu tidak ada serah terima buku rekening tabungan dana komite SMK N 1 Ende, laptop dalam keadaan rusak, RABPS yang diserahkan terdapat nilai RAPBS yang tidak wajar.
- Bahwa kegiatan yang menurut saksi tidak wajar, karena dalam masa pandemic covid 19 kegiatan yang melibatkan banyak orang tidak diperbolehkan, kegiatan dimaksud antara lain :

a. Kegiatan Natal bersama	Rp. 50.000.000,-
b. Kegiatan Hahal bihalal	Rp. 50.000.000,-
c. Kegiatan Lembur Panitia Ujian semester	Rp. 25.000.000,-
d. Hari Ulang Tahun sekolah	Rp. 50.000.000,-
e. Latihan kegiatan pramuka	Rp. 10.000.000,-
f. Prakering	Rp. 10.000.000,-
g. Home Fisit	Rp. 10.000.000,-
h. Perjalanan Dinas	Rp. 300.000.000,-

Halaman 123 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dana Operasional MKKS

Rp. 15.000.000,-

- Bahwa saat itu saksi melihat bahwa laptop yang diserahkan dalam keadaan rusak dan data-data / file dalam laptop tidak ada sehingga pada saat itu saksi meminta kepada bendahara lama saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd, untuk menyerahkan:
  - RAPS 5 tahun terakhir
  - Buku KAS 5 Tahun Terakhir.
  - Laporan Keuangan 5 Tahun terakhir
  - Laporan penggunaan dana 5 tahun terakhir.
  - Dan poin-poin tersebut diatas dimasukkan dalam Berita Acara Serah Terima Bendahara sebagai kurang data yang harus diserahkan ;
- Bahwa penggunaan Keuangan Komite sekolah berdasarkan perencanaan yang disetujui oleh Ketua Komite dalam satu tahun anggaran, kemudian ditetapkan oleh komite sekolah, kemudian dapat digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dibuat laporan pertanggungjawaban kepada ketua komite dan kepada orang tua wali, secara berkala.
- Bahwa penggunaan keuangan komite sesuai ketentuan permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain :
  - Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan. (paud s/d PT)
  - Pembiayaan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.
  - Pengembangan sarana prasarana.
- Bahwa Anggota komite sekolah terdiri atas unsur :
  - a. Orang Tua wali yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
  - b. Tokoh masyarakat.
  - c. Pakar Pendidikan.
- Bahwa Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur :
  - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.
  - b. Penyelenggara yang bersangkutan.
  - c. Pemerintah Desa.
  - d. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
  - e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
  - f. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  - g. Pejabat Pemerintah / Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan ;
- Bahwa Kekurangan biaya satuan pendidikan yang dimaksud adalah lembaga sekolah, dalam hal belanja honor komite, tenaga kebersihan, penjaga malam, satpam/security, operator dapodik.
- Bahwa Kegiatan sekolah yang tidak dianggarkan yaitu

Halaman 124 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan kerohanian.
- Kegiatan Olahraga.
- Kegiatan Kesenian.
- Perpisahan siswa
- Hari-hari besar nasional.
- Bahwa dana Komite sekolah digunakan untuk Pengembangan sarana-prasarana seperti rehab gedung, pengadaan dan perbaikan kursi meja, peralatan computer dan LCD, peralatan laboratorium, peralatan praktek siswa dan pembangunan bangunan baru.
- Bahwa tidak dibenarkan pembelian barang secara pribadi oleh pengurus komite.
- Tidak bisa karena ketika pemerintah pusat menganggarkan berdasarkan kebutuhan sekolah dan sudah ada hitungan tersendiri.
- Bahwa Pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021 yang saksi ketahui yaitu
  - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, M.Si ;
  - Sekretaris : ALFONS TARI SE, S.E ;
  - Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd ;
  - Anggota : KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd ;saksi tidak mengetahui apakah mereka ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala sekolah atau tidak.
- Bahwa penetapan Ketua Komite dan Sekretaris serta bendahara komite tidak melalui mekanisme, karena langsung ditunjuk oleh kepala sekolah. Seharusnya penetapan ketua komite ditetapkan dalam forum rapat orang tua wali. Yang menetapkan yaitu Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar penetapan WENSESLAUS DERTA, S.Pd, sebagai bendahara.
- Bahwa Uang komite harus digunakan untuk kepentingan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dan kebutuhan yang tidak dianggarkan oleh anggaran pemerintah, jika digunakan untuk kepentingan pribadi maka tidak boleh karena bertentangan dengan Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa :
  - Tahun Ajaran 2019/2020 besaran uang komite RP. 2.300.000,- penetapan tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali. Yang menetapkan uang komite adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
  - Tahun Ajaran 2020/2021 besaran uang komite Rp. 1.800.000,- penetapan tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali. Yang menetapkan uang komite adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd ;

Halaman 125 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Ajaran 2021/2022 besaran uang komite Rp. 1.800.000,- penetapan tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali. Yang menetapkan uang komite adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total penerimaan keuangan komite TA. 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA. 2021/2022.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karena pengelolaan keuangan komite tidak transparan, pengolaan dilakukan oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara WENSESLAUS DERTa, S.Pd. dan pada saat serah terima kepala sekolah lama HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dengan saksi tidak ada laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa ada temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti antara lain :  
Temuan :
  - a. Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
  - b. Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
  - c. Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
  - d. Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
  - e. RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - f. Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah);dan
  - g. Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK)..
- Rekomendasi pengembalian keuangan komite :  
Kepala Sekolah SMK N 1 Ende agar menghentikan pembayaran honor tambahan berupa transportasi dan tunjangan jabatan bagi para guru dan pegawai PNS dan segera Menyetor kembali Keuangan Komite ke KAS Komite senilai Rp. 196.000.000,- selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima dan bukti setoran disampaikan kepada Inspektorat Prop. NTT sebagai bahan tindak lanjut.
- Bahwa Daftar nama penerimaan honor tambahan berupa transportasi dan tunjangan jabatan bagi para guru dan pegawai PNS sebagai berikut :

No.	Nama / Nip	Jabatan	Biaya Satuan tiap bulan (Rp.)						jumlah (Rp.)
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	

Halaman 126 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11(4+5+6+7+8+9+10)
1	Hermin Gildus Rangga,S.Pd / Nip.1966110520021210 02	Kepala Sekolah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
2	Maria Angelina Byre / NIP.196009121986032 016	Guru bantu/Koord Pramuka/ staf Humas/staf kesiswaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
3	Polykarpus Oka / NIP.196002271991031 010	Guru Mapel	500.000	500.000	500.000	-	-	-	1.500.000
4	Yuliana Satu / NIP .196105311991032002	Guru BK	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	4.200.000
5	Runga Efrida / NIP.1961123119920320 40	Guru Mapel	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000
6	Maria Josefina Wawo / NIP. 196803191994122003	Guru Mapel / staf kurikulum	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
7	Paba Maria Karitas NIP.196206051994122 001	Guru Mapel / Wali kelas	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000
8	Drs. A. Samad Solo / NIP. 196408101994121003	Guru Mapel / Bendahara Barang BOS	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.800.000
9	Maria Dolorosa Pada / NIP.196103231994032 003	Guru Bantu / Kurikulum	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.000.000
10	Karina Kowe, S.Pd / NIP.196203151997022 002	Guru Bantu / Kurikulum	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
11	Fakhrudin Umar, S.Pd / NIP.	Guru Mapel	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
12	Basilia Maria Elisabeth Ea, S.Ag / NIP.	Guru Mapel	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	600.000	3.100.000
13	Reinildis Yuli Astuti, S.Pd / NIP	Guru Mapel / Wali kelas	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000
14	Emi Erawati, S.Pd / NIP.	Guru Mapel / Kaprog OTKP	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
15	Albertus Jao Ndu, S.Pd / NIP.	Guru Mapel / Wakasek Kesiswaan	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
16	Amadeus Goo Tori, S.Pd / NIP.	Guru Mapel / Wakasek Sarpras	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
17	Nur Hafni Hasan, S.Pd / NIP.	Guru Mapel / Wali kelas	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000

Halaman 127 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Elisabeth Djebe Suriyany Sakera, SE. / NIP.	Guru Mapel / Kaprog Akuntansi	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
19	Mohamad Rustam, S.Ag / NIP.	Guru Mapel / Wali kelas	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000

20	Efrem Boni Kasa, S.Pd/ NIP.	Guru Mapel / Kaprog TN	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
21	Maria Cesilia Dhale,SS / NIP.	Guru Mapel / Kaprog UPW	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
22	Israti Maisarah Mahar, S.Pd/ NIP.	Guru Mapel / Kpl. Perpus dan Bendhara BOS	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.800.000
23	Cosmas Damianus Resi,S.Si/NIP.	Guru Mapel/wali kelas / kpl bengkel UPW/staf kesiswaan	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000

24	Ahmad, S.Pd/ NIP.	Guru Mapel / Pembina Osis	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	4.800.000
25	Nursaimah Ali Kasim, S.Pd/NIP.	Guru Mapel	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
26	Ana Maria Yulita, S.Pd/ NIP.	Guru Mapel	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.000
27	Skolastika Kapi,SE / NIP.	Guru Mapel	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Maria Imakulata Zane, S.Pd /NIP.	Guru Mapel	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
29	Fitri Yani, SS / NIP.	Guru Mapel	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
30	Fabiola Srilota Ivony, SS / NIP.	Guru Mapel	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.0 00
31	Jenny Marthina Dubu, S.Pd / NIP.	Guru Mapel	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
32	Hildegardis Dhue, S.Ag / NIP.	Guru Mapel	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
33	Matheus We	Guru Mapel	750.000	750.000	750.000	-	-	-	2.250.0 00
34	Rosalia Wonga, S.Ag/NIP.	Guru Mapel	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
35	Wenseslaus Derta, S.Pd/NIP.	Guru Mapel	900.00 0	900.00 0	900.000	900.00 0	900.000	900.000	5.400.0 00
36	Yuliana Mi, S.Pd / NIP.	Guru Mapel	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	4.500.0 00
37	Agnes Mude, SE / NIP.	Guru Mapel	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
38	Klementina Sina, S.Pd / NIP.	Guru Mapel	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
39	Muhamad Natsir Mbusa, SE / NIP.	Guru bantu/Wali kelas	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
40	Melchior Kana / NIP.	Pegawai kpl Tata usaha	800.00 0	800.00 0	800.000	800.00 0	800.000	800.000	4.800. 000

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41	Jaelani Humris, S.Kom / NIP.	Guru Bantu	500.00 0	500.00 0	500.000	500.00 0	500.000	500.000	3.000. 000
42	Cut Mutia Elvi Ivo, ST / NIP.	Guru Bantu / walikelas	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
43	Wahyuni / NIP.	Bendahara gaji / staf TU	700.00 0	700.00 0	700.000	700.00 0	700.000	700.000	4.200.0 00
44	Felicia Agnes Mengi, S.Pi / NIP.	Pegawai / Staf TU	500.00 0	500.00 0	500.000	500.00 0	500.000	500.000	3.000. 000
45	Ephifania Jeloya	Honor Daerah Tk. Provinsi	600.00 0	600.00 0	600.000	600.00 0	600.000	600.000	3.600. 000
46	Skolastika Kapi, S.Pd / NIP.	Guru Bantu	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	600.000	2.350.0 00
47	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag / NIP.	Guru Bantu	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	600.000	2.350.0 00
48	Yohanes Ratu Koten, S.Pd / NIP.	Guru Bantu	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	600.000	2.350.0 00
	JUMLAH		33.150.0 00	33.150.0 00	33.150.00 0	31.900. 000	31.900.00 0	32.750.00 0	196.00 0.000

- Bahwa setelah ada temuan tidak ada pengembalian karena pada waktu itu Kebijakan dari Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd, bahwa keuangan tersebut sudah di kembalikan dengan cara para guru mengisi slip penyetoran Bank BRI Ndururea kemudian dikumpulkan oleh bendahara sedangkan uangnya diambil dari keuangan Komite, bahwa ada kebijakan kepala sekolah saat itu akan ada kegiatan pengganti yaitu kegiatan Projec Work.
- Bahwa ada juga persoalan lain yaitu pada tahun 2018 ada pembangunan gedung Ruang Praktek Siswa yang dinai oleh APBN namun setelah kegiatan pembangunan belum dibuat laporan pertanggungjawaban berakibat terkuncinya seluruh bantuan sarana prasarana untuk SMK N 1 Ende.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung menurut saksi dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende ada pejabat kepala sekolah SMK N 1 Ende sebelumnya HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara sebelumnya WENSESLAUS DERTA, S.Pd, yang dirugikan adalah SMK N 1 Ende karena seharusnya keuangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.
- Pada tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan pemeriksaan di SMK N 1 Ende dan terdapat temuan pembayaran yang tidak sesuai terhadap 48 (empat puluh delapan orang guru PNS yang menerima biaya transportasi dan tunjangan jabatan dan terdapat rekomendasi untuk dilakukan pengembalian ke kas Komite SMK N 1 Ende, terkait hal tersebut, apakah sampai dengan saat ini sudah dikembalikan ?
- Bahwa sudah ada tindak lanjut dari para guru dan pegawai PNS yakni pengembalian Keuangan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan dengan rincian :

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000

Halaman 131 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani, SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan Yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Halaman 132 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengembalian uang oleh para guru-guru dengan cara mentransfer ke rekening BRI Unit Paupire dengan nomor rekening Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715501020146533.
- Bahwa awalnya para guru ingin menitipkan kepada saksi, namun saksi tidak mau takut bermasalah sehingga saksi berinisiatif dengan bendahara komite yang baru sdr MARIA ROSALIA PARE, untuk membuka rekening baru menggunakan nama Komite SMK N 1 Ende guna menampung uang yang dikembalikan oleh guru-guru PNS.
- Bahwa temuan inspektorat yang dikembalikan Rp. 196.000.000, namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Pak. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd sebesar Rp. 5.400.000.
- Bahwa rekening Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 7155-01-020146-53-3, hanya digunakan untuk menampung keuangan yang dikembalikan oleh para guru.
- Bahwa saksi juga pernah meminjam uang secara pribadi kepada sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dengan rincian

No	Hari/Tanggal	Besar Uang	Keterangan
1	26/06/2019	5.000.000	Pinjaman pribadi untuk berobat anak
2	17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
3	31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
4	26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
5	26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
6	25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
7	30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
8	24/06/2020	1.000.000	
9	26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
		14.275.598	

Halaman 133 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Saksi memberikan keterangan tambahan bahwa uang yang dipinjam secara pribadi kepada bendahara sudah dikembalikan sebesar Rp. 14.300.000,- pada tanggal 20 Oktober 2022 karena baru ada uang untuk dikembalikan ;

- Bahwa hasil penggalangan dana setiap tahunnya diterima oleh Bendahara Komite yaitu terdakwa Wenseslaus Derta, S.Pd kemudian didalam pengelolaan keuangan hasil penggalangan dana yang bertanggung jawab adalah Hermin Gildus Rangga, S.Pd. dalam hal pengelolaan keuangan komite menurut saksi sebagian sudah sesuai mekanisme dan sebagiannya tidak sesuai mekanisme, sebagai contoh untuk membayar gaji tenaga honor, sebagian tidak sesuai ketentuan dimana penggunaan keuangan secara tidak wajar dan tidak dipertanggung jawabkan secara transparan ;
- Bahwa jangka waktu pembayaran uang komite yang disampaikan secara lisan oleh Kepala Sekolah dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap awal masuk sekolah, tahap kedua menjelang ujian semester ganjil dan menjelang ujian semester genap, penentuan jangka waktu karena melihat kemampuan orang agar tidak menjadi beban;
- Bahwa Akuntan public tidak pernah melakukan audit terhadap penerimaan, penyimpanan dan penggunaan keuangan komite atau uang hasil penggalangan dari orang tua wali, pernah ada audit namun dari Inspektorat Prop NTT yang berlangsung pada tanggal 13 Oktober 2020 s/d 23 Oktober 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dan keuntungan dari pengelolaan keuangan komite ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

## 2. Saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i, (KETUA KOMITE)

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi dalam pengelolaan Keuangan Komite SMK N Ende yaitu Ketua Komite, saksi menjabat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende, namun sampai dengan saat ini surat keputusan pengangkatan tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi, dan yang diberikan kepada saksi hanya surat Keputusan pemberhentian dari Ketua Komite oleh Kepala Sekolah yang baru ALBERTUS JA'O NDU, S.Pd.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende sejak bulan Juli 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dimana Masa jabatan saksi berakhir setelah saksi menerima Surat pemberhentian dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende yang ditandatangani oleh saksi ALBERTUS JA'O NDU, S.Pd.

Halaman 134 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021 yang saksi ketahui yaitu :
  - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
  - b. Sekretaris : ALFONS TARI SE
  - c. Bendahara : WENSESLAUS DERTASaksi lupa nama anggota lain karena SK tersebut masih diperbaiki oleh Kepala Sekolah.
- Bahwa penunjukan saksi sebagai Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende berdasarkan penunjukan langsung tidak melalui rapat komite, mekanismenya Kepala Sekolah sdr. HEMRMIN GILDUS RANGGA mengundang saksi ke sekolah kemudian duduk bersama beberapa guru dan memohon kesediaan saksi untuk menjadi Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende, dan beberapa waktu kemudian saksi diundang lagi untuk hadir disekolah guna bertemu dengan orang tua Murid.
- Bahwa saat itu ada beberapa guru yang hadir namun saksi tidak terlalu tahu dengan identitas lengkap dari guru-guru tersebut, dan kehadiran saksi saat itu hanya untuk mendengarkan penyampaian langsung dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA terkait permohonan untuk kesediaan saksi menjadi Ketua Komite di SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa secara aturan/regulasi, saksi sendiri tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua komite, dikarenakan sejak saksi ditunjuk sebagai ketua Komite, saksi tidak pernah di sampaikan terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan saksi laksanakan nanti, yang saksi tahu saksi hanya diminta bantuan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menjadi fasilitator/penjembatan antara pihak sekolah dengan orang tua murid.
- Bahwa saksi diundang kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menjadi fasilitator antara pihak sekolah dengan orang tua murid pada saat penerimaan raport dan penentuan sumbangan pendidikan di tahun ajaran baru bagi siswa baru, dan seingat saksi saat itu sekitar tahun 2018.
- Dengan yang saksi lakukan menjadi fasilitator/penjembatan antara pihak sekolah dengan orang tua murid, menurut saksi itu sudah benar, namun ada beberapa tugas dan tanggung jawab saksi yang tidak disampaikan secara transparan oleh pihak sekolah ;
- Bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab saksi yang tidak disampaikan secara transparan oleh pihak sekolah adalah terkait dengan tidak adanya penyampaian dari pihak sekolah kepada saksi selaku ketua komite terkait dengan pengelolaan keuangan komite itu sendiri, yang mana disini saksi seringkali menyampaikan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk mengadakan rapat

Halaman 135 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komite, namun selalu tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, dan disini pihak sekolah juga selalu membatasi ruang gerak saksi sebagai seorang ketua komite.

- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua komite, seingat saksi ada 3(tiga) kali diundang oleh pihak sekolah namun bukan untuk menghadiri rapat komite melainkan untuk menghadiri acara yang lain diantaranya adalah :
  - Acara penunjukan saksi sebagai ketua komite (tahun 2017) ;
  - Acara pembagian Raport siswa dan penerimaan siswa baru (tahun 2018) ;
  - Acara Perpisahan dengan siswa kelas XII (Tahun 2018) ;
- Bahwa pada saat rapat orang tua murid, kepala sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA menyampaikan dalam forum ada beberapa item kegiatan penunjang mutu sekolah, lalu meminta kesediaan komite untuk menyampaikan kepada orang tua wali, karena ada beberapa fasilitas tidak memadai antara lain Komputer minim, penambahan ruang gedung, melanjutkan bangunan ruang pertemuan, dan ada beberapa kegiatan yang saksi sudah lupa kemudian menyampaikan besaran sumbangan per siswa persatu tahun anggaran sebesar Rp. 2.300.000,-, peran saksi dalam pertemuan tersebut sebagai perantara antara sekolah dan orang tua murid sedangkan besaran biaya dan kegiatan sudah dirancang oleh pihak sekolah, saat itu saksi hanya menyampaikan kepada orang tua wali murid apakah setuju lalu orang tua wali menyampaikan setuju dengan catatan demi kepentingan anak diatur secara baik. Perlu saksi tambahkan bahwa ada kebijakan sekolah yang disampaikan bahwa jika ada 2 siswa 1 orang tua maka sumbangan uang komite hanya dibayar 1 anak.
- Bahwa setelah kegiatan pertemuan ada perwakilan orang tua wali menandatangani Berita Acara Kesepakatan yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah dan saat itu Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA menyampaikan secara lisan terkait dengan Item kegiatan penunjang sekolah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimanakah pihak sekolah menjadikan acuan untuk menetapkan besaran sumbangan sebesar Rp. 2.300.000,- yang saksi tahu bahwa rancangan tersebut dibuat oleh pihak sekolah dan saksi selaku Ketua Komite pada saat rapat hanya melanjutkan penyampaian dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan meminta pendapat kepada orang tua wali terkait dengan besaran sumbangan dan orang tua wali setuju akan besaran sumbangan tersebut.
- Bahwa pada saat selesai diadakannya rapat orang tua wali, komite dan pihak sekolah, saksi lalu menyampaikan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk segera dilakukan rapat komite, dan saat itu kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA langsung menjawab setuju untuk dilakukan rapat komite, namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan saksi sebagai ketua

Halaman 136 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komite, kegiatan rapat komite tersebut tidak pernah dilaksanakan dan berkaitan dengan mekanisme pengelolaan komite, Saksi sendiri tidak pernah menyentuh terkait dengan pengelolaan keuangan komite, semuanya diatur oleh pihak sekolah baik itu penerimaan maupun penggunaan keuangan komite itu sendiri.

- Bahwa Saksi selaku Ketua komite tidak pernah mendapat laporan tertulis maupun laporan secara lisan tentang pertanggung jawaban sampai saat ini.
- Bahwa Saat akhir tahun 2019, saksi pernah meminta Laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan komite kepada sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk dilakukan Evaluasi, namun tidak ditindak lanjuti oleh pihak sekolah sampai saat ini..
- Bahwa sesuai aturan bahwa pihak sekolah wajib menyampaikan pertanggung jawaban secara tertulis kepada komite, terkait pengelolaan keuangan secara transparan, namun sampai dengan saat ini pihak sekolah tidak mempertanggung jawabkan secara lisan dan tertulis sehingga komite tidak mengetahui secara pasti pengelolaan keuangan komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pengelolaan keuangan komite tersebut, apakah telah sesuai dengan aturan atau tidak, sebab sampai dengan saksi diberhentikan dari ketua komite laporan pertanggung jawaban keuangan komite itu sendiri tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak melakukan Audit dikarenakan saksi tidak pernah dikasih ruang oleh pihak sekolah dan juga terkait dengan data pertanggung jawaban pengelolaan keuangan komite itu sendiri tidak pernah diberikan kepada saksi, sehingga saksi tidak punya dasar untuk melakukan Audit terhadap pengelolaan keuangan komite tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu rekening mana yang digunakan untuk penampungan dana komite.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua komite, saksi tidak pernah memperoleh honor atau tunjangan ketua komite dalam pengelolaan keuangan komite.
- Bahwa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende yaitu Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan bendahara WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta pertanggung jawaban terkait pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua komite, tidak ada dokumen satupun yang dipegang oleh saksi terkait dengan komite maupun pengelolaannya.

Halaman 137 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan Surat keputusan penetapan besaran uang komite karena pada saat serah terima jabatan kepala sekolah tidak diserahkan namun yang perlu saksi jelaskan bahwa besaran uang komite itu sendiri sudah dirancang sebelumnya oleh pihak sekolah.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan pada saat serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende dari pejabat lama kepada pejabat Kepala Sekolah Baru pada tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dana komite adalah saksi sendiri, namun yang terjadi adalah sebaliknya dimana selama saksi menjabat sebagai ketua komite, saksi tidak pernah dilibatkan dalam hal pengelolaan maupun memberikan pertanggung jawaban kepada saksi terkait dengan pengelolaan dana komite tersebut, dan saksi sendiri sudah seringkali menyampaikan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk melakukan rapat komite namun seringkali penyampaian saksi tersebut tidak dihiraukan, jadi untuk hal ini yang paling tepat bertanggung jawab terkait dengan penyalagunaan keuangan sekolah adalah pihak sekolah yaitu Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan bendahara WENSESLAUS DERTA, dimana selama ini yang melakukan pengelolaan terhadap keuangan komite tersebut ;
- Bahwa didalam rapat orang tua/wali siswa SMK Negeri 1 Ende tidak pernah membahas tentang pemilihan anggota komite dan untuk keanggotaan komite itu sendiri tidak ada, sedangkan untuk susunan Komite itu sendiri, dimana terdiri dari ketua, sekretaris dan Bendahara komite, pemilihan tersebut tidak melalui proses pemilihan oleh anggota Komite secara Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara melainkan saat itu saksi dipercayakan sebagai ketua komite melalui penunjukan langsung secara aklamasi oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menduduki jabatan sebagai Ketua komite.
- Bahwa Saksi tidak ingat terkait dengan hari maupun tanggal dimana saksi dipercayakan sebagai ketua komite melalui penunjukan langsung secara aklamasi oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menduduki jabatan sebagai Ketua komite, hanya saja seingat saksi tepatnya sekitar bulan Juli 2017 dan saat itu dihadiri oleh 6 (enam ) orang Guru dan dari guru-guru yang hadir saat itu yang saksi kenal hanya kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, dan saudara WENSESLAUS DERTA.-
- Bahwa pada awalnya saksi menolak untuk dipercayakan sebagai pengurus komite dalam hal ini sebagai ketua komite, hanya saja pada saat penunjukan kepada saksi yang dilakukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, sebelumnya kepala sekolah terlebih dahulu meminta persetujuan dari guru-guru yang hadir saat

Halaman 138 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu, dan guru-guru yang hadir menyatakan setuju, selanjutnya atas dasar itulah saksi dipercayakan sebagai ketua komite melalui penunjukan langsung secara aklamasi oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menduduki jabatan sebagai Ketua komite.

- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai ketua komite pada SMK Negeri 1 Ende baru 1 (satu) kali dan itupun tidak ada surat keputusan terkait dengan penunjukan saksi sebagai ketua komite dan saksi menjabat sebagai ketua Komite itu sendiri selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan pada tanggal 31 Desember 2021 saksi diberhentikan dari Ketua komite berdasarkan surat pemberhentian dari kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende yang ditandatangani oleh ALBERTUS JAO NDU.
- Bahwa untuk susunan kepengurusan komite itu sendiri ada 3 orang yang terdiri dari:
  - Ketua Komite : saksi sendiri
  - Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
  - Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.
- Bahwa yang melakukan penggalangan dana, menyimpan, mengelola, dan menggunakan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran adalah pihak sekolah SMK Negeri 1 Ende sendiri dalam ini kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara WENSESLAUS DERTA, sedangkan untuk saksi sendiri selaku ketua komite tidak pernah dilibatkan sama sekali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pelaksanaan pembayaran sumbangan dari peserta didik, maupun orang tua/wali untuk setiap tahun ajaran karena mekanisme itu sendiri dijalankan langsung oleh pihak sekolah dan tidak melibatkan saksi selaku Ketua komite, namun berkaitan dengan besaran pembayaran sumbangan dari peserta didik, maupun orang tua/wali untuk setiap tahun ajaran yang saksi tahu hanya besaran sumbangan pada tahun ajaran 2019/2020 dimana sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terkait dengan perubahan besaran sumbangan itu sendiri saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa terkait dengan hasil penggalangan yang diterima baik itu berupa jumlah peserta didik yang memberikan sumbangan maupun dengan total penerimaan hasil penggalangan itu sendiri saksi tidak pernah tahu dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut dan terkait dengan penyimpanan hasil penggalangan itu sendiri saksi juga tidak mengetahuinya apakah hasil penggalangan disetiap tahun ajaran tersebut dibukukan didalam rekening ataukah langsung di simpan oleh pihak sekolah sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS tidak pernah sama sekali dibuat, hal ini dikarenakan saksi selaku ketua komite itu sendiri tidak pernah dilibatkan dalam setiap tugas dan fungsi saksi selaku pengurus komite dan setiap tugas dan fungsi dari pihak komite itu sendiri langsung diambil alih oleh pihak sekolah sendiri dalam hal ini Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan untuk acuan dalam penggunaan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran, saksi sendiri tidak tahu acuan manakah yang digunakan oleh pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah HELMIN GILDUS RANGGA.
- Bahwa besaran sumbangan pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) persiswa, dan terkait dengan adanya perubahan besaran sumbangan dari peserta didik pada saat pandemic covid-19 saksi sendiri tidak mengetahuinya, karena pada saat penyampaian perubahan tersebut saksi selaku pengurus komite tidak pernah disampaikan.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan besaran sumbangan yang diberikan oleh peserta didik pada tahun ajaran 2019/2020 yaitu sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal ini dikarenakan pada saat saksi diundang untuk mengikuti rapat antara orang tua /wali dengan pihak sekolah, saat itu kepala sekolah sempat menyampaikan terkait dengan besaran sumbangan tersebut, namun berkaitan dengan jumlah peserta didik pada setiap tahun ajaran, saksi sendiri tidak mengetahuinya dikarenakan dalam beberapa kali pertemuan rapat antara orang tua /wali dengan pihak sekolah, saksi sempat beberapa kali meminta laporan penerimaan maupun laporan hasil pertanggungjungan jawaban dari kepala sekolah HELMIN GILDUS RANGGA untuk disampaikan pada saat diadakannya rapat komite, hanya saja selalu tidak diindahkan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA sendiri.
- Bahwa pada setiap tahun ajaran, dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 untuk penggunaan hasil penggalangan dana tersebut tidak ada persetujuan dari pihak komite dan untuk pertanggung jawabannya sendiri tidak dilakukan secara transparan.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan sebagai pengurus komite pada saat awal saksi dipercayakan sebagai ketua komite adalah meminta kepada kepala sekolah agar setiap penerimaan dana maupun penggunaan/pengelolaan dana pada setiap tahun ajaran di sampaikan secara transparan pada saat rapat komite sekolah maupun rapat antara orang tua/wali dengan pihak sekolah, namun penyampaian saksi tersebut tidak diindahkan sama sekali oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA.

Halaman 140 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan penggalangan dana di setiap tahun ajaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (5) permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah:
  - Tidak adanya pembuatan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS disetiap tahun ajaran, dimana ini menjadi dasar acuan dalam penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran.
  - Tidak ada kejelasan terkait dengan susunan kepengurusan komite itu sendiri, hal ini dikarenakan pemilihan susunan kepengurusan komite itu sendiri tidak melalui Musaksiwarah mufakat.
  - Tidak adanya transparansi dari kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan juga Bendahara komite WENSESLAUS DERTA terkait dengan penerimaan maupun penggunaan/pengelolaan hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran adalah mereka yang melakukan pengelolaan terhadap hasil penggalangan dana itu sendiri dalam hal ini kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara komite WENSESLAUS DERTA sedangkan uang hasil penggalangan dana tersebut saksi tidak tahu digunakan untuk apa.
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama saksi dipercayakan sebagai pengurus komite, tidak ada penggalangan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional Komite SMK Negeri 1 Ende pada setiap tahun ajaran.
- Bahwa untuk kegiatan operasional komite berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, adalah memperbolehkan untuk digunakan contohnya pembelian kebutuhan administrasi/alat tulis kantor, Dimana kebutuhan administrasi/alat tulis kantor tersebut digunakan untuk mendatakan setiap penerimaan penggalangan dana dari peserta didik.
  - Sedangkan untuk kebutuhan operasional komite lainnya yang tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, menurut saksi adalah terkait dengan biaya konsumsi rapat pengurus dan transportasi dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan lain yang disepakati oleh Komite.
  - Dalam hal ini menurut saksi tidak sesuai dikarenakan sebagian dari kegiatan operasional komite tersebut diatas tidak pernah dilaksanakan dan tidak memperoleh persetujuan dari komite sekolah itu sendiri.

Halaman 141 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan Rapat antara orang tua/wali murid dengan pihak sekolah, dan saksi diundang saat itu dimana kapasitas saksi selaku Ketua Komite SMK Negeri 1 Ende, dan dalam rapat tersebut tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan komite dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dikarenakan sampai dengan saat ini saksi sendiri selaku pengurus komite tidak pernah memiliki data terkait dengan pelaporan tersebut dan untuk kegiatan Rapat antara orang tua/wali murid dengan pihak sekolah hanya menyampaikan tentang hasil akhir pendidikan sekolah ;
- Bahwa berkaitan dengan penetapan besaran sumbangan dari para peserta didik maupun orang tua/wali biasanya dilakukan pada saat penerimaan siswa baru, sedangkan untuk jangka waktu pembayarannya itu sendiri saksi tidak tahu mekanismenya seperti apa karena kegiatan tersebut langsung di kelola sendiri oleh pihak sekolah.
- Bahwa berkaitan dengan peserta didik yang tidak dapat membayar/ melunasi sumbangan pendidikan, merupakan kebijakan dari kepala sekolah dan pada saat Rapat antara orang tua/wali murid dengan pihak sekolah tentang laporan hasil akhir pendidikan sekolah, kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA pernah menyampaikan bahwa apabila ada peserta didik yang belum membayar/ melunasi sumbangan pendidikan maka ijasah dari peserta didik tersebut sementara akan ditangguhkan/tidak diberikan sampai dengan adanya pelunasan.-
- Bahwa terkait dengan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan juga orang tua/wali belum pernah di audit oleh akuntan public.
- Bahwa Saksi tidak dan tahu, apakah penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan juga orang tua/wali nya sudah pernah diaudit oleh Inspektorat Provinsi NTT atau tidak.-
- Bahwa pada bulan Maret 2021, saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan beserta daftar pengembalian dana komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang telah menandatangani surat pernyataan beserta daftar pengembalian dana komite SMK Negeri 1 Ende.-
- Bahwa selama saksi dipercayakan sebagai pengurus komite dalam hal ini ketua komite, saksi tidak menjalankan tugas serta fungsi sebagai pengurus komite, hal ini dikarenakan tidak adanya komunikasi yang baik antara saksi selaku pengurus komite dengan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, dimana komunikasi tersebut dapat dibangun apabila dilaksanakan rapat komite, namun sampai dengan saksi diberhentikan dari pengurus komite, kepala



sekolah HERMIN GILDUS RANGGA tidak pernah mengindahkan apa yang menjadi saran serta penyampaian dari saksi ;

- Bahwa rencana tidak lanjut dari saksi selaku pengurus komite, apabila saat itu diadakan rapat komite adalah :
  - Memperbaiki struktur dalam kepengurusan komite, dimana pemilihan anggota komite harus dilakukan melalui rapat orang tua/wali siswa dan proses pemilihan oleh anggota Komite harus secara Musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
  - Pihak sekolah harus menyerahkan RKJM (rencana kerja jangka menengah) dan RKJP (rencana kerja jangka pendek), sehingga menjadi dasar kepengurusan komite dalam Membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS disetiap tahun ajaran, dimana ini menjadi dasar acuan dalam penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran.
  - Mempertanggung jawabkan secara transparan seluruh keuangan komite baik itu penerimaan keuangan komite/sumbangan dari peserta didik atau orang tua/wali maupun penggunaan/pengelolaan keuangan komite/sumbangan selama tahun ajaran.

Terhadap keterangan saksi , Terdakwa memberikan pendapat benar ;

### **3. Saksi ALFONSIUS TARI ,**

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi dalam pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende yaitu Sekertaris Komite , saksi menjabat tanpa Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende, namun menjabat dengan Penunjukan Langsung dari Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, dan diberhentikan juga tanpa memperoleh surat Keputusan pemberhentian dari Kepala Sekolah baru ALBERTUS JA'O NDU, S.Pd.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Komite SMK Negeri 1 Ende sejak bulan Juli 2017 dan berakhirnya Masa jabatan saksi sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui namun informasi yang saksi peroleh telah ada pengurus Komite Sekolah yang baru dan berdasarkan informasi tersebut dengan sendirinya saksi merasa berakhir juga jabatan saksi sebagai Sekertaris Komite.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah diundang dalam pembentukan Kepengurusan Komite Sekolah tersebut.
- Bahwa proses penunjukan saksi selaku Sekertaris Komite SMK Negeri 1 Ende oleh Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA pada saat terjadi kunjungan Bupati Ende ke SMK Negeri 1 Ende di tahun 2017 dan saksi termasuk dalam

Halaman 143 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





rombongan Bupati tersebut karena saksi sebagai protocol Bupati, saat kami berada dalam situasi santai bersama Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA lalu Mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA langsung meminta saksi untuk menjadi Sekertaris Komite SMK Negeri 1 Ende dan saat itu juga saksi menerima.

- Bahwa Secara aturan/regulasi, saksi sendiri tidak tahu apa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekertaris Komite, dikarenakan sejak saksi ditunjuk sebagai Sekertaris Komite, saksi tidak pernah di sampaikan terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan saksi laksanakan nanti, yang saksi tahu saksi hanya diminta oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menjadi Sekertaris Komite.
- Bahwa selama saksi sebagai Sekertaris Komite SMK Negeri 1 Ende baru 1 (satu) kali saksi menghadiri Kegiatan Komite SMK Negeri 1 Ende tahun 2019 di Aula SMK N 1 Ende dalam rapat pembagian amplop kelulusan siswa kelas XII, itupun saksi di minta oleh Ketua Komite Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk mewakili Ketua Komite dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi dalam mewakili ketua Komite Drs. Abraham Badu, M.Si dalam rapat pembagian amplop kelulusan siswa kelas XII, apakah merupakan bagian dari kewajiban saksi selaku Sekretaris Komite SMK Negeri 1 Ende
- .Bahwa pada saat saksi menghadiri rapat pembagian amplop kelulusan siswa kelas XII, yang turut hadir juga adalah orang tua wali murid dan mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan adapun hal-hal yang dibahas oleh mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA salah satunya terkait dengan persentase kelulusan namun saksi juga sudah lupa berapa persentase kelulusan saat itu, dan terkait dengan hal-hal lain saksi juga sudah lupa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penentuan besaran uang komite dari orang tua siswa untuk Kelas X, XI , dan Kelas XII, selama masa jabatan saksi.
- Bahwa Soal Penetapan besaran sumbangan uang komite dari orang tua siswa untuk Kelas X, XI , dan Kelas XII dan dasar Penetapan besaran sumbangan uang komite tersebut saksi tidak mengetahui, karena saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa Saksi tidak tahu mekanisme pengelolaan keuangan komite setelah terjadi rapat orang tua wali komite dan pihak sekolah.
- Bahwa Saksi selaku Sekertaris Komite tidak pernah mendapat laporan tertulis maupun laporan secara lisan tentang pertanggung jawaban selama saksi menjabat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban, terkait pengelolaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende;
- Bahwa Dari awal saksi tidak dilibatkan dalam pembahasan Pengelolaan Keuangan Komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pengelolaan keuangan komite yang tidak sesuai dengan aturan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan keuangan komite di audit oleh Pengurus Komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu pada Bank dan rekening mana yang digunakan oleh komite untuk penampungan keuangan komite.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari siapapun selama dan sesudah masa jabatan saksi berakhir.
- Bahwa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende yaitu mantan Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Selama saksi menjabat sebagai Sekertari Komite, tidak ada dokumen satupun yang dipegang oleh saksi terkait dengan komite maupun pengelolaannya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan ada tidaknya Surat Keputusan Penetapan besaran uang komite.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang akan bertanggung jawab jika ada penyalahgunaan penggunaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

#### 4. Saksi EPHIFANIA JELOYA, S.Pd,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah sebagai Bendahara Komite SMK Negeri 1 Ende berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK N 1 Ende Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022, tanggal 05 Januari 2022.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bendahara Komite adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima keuangan Komite Sekolah dari orang tua atau siswa sekolah SMK Negeri 1 Ende selanjutnya melakukan pencatatan dalam buku registrasi pembayaran keuangan dana komite dan membuat laporan pertanggung kepada Kepala Sekolah.
  - b. Membayar gaji pada guru Honor, Karyawan serta security.
  - c. Pembiayaan kegiatan operasional komite Sekolah.

Halaman 145 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku bendahara komite dengan baik dan benar.
- Bahwa tidak ada, yang saksi kelola yaitu uang komite SMK N 1 Ende terhitung mulai 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- Bahwa Pengurus Komite saat ini yaitu :
  - Ketua Komite : EMANUEL MINGGU
  - Sekretaris : YUSTINUS RATO
  - Bendahara I : EPHIFANIA JELOYA, SP.d
  - Bendahara II : OLIVE YENITA, SP.d.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu HERMIN GILDUS RANGGA Spd, sedangkan bendahara bernama WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Dapat saksi jelaskan bahwa surat keputusan penetapan besaran uang komite selama saksi menjabat selaku bendahara tidak ada, dan masih mengikuti penetapan besaran uang komite pejabat lama sebesar Rp. 1.800.000/siswa, namun pembukuannya baru, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022.
- Selama saksi menjabat selaku bendahara ada buku kas umum rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran, uang komite SMK N 1 Ende terhitung mulai tanggal 5 Januari 2022, sedangkan buku rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran uang komite periode Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa mekanisme penggunaan uang komite berawal dari Rapat komite pada awal Tahun Ajaran yaitu terjadi pada bulan Juli tahun berjalan, dan pada rapat tersebut telah ditentukan peruntukan penggunaan dana Komite sehingga akan dibuat dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian barulah keuangan Komite dapat digunakan sesuai RAB yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan dari Ketua Komite SMK N 1 Ende. Mekanisme penggunaan uang yakni kepala sekolah an. ALBERTUS JAO NDU, Spd memberi memo kepada bendahara lalu sesuai memo atau petunjuk kepala sekolah maka bendahara membayarkan sesuai peruntukan.
- Bahwa untuk menentukan jenis kegiatan yang dianggarkan dari Dana Komite SMK Negeri 1 Ende ditentukan dalam Rapat Komite, Kepala sekolah mengusulkan kepada Komite dan jika disetujui dan anggarannya ada maka barulah dikerjakan kegiatan dimaksud kemudian selesai kegiatan maka dalam rapat komite kepala sekolah harus mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Halaman 146 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggunaan dana komite sesuai Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10, untuk kegiatan-kegiatan antara lain :
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Bahwa seharusnya pertanggungjawaban keuangan komite dilaksanakan diakhir Tahun Ajaran, bendahara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan menyerahkan kepada Kepala Sekolah kemudian kepala sekolah mempertanggungjawabkan pada saat terjadi rapat Komite pada sekolah.
- Bahwa ada, Rekening tampungan dana komite sejak saksi menjabat sebagai kepala sekolah SMK N 1 Ende nomor rekening : 00240101001736301, an. SMK Negeri 1 Ende, Bank BRI Cabang Ende.
- Bahwa Untuk pengelolaan keuangan komite terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 selama saksi menjabat tidak ada persoalan namun sebelum saksi menjabat selaku bendahara komite sepengetahuan saksi ada masalah yaitu terkait dengan temuan inspektorat Daerah Provinsi NTT 2020 terkait dengan pembayaran biaya honor dan transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS.
- Bahwa pada tahun 2020 Inspektorat Daerah Provinsi NTT melakukan kegiatan Audit pemeriksaan di sekolah SMK Negeri 1 Ende dimana ditemukan bahwa terjadi kesalahan pembayaran terhadap transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS sebanyak 48 Orang total pembayaran sebesar Rp. 196.000.000.
- Bahwa saksi menerima honor dan transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS setiap bulanya sebesar Rp. 600.000,- selama enam bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020 sehingga total yang saksi terima adalah Rp. 3.600.000.
- Bahwa yang membayarkan honor transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS yang saksi terima sebesar Rp. Rp. 3.600.000 adalah saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd selaku bendahara Komite sebelumnya.
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Bendahara komite SMK Negeri 1 Ende dari bendahara Komite yang lama lama saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di SMK Negeri 1 Ende adapun dokumen atau barang yang saksi terima adalah sebagai berikut :

Halaman 147 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba berwarna hitam type Satelit Satellite C55t-B5249. Nomor seri XE 155868P dalam keadaan Rusak ringan ( LCD Pecah ).
  - b. 1 (satu) set Alat cas Laptop Merek Toshiba.
  - c. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah).
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dari bendahar komite lama an. WENSESLAUS DERTA S.Pd kepada bendahara komite baru an.EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
  - e. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende Tahun ajaran 2021/2020.
- Bahwa barang berupa :
- a. 1 (satu) unit Laptop Merek Toshiba berwarna hitam type Satelit Satellite C55t-B5249. Nomor seri XE 155868P dalam keadaan Rusak ringan ( LCD Pecah ).
  - b. 1 (satu) set Alat cas Laptop Merek Toshiba.
  - c. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- ( sebelas juta rupiah).
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 11.000.000,- dari bendahar komite lama an. WENSESLAUS DERTA S.Pd kepada bendahara komite baru an. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
  - e. (dua) lembar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende Tahun ajaran 2021/2020.
- Barang-barang tersebut saksi serahkan kepada penyidik untuk di gunakan dalam proses Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima Jabatan bendahara Komite SMK Negeri 1 Ende pada tanggal 31 Desember 2021 yang mengetahui pada saat serah terima adalah saudari AGNES MUDE,SE, saudari NURHAFNI HASAN, Spd, saudari SKOLASTIKA KAPI, HASAN, SE dan saudari ISRATI M. MAHAR,S.Pd.
- Bahwa pada saat serah terima kepala sekolah Tanggal 31 Desember 2021 saksi tidak mengetahui dokumen apa yang yang diberikan namun perlu saksi jelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Aula SMK N 1 Ende terjadi serah terima antara Bendahara Lama dan Bendahara Baru berupa uang sebesar Rp. 11.000.000,- dan 1 Unit laptop warna Hitam merek Toshiba bersama dengan satu set alat cas Laptop Toshiba dan data pada laptop tersebut sudah terhapus semua.
- Bahwa Ada kekurangan yang harus dipenuhi oleh bendahara lama saudara WENSESLAUS DERTA,S.Pd adalah sebagai berikut :
- a. RAPS 5 tahun terakhir

Halaman 148 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 149 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan Sekretaris komite adalah saudara ALFONS TARI SE,S.E merupakan PNS pada Pemerintah Kab. Ende namun bukan merupakan tokoh masyarakat dan bukan juga pakar pendidikan sedangkan bendahara komite WENSESLAUS DERTA,SPd adalah guru aktif pada SMK N 1 Ende.

- Bahwa Komite sekolah tidak pernah membuat proposal terkait dengan penggalangan dana komite pada tahun ajaran Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ?
- Bahwa cara melakukan penggalangan dana adalah dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,SPd menyampaikan atau menghimbau kepada para siswa untuk membayar atau melunasi uang komite pada setiap tahun ajaran kemudian para guru/ wali kelas juga menyampikan kepada siswa yang belum membayar/melunasi uang komite apabila ada siswa yang membayar uang komite langsung kepada bendahara Komite an.WENSESLAUS DERTA,SPd atau bendahara pembantu KRISPINA AGNES NAMBA, SPd dan terkait dengan penyimpanan dan pengelolaan uang komite saksi tidak mengetahui, tetapi pada saat saksi menjabat selaku bendahara uang tersebut saksi simpan pada rekening komite SMKN 1 Ende.
- Bahwa pelaksanaan pembayaran sumbangan dari peserta didik, orang tua/wali adalah dari siswa atau peserta didik membayar langsung kepada bendahara Komite an. WENSESLAUS DERTA,SPd atau bendahara pembantu KRISPINA AGNES NAMBA, SPd dan bisa juga pembayaran uang komite tersebut langsung di bayar kepada Wali kelas setelah dari bendahara biasanya meberikan kwitansi pembayaran uang komite kepada siswa atau peserta didik yang sudah membayar.
- Bahwa menurut informasi dari pembantu bendahara a.n. KRISPINA AGNES NAMA, SPd bahwa uang disimpan di rekening komite dan ada juga di simpan dalam rekening pribadi bendahara an. WENSESLAUS DERTA,SPd.
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah SMK Negeri 1 Ende ada membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD dan ART)
- Bahwa yang saksi ketahui besaran uang komite yakni .
  - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Tahun Ajaran 2020/2021 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Tahun Ajaran 2021/2022 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 150 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkiraan penerimaan tahun ajaran 2019/2020 seharusnya sebagai berikut  
:Total siswa :1.358 orang
  - a. Kelas X 480 orang x Rp. 2.300.000,- Rp. 1.104.000.000,-
  - b. Kelas XI 424 orang x Rp. 2.300.000,- Rp. 984.400.000,-
  - c. Kelas XII 454 orang x Rp. 2.300.000,- Rp. 1.044.200.000,-
  - Total 1.358 Orang Rp. 3.132.600.000,-
- Bahwa perkiraan penerimaan tahun ajaran 2020/2021 seharusnya sebagai berikut  
:Total siswa :1.358 orang
  - a. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,- =Rp. 1.038.800.000,-
  - b. Kelas XI 442 orang x Rp. 1.800.000,- = Rp. 795.600.000,-
  - c. Kelas XII 410 orang x Rp. 1.800.000,- = Rp. 738.000.000,-
  - Total 1.358 Orang = Rp. 2.572.400.000,-
- Bahwa perkiraan penerimaan tahun ajaran 2021/2022 seharusnya sebagai berikut  
:Total siswa :1.428 orang
  - a. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 1.038.800.000,-
  - b. Kelas XI 575 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 1.035.000.000,-
  - c. Kelas XII 439 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 790.200.000,-
  - Total 1.428 orang = Rp. 2.864.000.000,-
- Bahwa hasil penggalangan dana komite digunakan oleh Bendahara Komite an. WENSESLAUS DERTA,SPd dan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,SPd dan sepengetahuan saksi biasanya di gunakan antara lain :
  - a. Membayar Gaji para guru yang bersatus Honor.
  - b. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan.
  - c. Membayar tukang yang melakukan pekerjaan pembangunan pada sekolah SMK N 1 Ende.
  - d. Pembiayaan operasional sekolah seperti kedatangan tamu sekolah.
  - e. Dan pembayaran uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan Honorer Provinsi pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa penggunaan penggalangan dana komite ada yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 Ayat (5) permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan dan membayar gaji para guru yang bersatus Honor sedangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan adalah pembayaran uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan Honorer Provinsi pada SMK N 1 Ende .
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung jawab adalah pejabat kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende sebelumnya an. HERMINGULDUS RANGGA,S.Pd dan bendahara komite sebelumnya an. WENSESLAUS DERTA,S.Pd kemudian pihak SMK Negeri

Halaman 151 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ende dirugikan karena seharusnya keuangan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan sekolah.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah saksi berada di kantor kepolisian Resor Ende baru saksi mengetahui bahwa bendahara komite WENSESLAUS DERTA, SPd menggunakan uang komite untuk kebutuhan sehari-hari dan mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, SPd menggunakan untuk kepentingan pribadi dan pembelian Sepeda Motor Arox berwarna merah.
- Bahwa penggunaan penggalangan dana hanya mendapat persetujuan dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, Spd tidak melalui anggota maupun ketua komite sekolah SMK N 1 Ende, dan penggunaan hasil penggalangan dana tersebut tidak dilakukan secara transparan serta berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban keuangan komite saksi tidak mengetahui.
- Bahwa penggunaan dari hasil penggalangan dana dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan desember 2021 ada yang sesuai dengan ketentuan dengan pasal 11 Ayat (2) permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah antara lain :
  - a. Kebutuhan administrasi /alat tulis kantor
  - b. Konsumsi rapat pengurus.
  - c. Transportasi dalam rangka melaksanakan tugas.

Dan ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuan dengan pasal 11 Ayat (2) permendikbud RI Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah antara lain :

- a. Kegiatan lain yang disepakati oleh komite sekolah dan satuan pendidikan karena dalam penggunaan uang komite tanpa sepengetahuan dari ketua komite hanya sepengetahuan dari kepala sekolah.
- b. Ada juga keuangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, SPd dan WENSESLAUS DERTA, SPd.

Bahwa pengurus Komite tidak pernah ada membuat laporan pertanggungjawaban kepada orang tua/wali peserta didik baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana ?

- Bahwa. Saksi selaku guru tidak melakukan upaya apa terkait dengan pengurus komite tidak membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan tersebut ;
- Bahwa jumlah pembayaran sumbangan dari peserta didik bersifat wajib dan harus dibayar oleh orang tua atau peserta didik dan untuk waktu pembayaran secara mencicil dalam semester dan apabila siswa pendaftar baru wajib untuk membayar pada awal pendaftaran .

Halaman 152 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sanksi bagi siswa atau siswi/peserta didik yang tidak melunasi/membayar sumbangan pendidikan ?
- Bahwa Tidak pernah dilakukan audit oleh akuntan publik.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang atau keuangan dari pengelolaan dana komite dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 ;

Terhadap keterangan saksi , terdakwa memberikan pendapat benar ;

## 5. Saksi KRISTINA AGNES NAMBA, SP.d,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai pembantu Bendahara Komite, Dasar saksi menjabat sebagai pembantu bendahara komite berdasarkan perintah lisan dari Kepala sekolah HERMIN GIDUS RANGGA, dimana saat itu saksi di sampaikan oleh Kepala sekolah untuk membantu Pak WENSESLAUS DERTA untuk menerima pembayaran Komite dari para siswa, dan pada saat serah terima Kepala Sekolah beserta bendahara Komite yang baru tepatnya tanggal 27 Desember 2021, saksi langsung dengan sendirinya berhenti dari pembantu bendahara, dan saat ini saksi hanya sebagai guru biasa.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai berikut:
  1. Menerima keuangan Komite Sekolah dari orang tua atau siswa sekolah SMK Negeri 1 Ende selanjutnya melakukan pencatatan dalam buku registrasi pembayaran keuangan dana komite dan melaporkan kegiatan tersebut kepada Bendahara Komite dalam hal ini WENSESLAUS DERTA
  2. Membantu Bendahara Komite untuk Membayar gaji pada guru Honor, Karyawan serta security.
  3. Membantu Bendahara Komite untuk melakukan Pembiayaan kegiatan operasional komite Sekolah ( yang tidak dianggarkan dalam dana Bos) seperti perjalanan dinas bagi para guru dan pegawai.
- Bahwa menurut saksi untuk tugas dan tanggung jawab tersebut sudah saksi laksanakan dengan baik dan benar dikarenakan setiap tugas dan tagung jawab yang saksi kerjakan tersebut berdasarkan perintah serta petunjuk dari Bendahara Komite.
  - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i

Halaman 153 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sekretaris : ALFONS TARI SE, S.E
- c. Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd ;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sebagai pembantu bendahara berdasarkan perintah lisan dari kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, dan tidak sesuai dengan ketentuan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan aturan Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan saksi baru mengetahui aturan tersebut setelah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ende terkait dengan pengelolaan Dana Komite pada sekolah SMK Negeri 1 Ende.
  - Bahwa saksi juga diberikan tugas untuk membantu Bendahara Komite dalam melakukan penerimaan pembayaran uang komite dari siswa maupun orang tua wali murid, dimana besaran pembayaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per/siswa, dan pada saat, Terjadinya pandemi Covid 19 tepatnya tahun ajaran 2020/2021, pembayaran uang komite turun menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per/.siswa.
  - Bahwa penerimaan pada Tahun ajaran 2019/2020 persiswa sumbangan sebesar Rp. 2.300.000,- dispensasi jika ada 2 siswa orang tua sama maka dibayar  $\frac{1}{2}$  masing-masing siswa sedangkan jika ada 3 siswa orang tua sama maka pembayaran 2 siswa bayar  $\frac{1}{2}$  sedangkan 1 siswa bayar  $\frac{1}{4}$ , sedangkan TA. 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000,- dan tidak ada dispensasi.
  - Bahwa sesuai dengan mekanisme, Yang seharusnya menetapkan besaran uang komite adalah Ketua Komite dimana penetapan terkait dengan besaran komite tersebut melalui rapat Komite dengan Orang tua wali/murid namun yang terjadi saksi sendiri tidak tahu, apakah melalui rapat Komite ataukah tidak.
  - Bahwa sekolah SMK Negeri 1 Ende pernah melaksanakan Rapat Komite bersama orang tua wali/murid, dimana rapat komite biasa dilaksanakan pada saat memasuki tahun ajaran baru dan pada saat penerimaan raport siswa, hanya saja saksi tidak ingat berapa kalikah pihak sekolah melaksanakan rapat komite dengan orang tua wali/murid.
  - Bahwa terkait dengan penerimaan Keuangan Komite dari tahun ajaran 2019/202, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 itu sendiri saksi tidak tahu pasti, hal ini dikarenakan saksi hanya ditugaskan untuk menerima pembayaran uang komite dari siswa maupun orang tua wali/siswa, yang mana pembayaran uang komite ini sendiri berlangsung hampir setiap hari, dikarenakan pembayaran komite itu sendiri dilakukan secara cicil dan untuk kejelasan terkait dengan jumlah siswa serta besaran penerimaan keuangan

Halaman 154 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komite yang tahu jelas adalah bendahara Komite itu sendiri yaitu WENSESLAUS DERTA.

- Bahwa terkait dengan pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS), saksi tidak pernah diberikan tugas ataupun diminta bantuan untuk membuatnya, setahu saksi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) itu sendiri dibuat oleh Bendahara WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar apakah yang menjadi acuan dari Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA dalam melakukan pembuatan RAPBS, dikarenakan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan ini.
- Bahwa selama saksi menjadi pembantu Bendahara mekanisme penggunaan uang komite itu sendiri adalah setelah saksi mendapatkan perintah secara lisan dari kepala sekolah an. **HERMIN GILDUS RANGGA** untuk mengeluarkan/ melakukan pembayaran terhadap kebutuhan dan disetiap penggunaan dana komite saksi lalu menyampikan terlebih dahulu kepada bendahara Komite **WENSESLAUS DERTA**, namun saksi sendiri tidak tahu apakah penggunaan Dana Komite tersebut sudah melalui persetujuan Ketua Komite atautkah belum.
- Bahwa penggunaan dana komite sesuai Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10, untuk kegiatan-kegiatan antara lain :
  - Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - Pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - Pengembangan sarana prasarana; dan
  - Pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan ;
- Bahwa berkaitan dengan buku kas umum rekapan penerimaan dan pengeluaran uang komite setahu saksi selama ini tidak ada, hanya saja untuk rekapan penerimaan maupun pengeluaran yang menggunakan uang komite, untuk saksi dengan Bendahara WENSESLAUS DERTA masing-masing memiliki buku agenda tersendiri.
- Bahwa penerimaan yang saksi maksudkan disini adalah berkaitan dengan pembayaran uang komite oleh siswa maupun orangtua wali/ siswa, dimana apabila Bendahara Komite tidak berada di tempat, maka saksi akan mencatat setiap pembayaran tersebut didalam buku agenda pribadi saksi, dan berkaitan dengan pengeluaran keuangan Komite yang saksi maksudkan disini adalah adanya perintah lisan dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA yang langsung kepada saksi ataupun melalui guru-guru yang membutuhkan dana untuk

Halaman 155 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





melakukan kegiatan, maka sebelum saksi memberikan uang komite tersebut, saksi akan melaporkan terlebih dahulu kepada bendahara WENSESLAUS DERTA, setelah itu saksi lalu memcatatnya didalam buku Agenda saksi.

- Bahwa kegiatan yang dibayarkan oleh saksi dengan menggunakan keuangan Komite sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembelian Bunga dan penataan taman	Rp 2.110.000,-
2.	Perbaikan Toilet Guru dan siswa	Rp 2.644.000,-
3.	Pemasangan 1 (satu) pintu ruang kelas tata niaga	Rp 1.500.000,-
4.	Biaya kedukaan mantan guru	Rp 1.000.000,-
5.	Persiapan simulasi UNBK	Rp 300.000,-
6.	Computer 10 Unit	Rp 80.678.000,-
7.	Biaya transportasi siswa PKL ke Desa Kelitembu	Rp 1.000.000
8.	Honor input kwitansi	Rp 19.500.000,-
9.	Pembelian alat pendukung	Rp 5.328.000,-
10.	Pembelian konsumsi untuk PKL	Rp 2.100.000,-
11.	Rapat Dewan guru	Rp 20,585,000,-
12.	Lembur kedatangan Inspektorat	Rp 4.200.000,-
13.	Snack pengerjaan air bersih	Rp 2.490.000,-
14.	Biaya perbaikan kursi	Rp 2.000.000,-
15.	Ulang sekolah	Rp 15.000.000,-

terkait dengan seluruh item kegiatan tersebut diatas, bahwa benar saksi yang membayarkannya dan kegiatan tersebut benar dilaksanakan ;

- Bahwa untuk item kegiatan input kwitansi penerimaan semester ganjil benar dilaksanakan, dimana kegiatan tersebut melibatkan saksi, bersama Bendahara WENSESLAUS DERTA dan juga saudara OLGANIUS K. SENDA dan untuk pertanggung jawaban yang membuatnya adalah bendahara komite WENSESLAUS DERTA, sedangkan untuk item kegiatan pengawasan pengerjaan tembok sekolah, saat itu saksi yang membayarkan biaya tersebut dimana untuk biaya tersebut saksi serahkan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, hanya saja kwitansi pembayarannya tidak ditandatangani oleh kepala sekolah.
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu hal apakah yang menjadi alasan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA tidak mau menandatangani setiap kwitansi pembayaran yang menggunakan keuangan komite, yang ingin saksi jelaskan disini bahwa dari sekian banyak keuangan komite yang saksi berikan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, sebagian besar tidak menggunakan kwitansi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika diberikan kwitansi untuk ditandatangani, kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA selalu menolaknya.

- Bahwa yang melakukan pengelolaan terhadap setiap penerimaan maupun pengeluaran keuangan Komite pada sekolah SMK Negeri Ende adalah Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan bendahara WENSESLAUS DERTA.
- Awalnya saksi tidak tahu disimpan diamanakah seluruh penerimaan keuangan komite tersebut, yang saksi tahu apabila saksi menerima pembayaran komite dari siswa maupun orang tua wali/siswa, seluruh keuangan tersebut saksi serahkan kepada Bendahara WENSESLAUS DERTA, namun setelah adanya temuan dari Inspektorat disitulah baru saksi tahu bahwa selama adanya penerimaan keuangan komite, seluruh keuangan tersebut disimpan oleh Bendahara di Rekening BRI milik Komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa setahu saksi temuan dari Inspektorat Prov NTT terhadap dana Komite SMK Negeri 1 Ende adalah terkait dengan pembayaran uang Kesra kepada guru-guru PNS, dan seluruh guru PNS diwajibkan untuk melakukan pengembalian terhadap keuangan tersebut.
- Bahwa yang mengatur terkait dengan pembayaran keuangan Kesra tersebut adalah saksi dan bendahara komite WENSESLAUS DERTA, dimana setelah bendahara memberikan uang kepada saksi, dan uang tersebut saksi masukan kedalam masing-masing Amplop, setelah itu saksi lalu menginformasikan secara lisan maupun melalui group Watss Up kepada guru-guru PNS penerima Kesra dan selanjutnya saksi membayarkan uang tersebut kepada guru-guru penerima Kesra.
- Bahwa setahu saksi jumlah guru-guru PNS penerima Kesra adalah sejumlah 48 (empat puluh delapan) orang, dan seingat saksi setelah adanya temuan dari inspektorat terkait dengan keuangan Kesra tersebut, saksi sempat diberikan tugas oleh Bendahara komite WENSESLAUS DERTA untuk melakukan penyetoran kembali uang ke Buku rekening Kas Komite sebesar Rp.196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk mengganti keuangan kesra yang dibayarkan kepada guru-guru PNS, namun penyetoran uang tersebut saksi lakukan secara bertahap.
- Bahwa sumber keuangan tersebut merupakan Dana Komite, dimana saksi ditugaskan untuk menyetorkan kembali ke Buku rekening kas komite, setelah itu slip penyetoran tersebut saksi tempelkan di Kertas HVS kemudian saksi jilid menjadi 1 (satu) buku dan hasil jilid tersebut saksi berikan kepada Bendahara WENSESLAUS DERTA, sebagai pertanggung jawaban bahwa uang kesra tersebut sudah dikembalikan, namun faktanya uang kesra tersebut belum pernah dikembalikan oleh para guru-guru PNS.

Halaman 157 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggota komite sekolah terdiri atas unsur :
  - Orang Tua wali yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
  - Tokoh masyarakat.
  - Pakar Pendidikan
- Bahwa setahu saksi Anggota Komite Sekolah tidak boleh berasal dari unsur :
  - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.
  - b. Penyelenggara yang bersangkutan.
  - c. Pemerintah Desa.
  - f. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
  - g. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
  - h. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  - f. Pejabat Pemerintah / Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung Jawab apabila terjadi penyalagunaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende adalah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa dalam pemilihan anggota komite SMK Negeri 1 Ende tidak pernah melalui rapat orang tua/wali siswa dan setahu Saksi bahwa untuk keanggotaan komite itu sendiri tidak ada.
- Bahwa untuk pemilihan susunan kepengurusan Komite sekolah tidak pernah melalui musyawarah mufakat ataupun pemungutan suara, dimana untuk mekanisme pemilihan kepengurusan komite itu sendiri tidak sesuai dengan ketentuan, karena saat itu kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA hanya melakukan penunjukan secara langsung terhadap susunan kepengurusan komite itu sendiri, hal ini dibenarkan dengan adanya penunjukan Saksi sebagai Bendahara pembantu oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk membantu pak WENSESLAUS DERTA selaku bendahara komite, dan pada saat itulah baru Saksi mengetahui bahwa telah ada pergantian Bendahara komite, dimana bendahara komite sebelumnya masih dijabat oleh Ibu MARIA PABA KARITAS.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lamakah masa jabatan yang diemban oleh anggota maupun pengurus komite itu sendiri, dikarenakan selama Saksi menjabat sebagai bendahara pembantu tidak pernah sama sekali dilakukan pemilihan anggota maupun pengurus komite sekolah.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah jumlah keanggotaan didalam komite sekolah SMK Negeri 1 Ende, hal ini dikarenakan tidak pernah diadakan pemilihan untuk keanggotaan komite itu sendiri, namun yang Saksi ketahui bahwa untuk susunan kepengurusan komite itu sendiri ada 3 orang yang terdiri dari :
  - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MSi.

Halaman 158 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
- Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.
- Bahwa pada saat dilakukan penggalangan dana dalam setiap tahun ajaran, dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 tidak pernah didahulukan dengan pembuatan proposal, dimana yang Saksi ketahui bahwa ketika ada penggalangan dana dalam setiap tahun ajaran Saksi ditugaskan untuk menerima penggalangan dana tersebut, selanjutnya hasil penggalangan dana tersebut Saksi serahkan kepada saudara WENSESLAUS DERTA selaku Bendahara Komite.
- Bahwa untuk mekanisme pembayaran itu sendiri, pada dasarnya Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA akan melakukan print out terkait dengan Daftar tunggakan pembayaran sumbangan dari peserta didik, kemudian Daftar tunggakan pembayaran sumbangan, kemudian daftar tunggakan tersebut diberikan kepada Saksi untuk dibagikan kepada masing-masing guru Wali kelas, dengan tujuan agar guru wali kelas dapat menghimbau para peserta didik untuk segera melunasi pembayaran sumbangan tersebut ;
- Bahwa untuk hasil penggalangan pada setiap tahun ajaran, dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 biasanya langsung diterima oleh Saksi sendiri bersama saudara WENSESLAUS DERTA, selanjutnya untuk uang hasil penggalangan yang diterima oleh Saksi, kemudian akan Saksi serahkan kepada saudara WENSESLAUS DERTA selaku Bendahara Komite, setelah itu uang hasil penggalangan tersebut biasanya dibawah pulang oleh saudara WENSESLAUS DERTA ke rumahnya, dan uang hasil penggalangan tersebut sebagian akan dimasukkan kedalam rekening Komite dan sebagian lagi dimasukkan kedalam rekening Pribadi atas nama WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Saksi pernah disuruh oleh saudara WENSESLAUS DERTA untuk melakukan penyetoran uang kedalam rekening pribadi miliknya, dan setahu Saksi uang yang Saksi setorkan tersebut merupakan uang hasil penggalangan dari peserta didik.
- Saksi tidak ingat tanggal serta waktu penyetoran tersebut, hanya saja Seingat Saksi lebih dari satu kali Saksi disuruh oleh saudara WENSESLAUS DERTA untuk melakukan penyetoran uang kedalam rekening pribadi miliknya, dan untuk nominalnya sendiri tidak menentu, hanya seingat Saksi kisaran uang yang disetorkan tersebut adalah kurang lebih ratusan juta.
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk menyetorkan uang kedalam rekening pribadi miliknya, dan uang yang Saksi serorkan tersebut merupakan uang hasil penggalangan dari peserta didik.

Halaman 159 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat tepatnya tanggal berapakah waktu penyetoran uang tersebut, hanya saja Saksi melakukan penyetoran uang kerekening miliknya kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Saksi lakukan lebih dari satu kali dan seingat Saksi pernah menyetorkan uang ke rekening milik kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA Sebesar Rp.245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), hanya saja Saksi tidak tahu maksud serta tujuan dan digunakan untuk apakah uang yang Saksi setorkan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pihak komite sekolah pernah membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta Rencana Kerja tahunan beserta RAPBS/RKAS, dikarenakan Saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, Sedangkan untuk acuan dalam penggunaan hasil penggalangan dana disetiap tahun ajaran itu sendiri, Saksi tidak tahu acuan manakah yang digunakan oleh komite sekolah dalam penggunaan hasil penggalangan dana tersebut.
- Bahwa besaran pembayaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per/siswa, dan pada saat, Terjadinya pandemi Covid 19 tepatnya tahun ajaran 2020/2021, pembayaran uang komite turun menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per/.siswa ;
- Bahwa jumlah perkiraan siswa didik pada tahun ajaran 2019/2020 adalah 1.358 orang, dengan rincian:
  - a. Kelas X480 orang x Rp. 2.300.000,- Rp. 1.104.000.000,-
  - b. Kelas XI424 orang x Rp. 2.300.000,- Rp. 984.400.000,-
  - c. Kelas XII454 orang x Rp. 2.300.000,- Rp. 1.044.200.000,-
  - Total 1.358 Orang Rp. 3.132.600.000,-
- Bahwa jumlah perkiraan siswa didik pada tahun ajaran 2020/2021 adalah 1.358 orang, dengan rincian :
  - a. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,- Rp. 1.038.800.000,-
  - b. Kelas XI 442 orang x Rp. 1.800.000,- Rp. 795.600.000,-
  - c. Kelas XII 410 orang x Rp. 1.800.000,- Rp. 738.000.000,-
  - Total 1.358 Orang Rp. 2.572.400.000,-
- Bahwa jumlah perkiraan siswa didik pada tahun ajaran 2021/2022 (sampai dengan Desember 2021) adalah 1.428 orang, dengan rincian:
  - a. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,- Rp. 1.038.800.000,-
  - b. Kelas XI 575 orang x Rp. 1.800.000,- Rp. 1.035.000.000,-
  - c. Kelas XII 439 orang x Rp. 1.800.000,- Rp. 790.200.000,-
  - Total 1.428 orang Rp. 2.864.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran Yang dijalankan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah :

- Menutupi kekurangan satuan pendidikan
- Pembiayaan program /kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.
- Pengembangan sarana dan prasarana.

Sedangkan hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran Yang tidak dijalankan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah:

- Bahwa pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah tidak dilakukan secara wajar dan tidak dipertanggung jawabkan secara transparan. Dan yang bertanggung jawab atas ini adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa untuk penggunaan hasil penggalangan dana dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 ada beberapa kebutuhan yang tidak memperoleh persetujuan dari pihak komite sekolah dan juga tidak dipertanggung jawabkan secara transparan yakni penggunaan hasil penggalangan dana yang ditujukan untuk kepentingan pribadi kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa saksi tidak tahu upaya apakah yang dilakukan oleh komite dalam mengatasi penggunaan hasil penggalangan dana yang dilakukan oleh sekolah tanpa melalui persetujuan dari komite sekolah sehingga kedepannya dapat dipertanggung jawabkan secara transparan.
- Bahwa yang menyebabkan penggalangan dana di setiap tahun ajaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 10 ayat (5) permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah adalah:
  - Tidak ada kejelasan terkait dengan susunan kepengurusan komite itu sendiri, hal ini dikarenakan pemilihan susunan kepengurusan komite itu sendiri tidak melalui MuSaksiwarah mufakat.
  - Tidak adanya transparansi dari kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan juga Bendahara komite WENSESLAUS DERTA terkait dengan penggunaan hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan hasil penggalangan dana di setiap tahun ajaran adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Bendahara komite WENSESLAUS DERTA

Halaman 161 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan uang hasil penggalangan dana tersebut digunakan digunakan oleh keduanya untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa dari tidak ada hasil penggalangan dana disetiap tahun dimulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan Desember 2021 ada yang digunakan untuk kegiatan operasional Komite SMK N 1 Ende
- Bahwa untuk kegiatan operasional komite yang digunakan sudah sesuai dalam pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, menurut Saksi adalah pembelian kebutuhan administrasi/alat tulis kantor.
  - o Dimana kebutuhan administrasi/alat tulis kantor tersebut digunakan untuk mendatakan setiap penerimaan penggalangan dana dari peserta didik.
  - o Sedangkan untuk kebutuhan operasional komite lainnya yang tidak sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, menurut Saksi adalah terkait dengan biaya konsumsi rapat pengurus dan transportasi dalam rangka melaksanakan tugas atau kegiatan lain yang disepakati oleh Komite.
  - o Dalam hal ini menurut Saksi tidak sesuai dikarenakan sebagian dari kegiatan operasional komite tersebut diatas tidak memperoleh persetujuan dari komite sekolah itu sendiri.
- Bahwa berkaitan dengan besaran pembayaran sumbangan dari peserta didik dan juga orang tua/wali sudah ditentukan dan bersifat wajib untuk seluruh peserta didik dan untuk jangka waktu pembayaran itu sendiri biasanya di berikan 2 (dua) tahap pelunasan dalam satu tahun ajaran yaitu pembayaran sumbangan tahap I dilakukan pada awal smester sampai dengan akhir smester 1, sedangkan untuk tahap II pembayaran sumbangan dilakukan pada awal dan akhir semester 2.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan, dimana, siapa saja dan bagaimana mekanisme dalam menetapkan besaran sumbangan dan jangka waktu pembayarannya.
- Bahwa apabila terdapat peserta didik yang tidak dapat membayar/ melunasi sumbangan pendidikan tersebut maka sanksi yang diberikan berupa raport maupun ijasah dari peserta didik tersebut tidak diberikan.
- Bahwa pada dasarnya terkait dengan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan sumbangan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan juga orang tua/wali belum pernah di audit oleh akuntan public, namun sekitar bulan Oktober 2020 sempat dilakukan audit oleh Inspektorat Provinsi NTT dan dari hasil audit tersebut terdapat temuan terkait dengan pembayaran biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS.
- Bahwa untuk pribadi Saksi sendiri tidak pernah memperoleh keuntungan dari pengelolaan dana komite tersebut, namun apabila Bendahara komite dalam hal ini

Halaman 162 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WENSESLAUS DERTA memperoleh sedikit rejeki, yang bersangkutan pasti akan juga membagikan rejeki tersebut dengan Saksi, hanya saja Saksi tidak tahu rejeki yang diberikan oleh saudara WENSESLAUS DERTA tersebut merupakan salah satu keuntungan dari pengelolaan dana komite ataukah bukan.

- Bahwa upaya yang Saksi lakukan adalah mengingatkan kepada Bendahara komite WENSESLAUS DERTA untuk lebih tertib dalam melakukan pengelolaan keuangan Komite sehingga tidak menjadi temuan dikemudian hari, namun penyampaian saksi tersebut tidak diindahkan oleh bendahara Komite WENSESLAUS DERTA.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar ;

## 6. Saksi YULIANA MI, S.Pd,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021
- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2019 sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kejuruan Akuntansi untuk kelas X, XI dan XII pada SMK N 1 Ende sampai dengan saat ini. dan dasar saksi menjadi guru mata pelajaran berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK N 1 Ende nomor : 01.a/I 21.27/smk.1/MN/2020, tanggal 4 Januari 2020.
- Bahwa sebagai guru mata pelajaran Tugas dan Tanggung jawab saksi adalah menjalankan proses belajar mengajar di kelas dan membimbing siswa dalam hal pengetahuan pendidikan kejuruan akuntansi, dan melakukan evaluasi program pelajaran.
- Bahwa pada Tahun Ajaran 2019/2020, SMK N 1 Ende menerima uang komite dari orang tua / wali siswa, sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / siswa, sedangkan tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi yang menetapkan besaran uang komite Tahun Ajaran 2019/2020, SMK N 1 Ende menerima uang komite dari orang tua siswa, sebesar Rp. 2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah) / siswa, sedangkan tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah) adalah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa penetapan besaran uang komite melalui mekanisme rapat bersama orang tua wali, saksi tidak tahu ;
- Bahwa pengurus komite antara lain :
  - Ketua Komite sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si.

Halaman 163 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris sdr, ALFONS TARI, SE.
- Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Penentuan pengurus komite SMK N 1 Ende tidak melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- Bahwa benar Bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah guru / tenaga pendidik pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa benar ada sanksi untuk siswa yang tidak bayar uang komite yakni laporan pendidikan ditahan sampai siswa tersebut membayar baru laporan pendidikan diserahkan terkadang siswa diminta untuk membuat pernyataan untuk membayar uang komite.
- Bahwa yang memerintahkan untuk memberikan sanksi kepada siswa yang tidak membayar uang komite adalah Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa setahu saksi uang komite untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan.
- Bahwa saksi tidak tahu penggunaan uang komite SMK N 1 Ende melibatkan Ketua Komite Drs. ABRAHAM BADU, M.Si
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Kepala sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd mengangkat/menetapkan sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tenaga pendidikan di SMK N 1 Ende sebagai bendahara Komite
- Bahwa saksi tidak tahu Komite SMK N 1 Ende memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende tidak boleh melakukan pungutan uang komite kepada orang tua wali siswa, tetapi dalam bentuk penggalangan dana
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total penerimaan uang Komite tahun ajaran 2019/2020 yang telah diterima dari orang tua wali siswa, dan digunakan untuk kegiatan apa saja ?
- Bahwa saksi menerima biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d bulan Juni 2020. Rincian bulan Januari 2020 sebesar Rp. 750.000, / bulan,- .
- Bahwa Saksi mendapat biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS karena atas perintah kepala sekolah Pak HERMIN GILDUS RANGGA, kemudian uang tersebut dibayarkan oleh bendahara Pak. WENSESLAUS DERTA, S.Pd kadang yang membayar adalah pembantu bendahara KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd.

Halaman 164 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahuinya karena kami hanya bekerja dan menjalankan tugas sebagai guru PNS, sedangkan kebijakan untuk pembayaran biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS menggunakan uang komite atas dasar perintah kepala sekolah melalui bendahara untuk membayar kepada kami dan saksi menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Inspektorat Prop NTT pernah melakukan Audit terhadap Keuangan Komite SMK N 1 Ende yaitu pada bulan Oktober 2020, Inspektorat Prop. NTT pernah melakukan pemeriksaan dana BOS dan dana komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa benar ada temuan Inspektorat Prop. NTT, dan ada rekomendasi yang harus ditindak lanjut yaitu pengembalian biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi PNS sebanyak 48 orang.
- Bahwa Saksi sudah mengembalikan uang komite sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2022, melalui transfer rekening ke rekening Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 7155-01-020146-53-3.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika penerimaan uang komite oleh PNS tidak sesuai prosedur dan menjadi kesalahan namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa bahwa kami salah telah menerima uang komite tidak sesuai prosedur Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

### 7. Saksi Dra. MARIA DOLOROSA PADA,

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan saat itu saksi sebagai Guru BPBK Kelas X Jurusan Akutansi Jurusan OTKP dan kelas XI UPW ( Usaha perjalanan Wisata) pada SMK Negeri 1 Ende dengan dasar pengangkatan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende Nomor : 153/I 21.27/SMK.1/ MN/2019.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Guru BP/BK adalah sebagai berikut:
  - Membimbing siswa/siswi yang bermasalah dalam bidang kehadiran di sekolah;
  - Membantu kepala sekolah dalam menyampaikan informasi terkait dengan pembayaran uang komite pada SMK Negeri 1 Ende;

Halaman 165 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- Membuat surat panggilan kepada orang tua siswa yang bermasalah tentang kehadiran siswa ;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Guru BPBK dengan baik dan benar, dan saksi bertanggung jawab terhadap pekerjaan saksi kepada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd.
- Bahwa Pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021 yang saksi ketahui yaitu :
  - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
  - Sekretaris : ALFONS TARI SE, S.E ;
  - Bendahara : WENSLAUS DERTA,S.Pd ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara WENSESLASUS DERA,S.Pd tidak diperbolehkan menjabat selaku bendahara karena bertentangan dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah bahwa anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur tenaga pendidik dari sekolah yang bersangkutan sedangkan saudara WENSESLASUS DERTA ,SPd adalah tenaga pendidik dari Sekolah.
- Bahwa yang berhak menjadi anggota komite adalah sebagai berikut :
  - Orang tua/Wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50 %;
  - Tokoh Masyarakat paling banyak 30 %;
  - Pakar pendidikan paling banyak 30 %;
  - Pensiunan tenaga pendidik dan orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan ;
- Bahwa anggota Komite Sekolah dipilih tidak sesuai dengan ketentuan karena sepengetahuan saksi tidak dipilih secara Akuntabel dan Demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa.
- Bahwa menurut yang saksi ketahui sebaran uang komite yaitu :
  - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Tahun Ajaran 2020/2021 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Tahun Ajaran 2021/2022 saksi tidak mengetahui berapa besaran terkait dengan pembayaran uang komite karena pada tanggal 23 Maret 2021 karena sudah pensiun ;
- Bahwa saksi mengetahui besaran uang komite tersebut dikarenakan saksi selaku guru BP/BK diberikan perincian tunggakan keuangan sekolah (Uang komite





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah) dan dalam daftar tersebut tertera rincian besaran uang komite sekolah di setiap tahun ajaran disamping itu juga bahwa kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Spd pernah menyampaikan kepada Guru BP/BK untuk menyampaikan kepada anak didik untuk melunasi uang komite atau uang pendampingan sekolah.

- Bahwa Saksi pernah di mintai tolong oleh siswa untuk membayar uang komite atau pendampingan sekolah namun saksi menyarankan untuk langsung membayar kepada bendahara komite an. WENSESLASUS DERTA, Spd.
- Bahwa yang menentukan besaran uang komite adalah kepala sekolah an. HERMIN GULDUS RANGGA, S.Pd biasanya berdasarkan kegiatan rapat komite dengan perwakilan dari orang tua siswa/wali namun berkaitan dengan pelaksanaan rapat komite tersebut saksi tidak pernah dilibatkan dan dapat saksi jelaskan bahwa untuk tahun ajaran 2020/2022 saksi tidak mengetahui dikarenakan pada tanggal 23 Maret 2021 saksi sudah pensiun.
- Bahwa menurut saksi berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh kepala sekolah bahwa semua siswa wajib untuk membayar uang komite sedangkan sanksi yang diberikan kepada siswa atau siswa yang tidak melunasi uang komite dalam 1 ( satu) tahun ajaran Rapot / ljasah dari siswa atau siswa tidak dibagikan oleh pihak sekolah.
- Bahwa yang bertugas mengumpulkan uang komite sekolah yakni bendahara komite sekolah an. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penggunaan keuangan komite sumbangan orang tua murid tersebut dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan rapat terkait penyusunan dan perencanaan kegiatan tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan kegiatan audit terhadap dana bos dan dana komite SMK N 1 Ende dan sepengetahuan saksi yang menjadi temuan adalah terkait dengan pembayaran Dana Kesra PNS yang dibayarkan kepada para guru.
- Bahwa pada tahun ajaran 2019 /2020 saksi pernah menerima uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan Honorer Provinsi dari bulan Januari s/d Juni 2019 dan perbulanya saksi menerima Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Total yang saksi terima adalah sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) dan yang membayarkan adalah bendahara komite an. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa uang tersebut sudah kembalikan sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) melalui kerening BRI an. Komite SMK Negeri 1 Ende dengan Nomor Rekening 7155-01-020146-53-3 pada tanggal 05 Oktober 2022.

Halaman 167 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling bertanggung jawab apabila terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana Komite Tahun Ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, adalah Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, Spd dan bendahara komite an. WENSESLAUS DERTA, Spd.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan perjalanan dinas menggunakan Dana Komite.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

## 8. Saksi PUPUT KUMALASARI DAENG,

Dibawah /sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, TA. 2020/2021 dan TA 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam pengelolaan keuangan komite ini sendiri adalah sebagai Orang tua dari wali murid atas nama PUTRI DAENG.
- Bahwa seingat saksi Anak saksi mulai sekolah di SMK Negeri 1 Ende pada Bulan Juli 2020, dimana pendaftaran awal masuk sekolah dilakukan Pada bulan Juni 2020.
- Bahwa seingat saksi besarnya biaya komite yang dibayarkan oleh saksi selaku orang tua wali murid adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian pada bulan Juni 2020 saksi membayar biaya Komite sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayarkan sekitar bulan Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat anak saksi naik ke kelas II, disitu ada perubahan terkait dengan besaran pembayaran uang komite dimana yang awalnya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menyebabkan adanya perubahan besaran dalam pembayaran uang Komite, dimana awalnya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah dikarenakan adanya masa Pandemi Covid 19.
- Bahwa pihak sekolah pernah mengadakan rapat Komite dimana, Selama anak saksi bersekolah di SMK Negeri 1 Ende dari Kelas 1 Hingga kelas 3, saksi pernah mengikuti rapat Komite sebanyak 4 (Empat) kali, dimana rapat pertama diadakan sekitar Bulan Juli 2020 pada saat penerimaan Siswa didik baru, kemudian selanjutnya sekitar Bulan Juni 2021 saat itu dibahas terkait dengan perubahan

Halaman 168 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besaran pembayaran Komite, dan sisa 2 (dua) kalinya saksi tidak ingat kapan dilaksanakan rapat Komite tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu acuan apakah yang digunakan oleh pihak sekolah dalam menentukan besaran keuangan Komite yang harus dibayarkan oleh orang tua wali murid, setahu saksi terkait besaran uang komite itu sendiri sudah ditentukan oleh pihak sekolah selanjutnya pihak sekolah menyampaikan kepada orang tua wali murid melalui rapat komite apakah setuju dengan besaran komite tersebut ataukah tidak.
- Bahwa struktu kepengurusan Komite pada SMK Negeri 1 Ende adalah :
  - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU.
  - Sekretaris : ALFONSIUS TARI.
  - Bendahara : WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa terkait dengan mekanisme pengelolaan keuangan komite, saksi tidak tahu sama sekali, dikarenakan selama mengikuti rapat Komite tidak pernah di jelaskan terkait dengan pengelolaan Keuangan komite.
- Bahwa setahu saksi selaku orang tua wali murid bahwa pembayaran uang Komite itu sendiri merupakan kewajiban dari siswa, hanya saja berkaitan dengan sanksi yang diberikan apabila diketemukan ada siswa yang belum melunasi uang Komite, biasanya dari pihak sekolah akan memberikan sanksi berupa siswa tersebut tidak boleh mengikuti ujian dan atau siswa tersebut tidak boleh menerima Raport.
- Bahwa seingat saksi, pada saat awal mula masuk sekolah saksi membayar biaya komite tersebut kepada Bendahara Pembantu atas nama NAMBA, selanjutnya pembayaran keuangan Komite biasanya saksi titipkan kepada anak saksi untuk membayarkan.
- Bahwa setiap kali saksi melakukan pembayaran Komite selalu disertakan dengan Kwitansi pembayaran.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang melakukan pengelolaan terhadap Keuangan Komite tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diambil keterangan di Kantor Kepolisian Resort Ende barulah saksi tahu bahwa Penggunaan keuangan komite sesuai ketentuan permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain :
  - Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan. (paud s/d PT)
  - Pembiayaan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan.
  - Pengembangan sarana prasarana;

Halaman 169 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diambil keterangan di Kantor Kepolisian Resort Ende barulah saksi tahu bahwa Anggota komite sekolah terdiri atas unsur :
  - Dari Orang Tua wali yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan.
  - Dari Tokoh masyarakat.
  - Pakar Pendidikan;
- Awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diambil keterangan di Kantor Kepolisian Resort Ende barulah saksi tahu bahwa Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur :
  - Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan.
  - Penyelenggara yang bersangkutan.
  - Pemerintah Desa.
  - Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
  - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
  - Pejabat Pemerintah / Pemerintah Daerah yang membidangi pendidikan.
- Bahwa setahu Saksi yang bertanggung Jawab apabila terjadi penyalagunaan keuangan Komite SMK Negeri 1 Ende adalah orang yang melakukan pengelolaan Keuangan itu sendiri.
- Bahwa dalam pemilihan anggota atau pengurus komite tidak pernah dilakukan rapat orang tua/wali, saksi selaku wali tidak pernah mendapat undangan terkait dengan pembahasan pemilihan anggota atau pengurus Komite ;
- Bahwa Anggota Komite tidak ada, yang ada hanya pengurus Komite berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Komite atas nama Drs. Abraham badhu, Msi dan Sekretaris atas nama Alfons Tari, SE dan Bendahara atas nama Wenseslaus Derta, S.Pd terkait dengan pengurus komite tersebut menurut saksi bukan merupakan pakar pendidikan atau tokoh masyarakat karena Ketua Komite atas nama Drs. Abraham badhu, Msi merupakan pensiunan PNS dan Sekretaris atas nama Alfons Tari, SE merupakan PNS pada Pemda Kab. Ende sedangkan Bendahara atas nama Wenseslaus Derta, S.Pd merupakan Guru aktif pada SMK N 1 Ende dan mekanisme pemilihan anggota/pengurus Komite SMK N 1 Ende yang seharusnya dilakukan secara musyawarah melalui rapat orang tua/wali namun yang terjadi pada SMK N 1 Ende adalah penunjukan langsung, karena saksi tidak pernah diundang atau mengikuti terkait dengan rapat pemilihan anggota/pengurus komite SMK N 1 Ende ;

Halaman 170 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komite sekolah tidak pernah membuat proposal terkait dengan penggalangan dana Komite pada tahun ajaran 2019/2020, tahun ajaran 2020/2021/ dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan Bulan Desember 2021
- Bahwa cara penggalangan dana/pembayaran uang komite pada tahap pertama saksi selaku wali melakukan pembayaran langsung kepada Bendahara Komite SMK N 1 Ende yaitu Wenseslaus Derta S.pd setelah itu saksi mendapat kwitansi pembayaran uang komite dari Bendahara dan untuk pembayaran tahap berikutnya saksi juga yang membayar kepada Bendahara komite dan saksi melakukan proses membayar uang komite secara bertahap, terkait dengan penyimpanan, mengelola serta penggunaan dari uang komite saksi selaku wali tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu :
  - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Tahun Ajaran 2021/2022 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila terdapat peserta didik, orang tua / wali yang tidak dapat membayar/melunasi maka sanksinya adalah raport atau ijasah tidak dibagikan kepada siswa atau tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian bagi siswa yang belum membayar/melunasinya uang komite ;
- Bahwa proses pembayaran sumbangan/uang komite saksi selaku wali pada tahap pertama saksi langsung membayar kepada Bendahara komite yaitu wenseslaus Derta S.Pd setelah membayar saksi diberi kwitansi pembayaran tersebut, begitu pula untuk pembayaran tahap berikutnya ;
- Bahwa Komite Sekolah SMK N 1 Ende tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban kepada orang tua/wali peserta didik baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak sekolah maupun kepada pihak komite terkait dengan laporan kegiatan komite maupun laporan hasil penggalangan dana
- Bahwa menurut saksi penggunaan penggalangan dana atau uang komite dilakukan tidak transparan karena dari pihak komite tidak pernah mengundang saksi selaku orang tua/wali siswa untuk menyampaikan terkait dengan laporan pertanggung jawaban penerimaan atau pengeluaran uang komite ;

Halaman 171 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jangka waktu pembayaran sumbangan dari peserta didik, orang tua/walinya sudah ditentukan pada saat pendaftaran awal tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terkait dengan jangka waktu pembayaran sumbangan dalam 1 (satu) tahun ajaran sebelum naik kelas harus sudah dilunasi oleh peserta didik, orang tua/walinya dan pembayaran sumbangan itu bersifat wajib untuk seluruh peserta didik, orang tua/walinya ;
- Bahwa pada saat tahun ajaran 2019/2020 sebelum pelaksanaan MOS (Masa Orientasi Siswa) saksi pernah menghadiri undangan bertempat di Aula SMK N 1 Ende disana disampaikan secara lisan oleh Kepala Sekolah atas nama Hermin Gildus Rangga, S.Pd bahwa besaran uang komite yang harus dibayar oleh masing-masing peserta didik, orang tua/walinya sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada surat keputusan dari Kepala Sekolah tentang besaran uang komite yang harus dibayar oleh masing-masing peserta didik, orang tua/walinya ;
- Bahwa Saksi selaku orang tua/wali bersedia untuk membayar uang komite karena diwajibkan dari pihak sekolah apabila mempunyai anak/adik yang sekolah di SMK N 1 Ende wajib untuk membayar uang Komite yang sudah ditentukan ;
- Bahwa selaku orang tua/wali siswa merasa keberatan dan kesulitan dengan besaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar ;

## 9. Saksi WAHYUNI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021 saksi menjabat sebagai pelaksana tata usaha dan Bendahara Gaji guru PNS dan pada tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan saat ini jabatan saksi sebagai pelaksana tata usaha dibagian pengadministrasian persuratan, dan saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021 adalah sebagai pelaksana tata usaha dan Bendahara Gaji guru PNS adalah sebagai berikut :
  - Mengurus dan mengangani gaji guru PNS dan pegawai PNS
  - Pengurusan perubahan gaji karena naik pangkat, berkala, menikah, punya anak, pension dan meninggal.
  - Melaporkan SPT Pajak tahunan guru dan pegawai PNS.
  - Membuat laporan pekerjaan.

Halaman 172 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan, yang diberikan oleh Kepala sekolah dan Koordinator tata usaha.
- Bahwa sedangkan pada tahun ajaran 2021/2022 tugas saksi sebagai pelaksana tata usaha dibagian pengadministrasian persuratan adalah
  - Menangani buku agenda surat masuk dan keluar.
  - Menangani pengarsipan surat/ dokumen sekolah sesuai dengan kode persuratan.
  - Membuat dan mengetik surat.
  - Mengelola buku ekspedisi persuratan, mengisi buku input, membantu melapokan SPT Pajak tahunan guru dan pegawai PNS.
  - Membuat laporan kegiatan pekerjaan.
  - Membantu melayani pengambilan ijasah siswa.
  - Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan, yang diberikan oleh Kepala sekolah dan Koordinator tata usaha
- Bahwa Tugas pokok saksi hanya sebagai Bendahara Guru dan saksi tidak pernah diberikan tanggung jawab untuk menangani pengelolaan keuangan Komite.
- Bahwa yang saksi tahu untuk tahun ajaran 2019/2020 adalah sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.1.800.000,- (satu Juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan sehingga adanya perubahan terkait dengan besaran komite tersebut adalah dikarenakan adanya pandemi Covid 19, sehingga terjadi penurunan besaran pemungutan Komite;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang menetapkan besaran uang komite tersebut, hanya saja setahu saksi pada tahun ajaran 2020/2021, sempat diadakan rapat komite antara pengurus sekolah dengan orang tua wali murid, dan hasil rapat tersebut terjadi perubahan atas besaran pembayaran komite yang dibebankan kepada siswa yang mana dari besaran Komite Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa berkaitan dengan pengurus Komite itu sendiri, saksi hanya tahu Ketua Komite dan Bendahara Komite dimana Ketua Komite ABRAHAM BADU Bendahara Komite WENSESLAUS DERTA sedangkan untuk pengurus Komite yang lainnya saksi sendiri tidak tahu.
- Bahwa Pada dasarnya pemilihan pengurus komite tersebut tidak melalui musyawarah mufakat dan atau voting atau pemungutan suara bersama para orang tua wali siswa, hal ini dikarenakan sejak saksi masuk menjadi pegawai di SMK Negeri 1 Ende pada tahu 2016, saat itu Bendahara Komite di jabat oleh Ibu MARIA

Halaman 173 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PABA KARITAS, dan tidak lama kemudian sudah diganti dengan pak WENSESLAUS DERTA.

- Bahwa Bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah guru / tenaga pendidik pada SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa yang saksi ketahui uang komite untuk menutupi kekurangan biaya pendidikan yang tidak dianggarkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam penggunaan uang komite SMK N 1 Ende ada melibatkan Ketua Komite Drs. Abraham Badu. M.Si
- Bahwa benar saksi ada menerima biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d bulan Juni 2020 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / bulan.
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu dan untuk pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendahara yairu Bapak Wenseslaus Derta, S.Pd kadang yang membayar adalah pembantu Bendahara Krispina Agnes Namba, S.Pd ;
- Bahwa Kami hanya bekerja dan menjalankan tugas sebagai pegawai PNS, sedangkan kebijakan untuk pembayaran biaya Transportasi dan Tunjangan Jabatan bagi para guru dan pegawai PNS menggunakan uang komite itu sendiri saksi tidak tahu sama sekali.
- Bahwa saksi menggunakan uang komite tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang komite tidak boleh dianggarkan untuk kegiatan yang telah dianggarkan oleh Keuangan Negara;
- Bahwa benar yaitu pada bulan Oktober 2020, Inspektorat Prop. NTT melakukan pemeriksaan dana BOS dan dana komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa hasil dari audit yang dilakukan oleh Inspektorat Propinsi NTT ada temuan dan ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti yaitu pengembalian biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi PNS sebanyak 48 orang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapatnya benar.

#### **10. Saksi WENSESLAUS DERTA,**

Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan keuangan komite pada SMK Negeri 1 Ende Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 SMK Negeri 1 Ende, jabatan Saksi adalah sebagai Bendahara Komite, dasar Saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd menjabat sebagai bendahara komite berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini Saksi tidak lagi menjabat sebagai bendahar Komite sekolah SMK Negeri 1 Ende

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah sebagai berikut :
  - a. Menerima keuangan Komite Sekolah dari orang tua atau siswa sekolah SMK Negeri 1 Ende selanjutnya melakukan pencatatan dalam buku registrasi pembayaran keuangan dana komite dan membuat laporan pertanggung kepada Kepala Sekolah.
  - b. Membayar gaji pada guru Honor, Karyawan serta security.
  - c. Pembiayaan kegiatan operasional komite Sekolah ( yang tidak dianggarkan dalam dana Bos) seperti perjalan dinas bagi para guru dan pegawai.
  - d. Mengeluarkan pembayaran honor Keuangan Komite berdasarkan perintah lisan dan tertulis dari Kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa sebagian tugas dan tanggung jawab tersebut sudah Saksi laksanakan dengan baik dan benar namun ada juga tugas tersebut tidak Saksi laksanakan dengan baik dan benar contohnya seperti pembayaran uang kesra atau pembayaran tranportasi bagi para guru PNS yang sebenarnya tidak boleh di bayarkan dengan menggunakan uang komite, tetapi atas perintah lisan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd untuk membayarkan dan ada beberapa uang komite digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yaitu digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd. maupun kepada Saksi sendiri tidak membuat laporan pertanggung jawaban keuangan komite
- Bahwa berdasarkan Surat keputusan kepala sekolah SMK Negeri 1 Ende Nomor : 139.a./I 21.27/SMK.1/2017, tanggal 03 Juli 2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus Komite Sekolah SMK Negeri 1 Ende pada Tahun Anggaran 2017 s/d 2021, adapun struktur kepengurusan komite sekolah SMK Negeri 1 Ende adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
  - b. Sekertaris : ALFONS TARI SE, S.E
  - c. Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd
- Bahwa anggota Komite pada SMK Negeri 1 Ende tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dipilih tidak secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa karena anggota komite yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 yang ditunjuk sebanyak 3 (orang) terdiri dari Saksi sendiri Menjabat selaku bendahara

Halaman 175 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersatus sebagai tenaga pendidik pada SMKN Negeri 1 Ende, Ketua komite an. Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku pejabat pemerintah daerah, dan sekretaris komite an. ALFONS TARI SE, S.E selaku pejabat pemerintah daerah Kab.Ende.

- Bahwa pemilihan anggota Komite pada SMK Negeri 1 Ende tidak secara Akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua / wali siswa karena Saksi ditunjuk berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 dengan alasan mengikuti pimpinan kepala sekolah sebelumnya bahwa anggota komite berasal dari tenaga pendidik atau guru dari sekolah setempat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan aturan Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dan Saksi baru mengetahui aturan tersebut setelah di lakukan pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ende terkait dengan pengelolaan Dana Komite pada sekolah SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Penunjukan Saksi sebagai bendahara komite tidak melalui mekanisme dan tidak boleh menjabat sebagai bendahara komite karena pada pasal 4 poin (3) huruf a permendikbud 75 Tahun 2016 yang berbunyi "anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan sedangkan Saksi sendiri merupakan tenaga pendidik dari SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa terdakwa tidak berhak/boleh menjadi bendahara komite sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 karena Saksi merupakan tenaga pendidik aktif pada sekolah SMK Negeri 1 Ende serta adapun yang boleh menjabat sebagai bendahara komite adalah sebagai berikut :
  1. Anggota komite terdiri dari :
    - a. Orang tua / wali dari siswa yang masih aktif pad sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% ( lima puluh persen);
    - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30 % ( tiga puluh persen) antara lain :
  2. Memiliki pekerjaan dan prilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat ;
  3. Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan tidak termasuk anggota/ pengurus organisasi propesi pendidik dan penguru partai politik
    - a. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) antara lain :





1. Pensiunan tenaga pendidik;
  2. Orang yang memiliki pengalaman dalam bidang pendidikan;
    - a. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100 % (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing;
  3. Anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang;
  4. Anggota komite tidak dapat berasal dari unsur :
    - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan;
    - b. Penyelenggara sekolah yang bersangkutan;
    - c. Pemerintah desa;
    - d. Forum koordinasi pimpinan kecamatan;
    - e. Forum koordinasi pimpinan daerah;
    - f. Anggota Dewan Rakyat Perwakilan Daerah;
    - g. Pejabat pemerintah / pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
- Bahwa SMK Negeri 1 Ende memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) pernah membuat namun sudah hilang dan Saksi tidak bisa menunjukan kepada penyidik.
  - Bahwa pada tahun Ajaran 2019/2020 Saksi selaku bendahara Komite pernah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan dapat Saksi serahkan kepada penyidik untuk keperluan proses penyidikan.
  - Bahwa Dasar Saksi membuat membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) berdasarkan rapat kerja Kepala sekolah dan dewan guru, pegawai untuk membahas kebutuhan dalam 1 Tahun ajaran yang harus di biayai dengan menggunakan uang komite tetapi tidak didukung dengan menggunakan dana BOS dan adapun alasan belum ditandatangani adalah karena Saksi belum sempat untuk mengajukan untuk di tandatangani oleh ketua Komite dan perlu Saksi jelaskan lagi bahwa Saksi hanya bertugas untuk mengimput terkait dengan (RAPBS) yang berdasarkan kesepakatan rapat kerja kepala sekolah dan dewan guru serta pegawai.
  - Bahwa mekanisme penggunaan uang komite adalah setelah Saksi mendapatkan perintah secara lisan maupun secara tertulis dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA untuk mengeluarkan/ melakukan

Halaman 177 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran terhadap kebutuhan dan di setiap penggunaan dana komite Saksi tidak pernah meminta ijin kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah.

- Bahwa Penggunaan dana komite sesuai Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10, untuk kegiatan-kegiatan antara lain :
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan oleh dana Bos;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Bahwa penggunaan uang komite tidak semua sesuai dengan Permendikbud RI no. 75 Tahun 2016, pasal 10 karena ada beberapa kegiatan pribadi seperti arisan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Spd menggunakan dana komite, shering dana untuk penambahan dana yang sudah dianggarkan menggunakan dana ABPN seperti pembangunan Ruang Praktek Siswa perintah tertulis Rekapitulasi dana shering yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.P.d dan pembayaran uang transportasi dan jabatan kepada 48 orang Guru dan Pegawai PNS.
- Bahwa Saksi tidak membuat atau memiliki buku kas umum terkait dengan rekapan penerimaan dan pengeluaran uang komite karena Saksi sibuk selaku guru pengajar sehingga Saksi lupa dan tidak membuat buku kas umum dan Saksi juga tidak sempat membuat laporan pertanggung jawaban terkait dengan keuangan dana komite selama Saksi menjabat selaku bendahara komite.
- Benar Saksi menerima uang komite wajib dari orang tua wali murid. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat komite kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd menyampaikan kepada orang tua atau wali siswa bahwa besaran uang komite yang harus di bayar oleh masing-masing siswa namun tidak ada surat penetapan terkait dengan besaran uang komite,
- Bahwa penerimaan pada Tahun ajaran 2019/2020 persiswa sumbangan sebesar Rp. 2.300.000,- dispensasi jika ada 2 siswa orang tua sama maka dibayar  $\frac{1}{2}$  masing-masing siswa sedangkan jika ada 3 siswa orang tua sama maka pembayaran 2 siswa bayar  $\frac{1}{2}$  sedangkan 1 siswa bayar  $\frac{1}{4}$ , sedangkan pada Tahun ajaran. 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa yang seharusnya menetapkan besaran uang komite adalah Ketua Komite namun yang terjadi bahwa yang menentukan besaran uang komite

Halaman 178 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd berdasarkan rapat bersama dengan perwakilan orang tua siswa dan dan anggota komite

- Bahwa Berita Acara dalam rapat bersama tidak dibuatkan namun untuk notulen rapat terkait dengan keputusan besaran uang komite di buat oleh ibu WAHYUNI selaku pegawai tata usaha dan Saksi pernah mengikuti kegiatan Rapat anggota Komite.
- Bahwa pada tahun ajaran 2019 /2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 tidak pernah dilakukan rapat khusus terkait dengan pembahasan besaran uang komite tidak pernah dilaksanakan hanya saja pada saat pembagian rapot pada bulan Juni tahun ajaran disampaikan oleh kepala Sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.P.bahwa besaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000 dan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000.
- Bahwa perkiraan penerimaan seharusnya sebagai berikut :

Total siswa :**1.358** orang

- a. Kelas X 480 orang x Rp. 2.300.000,- =Rp. 1.104.000.000,
  - b. Kelas XI 424 orang x Rp. 2.300.000,- = Rp. 984.400.000,-
  - c. Kelas XII 454 orangx Rp. 2.300.000,- = Rp. 1.044.200.000,-
- Total 1.358 Orang = Rp. 3.132.600.000,-

- Bahwa berkaitan dengan penerimaan keuangan komite tahun ajaran 2019 /2020 sebesar Rp. 2.732.150.000, sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada penyidik, total pengeluaran sebesar Rp. 2.688.519.424,- terjadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 43.630.576,-. Bahwa selisih uang tersebut Rp. 43.630.576, karena digunakan untuk kepentingan pribadi namun perlu Saksi jelaskan bahwa selain Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi ada juga Saksi serahkan pada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama pak ALBERTUS JAO NDU, S.Pd lebih besar, dapat Saksi rincikan sebagai berikut :

- 1. HERMIN GILDUS RANGGA Rp. 246.150.000
- 2. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd Rp. 14.275.598
- 3. Saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 20.000.000,-

Total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.280.425.598,-

- Bahwa sebenarnya pertanggungjawaban tahun ajaran 2019/2020 terdapat selisih sebesar Rp. 280.425.598, namun keuangan komite tahun ajaran



2020/2021, yang sudah masuk lebih awal diantara bulan April-Juni 2020, sehingga menutupi penggunaan item kegiatan tahun ajaran 2019/2020

- Bahwa Saksi salah dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban sehingga menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahara atas kerugian keuangan tersebut sebesar Rp. 53.100.000,- bukti yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah benar, uang telah diterima oleh mereka namun untuk tanda tangan dalam bukti penerimaan banyak tidak tanda tangan karena banyak yang sudah menerima uang terlebih dahulu sebelum diterbitkan bukti penerimaan, kemudian ada juga yang membantu mengambil uang dari rekan kerja.
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Pak ALBERTUS JAO NDU, S.Pd, menggunakan keuangan komite, pelaksanaan foto dilaksanakan di sekolah, jumlah siswa yang membuat pas foto sebanyak 462 orang x Rp. 150.000/siswa,- = Rp. 69.300.000,-.
- Bahwa yang melakukan pemotretan terhadap siswa Saksi tidak mengetahui yang mengetahui pasti adalah pak ALBERT JAO NDU, S.Pd, karena beliau adalah Wakasek Kesiswaan yang dipercaya oleh kepala sekolah untuk mengurus pas foto siswa berdasarkan kwitansi pembayaran pada tanggal 14 Januari 2020.
- Bahwa pembayaran terhadap siswa berprestasi adalah sebagai berikut :-

a. MARIA KRISTINA PAU, sebesar	Rp. 150.000
b. MARIA FATIMA WULA, sebesar	Rp. 100.000
c. PATRICIA KEDA sebesar	Rp. 50.000
d. HILARIUS K. SARE sebesar	Rp. 150.000
e. ANJELIKA SANGGU sebesar	Rp. 100.000
f. ANISA KAWI sebesar	Rp. 50.000
g. GAITANO G. K. NANO sebesar	Rp. 150.000
h. NEATALIANA ENGGOE sebesar	Rp. 100.000
i. ANDREAS S. SE SUMBI sebesar	Rp. 50.000
j. GAITANO G. K. NANO sebesar	<u>Rp. 150.000</u>
	Rp. 1.050.000

Karena salah mengimput kwitansi tahun ajaran 2018/2019, sebesar Rp. 600.000,- kedalam pertanggung jawaban tahun 2019/2020, dan itu menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahara komite.

- Bahwa dapat Saksi tunjukan RAB pembangunan tersebut, penanggung jawab pembangunan Pak. GILDUS RANGGA, Pak AMADEUS GO.O TORI, S.Pd, dan Saksi sendiri namun, nama tukang dan tanggal mulai kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengetahui adalah pak AMADUES GO.O TORI, S.Pd, Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa ongkos tukang secara keseluruhan karena yang mengurus berkaitan dengan ongkos tukang adalah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan Saksi hanya diperintah untuk membayar uang muka tukang.

- Bahwa penebangan pohon kayu mangga sebanyak 11 pohon berlokasi di lingkungan dalam sekolah, penebangan pohon dilakukan pada 20 Juli 2019 sebanyak 7 pohon kemudian 4 pohon dilakukan pada tangga; 30 Juli 2019, yang menebang pohon-pohon tersebut PETRUS MBEI, beralamat di Megengura Ds. Embunggena, Kec. Ende, Kab. Ende, bukti pembayaran ada dan Saksi akan serahkan kepada penyidik.
- Bahwa penataan taman berlokasi di halaman SMK Negeri 1 Ende, kegiatannya yaitu pembelian Pot Bunga sekaligus bunga hidup seharga Rp. 350.000,- pembelian Pot dan bunga hidup bertempat dimana Jl. Nangka yang membeli Bunga tersebut yaitu Ibu KRISPINA AGNES NAMBA. Sedangkan bunga lain dibeli dari Mas SUGENG penjual bunga keliling sebesar Rp. 710.000,- yang membayar adalah Saksi, selanjutnya pembelian Bungan sebanyak 14 pohon RP. 850.000 bertempat di Bapak PETRUS MAU yang membeli bunga tersebut adalah Ibu KRISPINA AGNES. Kemudian transportasi muat pot bunga dan sampah Rp. 200.000,- dibayarkan kepada GUNAWAN tempat tinggal di Jl. Pekuburan. Bukti kwitansi akan Saksi serahkan.
- Bahwa kegiatan Ret-Ret dilaksanakan tanggal 27 November 2019, koordinator Pak. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd bertempat di Kematabor Mataloko, Jadi total pengeluaran untuk kegiatan Ret-Ret Mushabah dan Mushabah adalah sebesar Rp. 121.000.000 dan terjadi selisih tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.450.000 dan yang bertanggung jawab adalah Saksi sendiri selaku bendahara komite.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pembayaran kepada masing-masing dan bukti kwitansi Saksi serahkan kepada pemeriksa :
- Bahwa terhadap kegiatan pengembangan bakat siswa biaya yang dianggarkan Rp. 11.150.000 namun dalam rincian kegiatan total pengeluaran Rp. 8.450.000,- terdapat selisih Rp. 2.700.000 dan itu merupakan tanggung jawab Saksi dan Rp. 2.700.000.
- Bahwa Kegiatan musyawarah kepala sekolah menengah kejuruan dilaksanakan bergiliran di setiap Sekolah Kejuruan kegiatan dimaksud diikuti oleh kepala sekolah kejuruan di Kab. Ende, iuran tersebut dibayarkan kepada

Halaman 181 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKA JS NDU (Bendahara MKKS) mekanismenya Uang diserahkan oleh Saksi kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA kemudian barulah diserahkan kepada Ibu FRANSISKA, ketentuan untuk penggunaan uang komite untuk Kegiatan Kepala Sekolah tidak diperbolehkan berdasarkan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah, namun karena diperintah uang tersebut Saksi serahkan dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yang bisa Saksi pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.1.889.500 dan terjadi selih Rp. 216.000 tidak bisa dipertanggung jawabkan.

- Bahwa perbaikan kursi dan meja siswa, Rp. 4.805.000,- Perbaikan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 September 2019, perbaikan meja sebanyak 25 unit dan kursi 25 unit, dilakukan oleh tukang ABDUL RAJAB, beralamat di Kompleks Pertokoan belakang Lolita, yang bertanggung jawab adalah Saksi sendiri. Rincian penggunaan untuk ongkos kerja Rp. 1.500.000, dan pembelian bahan Rp. 3.305.000,-
- Bahwa Perbaikan toilet guru dan siswa (perbaikan pintu, pembelian 5 unit closed, dan pemasangan) , yang melakukan perbaikan ABDUL RAJAB, yang bertanggung jawab Ibu KRISPINA AGNES NAMBA, rincian pengeluaran Pembelian material Rp. 2.144.000,- ongkos kerja Rp. 500.000,-
- Bahwa pengangkutan kursi dan meja dari Sekolah SMK N 1 Ende menggunakan jasa sebesar Rp. 100.000 menggunakan mobil milik PIK UP Gunawan pelaksanaan pada tanggal 29 September 2019 yang bertanggung jawab Saksi sendiri selaku Bendahara Komite.
- Bahwa Pengarang lagu sdr. YAKOBUS PEU, kegiatan tanggal 25 September 2019, telah diserahkan uang oleh Saksi selaku bendahara dan bukti penyerahan uang Rp. 600.000,- sdr. YAKOBUS PEU, Saksi serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela sebesar Rp. 1.500.000,- pekerjaan pemasangan dilakukan pada tanggal 12 November 2019, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah sdr. DOMINGGUS, guna jasa pemasangan penanggung jawab KRISPINA AGNES NAMBA,S.Pd.
- Bahwa pelaksanaan Hari Ulang Tahun (HUT) SMK menggunakan uang komite sebesar Rp. 35.180.000,- Kegiatan HUT SMK dilaksanakan pada tanggal 11 September 2019, bentuk kegiatan yaitu perayaan HUT SMK, ahwa pada saat Ibu MARIA ANJALINA BIRE, menyerahkan total anggaran komsusmsi, Saksi menerima bukti rincian anggaran tetapi tidak

Halaman 182 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan bahwa sudah ada tanda tangan atau tidak. Kwitansi tersebut tidak ada tanda tangan menurut Saksi tidak sah tetapi uang tersebut telah diserahkan kepada ibu MARIA ANJELINA BIRE yang menyaksikan penyerahan uang adalah Ibu KRISPINA NAMBA sebesar Rp. 12.000.000,- sementara Rp. 15.000.000,- untuk pembelian 1 ekor sapi dan beras 10 karung, diserahkan kepada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA atas perintahnya. Rincian uang pembelian sapi sebesar Rp. 9.000.000,- sedangkan pembelian beras Rp. 6.000.000,- sisanya Rp. 3.180.000 untuk uang capek panitia.

- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada beberapa pihak namun semua itu diperuntukan untuk item penggunaan untuk konsumsi HUT sekolah.
- Bahwa Kontribusi untuk Hari Ulang Tahun Satpam Kab.Ende Tahun 2019, biaya konsumsi dan biaya pembelian snack sebesar Rp. 750.000.
- Bahwa Kegiatan Misa Syukur. Rincian pengeluaran transportasi ke Kamp. Ranga Beberapa Guru dan Siswa Rp. 300.000,- Stipendium (persembahan) Misa Kegiatan Misa kelas XII Rp. 600.000,-Snac Pastor Kepsek dan Wakasek Rp. 150.000,-Dan total pengeluaran untuk kegiatan Kerohanian Rp. 1.050.000.
- Bahwa Sewa Sound Sosialisasi radikalisme dari Kodim Rp. 350.000,- Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 30 Februari 2020 bertempat di Aula SMK 1 N Ende, pembayaran diserahkan uang kepada Satpam bernama YOHANES N. NUKUNG.
- Bahwa Kunjungan Kadis Pendidikan dan kebudayaan Prop. NTT, Rp. 6.625.000,- Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2020, Bahwa Yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah Saksi sendiri selaku bendahara komite, dan yang membeli konsumsi dan snack tersebut adalah saudari MARIA YOSEPINA WAWO tempat beli konsumsi dan snack tersebut Saksi tidak mentahui
- Bahwa Berdasarkan kwitansi pada tanggal 08 Januari 2022 bahwa yang menyerahkan uang duka tersebut adalah saudari KRISPINA A. NAMBA,Spd
- Bahwa Kegiatan Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong ruangan jurusan Ruang Perangkat lunak tersebut dan apakah kegiatan tersebut pengeluaran sebesar Rp. 3.300.000, Dapat dirincikan jenis pengeluaran adalah sebagai berikut :
- Biaya tukang pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong ruangan jurusan Ruang Perangkat lunak kepada saudara ALOSIUS RAGO sebesar Rp. 1.700.000,-

Halaman 183 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Pasir sebanyak 2 Rit sebesar Rp. 1.200.000, Pembelian batu sebanyak 2 Rit dan batako sebanyak 1 Rit sebesar Rp. 400.000 Dan yang mengerjakan kegiatan tersebut adalah saudara ALOSIUS ROGO
- Bahwa pekerjaan Lantai Halaman Sekolah dan jenis yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah saudara ALOSIUS ROGO dan berdasarkan nota serta kwitansi tempat pembelian material semen sebanyak 10 Sak dengan total harga Rp. 500.000,(Lima ratus ribu rupiah ) dan pembelian pasir sebanyak 2 Rit sebesar Rp. 1.200.000,- ( Satu juta dua ratus ribu rupiah).serta ongkos kerja sebesar Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah) total biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut adalah Rp. 5.700.000,- ( Lima juta tujuh ratus ribu rupiah ).
- Bahwa Instalasi air Bersih sebesar Rp. 4.827.000,
- Bahwa pengadaan barang (sarana dan prasarana) sebesar Rp. 1.558.000,- ( satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah ).
- Bahwa pembelian karangan bunga sebesar Rp. 1.670.000 ( satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah )
- Bahwa Saksi membeli 1 Buah Flas Disk 16 GB dengan harga Rp. 130 .000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah) dan dalam rangka kegiatan apa pembelian barang berdasarkan Nota pada tanggal 31 Juli 2019 Pembelian 1 Buah Flas Disk 16 GB dengan harga Rp. 130 .000 ( seratus tiga puluh ribu rupiah) di Toko ERAJAYA dipergunakan untuk menyimpan data yang berkaitan dengan kegiatan Pramuka
- Bahwa yang membeli senter dan dimana pembelian Senter penjaga malam sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah ) dan pembelian tersebut dilakukan oleh bendahara, pada tanggal 11 November 2019.bukti pembelian Saksi serahkan kepada pemeriksa.
- Bahwa pemasangan Finger Prin Sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ). Dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020 dan yang pasang adalah saudara FULBERTUS A. WENGGO.
- Bahwa pembeli 1 Buah Bola dan Net Voly seharga Rp. 900.000,- diserahkan uang kepada pak ALBERTUS JAO NDU dan pembelian tersebut terjadi pada tanggal 08 Agustus 2019.
- Bahwa Pengadaan bola lampu, Kabel sekolah seharga Rp. 1.513.000,- (Satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah ) Bahwa pemasangan trali jendela dengan biaya sebesar Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) berdasarkan Kwitansi pembayaran pada tanggal 13 Agustus 2019 yang

Halaman 184 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemasangan Trali jendela Ruangan RPS sebanyak 18 buah adalah Bengkel Las ANS saudara YOLTANES BONA.

- Bahwa Pengadaan mobiler (kursi dan meja) tahun 2018/2019, sebesar Rp. 96.000.000, bahwa yang mengerjakan kursi dan meja adalah sdr. AGUSTNUS NAGA, pengadaan dilakukan pada bulan Agustus 2019 pembayaran utang, dengan rincian
  - 120 unit kursi x Rp. 375.000,- = Rp. 45.000.000,-
  - - 120 Meja x Rp. 425.000,- = RP. 51.000.000,-
- Bahwa persiapan simulasi UNBK Rp. 300.000,- terdapat kegiatan yang dilakukan yaitu Pembelian makan siang dan malam untuk teknisi dan copy file CCTV, Ibu KRISPINA AGNES yang menyerahkan uang kepada sdr. FULBERTUS A. WENGGO.
- Bahwa konsumsi pemeriksaan bahan ujian naik kelas sebesar Rp. 3.800.000,- rincian Pembelian makan untuk guru-guru yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan soal ujian semua mata pelajaran, kegiatan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019, Bahwa supervisi Mutu Program OTKP sebesar Rp. 1.444.500, yang disupervisi yaitu terkait Program Studi OTKP, yang melakukan supervisi Saksi tidak mengetahui, Saksi menyerahkan uang kepada ibu EMI HERAWATI sejumlah Rp. 1.444.500, untuk konsumsi pembelian snack dan makan dan kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa upah kerja pembangunan 2 ruang UPS Rp. 130.000.000,- perlu Saksi jelaskan bahwa pada tahun 2018, Kepala Sekolah bersama Panitia mengusulkan kepada Kementrian P & K guna pembangunan ruang praktek siswa SMK N 1 Ende, kemudian pada tahun yang sama terjawab dengan diberikan transferan dana sebesar Rp. 512.400.000, pada saat pengusulan sekolah telah membentuk kepanitian antara lain :
  - Penanggung Jawab : HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd
  - Ketua Panitia : AMADEUS GOO TORI
  - Bendahara : WENSESLAUS DERTA, S.Pd
  - Konsultan : MARIO SERA BANUNAEK
- Bahwa pada saat uang tersebut masuk kerekening BOS yang mengelola uang tersebut adalah Pak GILDUS RANGGA dan Pak AMADEUS, Saksi tidak melibatkan diri karena Saksi sebagai bendahara komite. Pada tahun 2019 pekerjaan belum selesai sehingga kepala sekolah memerintahkan kepada Saksi untuk melakukan penalangan dana untuk beberapa item pekerjaan antara lain membayar tukang, bayar jasa konsultan dan pembelian material Total **Rp. 130.000.000,-** rincian uang Rp. 130.000.000, Saksi tidak dapat

Halaman 185 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincikan karena semua dilaksanakan oleh pak AMADEUS dan Pak HERMIN GILDUS RANGGA. Semua bukti kwitansi ada pada kepala sekolah dan pak AMADEUS. secara regulasi dan aturan tidak dibenarkan penggunaan uang komite sebesar **Rp. 130.000.000** untuk penggunaan pembangunan karena sudah di biayai menggunakan dana Bos tetapi atas perintah dari kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk memerintahkan membayar.

- Bahwa dana APBN untuk pembangunan ruang RPS harus ditanggulangi menggunakan uang komite dijelaskan bahwa sesuai aturan permendibud RI nomor 75 Tahun 2016, dana komite tidak boleh dishering ke dana APBN, namun Saksi membayar karena perintah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA.
- Bahwa Pembelian maintenance Komputer Lab. Persiapan UNBK Rp. 51.145.000,- Kegiatan tersebut tidak dilakukan, uang sebesar **Rp. 51.145.000**, digunakan untuk keperluan pribadi antara Saksi selaku bendahara dan saudara HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd selaku Kepala Sekolah,
- Bahwa terdapat pembelian computer sebanyak 10 unit sebesar Rp. 80.675.000,- ( Delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pembelian computer sekitar bulan Maret 2019 bertempat di Toko ERAJAYA sebanyak 10 Unit Computer dimana kepala sekolah lama an. HERMINGILDUS RANGGA memerintahkan bendahara BOS an. ISRATI MAHAR, Spd untuk Bon. yang membayar 10 Unit Computer tersebut adalah bendahara Pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA, Spd, computer tersebut di gunakan pada saat Ujian Nasional Berbasis Computer (UMBK) Nasional oleh Kelas XII dan computer tersebut disimpan di ruangan LAB computer.
- Bahwa pada saat Saksi memerintahkan bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd untuk membayar 10 (sepuluh) unit Computer tersebut Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap dari 10 ( sepuluh ) unit Computer tersebut dan sepengetahuan Saksi pembelian 10 ( sepuluh ) unit Computer tersebut menggunakan dana komite.
- Bahwa Saksi membayar 10 (sepuluh) unit computer menggunakan dana komite untuk pembelian 10 Unit Computer tersebut menggunakan keuangan komite dan atas perintah bapak Kepala sekolah an. HERMINGILDUS RANGGA, S.Pd di Saksikan oleh bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA, S.Pd.

Halaman 186 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biaya Rapat Guru dan pegawai dengan pengeluaran sebesar Rp. 18.860.000,- ( Delapan belas Juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Bahwa pengadaan kelengkapan Cleaning Service seharga Rp. 860.000,- ( delapan ratus enam puluh ribu rupiah) Bahwa pembelian pulsa data Pulsa Data Operator Operasional Sekolah sebesar Rp. 3.216.000,- Saksi tidak dapat membuktikan dan mempertanggungjawabkan pembelian pulsa data kepada masing-masing operator sebesar Rp. 3.216.000 dan itu menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahar komite,-
- Bahwa terkait tamu sekolah sebesar Rp. 6.472.000,- bahwa setiap tamu sekolah yang Saksi maksudkan yaitu setiap ada kunjungan pejabat kesekolah SMK N 1 Ende dilayani dengan diberikan snack dan terkadang makan, Bahwa terdapat selisih dalam pertanggung jawaban tamu sekolah Rp. 6.472.000,- namun yang dapat dipertanggung jawabkan Rp. 6.565.000,- terdapat Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3.000,- Terjadi kesalahan pengimputan pada saat pembuatan laporan
- Bahwa pembelian ATK pada SMK N 1 Ende sebesar Rp.2.229.500, Pembelian ATK yang bisa Saksi pertanggung jawabkan sesuai dengan Nota sebesar Rp. 2.079.500 dan sisanya sebesar Rp. 150.000 Saksi tidak bisa membentanggung jawabkan.
- Bahwa Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS SMK/SMA sebesar Rp. 2000.000,- ( dua juta rupiah) Pembelian makan dan minum Tamu, yang bertanggung jawab adalah MARIA Y. WAKA.
- Bahwa biaya Konsumsi Persiapan Sebelum Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun ajaran 2019 s/d 2020 rincian pembelian Konsumsi makan dan dan minum bertempat di Warung tegal II pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020 untuk 10 Orang Guru dengan total Rp. 2.100.000 ( Dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa Konsumsi Penguji Ujian sekolah Praktik Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020 Rincian sebesar Rp. 4.725.000 rincian :
- Pembelian Makan siang 58 Nasi Kotak X 2 Hari @ 35.000 total Rp. 4.060.00 , -
- Pembelian Snak 58 Kotak X 2 Hari @ 10.000 Total 1.160.00,-
- Jumlah total pembelian biaya komsulsmis adalah 5.220.000,- ( Lima juta dua ratus dua puluh dua ribu ) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Seksi komsusmi kegiatan an. ANA MARIA YUNITA,Spd dan pertanggung jawaban kegiatan tersebut ada pada seksi komsusmi saudara an. ANA MARIA YUNITA,Spd

Halaman 187 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsumsi Penyusunan Soal Ujian Sekolah Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 5.220.000,- ( lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan serta uang tersebut Saksi serahkan kepada ANA MARIA YUNITA, Spd selaku koordinator dan pertanggung jawaban ada pada saudari ANA MARIA YUNITA, S.pd.
- Bahwa Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK perhari tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.850.000, dirincikan sebagai berikut :
  - Pembelian Makan siang 45 Nasi Kotak @ 40.000 total Rp. 1.800.00 , -
  - Pembelian Snak 70 Kotak pagi dan sore @ 15.000 Total 1.050.00,-
  - Total pembelian biaya komsulsmis adalah 2.850.000,- ( dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Seksi komsusmi kegiatan an. ANA MARIA YUNITA, S.Pd. dan pertanggung jawaban ada pada saudari ANA MARIA YUNITA, S.pd.
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi pertanggung jawaban Saksi hanya menyerahkan Rencana anggaran Belanja kepada pemeriksa, bahwa Saksi tidak bisa menunjukan pertanggungjawaban kegiatan tersebut, dan uang tersebut Saksi serahkan kepada saudari ANA MARIA YUNITA, S.Pd total sebesar Rp.12.915.000 (dua belas juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah) dan pertanggungjawaban sudah di serahkan oleh saudari ANA MARI YUNITA, S.Pd.
- Bahwa kegiatan Ekstra kurikuler Bola Kaki Untuk mengikuti turnamen antar pelajar tingkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019, Total Biaya kegiatan tersebut adalah 5.340.000,- (Lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).- uang tersebut Saksi serahkan kepada MARTINUS NGARO selaku guru olah raga atas perintah wakasek Kesiswaan an. ALBERTUS JAO NDU naumun tidak ada kwitansi penyerahan kepada Saksi.
- Bahwa ada uang transportasi pemain dan Pembina, untuk kegiatan pertandingan Mudmaina CUP yang diselengaran pada bulan November tahun 2019 bertempat di Lapangan Suryadikara dan yang menjadi ketua pelaksana adalah Guru olahraga an. MARTINUS NGARO dan untuk menjadi pelatih dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi merincikan terkait dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 92.970.524- ( sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ratus dua puluh empat rupiah) dan guru-guru siapa yang melaksanakan perjalan Bahwa Berkaitan dengan keterangan Saksi menerangkan bahwa biaya perjalanan dinas keluar kota dan dalam kota untuk para Guru-guru tahun

Halaman 188 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 92.970.524 (sembilan puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ratus dua puluh empat rupiah) namun terjadi selisih dengan kwitansi yang saudara laporkan sebesar Rp.10.707.541 (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dijelaskan bahwa pada saat Saksi melakukan rekapan laporan pertanggungjawaban terjadi kesalahan pendobelan kwitansi dan salah hitung pembayaran uang saku yang dibayarkan kepada para guru yang melakukan perjalanan dinas sehingga selisih sebesar Rp.10.707.541 (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) Saksi tidak bisa mempertanggungjawabkan.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih biaya perjalanan dinas sebesar Rp.10.707.541 (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) bahwa yang bertanggung jawab atas terjadinya selisih Rp.10.707.541, (Sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) adalah Saksi sendiri selaku bendahara Komite dan uang tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi dan kebutuhan sehari-hari makan dan minum.
- Bahwa biaya Transportasi Pengantaran siswa PLK Ke Desa Kelitembu Kec.Kelimutu, Kab.Ende Yang membayarkan kegiatan tersebut adalah saudara KRISTINA AGNES NAMBA selaku bendahara pembantu, dan yang menjadi penanggung jawab adalah saudara ALBERTUS JAO NDU dan jumlah siswa yang mengikuti kegiatan PKL adalah 2 Orang.
- Bahwa biaya Transportasi sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) Untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDB untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, bahwa Kegiatan tersebut pada tanggal 17 Juli 2019 dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah saudara AHMAD selaku guru agama Islam.
- Bahwa pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk pengawalan Erobik MPLS, sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ). kegiatan tersebut pada tanggal 18 Juli 2019 dalam rangka pengenalan lingkungan siswa baru dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah saudara AHMAD selaku guru agama Islam. Jasa sound Sistem kegiatan MPLS,
- Bahwa pembayaran Jasa Sound System dalam rangka kegiatan Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2019/ 2020 sebesar Rp. 300.000, Kegiatan tersebut pada tanggal 19 Juli 2019 dalam rangka pengenalan lingkungan siswa baru dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah saudara ALBERTUS JAO NDU.

Halaman 189 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi), pengawas, korwas, dan pemateri, dalam rangka pengenalan lingkungan siswa baru Sebesar 1.350.000, Dapat Saksi jelaskan bahwa kegiatan tersebut pada tanggal 17 Juli 2019 dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut adalah FABIOLA S. IVONI kegiatan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa Pembelian 1 buah bola kaki kasa, sebesar Rp. 162.000,- (seratus eman puluh dua ribu) Saksi membeli di ROXY Swalayan pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp. 162.000,- (seratus eman puluh dua ribu)
- Bahwa kegiatan Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT, sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) Kegiatan tersebut pada tanggal 12 Januari 2020 dan Saksi serahkan kepada JOLITA DELIMA selaku bendahara MKKS/ SMA/MA.
- \Bahwa yang membayarkan pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANTONIUS TOLO, sebesar Rp. 129.800,- ( seratus dua puluh sembilan delapan ratus rupiah) pada tanggal 08 November 2019 dalam rangka berobat siswa an. . ALBERTUS VIANTONIUS TOLO karena sakit.
- Bahwa pembeli 15 Dos air Kelimutu untuk kegitan hari Pramuka, Sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan lima ribu rupiah) terjadi pada tanggal 14 Agustus 2019 pembelian 15 Dos air Kelimutu bertempat di Toko Sina Mas
- Bahwa pembelian 1 cup lens 18.55, sebesar Rp. 80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa rincian pengeluaran dan RAB Lanjutan Pembangunan Aula sebesar Rp. 502.127.000,- dirincikan pengeluaran berdasarkan RAB
- Total secara keseluruhan yang bisa Saksi pertanggung jawabkan adalah sebesar Rp.398.663.000,- dan sisanya sebesar Rp. 103.464.000 Saksi tidak bisa dipertanggungjawabkan
- Bahwa penjilidan istimewa laminasi 4 buku dan 1 buku ukuran F4 sebesar Rp. 130.000,- ( seratus tiga puluh ribu rupiah) Pada tanggal 01 November 2019 di toko UD, SYAFAAT foto Copy jalan Prof. Dr. WZ YOHANES
- Bahwa Pengadaan 2 baliho sebesar Rp. 310.000,- ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dilaksanakan pada tanggal 20 November 2019 bertempat di Mahameru Ende sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa pengadaan 1 Spanduk sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Pada tanggal 26 Nopember 2019 bertempat di Mahameru Ende sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 190 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghargaan purna bakti guru sebesar Rp. 8.500.000,- ( delapan juta lima ratus ribu rupiah ) Kegiatan tersebut dilaksanakan dan kegiatan purna bakti diberikan kepada:
  - a. Guru SUMIATI PUA GENO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - b. Guru SYARIPUDIN SALEH sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan kegiatan Sumbangan duka orang tua dari ketua komite sebesar Rp. 3,000.000,- (tiga juta rupiah) bahwa sumbangan duka orang tua dari Ketua Komite an. ABRAHAM BADHU sebesar Rp. 3000.000,- ( tiga juta rupiah ).
- Bahwa terkait dengan kebutuhan pengecatan ruang kepala sekolah Rp. 1.683.000, (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah ), Pembelian 5 Kg Cat tembok Epni sebesar Rp. 152.000,- ( seratus lima puluh dua ribu rupiah ) dan pembelian 5 Meter tamlak meja sebesar Rp. 90.000 di toko Nirmala Total biaya yang dikeluarkan untuk pengecatan ruang kepala sekolah Rp. 1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan biaya pengobatan siswa yang celaka sebesar Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ), Saksi tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut
- Bahwa jelaskan terkait dengan UKS /P3K sebesar Rp. 1.220.000, berkiatan dengan laporan pertanggung jawaban kwitansi dan nota belanja yang Saksi serahkan kepada penyidik terjadi selisih sebesar Rp. 400 ( empat ratus rupiah) dan itu menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahara.
- Bahwa pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi pada tanggal 19 Desember 2019 pembayaran Bon di toko sekolah yang diambil oleh kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) namun kwitansi pertanggung jawaban Saksi tidak bisa pertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2019/2020 dimana total penerimaan sebesar Rp. 2.732.150.000 dan total pengeluaran sebesar Rp. 2.688.519.424 dimana diperoleh selisih Rp. 43.630.578 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain, bahwa Saksi jelaskan total kerugian lain berdasarkan hasil uji petik berdasarkan pertanggung jawaban yang Saksi berikan;
- Jadi total kerugian antara selisih pertanggung jawaban dan penerimaan sebesar Rp.43.630.576kemudian dilakukan uji petik atas pertanggungjawaban

Halaman 191 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





yang diserahkan maka terdapat kerugian pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 386.524.441, dan kerugian lain yaitu uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS / kesra yang bayarkan kepada Guru dan pegawai PNS sebanyak 48 Orang yaitu sebesar Rp. 196.000.000- sehingga total kerugian yang ditemukan setelah dilakukan penjumlahan uji petik dan selisih pada pertanggung jawaban sebesar Rp. 626.155,017.

- Bahwa terkait dengan keterangan bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 386.524.441,- Dapat Saksi jelaskan terkait pengelompokan kerugian adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan/memperkaya orang lain Sebesar Rp. 134.000.000.
2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan Rp.201.378.841
3. Kwitansi Fiktif Sebesar Rp. 51.145.000.

- Bahwa terkait dengan keterangan bahwa uang yang gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 201.378.841, dapat dijelaskan oleh Saksi bahwa uang tersebut untuk kepentingan Saksi pribadi sehari-hari makan dan minum dan ada juga pengeluaran yang Saksi gunakan untuk kepentingan komite sekolah namun tidak ada bukti kwitansi/catatan yang bisa Saksi tunjukan.

- Bahwa Terkait dengan Dokumen Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana komite pada tahun ajaran 2019/2020 bahwa benar seluruh dokumen Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana komite pada tahun ajaran 2019/2020 Saksi sudah serahkan kepada penyidik.

- Bahwa Saksi menjelaskan kepada pemeriksa jumlah siswa dan penerimaan keuangan komite tahun Ajaran 2020 s/d tahun 2021, Dapat dijelaskan bahwa perkiraan penerimaan seharusnya sebagai berikut :

Total siswa : **1.358** orang

- a. Kelas X 576 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 1.038.800.000,-
- b. Kelas XI 442 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 795.600.000,-
- c. Kelas XII 410 orang x Rp. 1.800.000,-= Rp. 738.000.000,-

Total: 1.358 Orang = Rp. 2.572.400.000,-

- Bahwa penerimaan dana komite pada tahun ajaran 2019/2020 dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa berkaitan dengan pembayaran honor komite pada SMK N 1 Ende Tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 411.750.000 (empat ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti pembayaran yang saudara serahkan sebesar Rp. 386.750.000



(tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) maka terdapat selisih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penjelasan Saksi bahwa terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban sehingga menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahara atas Kekurangan keuangan tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) terkait dengan tanda tangan daftar Nominatif yang telah diterima oleh masing-masing guru banyak yang tidak tanda tangan karena banyak yang sudah menerima uang terlebih dahulu, sebelum diterbitkan bukti penerimaan atau nominatif kemudian ada juga guru lain yang membantu mengambil honor tersebut dan untuk honor tersebut menang benar sudah di terima oleh masing-masing guru sesuai dengan daftar nominatif tersebut.

- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Saksi pada pembayaran Honor teknisi sebesar Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar nominatif penerimaan honor teknisi sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan terjadi selisih sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), terjadi selisih dan kesalahan penghitungan pada saat Saksi membuat laporan pertanggung jawaban pembayaran Honor teknisi sebesar Rp. 28.100.000,- ( dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang sebenarnya penerimaan tersebut riil sesuai dengan daftar Nominatif yang diterima sebesar Rp. sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) nama guru honor yang menerima insentif tersebut ada 5 (lima) orang dan ada di daftar Nomonatif yang Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Saksi pada pembayaran Honor Dapodik sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar nominatif penerimaan honor Dapodik sebesar Rp. 1.800.000,- ( Satu juta delapan ratus ) dan terjadi selisih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), karena terjadi kesalahan penghitungan pada saat Saksi membuat laporan pertanggung jawaban pembayaran Honor Dapodik sebesar Rp. 19.500.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang sebenarnya penerimaan tersebut RIL sesuai dengan daftar Nominatif yang diterima sebesar Rp. 1.800.000,- ( delapan belas juta rupiah ) dan yang bertanggung jawab atas selisih tersebut adalah Saksi sendiri selaku bendahara komite.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Saksi pada pembayaran tugas tambahan PNS dan Non PNS sebesar Rp. 66.200.000,- (Enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) namun setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar nominatif pembayaran tugas tambahan PNS dan Non PNS Rp. 32.450.000,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadi selisih sebesar Rp. 33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena terjadi selisih kesalahan penghitungan pada saat Saksi membuat laporan pertanggung jawaban pembayaran tugas tambahan PNS dan Non PNS Sebesar Rp 33.750.000,- (Tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebenarnya penerimaan tersebut RIL sesuai dengan daftar Nominatif yang diterima sebesar PNS sebesar Rp. 66.200.000,- ( Enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan terjadi salah memasukan laporan pertanggung jawaban dalam satu bulan ke pertanggung jawaban tahun ajaran 2019/2020 sehingga terjadinya selisih dan yang bertanggung jawab atas selisih tersebut adalah Saksi sendiri selaku bendahara komite.
- Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Saksi pada pembayaran PNS dan lembur dalam jabatan sebesar Rp. 164.150.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) saudara dimohon untuk menjelaskan terkait dengan ketentuan atau regulasi sekolah yang mengatur tentang pembayaran uang tersebut serta jelaskan terkait dengan proses pembayaran lembur PNS dalam jabatan semua atas perintah dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd secara lisan dan tidak ada aturan secara tertulis dan proses pembayaran dilakukan setiap akhir tahun ajaran dibayarkan oleh Saksi sendiri selaku bendahara Komite.
- Bahwa berkaitan dengan klasifikasi jam lembur dari para Guru PNS maupun non PNS Saksi jelaskan bahwa terkait dengan Klasifikasi pembayaran jam lembur ketika para guru melakukan kegiatan mengajar melebihi jam mengajar dari jam 14.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita seperti pelaksanaan mengajar les sekolah, kegiatan ekstra kulikuler dan kegiatan sekolah yang dilakukan pada sore hari makan akan di bayarkan lembur dalam jabatan pada ahir tahun ajaran.
- Bahwa Saksi merincikan terkait dengan biaya perjalanan dinas guru pegawai sebesar Rp. 80.138.433- (delapan puluh juta seratus tiga puluh tuju ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) Bahwa berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban Saksi tentang perjalan dinas sebesar Rp. 80.138.433,- setelah dilakukan pengecekan oleh pemeriksa di temukan selisih sebesar Rp.

Halaman 194 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- bahwa terkait dengan selisih sebesar Rp. 2.700.000,- Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan dan menjadi tanggungjawab Saksi sendiri selaku bendahara Komite sekolah SMK Negeri 1 Ende.

- Bahwa yang menerima uang jasa penulisan ljasah sebesar Rp. 13.800.000, (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) adalah saudara Drs. A. SAMAD SOLO pada tanggal 05 September 2020 kegiatan tersebut dilaksanakan dan bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa guru yang mendapatkan biaya pembayaran kelebihan jam mengajar tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) Semester Ganjil 48 Orang sebesar Rp. 8.600.000,- dan semester genap 47 Orang sebesar Rp. 8.500.000 dan total sebesar Rp. 17.100.000 (tujuh belas juta seratus ribu rupiah) bukti pembayaran tersebut Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa berkaitan klasifikasi kelebihan jam mengajar dan berapa jumlah yang dibayarkan kepada masing-masing Guru bahwa klasifikasi kelebihan jam mengajar apabila melebihi jam normal mengajar dalam satu minggu 24 JP jika melibihi dari jam yang telah ditentukan maka akan mendapatkna insentif kelebihan jam mengajar dalam waktu 1 minggu maksimal 12 jam dan yang dibayarkan per/jam Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga masing guru guru yang menerima insentif bervariasi tergantung dari kelebihan per/jam mengajar.
- Bahwa guru yang mendapatkan biaya pembayaran kelebihan jam mengajar tahun pelajaran 2020/2021 sebesar Rp. 13.725.000 (Tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu), dengan rincian Semester Ganjil 45 Orang sebesar Rp. 7.050.000,- dan semester genap 46 Orang sebesar Rp. 6.675.000 dan bukti pembayaran tersebut Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa yang menerima honor input kwitansi penerimaan dana komite sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus) bahwa yang melakukan rekapan kwitansi dan mengimput kedalam data Computer terkait dengan pembayaran dana komite Saksi selaku bendahara komite dan dibantu oleh bendahara pembantu KRISPINA AGNES NANBA, dan MURSALIM MUHAMAD honor tersebut dalam pembelian makan dan minum pada saat melakukan kegiatan pengimputan kwitansi dan mekanisme pengimputan dilakukan secara manual dan dimasukan kedalam rekapan computer.
- Bahwa merincikan secara detail terkait dengan pembelian alat perabot pendukung sebesar Rp. 5.328.000 (lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yakni pembelian 1 buah lower, 1 buah cling web, dan ongkos

Halaman 195 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis, 2 kotak baterai everedy, 1 pasang baterai, 2 buah colokan terminal, 1 buah pluit, 1 buah terminal 5 meter, 1 pasang baterai, sebesar Rp. 1.184.500 (Satu juta seratus delapan puluh empat lima ratus rupiah) di toko Eliza.

- Bahwa Saksi membeli konsumsi untuk panitia praktek kerja lapangan dan pengantaran sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) di Warung tegal 2 dan yang menjadi peserta sebanyak 13 Orang dengan Rincian 4 (empat) orang menjadi penanggung jawab dan 9 (sembilan) Orang menjadi anggota daftar nama Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa Saksi membeli konsumsi untuk pemasangan jaringan internet penilaian ahir semester tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.995.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) di Warung tegal 2 sebesar Rp. 1.995.000,- Yang melakukan pemasangan internet tersebut adalah saudara. HULBERTUS A. WENGGU.
- Bahwa dilaksanakan peringatan hari pancasila sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 14.775.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2021 dan yang menjadi ketua panitia adalah ELISABETH D.S. SAKERA, S.E dan jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Lomba mirip bung karno, lomba pengucapan UU 1945 dan Lomba pidato dengan tema Pancasila rumah kita dari ende untuk indonesia Bahwa terkait dengan pengeluaran rapat dewan guru sebesar Rp. 20.585.000,- ( dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), Bahwa kegiatan pemberitaan dimedia sosial sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2020/2021, ada wartawan datang kesekolah untuk meliput kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah
- Bahwa dilakukan pembayaran tabloit dan majalah ,Flores Pos sebesar Rp. 580.000 (liam ratus delapan puluh ribu rupiah) pembayaran Flores Pos dilakukan setiap pertengahan bulan berjalan kepada petugas flores Pos yang datang kesekolah adapun rincian pembayaran berdasarkan kwitansi Bahwa pembayaran tabloit dan majalah majalah Pos Kupang sebesar Rp. 840.000 (delapn ratus empat puluh ribu rupiah), pembayaran Pos Kupang dilakukan setiap pertengahan bulan berjalan kepada petugas Pos kupang yang datang kesekolah adapun rincian pembayaran berdasarkan kwitansi Total pembayaran untuk Pos Kupang adalah sebesar **Rp. 840.000 (delapn ratus empat puluh ribu rupiah).**
- Bahwa pelaksanaan hari guru dan jenis kegiatan yang dilaksanakan sehingga mengeluarkan baiaya Rp. 8.550.000,- ( delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi jelaskan bahwa pelaksanaan hari guru dilaksanakan pada

Halaman 196 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2020 adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah syukuran antara para guru dan para siswa pengurus osis yang dilibatkan

- Bahwa Saksi merincikan terkait dengan pengeluaran lembur dalam rangka penggandaan soal ujian pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah )
- Bahwa pengeluaran biaya konsumsi dalam rangka lembur kedatangan inspektorat propinsi NTT sebesar Rp. 4.200.000 (Empat juta dua ratus) Saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuan dari dari inspektorat Provinsi datang ke SMKN 1 Ende datang untuk melakukan audit menajemn penggunaan dana Bos dan Komite tahun anggaran 2020 adapun rincian pengeluaran adalah sebagai berikut :

Total biaya yang di keluarkan dalam rangka lembur kedatangan inspektorat sebesar **Rp. 4.200.000 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah)** Bahwa pengeluaran biaya konsumsi kedatangan inspektora prov NTT sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) dan apa maksud dan tujuan dari isnpektorat datang ke sekolah, Saksi jelaskan bahwa maksud dan tujuan dari dari inspektorat Provinsi NTT datang ke SMK Negeri 1 Ende datang untuk melakukan audit menajemn penggunaan dana Bos dan Komite tahun anggaran 2020 Bahwa pembelian snack dalam rangka pengerjaan bak air sebesar Rp. 2.490.000,- bertempat di toko Top Bakery dan pembelian Makan di Rm.Khalilah total 2.480.000 terjadi selisih sebesar Rp. 10.000 dan itu menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahara komite.

- Bahwa kunjungan kepala dinas P& K Provinsi NTT menggunakan anggaran sebesar Rp. 9.100.000,- kegiatan tersebut pada tanggal 16 Januari 2021 Bahwa yang melakukan penebangan pohon dan dimana lokasi pohon sebesar Rp. 2.000.000 adalah saudara LAMBER dan lokasi pohon tersebut di sekolah ongkos potong pohon sebesar Rp. 2.000.000
- Bahwa yang mengerjakan adalah saudara PERDINAN DJAMI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi merincikan konsumsi ujian semester Ganjil pada tahun ajaran 2020/2021 sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 11.250.000, terkait dengan konsumsi ujian semester Ganjil pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 11.250.000 seharusnya menggggunakan dana Bos namun pada saat itu atas persetujuan bapak kepala sekolah HERMISN GILDUS RANGGA menyuruh membayar menggunakan uang komite sehingga pada tanggal 30 oktober 2020 Saksi menyerahkan uang tersebut kepada

Halaman 197 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA ROS DEWA sebesar Rp. 11.250.000 dan samapai dengan saat ini uang tersebut tidak di ganti dengan dana BOS

- Bahwa pembelian alat kesehatan sebesar Rp. 8.089.000, Pembelian alat kesehatan di Apotik Sido dadi Jalan Kelimutu, Kel. Potulando.adapun alat kesehatan yang dibeli adalah sebagai berikut :Total pembelian alat kesehatan adalah sebesar 4.378.000 dan tersejadi selisih sebesar Rp. 3.711.000 dan itu menjadi tanggung jawab Saksi sendiri selaku bendahara Komite.
- Bahwa bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020 sehingga mengeluarkan biaya Rp. 21.350.000,- ( dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dilaksanakan sertiap hari senin sampai dengan hari kamis untuk siswa kelas XII sedangkan guru yang mengajar les secarabergantian dan uang tersebut sebsar Rp. 21.350.000,- ( dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan kepada Dra. MARIA JOSEFINA WAWO dan ANA MARIA YUNITA,S.Pd dan dftar nominatif penerimaan honor Saksi serahkan kepada pemeriksa
- Bahwa daftar nominatif yang menerima honor Diklat sore yang Saksi serahkan kepada pemeriksa semua tidanda tangani oleh para guru yang menerima insentif Diklat karena daftar nominatif yang benar hilang dan Saksi kembali meminta daftar nominatif tersebut kepada ANA MARIA YUNITA,S.Pd dan setelah itu terkait dengan tanda tangan nominatif yang Saksi serahkan ke pemeriksa tersebut Saksi sendiri yang mendatangani secara keseluruhan sedangkan untuk Honor insentif Saksi serahkan kepada Dra. MARIA JOSEFINA WAWO dan ANA MARIA YUNITA, S.Pd
- Bahwa Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000 tersejadi kesalahan dalam pembuatan laporan tersebut yang seharusnya dalam laporan pertanggung jawaban berkaiatn dengan bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020 sehingga mengeluarkan biaya Rp. 21.350.000,- ( dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan Trnasfortasi maulid di anaraja sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) tahun ajaran 2020/2021, Kegiatan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) dan menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahara komite.-
- Bahwa Saksi tidak mengetahaui pembelian 6 buah baju kaos satpam sebesar Rp. 300.000 (tigaratus ribu rupiah) karena Saksi menyerahkan uang kepada satpam sekolah saudara ISMAIL AHMAD.
- Bahwa benar terjadi rekreasi kepala sekolah dan guru mengeluarkan biaya sebesar Rp. 960.000,- ( sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), tempat

Halaman 198 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekreasi di Nangalala Cafe dan pembelian makan dan minum sebesar sebesar Rp. 960.000,-( sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), bahwa menurut Saksi bahwa kegiatan rekreasi tersebut tidak diperbolehkan menggunakan dana komite namun atas perintah lisan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd untuk menggunakan uang komite tersebut.

- Bahwa terkait dengan pembayaran tabloit Ekspo sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2020/2021 di bayarkan pada tanggal 16 Oktober 2020 kepada LEO AJIS sebesar Rp. 240.000,- ( dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tabloit Ekspo.
- Bahwa yang melakukan pengadaan kostum olah raga guru pembina sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua taus ribu rupiah) Pembelian konstum tersebut bertempat di toko jaket kaos olahraga celana traning Pekalongan sebanyak 120 Pikces @ 160.000 sehingga total belanja sebesar Rp.19.200.000,- ( sembilan belas juta dua taus ribu rupiah) dan yang melakukan pembelian tersebut adalah Saksi sendiri
- Bahwa yang menjadi ketua panitia terkait dengan biaya pengeluaran dana shering penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 38.660.000. Tekait dengan rincian RAB Kegiatan tersebut shering penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 38.660.000 berada di sekretariat sekolah dan yang menjadi ketua panitia tersebut adalah saudara ALBERTUS JAO NDU,S.Pd.
- Bahwa dasar Saksi mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 38.660.000 untuk kegiatan Kegiatan tersebut shering penerimaan peserta didik baru dan apakah kegiatan tersebut di biayai menggunakan dana Bos atau komite dijelaskan bahwa dasar Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 38.660.000 atas perintah lisan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,spd setelah menerima RAB dari ketua panitia pelaksana ALBERTUS JAO NDU,Spd terkait dengan biaya kegiatan tersebut dibagi menjadi 2 dari dana Bos dan dana Komite sebesar Rp. 38.660.000 digunakan kegiatan seperti pembelian ATK, Biaya Komsumsi makan dan minum serta pembelian snck dan pembayaran transfortasi kepada para panitia kegiatan shering penerimaan peserta didik baru.
- Bahwa terkait dengan pengeluaran uang duka sebesar Rp. 1.100.000, di serahkan kepada ALBERTUS JAO. NDU pada tanggal 04 November 2020 karena ada siswa kelas X jurusan TKJ meninggal dunia namun nama siswa yang meninggal Saksi sudah lupa.

Halaman 199 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi ketua pelaksana In House Training ( ITH) tahun ajaran 2020/2021 dan rincian terkait dengan pengeluaran anggaran sebesar Rp. 23.430.000,- ( dua puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah adalah saudara FAKHRUDDIN UMAR, S.Pd terkiat dengan rincian pengeluaran tersebut Saksi bisa mempertanggung jawabkan nota sebesar 1.270.000,- dan sisanya sebesar Rp. 22.160.000 Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan, namun seingat Saksi uang tersebut Saksi serahkan kepada bendahara panitia an. KARINA KOWE namun tidak ada kwitansi.
- Bahwa pembelain Kostum dan satu bola voly pada tanggal 02 Februari 2020 di toko Kartini yaitu 11 Set Costum bola Voly sebesar Rp. 600.000,- dan pembelian 1 buah bola voly sebesar Rp. 275.000,- total sebesar Rp. 875.000,-
- Bahwa perbaikan kursi meja sebesar Rp. 2.000.000, yang membayarkan jasa perbaiki kursi tersebut bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA diserahkan kepada AGUSTINNUS NAGA.
- Bahwa Pembelian 2 lembar bendara,umbul-umbul dan tali rafia sebesar Rp. 80.000, pada tanggal 08 agustus 2022 dan uang tersebut Saksi serahkan kepada NOBERTUS N. ROGA.
- Bahwa sewa camera Canon sebesar Rp. 100.000 kepada saudara FERY pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam rangka kegiatan di sekolah .
- Bahwa tempat jilid Istimewa dokumen kurikulum Saksi tidak mengetahui pembayaran sebesar Rp. 150.000 serahkan kepada FABIOLA S. INONY.
- Bahwa terdapat pengadaan kipas angin berdiri sebanyak 10 buah sebesar Rp. 6.000.000, di toko USAHA MUDA Jalan Flores –Nangesa sebesar Rp. 6000.000 dimana kipas tersebut digunakan pada saat pelatihan STEM yang di ikuti oleh guru guru SMK dari Kabupaten Ende dan Ngada serta Nagekeo
- Bahwa pembelian Facesil sebanyak 17 buah, Saksi menyerahkan uang tersebut kepada INE FLORENSIA sebesar Rp. 340.000, kegiatan drumband pelangi nusantara dalam rangka apa sehingga mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 15.958.000, kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia adapunn rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Jasa transfortasi Drumband geladi dari sekolah sampai dengan Lapangan Perse PP sebesar Rp. 900.000
  - Rancangan anggaran kegiatan Drumband Saksi tidak bisa merincikan secara detail dan diserahkan oleh bendahara pembantu kepada STEVANIA G SEDA sebesar Rp. 11.568.000Dan total biaya kegiatan

Halaman 200 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latihan Drumband pelangi nusantara sebesar Rp. 12.468.000 Terjadi selisih yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.490.000,-

- Bahwa pembelian mesin foto copy canon tipe 5075 tukar tambah di toko ELIZA jalan Melati oleh HERMIN GILDUS RANGGA seharga Rp. 40.000.000 dan mesin foto copy tersebut berada di Ruangan unit produksi SMK N 1 Ende
- Bahwa kegiatan sewa Molen sebesar Rp. 5.000.000 dalam rangka kegiatan pengecoran Tiang Aula sekolah SMKN 1 Ende, diserahkan kepada AMADEUS GOO TORI. Pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020.
- Bahwa pembayaran bambu untuk pembangunan aula sebanyak 200 batang sebesar Rp. 5.000.000 diserahkan kepada saudara PETRUS MBEI, alamat Desa Ambunggena, Kec. Ende.
- Bahwa rincian Dana kontribusi kegiatan pendamping Rencana Kerja Anggaran Sekolah sebesar Rp. 750.000,- dianggarkan dari Komite bahwa hal tersebut tidak dibolehkan namun atas perintah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa perbaikan Laptop Thosiba senilai Rp. 500.000,- Ibu MARIA YOSEFINA bertempat di Mitra Komputer, pada tanggal 20 Februari 2021.
- Bahwa Untuk biaya Drumband penjemputan gubernur seingat Saksi dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 2 Ende, berkaitan dengan kegiatan tersebut yang diberikan kepada Saksi berupa nota rancangan anggaran sebesar Rp.1.431.000,-(satu Juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah), dan kewajiban Saksi adalah memberikan uang sesuai dengan rancangan tersebut, hanya saja saat itu tidak ada Kwitansi penyerahan Uang kepada saudara FULBERTUS ARKADIUS WENGGO (Selaku Kordinator) dan untuk kegiatan tersebut terdapat penambahan anggaran pembelian Sanck untuk peserta Drumband diluar dari nota rancangan anggaran sebelumnya dimana penambahan tersebut sebesar Rp.550.000,-(Lima ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Pembelian di Toko saudara bangunan beralamat di Jl. Wolter Mongonsi, padatanggal 2 November 2020 dan nota tersebut Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa Konsultan perencana bernama MARIO S. BANUNAEK, pada tanggal 18 Desember 2020, gambar masih ada di Konsultan Perencana, dasar Saksi melakukan pembayaran kerana perintah Kepala Sekolah secara lisan dan bisa dipertanggung jawabkan.

Halaman 201 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran panjar gambar WC, tanggal 18 Desember 2020, sebesar Rp. 12.000.000, kepada Pak MARIO.
- Bahwa pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan Aula sebesar Rp. 43.800.000,- dilakukan pada tanggal 17 November 2020 kepada YULIUS SOKOJO, sebesar Rp. 20.000.000, yang kedua tanggal 18 desember 2020 Rp. 13.800.000,- ketiga tanggal 7 Januari 2021 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa kepada pemeriksa Saksi memberikan penjelasan untuk pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang Saksi serahkan, namun pembelian Batako sebesar Rp. 43.800.000,- (Empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sebenarnya merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp. 43.800.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pengadaan mobiler sebesar Rp. 96.000.000,- Pembayaran kepada AGUSTINUS NAGA tanggal 17 September 2020 sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 25 November 2020 sebesar Rp. 46.000.000,-
- Bahwa pembayaran sisa pasir 10 ret sebesar 6.000.000, untuk kegiatan pekerjaan aula kepada saudara SERILUS SEPU pada tanggal 17 Juli 2020.-
- Bahwa dalam penjelasan Saksi terdahulu Saksi dalam pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang saudara serahkan, karena Biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp. 6.000.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dalam penjelasan Saksi terdahulu bahwa pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang Saksi serahkan, namun biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp.

Halaman 202 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.800.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).

- Bahwa pembayaran pembelian kerikil kerja aula sebesar Rp. 11.250.000,- kepada saudara SERILUS SEPU, pada tanggal 08 Agustus 2020.
- Bahwa dalam penjelsan kepada pemeriksa pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang Saksi serahkan, biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp. 11.250.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pembelian 2 (dua) peta kabupaten ende sebesar Rp. 800.000,- Pembelian tersebut dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2020, yang menerima yaitu sdr. MULYADI.
- Bahwa pembayaran sisa utang pengerjaan Aula sebesar Rp. 195.000.000,- Saksi tidak ingat saat itu pembayaran utang tersebut kepada siapa, dan rinciannya seperti apa, dikarenakan sampai dengan saat ini kwitansi terkait dengan rincian pembayaran utang tersebut tidak ada dan Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkannya.
- Bahwa jasa konsultan pembuatan revisi laporan RPS, sebesar Rp. 1.750.000 dibayarkan kepada sdr. MARIO BANUNAEK tanggal 24 November 2020.
- Biaya pemasangan alat jaringan internet Rp. 1.500.000,- ? kepada siapa dibayarkan kepada saudara HULBERTUS A. WENGGO, tanggal 30 November 2020
- Bahwa Pembelian 10 baju merah maron sebesar Rp. 300.000,- ? Dibayarkan kepada Toko AB Colektion pada tanggal 12 Januari 2021, kepada ibu ASTUTI, untuk kegiatan extra kurikuler siswa.
- Pembelian papa dan kayu usuk sebesar Rp. 12.200.000,- dibayarkan kepada siapa ? untuk kepentingan apa dibayarkan kepada Toko Rizal Karia Mebel, tanggal 11 Desember 2020.
- Lembur tanda tangan ijasah sebesar Rp. 3.000.000,- Saksi Tidak dapat mempertanggung jawabkan kegiatan tersebut.

Halaman 203 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian 1 (satu) buah printer canon MP207 sebesar Rp. 1.200.000, pembelian print canon MP207 di Toko Nirmala, tanggal 11 Oktober 2020, yang menggunakan printer tersebut sekarang bagian tata usaha.
- Pembelian 1 (satu) buah dinamo air sebesar Rp. 5.500.000,- Pembelian dilakukan pada tanggal 12 November 2020, di Toko Boga sari maumere Flores, kapasitas 80 Meter, untuk mengganti dinamo sumur bor yang rusak.
- Bimtek persiapan akreditasi sebesar Rp. 5.850.000,- Kegiatan dilaksanakan di SMK N 1 Ende tanggal 5 Januari 2021, rincian penggunaan keuangan yaitu pembelian snack dan nasi Snak sebesar Rp. 1.300.000, nasi Rp. 4.450.000,-
- Pembelian bendera merah putih sebesar Rp. 500.000, Pada tanggal 11 Januari 2021 pembelian bendera di Toko Rejeki sebesar Rp. 225.000, dan pada tanggal 12 Januari 2021, sebesar Rp. 225.000,-
- ATK Komite sebesar Rp. 13.305.000,- rincian :

Terdapat selisih Rp. 92.500,- tidak dapat dipertanggungjawabkan:

- Tamu sekolah sebesar Rp. 21.221.482,- dengan rincian antara lain Pejabat, orang tua wali siswa,
- Bahwa pembelian super sol pembersih lantai sebesar Rp. 2.250.000 yakni Pembelian 3 Jigen Topron pembersih lantai @ 750.000 x 3 Jirigen sebesar Rp. 2.250.000 pada tanggal 12 Januari 2021 di Cv.AHSAN
- Bahwa membayar utang tali ijuk sebesar Rp. 1.000.000,- Pembayaran Tali Ijuk 50 Rol @ 20.000 sebesar Rp. 1000.000,- kepada Saudara PETRUS MBEI Pada tanggal 19 Desember 2020 digunakan untuk ikat bambu pada saat pembangunan Aula SMK N 1 Ende
- Bahwa yang mengerjakan rumah dan pemasangan papan nama lampu LED Aula Sekolah sebesar Rp. 25.000.000,- Yang mengerjakan adalah saudara FERDINAD DJAMI tinggal di dijalan Udayana, lokasi pemasangan di dirumah dengan alamat jalan Udaya, setelah selesai dikerjakan kemudian di bawa kesekolah SMKN 1 Ende kemudian dipasang di Aula dan depan sekolah, Pembayaran pada tanggal 30 Oktober 2020.
- Bahwa pengeluaran rumah dan pemasangan papan nama lampu LED Aula Sekolah sebesar Rp. 25.000.000 Semua yang melakukan pembelian adalah saudara FERDINAD DJAMI Saksi hanya membayarkan biaya pengerjaan terkait dengan pemasangan papan nama lampu LED Aula Sekolah.
- Bahwa yang melakukan pembelian 1 Unit sarver sebesar Rp. 20.000.000,- serta digunakan untuk apa server tersebut, saksi jelaskan bahwa yang melakukan pembelian adalah saudara FULBERTUS AWENGGO Pada

Halaman 204 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2019 di Toko Mitra Sejati Computer Hi Tech Mall LT.1A No. 70B Surabaya Ho Hp. 081 232 646464 adapun jenis barang yang di beli

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembelian adalah saudara FULBERTUS AWENGGO bersama dengan Saksi selaku bendahara Komite Pada tanggal 10 Juli 2019 di Toko Mitra Sejati Computer Hi Tech Mall LT.1A No. 70B Surabaya Ho Hp. 081 232 646464 adapun jenis barang yang di beli
- Bahwa biaya pengiriman server dan Computer Rp. 572.800 biaya pengiriman barang Server dan Computer dari Surabaya menuju ke Ende menggunakan jasa Expedisi Darat Alam Jaya yang beralamat di jalan Kelimutu, pada tanggal 11 Juli 2019.
- Bahwa yang melakukan latihan Paskibraka sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp. 200.000 saudara AHMAD. S.Pd adapun uraian ada pengeluaran adalah : 12 bungkus Nasi @ 15.000 sebesar Rp. 180.000 dan pembelian Air minelar 1 Dos seharga Rp. 20.000,- jadi total biaya sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa yang melakukan pembelian lampu Philips sebesar Rp.9.474.000, Saksi membeli Lampu Philips pada tanggal 30 Juli 2021 di CV. Pesantenan Jln. Gatoto Subroto KM 4 Ende
- Pembelian Pulsa dapodik pada tanggal 03 Juni 2021 di Ud. Sinar Jaya Sebesar Rp. 388.000,-

Pembelian Pulsa pada tanggal 29 Juni 2021 di Ud. Sinar Jaya sebesar Rp. 210.000,- Pembelian Pulsa pada tanggal 01 September 2021 di Plaza Cellular Rp. 105.000,-

Total pembelian pulsa untuk operator dapodik sebesar Rp. 681.000, terjadi kelebihan pembelian pulsa sebesar Rp. 60.000,- karena terjadi kesalahan pengetikan pada saat pembuatan laporan pertanggung jawaban.

- Bahwa pembelian Baliho dan stempel seharga Rp. 620.000 dengan rincian Pembelian Panduk dan Stempel di Mahameru adapun rincian Bahwa pembelian karangan buka di Toko Istana Kembang Jalan Nangka-Ende Sebesar Rp. 200.000,- dan yang berduka Purnabakti Guru an. MIKAEL DEY,
- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan Biaya Tranfortasi guru pendamping Latihan Voly
- Bahwa biaya snack dan pembelian aqua pada saat melakukan latihan Bola Voly Rp. 4.800.000 rincian Biaya Tranfortasi guru pendamping Latihan Voly
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi pelatih karate adalah saudara KAREL L HABA latihan karate dilaksanakan di Aula Sekolah di ikuti oleh sebagian siswa SMKN 1 Ende dan sebagian dari orang luar dan yang

Halaman 205 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar honor adalah Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan Saksi selaku Bendahara Komite :

- Bahwa Biaya transportasi pembelian bambu untuk umbul-umbul di Loko Boko.Kec.Ndona pada tanggal 08 Agustus 2020 kepada RAMLAN sebesar Rp. 200.000,-
- Bahwa Untuk pembelian bahan bakar mesin potong yang bisa Saksi pertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yaitu pada tanggal 07 Juli 2020 dibayarkan kepada om FRENGKI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 September 2020 dibayarkan kepada saudara ISMAIL AHMAD sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk pembelian bahan bakar tersebut adalah sebesar Rp.200.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya administrasi Bantuan Sumur Bor Rp. 5.000.000,- Biaya administrasi bantuan sumur Bor tersebut Saksi tidak dapat mempertanggungjawabkan.
- Bahwa ulang tahun sekolah pada tanggal 11 September dilaksanakan hari ulang tahun sekolah yang mengurus keuangan adalah bendahara pembantuan. KRISFINA AGNES MAMBA langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- kepada saudara ALBERTUS JAO NDU terkait dengan jenis kegiatan pada saat HUT sekolah Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi sedang berada di Bandung dan yang lebih mengetahui adalah saudara ALBERTUS JAO NDU.
- Bahwa untuk Biaya perbaikan tersebut, tidak dapat Saksi pertanggungjawabkan.
- Pembayaran ke Kas Provinsi Rp. 7.500.000, Pembayaran tersebut Saksi lakukan pada tanggal 08 September 2020, melalui via transfer dengan menggunakan rekening pribadi Saksi yaitu Bank Mandiri dengan rekening tujuan transfer adalah Bank NTT
- Biaya Konsumsi selama 3 hari untuk 22 Orang guru dan siswa dalam rangka kegiatan bencana tanah longsor Rp. 3.250.000,- Kegiatan tersebut memang benar dilaksanakan selama kurang lebih 3 (tiga) hari, namun berkaitan dengan biaya konsumsi yang Saksi keluarkan saat kegiatan tersebut tidak dapat Saksi pertanggungjawabkan.
- Transportasi laut Larantuka menuju ke Adonara dalam rangka kegiatan bencana tanah longsor Rp. 2.000.000,Transportasi laut dari Larantuka menuju Waewerang menggunakan motor laut, dan pertanggung jawaban tersebut Saksi serahkan kepada penyidik

Halaman 206 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi darat dari Adonara ke Titik Bencana dalam rangka kegiatan benca tanah longsor Rp. 1.000.000,- Transportasi tersebut menggunakan 2 (dua) unit mobil pic up, dan pertanggung jawaban tersebut Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa Saksi jelaskan terkait dengan 2 (dua) kegiatan shering proyek work tersebut tidak ada kwitansi penyerahan dari Saksi kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, namun uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dihadapan panitia kegiatan, selanjutnya kepala sekolah yang merancang besaran insentif yang diberikan kepada masing-masing panitia kegiatan tersebut (Tidak dapat dipertanggung jawabkan).
- Bahwa untuk perbaikan instalasi ruangan tata niaga lama sebesar Rp.2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut dikerjakan oleh saudara TADEUS T. dan yang dapat Saksi pertanggung jawabkan berdasarkan kwitansi pengeluaran adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga memperoleh selisih sebesar Rp.2.220.000,- (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang Saksi tidak bisa pertanggung jawabkan,
- Bahwa terkait dengan biaya pengadaan foto siswa kelas XII sebanyak 382 siswa, dengan biaya sebesar Rp.25.000,- per/siswa diambil oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dengan menggunakan dana komite disaksikan oleh Saksi dan bendahara pembantu KRISPINA AGNES NAMBA hanya saja tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang tersebut, dikarenakan pengambilan uang tersebut dilakukan secara cicil (tidak dapat dipertanggung jawabkan).
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2021, Saksi melakukan pembayaran jasa konsultan kepada saudara MARIO SERA BANUNAEK, sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Pembayaran jasa konsultan tersebut tidak termasuk dalam biaya pembangunan aula sebesar Rp.502.127.000,- dikarenakan biaya pembayaran jasa tersebut dilakukan secara cicil berdasarkan permintaan dari konsultan MARIO SERA BANUNAEK dan biaya tersebut diambil dari dana komite tahun 2020/2021.
- Bahwa Yang mengerjakan tembok tersebut adalah saudara PETRUS LIMA, dimana pengerjaan tembok tersebut sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh ) meter. Bukti berupa kwitansi Saksi serahkan kepada penyidik guna dilakukan proses penyidikan.

Halaman 207 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbaikan Instalasi Listrik Ruang TN Lama sebesar Rp. 2.520.000, tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa pemasangan Instalasi Listrik diruang Kepsek, Bendahara dan Ruang Kurikulum sebesar Rp. 3.855.000 dan rincian jenis pengeluaran
- Bahwa yang melakukan pemasangan instalasi tersebut adalah saudara LEONARDUS, dimana untuk pembayaran jasa pemasangan instalasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.885.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (temuan/tidak dapat dipertanggung jawabkan).
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2020/2021 dimana total penerimaan sebesar Rp. 2.182.220.000, dan total pengeluaran sebesar Rp. 1.903.915.715 dimana diperoleh selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp 278.304.285 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 341.548.500, jika demikian saudara dimohon untuk merincikan kerugian lain setelah dilakukan uji petik total kerugian lain. Jadi total kerugian antara selisih RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp.278.304.285 dan hasil selisih uji petik data pertanggungjawaban sebesar Rp. 344.258.500 jadi total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada pertanggung jawaban sebesar Rp. 621.562.785. Terkait dengan keterangan saudara diatas bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp 341.548.500,- rincian pengelompokan kerugian sebagai berikut “ Untuk kepentingan/memperkaya orang lain? Sebesar Rp. 194.433.500 Untuk Kepentingan Pribadi adalah sebesar Rp.147.115.000.
- Bahwa uang yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.147.115.000 Saksi gunakan untuk kepentingan Saksi pribadi sehari-hari makan dan minum dan dan sebagai juga uang tersebut Saksi pinjamkan kepada guru PNG atau pegawai pada SMK N 1 Ende dan ada juga pengeluaran yang Saksi gunakan untuk kepentingan komite namun tidak ada bukti kwitansi yang bisa Saksi tunjukan.
- Bahwa terhadap keregian kepentingan kepentingan/memperkaya orang lain Sebesar Rp. 194.433.500 diberikan kepada Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd sebesar Rp. 194.433.500.
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi diatas bahwa Saksi memberikan uang pada tahun anggaran 2020/2021 kepada saudara HERMIN GULDUS RANGGA sebesar Rp. 194.433.500, Saksi memberikan uang tersebut dengan alasan untuk kepentingan pribadi seperti arisan keluarga dan keperluan untuk main judi.

Halaman 208 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- Bahwa total nilai kerugian pada tahun ajaran 2020/2021 yang tidak bisa Saksi pertanggung jawabkan setelah dilakukan uji petik ditambah dengan kerugian lain diluar dari pertanggung jawaban yakni bahwa selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp. 278.304.285,- dan kerugian setelah dilakukan uji petik adalah sebesar Rp 344.258.500 sehingga total kerugian pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 621.562.78
- Bahwa seluruh dokumen Laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana komite pada tahun ajaran 2020/2021 Saksi sudah serahkan.
- Bahwa Saksi dapat dijelaskan bahwa perkiraan penerimaan seharusnya sebagai berikut:

Total siswa : **1.428** orang

a. Kelas X	576 orang	x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 1.038.800.000,-
b. Kelas XI	575 orang	x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 1.035.000.000,-
c. Kelas XII	439 orang	x Rp. 1.800.000,-	= Rp. 790.200.000,-
Total	1.428 orang		= Rp. 2.864.000.000,-

Pada tahun Ajaran 2019/2020 Saksi selaku bendahara Komite membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) :

- Bahwa Saksi menjelaskan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana komite tahun rincian sebagai Ajaran 2021 /2022 sampai dengan bulan desember
- Bahwa berkaitan dengan keterangan Saksi terkait dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana komite tahun ajaran 2021/2022 Saksi menjelaskan pengadaan Golamba (gong) sebesar Rp. 18.000.000 dilakukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dan uang sebesar Rp. 18.000.000 diserahkan kepada saudara TEMY GAWA yang berlokasi di lorong SMA 1 Ende pada tanggal 10 September 2021
- Bahwa kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec.Ende Timur tahun 2021 sebesar Rp. 350.000 diberikan kepada saudara ELISABETH D.S. SAKERA pada tanggal 1 November 2021 sebesar Rp. 350.000.
- Bahwa yang melakukan sensor dan belah kayu adalah saudara FIAN dibayarkan pada tanggal 20 Agustus 2021 sebesar Rp. 3.500.000 dan kepada saudara SUARES XIMENES sebesar Rp. 1.500.000.
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000 untuk pengerjaan tembok lokasi Smea lama jalan Mbongawani Pembayaran tukang kepada saudara KAHARUDIN H.KATARI dalam rangka pengerjaan tembok yang berlokasi di Smea Lama pada tanggal 06 Juli 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian Material untuk pembangunan pagar di Smea lama jalan Mbongawani 3.600.000, pembelian pada tanggal 03 Juli 2021 kepada saudara KAHARUDIN H.KATARI sebesar Rp. 3.300.000 dan selisih sebesar Rp. 300.000 tidak bisa dipertanggung jawabkan
- Bahwa Saksi membeli lampu Philips Spiral sebesar Rp. 7.600.000, Saksi membeli Lampu Philips pada tanggal 13 September 2021 di CV. Pesantenan Jln. Gatoto Subroto KM 4 Ende Bahwa pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp. 32.000.000 dibayarkan kepada saudara MARIO SERA BANUNAEK pada tanggal 11 Agustus 2021.
- Bahwa pelunasan jasa konsultan gambar WC. Aula sebesar Rp.10.000.000 dibayarkan kepada saudara MARIO SERA BANUNAEK pada tanggal 11 Agustus 2021.
- bahwa Pembelian Cat tersebut di beli oleh saudara YUDI HERIYANTO namun nota tidak ada dan bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMNA yang menyerahkan uang sebesar Rp. 1.832.000 untuk pembelian cat pada tanggal 20 Agustus 2022.
- Bahwa insentif Gugus Covid sebesar Rp. 5.000.000, Yang menerima insentif adalah saudara saksi D. RESI S.Si pada tanggal 08 Agustus 2021 dan perannya adalah melakukan penyemprotan disinfektan kedalam ruangan kelas maupun kedalam ruang guru selama pandemi covid 19
- Bahwa pengeluaran persiapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala Sekolah sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp.1.175.000 Rincikan terkait dengan pengeluaran kegiatan Publikasi media sebesar Rp. 3.000.000
- Bahwa terkait dengan peringatan HUT Sekolah pada tanggal 09 September 2021 dan kegiatan yang dilakukan berupa syukuran sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp.7.750.000 dengan rincian sebagai berikut
- Bahwa kegiatan penelusuran tamatan dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000 ini merupakan salah satu Kegiatan sekolah dimana untuk memenuhi permintaan dari Dinas P&K Prov. NTT, yang mana kepala sekolah membentuk tim dengan ibu EMI ERAWATI sebagai ketua Kelompok kerja dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan biaya konsumsi sebesar Rp.1000.000,-
- Bahwa lembur persiapan ujian semester ganjil sebesar Rp. 1.070.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman 210 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan ini adalah ibu ANA MARIA YULITA, S.Pd dimana cetak dan penulisan ijasah siswa sebanyak 379 dengan pengerjaan masing-masing ijasah sebesar @30.000,- /siswa, dan tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan Pada tanggal 21 juli 2021 sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya konsumsi selama melaksanakan kegiatan lembur penulisan Izasah
- Bahwa dalam kegiatan cetak serta penulisan ijasah tahun ajaran 2020/2021 dianggarkan biaya sebesar Rp.11.370.000 menggunakan dana Komite sedangkan kegiatan tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari guru, Saksi jelaskan bahwa kegiatan cetak serta penulisan ijasah sehingga mengeluarkan biaya sebesar Rp.11.370.000 karena biaya konsumsi pada saat kegiatan lembur dalam rangka penulisan Izasah.
- Bahwa biaya pembelian Gorden untuk ruang ujian P3K sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pembelian dilakukan pada tanggal 11 September 2021, telah diserahkan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada ibu ANA MARIA YULITA untuk pembelian gorden dan jasa pemasangan , dengan rincian :
- Untuk biaya jasa pemasangan Gorden adalah sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan biaya pembelian gorden sebesar Rp.2.110.000 sehingga total pengeluaran sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembelian bensin untuk potong rumput sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa biaya lembur pengadaan dan pengepakan soal ujian smester ganjil sebesar Rp. 2.000.000,- tidak bisa mempertanggung jawabkan.
- Bahwa pembayaran majalah Flores Pos sebesar . Rp.660.000,-,
- Bahwa biaya rapat guru dan pegawai dan rincian penggunaan biaya sebesar Rp. 5.850.000,- Kegiatan tersebut Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan
- Bahwa pembayaran majalah Pos Kupang sebesar . Rp.350.000 dibayarkan pada tanggal 06 September 2021 telah dilakukan pembayaran majalah pos kupang Edisi Bulan April 2021 sampai dengan Edisi Bulan Agustus 2021, sebesar Rp 350.000,-
- Bahwa pembayaran majalah Flobamora sebesar . Rp.135.000,-dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 telah dilakukan pembayaran majalah Flobamora dengan rincian yaitu Edisi 88 sebesar Rp.45.000,- selanjutnya

Halaman 211 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edisi 86 sebesar Rp. 45.000,- dan Edisi 83 sebesar Rp.45.000,- dengan total secara keseluruhan sebesar Rp.135.000,-

- Bahwa biaya snack dan konsumsi lembur persiapan bahan magang calon pengawas sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kegiatan tersebut Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan.
- Bahwa pembelian 1 (satu) buah Tandon yang diperuntukan untuk Smea lama dilakukan pada tanggal 07 Juli 2021, bertempat di Toko Saudara yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian yaitu 1 (satu) buah tendon 1100 Liter sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kran air sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memperoleh biaya honorer atau lembur panitia PKL sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dapat dijelaskan bahwa untuk kwitansi pembayaran biaya honorer/lembur PKL tidak Saksi buat dan untuk pembayaran biaya honorer /lembur PKL diserahkan secara bertahap yaitu kepada ibu MARIA YENITA SORU sebesar Rp.17.545.000,- (tujuh belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kepada ibu FLORENTINA NOVITA TANDA melalui Via transfer ATM sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun untuk item penggunaan beserta nama –nama penerima biaya Honorer/lembur PKL tersebut tercantum sesuai dengan RAB hanya saja tidak ada pertanggung jawaban sama sekali (kwitansi penerima biaya honorer).
- Bahwa Saksi menjelaskan serta merincikan terkait biaya lembur rancang bangun Lab computer TKJ sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kwitansi pembayaran biaya lembur rancang bangun Lab computer TKJ sebesar Rp.2.850.000,- tidak Saksi buat, namun terkait dengan biaya lembur tersebut Saksi serahkan kepada ibu CUT MUTIA E.EVO,ST. pada tanggal 21 Agustus 2021 dan untuk item penggunaan serta penerima Insentif tersebut sudah tercatum di dalam RAB.
- Bahwa Saksi menjelaskan serta merincikan terkait biaya Konsumsi kegiatan Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende bahwa kwitansi pembayaran biayakonsumsi kegiatan Vaksinasi sebesar Rp 11.480.000,- tidak Saksi buat, dimana pembayaran tersebut atas perintah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd berdasarkan RAB yang diberikan.dan untuk pembayaran biayakonsumsi kegiatan Vaksinasi tersebut diserahkan secara bertahap kepada ibu MARIA OKTAVIA RIA, Amd. Sebagai Koordinator UKS, Bahwa pembayaran biaya input kwitansi penerimaan smester ganjil sebesar

Halaman 212 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.200.00,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya input kwitansi penerimaan smester ganjil sebesar Rp.10.200.000,- hanya berupa RAB sedangkan untuk kwitansi pembayarannya/penerima sendiri tidak Saksi buatkan, dimana untuk insentif itu sendiri dibayarkan kepada 3 (tiga) orang yaitu Saksi bersama saudari KRISPINA AGNES NAMBA dan OLGANIUS K. SENDA, dimana kami masing-masing mendapat insentif sebesar @3.400.000,-(tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terkait dengan biaya Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebesar Rp.70.060.000,- Kegiatan tersebut tidak bisa Saksi pertanggung jawabkan.
- Bahwa rincian biaya konsumsi sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada kegiatan seleksi kompetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende,
- Bahwa panitia seleksi non provinsi yang memperoleh insentif sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang menjadi panitia seleksi yang memperoleh insentif tersebut, hanya saja yang bertanggung jawab dalam pembagian insentif kepada panitia seleksi tersebut adalah saudari NUR SAIMAN ALI KASIM dimana insentif sebesar Rp. 7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada panitia seleksi ini berkaitan dengan kegiatan ujian seleksi P3K yang diselenggarakan di SMK negeri 1 Ende.
- Bahwa biaya lembur pengisian kuisioner BPK sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) biaya lembur pengisian kuisioner BPK sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) digunakan untuk pembelian konsumsi Bahwa pengadaan kursi 69 buah sebesar Rp.25.875.000 pengadaan tersebut terjadi pada tanggal 12 September 2021 dan telah dilakukan pembayaran terhadap 69 (ena puluh Sembilan) buah kursi yang diperuntukan untuk siswa/siswi SMK Negeri 1 Ende dengan rincian 69 kursi x @375.000 = Rp.25.875.000,- (dua puluh lima jta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa konsumsi rapat pengisian kuisioner sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah). terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021 telah dilakukan pembelian nasi ayam di Rumah Makan bangkalan dengan rincian : 18 Bungkus x @35.000 = Rp.630.000,
- Bahwa biaya service Laptop/computer sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terjadi pada tanggal 29 Agustus 2021, telah dilakukan service terhadap Laptop dan Komputer di Toko Era Jaya sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 213 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian snack dan makan untuk ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) pada tanggal 10 Oktober 2021 telah menyerahkan uang sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) kepada saudari SUHASNI untuk pembelian Snack dan makan Ujian.
- Bahwa pembelian snack serta konsumsi untuk peringatan hari guru dengan biaya sebesar Rp.4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - Bahwa pembelian baju olah raga guru sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) terjadi pada tanggal 05 September 2021 telah dilakukan pembelian Kostum Olahraga Guru dan pegawai, dengan rincian 40 (empat puluh) Pcs Kostum x @180.000,- = Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembelian baterai LPE 8 dan Memori Sandisk sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) terjadi pada tanggal 20 Desember 2021 telah melakukan pembelian terhadap baterai LPE 8 dan Memori Sandisk sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah),
- Bahwa pembelian snack untuk pemilihan pengurus osis telah dilakukan pembelian Snack dengan rincian 34 (tiga puluh empat) buah Box snack x @10.000,- = Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembersihan tembok yang berlokasi di belakang sekolah sebesar Rp. 150.000,- yang melakukan kegiatan pembersihan adalah saudara MAT pembayaran pada tanggal 1 september 2021 sebesar 150.000.
- Bahwa terkait dengan kegiatan pembuatan taman sebesar Rp. 15.000.000,
- Bahwa Saksi merincikan terkait dengan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp. 68.895.000 bahwa Nota terkait dengan pengadaaa alat kesehatan sebesar Rp. 68.895.000 bahwa kegiatan Teacer study dilaksanakan selama 2 Hari yaitu pada tanggal 08 November 2021 dan tanggal 09 November 2021, dan yang mengikuti Kegiatan Teacher study adalah Guru-guru SMK negeri 2 Ende, dimana nama-nama peserta teaccher study sudah tercatat didalam RAB dan berkaitan dengan pengeluaran biaya sebesar Rp.1.226.000,- tersebut digunakan untuk biaya konsumsi selama kegiatan,
- Bahwa yang melakukan pembelian Obat-obatan, Galon dan Dispenser sebesar Rp. 1.800.000, untuk pembelian obat-obatan, galon dan Dispenser tidak ada Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.1.800.000,-, yang ada hanya berupa memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd kepada Saksi dimana yang bersangkutan membutuhkan biaya sebesar

Halaman 214 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.800.000,- dan yang melakukan pembelanjaan barang-barang tersebut adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd sendiri.

- Bahwa biaya sewa tenda ujian P3K selama 5 Hari sebesar Rp. 1.500.000, pada tanggal 12 September 2021 telah menyerahkan biaya sebesar Rp.1.500.000,- kepada saudara ROBERTUS N. ROGA untuk biaya sewa tenda selama 5 (lima) hari untuk ujian P3K.
- Bahwa pengawalan siswa PKL tujuan ke Kabupaten Nagekeo sebesar Rp. 1.000.000, dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 dibayarkan kepada petugas yang melakukan pengawalan, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa kegiatan pemasangan closet dan shower di ruang WC Kepala sekolah sebesar Rp. 2.000.000, telah melakukan pembayaran pemasangan closet dan shower di ruang WC Kepala sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- dimana uang tersebut Saksi serahkan kepada kepala sekolah HELMINGILDUS RANGGA, S.Pd. namun kwitansi tersebut belum ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- Bahwa terkait penjaga material di Smea lama sebesar Rp. 1.000.000, Kegiatan tersebut Tidak dapat dipertanggung jawabkan,
- Bahwa kegiatan pengerjaan tembok sekolah sebesar Rp. 100.000,-, pengawasan kerja tembok tersebut ALBERTUS JAO NDU, saudara MANTO dan ISMAIL AAHMAD, dimana biaya pengawasan tersebut diserahkan oleh saudara KRISPINA AGNES NAMBA kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd. hanya saja kwitansi penerimaan tersebut belum ditanda tangani oleh Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa pembayaran honor Komite selama 6 Bulan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 228.400.000, Pembayaran honor komite selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.228.400.000,- telah dibayarkan sesuai dengan nama-nama yang tercatat didalam Nominative pembayaran, Bahwa terkait dengan pembayaran operator dapodik sebesar Rp. 6.500.000 Pembayaran Operator Dapodik selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.6.500.000,- telah dibayarkan sesuai dengan nama-nama yang tercatat didalam Nominative pembayaran,
- Bahwa terkait dengan pembayaran honor teknisi sebesar Rp. 12.300.000, pembayaran Honor teknisi selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.12.300.000,- telah dibayarkan sesuai dengan nama-nama yang tercatat didalam Nominative pembayaran,
- Bahwa pembelian pembersih lantai super sill sebesar Rp. 3.500.000,- dilaksanakan Pada tanggal 27 Juli 2021 telah dilakukan pembelian pembersih

Halaman 215 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai super sill sebesar Rp. 3.500.000,- dengan rincian 4 (empat) jirigen x @875.000,- = Rp.3.500.000,-

- Bahwa kegiatan Transportasi guru pendamping latihan bola voli sebesar Rp. 2.400.000,- telah dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2021 kepada saudara MAKSIMUS MUDA sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa biaya permen dan latihan bola Voli sebesar Rp. 1.200.000, telah dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2021 kepada saudara MAKSIMUS WUDA sebesar 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait dengan honor guru tamu komite sebesar Rp. 4.800.000, Telah dilakukan pembayaran honor guru tamu komite Bahwa Saksi menerangkan biaya pembelian permen dan aqua latihan karate sebesar Rp. 1.200.000, dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 2021 kepada saudara KAREL LUDJI HAWA sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terkait pembelian 1 buah karangan bunga sebesar Rp. 350.000, pada tanggal 27 November 2021 telah melakukan pembelian karangan bunga di Toko muflower yang beralamat di Jl. Melati atas, kel. Paupire, kec. Ende tengah, Kab.Ende, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Dimana pengadaan 1 Shower Closed sebesar Rp. 300.000 dilaksanakan pada tanggal 6 agustus 2021 telah melakukan pembelian di Toko wijaya yang beralamat di Jl. Banteng, kel. Potulando, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan kegiatan Pengadaan closet duduk sebesar Rp. 1.005.000, terjadi pada tanggal 06 Agustus 2021 telah dilakukan pembelian 1 (satu) buah Closet duduk di Toko UD. Fajar bangunan yang beralamat di jalan ahmad yani sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pembelian 1 Galon Mateks sebesar Rp. 115.000 tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa kegiatan pembelian 5 buah pisau potong rumput Rp. 500.000, pada tanggal 21 Juli 2021, yang dilakukan di CV. Pesantenan yang beralamat di Jl. Gatot sobroto-Ende.
- Bahwa terkait dengan Tamu sekolah sebesar Rp. 7.794.000, Nota terkait dengan pengeluaran biaya untuk tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- sudah lengkap dan Saksi serahkan kepada penyidik
- Bahwa Saksi menerangkan merincikan terkait dengan perjalanan dinas sebesar Rp.74.854.594,- bahwa untuk laporan pertanggung jawaban perjalan

Halaman 216 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas yang dilakukan di luar kota oleh para guru dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa pembayaran dana Duka Guru 4 Orang sebesar Rp. 8.550.000, Berkaitan dengan pembayaran uang duka sebesar Rp. 8.550.000 sebenarnya di potong melalui uang lembur PNS untuk tahun ajaran 2021/2022 uang lembur tersebut tidak dilakukan pemotongan dikarenakan karena pergantian kepala sekolah sehingga biaya dari dana komite yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikembalikan lagi.
- Bahwa terkait dengan pembayaran sumbangan Nikah sebesar Rp. 1.425.000, berkaitan dengan pembayaran sumbangan Nikah sebesar Rp. 1.425.000 sebenarnya di potong melalui uang lembur PNS untuk tahun ajaran 2021/2022 uang lembur tersebut tidak dilakukan pemotongan dikarenakan danya pergantian kepala sekolah sehingga biaya dari dana komite yang dikeluarkan tersebut tidak dapat dikembalikan lagi.
- Bahwa terkait dengan instalasi listrik 4 ruangan kelas dan Tes P3K sebesar Rp. 40.000.000, Total biaya pembelian pinstalasi listrik sebesar Rp. 11.664.000 dan dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 40.000.000 sehingga terjadi selisih Rp. 28.336.000 dan selisih tersebut menjadibtanggung jawab Saksi selaku bendahara.
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengerjakan tembok belakang PRS serta rincian terkait dengan item-item belanja sehingga mengabiskan dana sebesar Rp. 45.000.000 adalah saudara GUSTI NAGA dengan alamat di Lokoboko,Kec.Ndona Bahwa terkait dengan penyaringan kamar Wc sebesar Rp. 10.000.000, tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).
- Bahwa kegiatan tanda tangan laporan pendidikan sebesar Rp. 3.000.000 Tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).
- Bahwa terkait lembur lembur tanda tangan Izasah sebesar Rp. 2.000.000, tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).
- Bahwa pembayaran tamu sekolah di unit produksi sebesar Rp. 2.000.000, Tidak bisa dipertanggung jawabkan (yang bertanggung jawab kepala sekolah

Halaman 217 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMIN GILDUS RANGGA,Spd bersama dengan WENSESLAUS DERTA,Spd).

- Bahwa terkait dengan pinjaman para Guru Rp. 6.000.000, tidak ada kwitansi penyerahan oleh Saksi sebesar Rp. 6.000.000, namun berdasarkan rekapan Saksi terdapat nama-nama guru yang meminjam uang komite antara lain :
  - Ibu ELISABERT ELSE SACEIRA (PNS) sebesar Rp. 600.000
  - Ibu MARIA YASINTA PARE (Honor ) Sebesar Rp. 1.000.000.
  - Ibu ASTASI LAMBO (Honor) Sebesar Rp. 1.000.000.
  - Ibu VERONIKA LIDRIANA Sebesar Rp. 300.000
  - Ibu ASTUNI ABDUL KARIM (Honor) Sebesar Rp. 1.000.000.
  - Bapak MUHAMAD NUR (security) Sebesar Rp. 500.000
  - Bapak NIKOLAUS RADJA Alias FRENGKI Sebesar Rp. 500.000
  - Bapak MUHAMAD ROMAN\_( Security )Sebesar Rp.750.000
  - Bapak ISMAIL ELE VIEO (Security) Sebesar Rp. 800.000
- Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan keterangan Saksi dalam hal peminjaman keuangan keuangan komite di pinjamkan kepada orang lain dapat dijelaskan bahwa uang komite sebenarnya tidak boleh dipinjamkan, namun atas kebijakan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan Saksi sendiri sehingga uang tersebut di pinjamkan kepada orang lain, dan pinjaman tersebut merupakan Kas Bon buat para pegawai dan security dan apabila sudah waktunya gaji akan di potong sesuai dengan besaran pinjaman tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan saat ini uang pinjaman yang diberikan kepada orang lain sudah dikembalikan dengan saat ini Saksi tidak mengetahui terkait dengan pengembalian uang pinjaman tersebut karena sebelum pengembalian Saksi sudah serah terima kepada bendahara baru an. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021.
- Bahwa Saksi menerangkan pembayaran pekerjaan Pintu dan jendela ruang kelas dibawah aula Rp. 16.000.000 dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2020 kepada MARIANUS LETE selaku bengkel kayu.
- Bahwa kegiatan operasional kedatangan pegawai dinas P dan K Propinsi sebesar Rp. 2.000.000, Uang tersebut Saksi serahkan kepada kepala sekolah ALBERTUS JAO NDU pada saat kedatangan pegawai Dinas Provinsi NTT sebesar Rp. 2.000.000,
- Bahwa sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021 sebesar Rp. 350.000, tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Halaman 218 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran bambu untuk pembangunan Tembok dilokasi Smeaa sebesar Rp. 500.000 tidak dapat dipertanggungjawabkan
- Bahwa untuk intalasi jaringan pompa sebesar Rp. 1.518.000, Kegiatan tersebut dilaksanakan dan kwitansi terkait dengan pembelian Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa kegiatan pembelian papan cor kemiri 10 lembar seharga Rp. 800.000, bertempat di Ud Ferilob Jlan WZ. Yohanes pada tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp. 800.000.
- Bahwa pembelian 2 buah Alcare Thermomoter sebesar Rp. 861.000, tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 861.000.
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2021/2022 dimana total penerimaan sebesar Rp. 1.166.100.000 ,dan total pengeluaran sebesar Rp. 904.319.094 dimana diperoleh selisih antara RAB dan pertanggungjawaban Rp 261.780.906 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 217.182.410, dapat dijelaskan total kerugian lain berdasarkan hasil uji petik berdasarkan pertangung jawaban yang Jadi total kerugian antara selisih RAB dan pertangung jawaban Rp 261.780.906 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 217.182.410 dan total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada pertanggungjawaban pada tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 478.936.316
- Bahwa terkait dengan Saksi diatas bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp 217.182.410,-
- Bahwa terkait dengan keterangan Saksi diatas bahwa uang yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.147.115.000. Uang tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan Saksi pribadi sehari-hari makan dan minum ketempat hiburan karaoke serta main judi online dan ada juga pengeluaran yang Saksi gunakan untuk kepentinagn komite namun tidak ada bukti kwitansi yang bisa Saksi tunjukan
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa untuk keuangan yang Saksi serahkan pada HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd yang Saksi ingat Bahwa Saksi menerangkan bahwa kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd memerintahkan Saksi mengeluarkan uang komite, bahwa cara kepala sekolah memerintahkan Saksi untuk mengeluarkan uang komite adalah dalam bentuk memo atau Nota dinas berupa RAB dalam kegiatan yang menggunakan keuangan komite dan ada juga perintah secara lisan.

Halaman 219 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam penggunaan uang komite adalah selaku pengawasan dan koordinasi.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kepala Sekolah tidak diperbolehkan karena kapasitasnya hanya selaku pengawasan dan koordinasi.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada aliran dana kepada orang lain yang dipinjam oleh guru Bahwa Saksi menerangkan berkaitan dengan rekapan Saksi diatas uang yang saudara pinjamkan kepada para guru merupakan uang komite atau uang pribadi Saksi jelaskan bahwa uang yang dipinjam merupakan uang komite, dan pinjaman tersebut secara pribadi antara Saksi dengan para guru atau pegawai yang digunakan untuk kepentingan sehari-hari
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa sampai dengan saat uang yang dipinjamkan kepada para guru-guru tersebut sudah dikembalikan Bahwa Saksi menerangkan uang telah diterima dari guru-guru sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ende.
  - Bahwa Saksi menerangkan uang yang Saksi pinjamkan tersebut tidak mendapatkan bunga/keuntungan dan uang komite tersebut sebenarnya tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain namun karena atas perintah secara lisan kepala sekolah saksi HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd sehingga Saksi memberikan kepada para guru.
  - Bahwa Saksi jelaskan bahwa ada aliran dana komite yang Saksi serahkan kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
  - Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), menyerahkan uang tersebut kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE dan OKA sekitar bulan Mei 2022.
  - Bahwa bagaimana Saksi menyerahkan uang kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Wakil Bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sekitar bulan Mei 2022 uang tersebut Saksi titip kepada mantan kepala sekolah saksi HEMIN GILDUS RANGGA ,S.Pd dan Saksi antar kerumahnya di jalan

Halaman 220 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samratulangi, RT,002,RW.005,Kel. Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab.Ende sehingga uang tersebut diserahkan oleh saksi HEMIN GILDUS RANGGA ,S.Pd sedangkan uang yang Saksi serahkan kepada OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) Saksi serahkan sendiri sekitar bulan Mei 2022 bertempat di Pantai Kota Ratu, Kel. Kota Ratu,Kec. Ende Utara,Kab. Ende

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 13 Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan kegiatan audit terhadap dana bos dan dana komite SMK N 1 Ende dan yang menjadi temuan adalah terkait dengan pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan guru dan pegawai PNS sebanyak 48 Orang dengan total sebesar sebesar Rp. 196.000.000 yang seharusnya tidak boleh di bayarkan karena Guru PNS sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah.
- Bahwa Saksi terkait dengan kerugian sebesar Rp. 196.000.000 sebagai sudah dikembalikan oleh para Guru pegawai PNS lewat rekening komite yang baru dimana rekening tersebut di buka oleh Kepala sekolah yang baru an. ALBERTUS JAO NDU,S.Pd untuk memampung pengembalian uang tersebut
- Bahwa Saksi mendapat uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS dari bulan Januari s/d Juni 2020 dimana setiap bulanya Saksi menerima sebesar Rp. 900.000,- dengan sehingga total penerimaan sebesar Rp. 5.400.000,-
- Bahwa Saksi menerangkan uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS yang diterima oleh Saksi belum dikembalikan Rp. 5.400.000
- Bahwa Saksi menerangkan menggunakan uang komite untuk kepentingan pribadi dalam rangka pembelian aset pribadi, yakni pada tanggal 11 Oktober 2019 Saksi membeli sebidang tanah yang berlokasi di jalan Marilonga, Kel. Kota Raja, RT.003. RW.005 dengan Luas tanah 210 M2 dan baru Saksi membayar uang muka (DP) dengan menggunakan uang komite sebesar Rp. 50.000.000. Saksi menjelaskan bahwa harga tanah tersebut berdasarkan kesepakatan sebesar Rp.250.000.000 namun Saksi sepakat untuk membayar uang muka/Dp sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 11 Oktober 2019, dengan menggunakan uang komite dan belum sempat dilunasi dan perlu Saksi jelaskan bahwa pembelian tanah tersebut dibatalkan setelah adanya permasalahan yang Saksi hadapi terkait dengan penggunaan dana komite.

Halaman 221 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan alasan Saksi membatalkan pembelian tanah tersebut karena Saksi terlibat dalam masalah pengelolaan uang komite dan pembelian tanah tersebut belum sempat Saksi lunasi sehingga uang sebesar Rp. 50.000.000,- sudah Saksi ambil kembali dan pembelian tanah tersebut Saksi batalkan berdasarkan surat pernyataan pembatalan pembelian tanah pada tanggal 11 Agustus 2022 sehingga uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Saksi bahwa berdasarkan perhitungan AHLI Akuntan publik bahwa di temukan kerugian Negara terkait dengan pengelolaan keuangan Dana Komite SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp. 1.726.681.118
- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas kerugian Negara sebesar Rp 1.726.681.118 adalah saudara HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd selaku Kepala Sekolah dan Saksi sendiri WENSESLAUS DERTA,S.Pd selaku bendahara Komite sekolah
- Bahwa Saksi memiliki nomor Rekening tampungan Dana Komite SMK Negeri 1 Ende nomor rekening : 4651-01-010761-53-2 an. dana komite SMK Negeri 1 Ende.
- Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Bendahara komite SMK Negeri 1 Ende kepada bendahara Komite yang baru an. an. EPHIFANIA JELOYA, S.Pd pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 bertempat di SMK Negeri 1 Ende
- Bahwa untuk anggota komite pada SMK N 1 Ende tidak ada, yang ada hanya pengurus komite yang terdiri dari Ketua komite adalah Drs. ABRAHAM BADU, MS.i dan sekretaris komite adalah ALFONS TARI SE, S.E dan bendahara komite adalah Saksi sendiri dan perlu Saksi jelaskan lagi bahwa dalam pemilihan pengurus komite tersebut tidak dilakukan melalui rapat orang tua/wali siswa karena pengurus komite yang ditetapkan penunjukan langsung berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 yang ditunjuk sebanyak 3 (orang) terdiri dari Saksi sendiri Menjabat selaku bendahara bersatus sebagai tenaga pendidik pada SMKN Negeri 1 Ende, Ketua komite an. Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku pejabat pemerintah daerah, dan sekretaris komite an. ALFONS TARI SE, S.E selaku pejabat pemerintah daerah Kab.Ende.

Halaman 222 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk susunan pengurus komite sekolah yang terdiri dari ketua, Sekretaris dan bendahara tidak dipilih oleh anggota komite karena tidak ada anggota komite dan pemilihan pengurus komite tersebut tidak secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa proses pemilihan anggota/pengurus komite dilakukan dengan penunjukan langsung oleh kepala sekolah SMK N 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 setelah itu kami pengurus komite di perkenalkan oleh kepala sekolah pada saat terjadinya rapat orang tua ahir tahun ajaran setelah itu sampai dengan saat ini tidak pernah dilakukan perkenalan kepada orang tua wali
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd tidak melakukan pemilihan melauai rapat orang tua/wali siswa SMK N 1 Ende, namun sebelum di terbitkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 kepala sekolah pernah menyampaikan kepada Saksi secara lisan bahwa nanti Saksi menjabat selaku bendahara komite dengan pertimbangan bahwa Saksi dinilai layak untuk menjabat selaku bendahara karena Saksi merupakan guru aktif pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa pengurus komite tersebut diatas bukan merupakan Tokoh masyarakat dan berasal dari pakar pendidikan, namun untuk ketua komite an. Drs. ABRAHAM BADU, MS.i merupakan orang tua/ wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah SMK N 1 dan sekrestaris komite an. ALFONS TARI SE, S.E bukan merupakan tokoh masyarakat, pakar pendidikan dan bukan merupakan orang tua/ wali dari siswa yang masih aktif sedangkan untuk Saksi sendiri menjabat selaku bendahara komite bukan merupakan Tokoh masyarakat,orang tua/ wali dari siswa yang masih aktif dan pakar pendidikan tetapi sebagai guru aktif pada SMK N 1 Ende.
- Bahwa Saksi mau menjabat selaku bendahara komite, karena pengalaman dari kepala sekolah sebelumnya selalu menunjuk bendahar komite berasal dari dari Guru sekolah yang masih aktif dan Saksi tidak mengetahui terkait dengan aturan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah.

Halaman 223 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lakukan untuk mendapat acuan dalam melaksanakan fungsi sebagai pengurus komite sekolah dalam penerimaan dan menggunakan keuangan komite berdasarkan rencana pembiayaan yang tidak bisa dibiayai dengan menggunakan dana BOS hasil Rapat kerja kepala sekolah dan dewan Guru dan perintah lisan dari kepala sekolah terkait dengan penggunaan dadakan dana komite.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan masa jabatan pengurus komite yang di tunjuk oleh kepala sekolah berdasarkan SK nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sekitar selama 4 (tahun) 6 (enam).
- Bahwa tidak pernah ada pembaharuan terkait dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMKN 1 Ende terkait dengan kepengurusan komite selama sekitar selama 4 (tahun) 6 (enam)
- Bahwa masa jabatan keanggotaan/pengurus komite sekolah tidak sesuai dan menyalahi aturan ketentuan dalam pasal 8 Ayat (1) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah yaitu paling lama 3 tahun ( tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan karena Saksi menjabat selaku bendahara komite selama 4 (tahun) 6 (enam) bulan tidak pernah ada Pembaharuan Surat keputusan dari kepala sekolah tentang pengurus komite sekolah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Saksi HERMIN GILDUS RANGGA,SPd selaku kepala sekolah SMKN 1 Ende tidak melakukan pembaharuan terhadap surat keputusan tentang pengurus komite sekolah dan menurut Saksi bahwa perbuatan kepala sekolah dengan tidak melakukan pembaharuan terhadap SK tersebut sudah menyalahi aturan/ tidak sesuai dengan pasal 8 Ayat (1) Permendikbud RI nomor 75 tahun 2016.
- Bahwa pengurus komite pada tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan tahun ajaran 2021/2022 tidak pernah dilibatkan dalam menentukan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, memberikan pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan sekolah, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan menindak lanjuti keluhan, saran, kritik dan asfisasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat, karena pengurus komite, Ketua dan sekretaris Komite tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Halaman 224 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mentahui Saksi HERNMIN GILDUS RANGGA,SPd selaku kepala sekolah SMKN 1 Ende tidak meminta pengurus komite untuk melaksanakan fungsi dan tugas komite karena yang dilibatkan dalam kegiatan komite dalam penerimaan dan penggunaan uang komite Saksi selaku bendahara namun semua atas perintah dari kepala sekolah.
- Bahwa Komite sekolah tidak pernah membuat proposal yang diketahui oleh sekolah terkait dengan penggalangan dana komite pada tahun ajaran Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan saksi HERMIN GILDUS RANGGA, tidak meminta kepada pengurus Komite untuk membuat proposal yang diketahui oleh sekolah, kerena berdasarkan pengalaman dari pejabat /pengurus komite sebelumnya tidak pernah membuaat proposal yang ditunjukan kepada sekolah .
- Bahwa cara melakukan penggalangan dana / pembayaran uang komite adalah dengan cara peserta didik, orang tua/wali melakukan pembayaran pada awal tahun ajaran yang hendak mau bersekolah di SMKN 1 Ende atau yang sementara melanjutkan sekolah langsung melakukan pembayaran kepada Saksi selaku bendahara komite atau bisa di bayarkan lewat bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA,S.Pd dan ada juga peserta didik yang menitipkan pembayaran uang komite kepada wali kelas dari masing-masing siswa setelah itu wali kelas tersebut menyerahkan kepada Saksi selaku bendahara komite kemudian Saksi menyerahkan kwitansi pembayaran uang komite kepada peserta didik,orang tua/wali yang telah membayar uang komite , setelah penggalangan dana tersebut Saksi simpan di buku tabungan komite dan sebagian besar Saksi simpan di rumah untuk mempermudah dalam penggunaan apablia sewaktu-waktu digunakan untuk kepentingan komite maupun permintaan dari Kepala Sekolah .
- Bahwa Saksi mau menerima uang komite/ hasil pengalangan dana tersebut karena Saksi menjabat selaku bendahara komite berdasarkan surat keputusan kepala sekolah, dan Saksi selaku bendahara komite tidak membuat profosal yang diketahui oleh sekolah karena berdasarkan pengalaman dari pengurus komite sebelumnya tidak pernah membuat profosal.
- Bahwa yang melakukan penggalangan dana adalah Saksi sendiri selaku Bendahara Komite dan yang menyimpan keuangan tersebut adalah Saksi

Halaman 225 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri dan keuangan tersebut Saksi simpan di buku tabungan Bank BRI Komite sekolah, namun sebagai besar juga uang hasil penerimaan tersebut Saksi simpan di rumah untuk mempermudah dalam pengambilan atau penggunaan dari uang tersebut dan untuk penggunaan di setiap tahun ajaran berdasarkan RAPBS/RKAS dan ada juga penggunaan uang komite tersebut Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi seperti makan dan minum dan ada juga digunakan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA,SPd untuk kepentingan pribadi, pembelian tiket untuk keluarga dan pembelian sepeda motor Aerox warna merah dan pembelian cincin yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik guna kepentingan penyidikan.

- Bahwa cara saudara HERMIN GILDUS RANGGA,Spd meminta uang kepada Saksi secara langsung tunai, dan kadang juga Saksi antar keruamhnya serta lewat transfer kerekening pribadinya sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah.
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Saksi menerima uang sumbangan/komite dari peserta didik,orang tua/wali adalah karena Saksi menjabat selaku bendahara komite berdasarkan SK Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd nomor :139.a/ I 21.27/SMK.1/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 dan yang menjadi dasar Saksi menggunakan uang komite tersebut adalah berdasarkan RAPBS/RKAS disetiap tahun ajaran ada ada juga perintah lisan dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dalam penggunaan uang tersebut
- Bahwa untuk memo atau nota dinas dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,SPd di setiap pengeluaran yang menggunakan uang komite ada namun sudah hilang tetapi perlu Saksi jelaskan bahwa lebih banyak atau sering kepala sekolah tidak membuat nota dinas/atau memo yang ditunjukan kepada Saksi selaku bendahara komite dalam menggunakan uang komite dan lebih sering berupa perintah lisan
- Bahwa proses sumbangan /pembayaran uang komite adalah dengan cara peserta didik, orang tua/wali melakukan pembayaran langsung kepada Saksi selaku bendahara komite atau bisa di bayarkan lewat bendahara pembantu an. KRISPINA AGNES NAMBA,S.Pd dan ada juga peserta didik yang menitipkan pembayaran uang komite kepada wali kelas dari masing-masing siswa setelah itu wali kelas tersebut menyerahkan kepada Saksi selaku bendahara komite setelah itu Saksi menyerahkan kwitansi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang komite kepada peserta didik, orang tua/wali yang telah membayar uang komite.

- Bahwa hasil penggalangan dan tersebut Saksi simpan di buku tabungan BRI Simpedes unit Ndururea Ende dengan nomor Rek. 4651-01-010761-53-2 atas nama dana komite SMK Negeri 1 Ende dan sebagian besar uang tersebut Saksi simpan di rumah dan ada juga uang tersebut Saksi serahkan kepada saudara HERMIN GILDUS RANGGA, Spd sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah
- Bahwa Saksi menyimpan sebagian hasil penggalangan dana tersebut di rumah supaya memudahkan Saksi pada saat ada pengeluaran yang mendadak untuk kepentingan operasional sekolah.
- Bahwa untuk penggunaan hasil penggalangan dana/pembayaran komite Saksi bersama dengan kepala sekolah gunakan tidak secara tranfaran dan akuntabel karena Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan maupun pengeluaran dari hasil penggalangan dana /pembayaran dana komite kepada orang tua/wali pada setiap tahun ajaran.
- Bahwa anggota /pengurus SMK Negeri 1 Ende pernah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) pernah membuat namun sudah hilang dan setiap tahun Ajaran 2019/2020 sampai dengan desember 2021 Saksi selaku bendahara Komite pernah membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan Saksi serahkan kepada penyidik untuk keperluan proses penyidikan.
- Bahwa Saksi menggunakan keuangan tidak sesuai dengan RAPBS karena sesuai dengan perintah lisan dari kepala sekolah terkait dengan penggunaan keuangan komite sehingga menyimpang dari RAPBS yang sudah Saksi buat pada setiap tahun ajaran dan mekanisme penyusunan RAPBS adalah berdasarkan Rapat kerja kepala sekolah dan dewan guru yang dilaksanakan disetiap awal tahun ajaran.
- Bahwa yang menjadi acuan Saksi melakukan pembayaran menggunakan keuangan komite adalah berdasarkan RAPBS namun sebagian besar penggunaan tidak sesuai dengan RAPBS karena atas perintah lisan kepala sekolah sehingga terjadi penyimpangan penggunaan penggalangan dana dari RAPBS yang telah ditentukan serta dalam setiap pembayaran penggunaan hasil penggalangan dana tersebut atas seijin dan perintah dari kepala sekolah SMK N 1 Ende an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd

Halaman 227 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan hasil penggalangan dana untuk tahun ajaran 2021/2022 sebesar sebesar Rp. 1.166.100.000 Dapat Saksi jelaskan total kerugian lain berdasarkan hasil uji petik berdasarkan pertanggung jawaban yang Saksi berikan Jadi total kerugian antara selisih RAB dan pertanggung jawaban Rp 261.780.906 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 217.182.410 dan total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 478.936.316
- Bahwa hasil penggalangan mulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan desember 2021 digunakan oleh Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA dan Saksi selaku bendahara Komite digunakan untuk kepentingan operasional sekolah seperti pembayaran guru honor, pembelian ATK komite, pembelian computer ,biaya perjalan dinas para guru yang tidak mendapat biaya dari dana BOS serta pembangunan Aula pada sekolah SMK N 1 Ende dan kegiatan lainnya yang tidak didukung dengan menggunakan dana BOS dan perlu Saksi tambahkan bahwa selain untuk kegiatan tersebut hasil penggalangan dana ada yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi kebutuhan makan dan minum, dan ada juga Saksi serahkan kepada kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA untuk kepentingan pribadi pembelian yaham Motor Aerox dan pembelian cincin serta kebutuhan sehari-hari sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran sesuai dengan pasal 10 Ayat (5) Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah antara lain :
  - a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan
  - b. Pembiayaan program terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan
  - c. Pengembangan kegiatan sarana dan prasarana. Pembiayaan operasional komite sekolah.

Namun perlu Saksi pertegas bahwa ada penggunaan penggalangan dana disetiap tahun ajaran tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas seperti hasil penggalangan dana digunakan untuk kepentingan sehari-hari oleh Kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd maupun Saksi sendiri selaku bendahara komite, dan disetiap penggunaan penggalangan dana pada setiap tahun ajaran tidak mendapat persetujuan dari pegurus komite, karena di setiap penggunaan penggalangan dana tersebut Saksi tidak pernah meminta ijin kepada

Halaman 228 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua maupun sekretaris komite namun disetiap penggunaan penggalangan dana tersebut atas perintah dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan penggunaan penggalangan dana tersebut tidak secara tranfaran karena Saksi selaku bendahara tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan maupun pengeluaran dari hasil penggalangan dana tersebut pada setiap semester atau setiap tahun ajaran.

- Bahwa saksi an. HERMIN GILDUS RANGGA, Spd membiarkan penggunaan tidak secara tranfaran karena menurut Saksi kepala sekolah terlibat dalam penggunaan penggalangan dana tersebut sehingga kepala sekolah tidak pernah memerintahkan Saksi selaku bendahara membuat laporan pertanggungjawaban , dan Saksi selaku bendahara komite tetap melakukan pembayaran atas hasil penggalangan dana tersebut karena Saksi tidak bisa menolak perintah dari kepala sekolah karena berdasarkan kebiasaan kepemimpinan pengurus komite sebelumnya kepala sekolah berperan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa menurut Saksi penyebab penggunaan penggalangan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena kurangnya pengawasan dari kepala sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan tidak mengetahui aturan Permendikbut nomo 75 tahun 2016 tentang komite sekolah,dan yang melakukan penyimpangan penggunaan penggalangan dana tersebut adalah mantan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,SPd dan dan Saksi sendiri selaku bendahara komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa Saksi selaku bendahara komite sekolah menggunakan hasil penggalangan dana tersebut atas perintah dan persetujuan dari mantan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd untuk keperluan sehari-hari dan sebgain besar hasil penggalangan dana tersebut Saksi serahkan dan digunakan oleh mantan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,Spd digunakan untuk pembelian Motor yamaha Aerox dan pembelian cincin serta kebutuhan sehari-hari dalam pembelian tiket pesawat dal lain-lain .
- Bahwa dapat Saksi jelaskan di setiap pengeluaran maupun penggunaan dana komite pada setiap tahun ajaran mulai dari tahun ajaran 2019/2020 sampai dengan bulan desember 2021 mendapat persetujuan dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd dan ada aliran dana yang Saksi berikan kepada sekolah an.HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd antara lain sebagai berikut :

Halaman 229 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kepada orang tua/wali peserta didik maupun kepada kepala sekolah baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana
- Bahwa adapun alasan Saksi tidak membuat laporan pertanggungjawaban baik laporan kegiatan komite dan laporan hasil penggalangan dana kepada orang tua/wali dan peserta didik karena kelalain Saksi selaku bendahara belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan pengeluaran hasil penggalangan dana, disebabkan karena terlalu banyak uang yang Saksi serahkan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA namun tidak ada kwitansi penyerahan uang tersebut.
- Bahwa jumlah pembayaran sumbangan dari peserta di tentukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Spd pada setiap awal tahun ajaran baru pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000 ( dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan jangka waktu pembayaran mulai dari tahun ajaran baru dari bulan Juli tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya harus sudah dilunasi oleh peserta didi/orang tua/wali dan pembayaran sumbangan bersifat wajib dan harus dibayar oleh orang tua atau peserta didik dan untuk waktu pembayaran secara mencicil dalam semester.
- Bahwa waktu penetapan besaran sumbangan dilakukan pada saat ahir tahun ajaran sebelumnya biasanya bulan Juni pada tahun berjalan kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, SPd mengumumkan pada saat rapat dalam pembagian Rapot kenaikan kelas yang dihadiri oleh para orang tua/wali dari peserta didik yang bertempat di Aula SMKN 1 Ende dan di lapangan Apel SMK N 1 Ende mengumumkan terkait dengan besaran uang sumbangan pada tiap tahun ajaran yang harus dibayar oleh peserta didik, orang tua/wali .
- Bahwa karena pembayaran sudah ditentukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA bahwa pembayaran secara bertahap untuk tahun ajaran 2019/2020 tahap pertama dari bulan Juli samapi dengan Desember bulan berjalan di bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 ( satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 (satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan bulan desember 2021 besaran di tentukan juga oleh kepala sekolahan. HERMIN GILDUS RANGGA untuk Tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan tahap kedua sebesar Rp. 800.000,-

Halaman 230 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut yang Saksi ketahui besaran uang komite yakni .
  - Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Tahun Ajaran 2020/2021 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - Tahun Ajaran 2021/2022 Sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila ada peserta didik yang tidak dapat membayar/melunasi sumbangan pendidikan sangsi yang dikenakan adalah Rapot/Izasah dari siswa atau peserta didik tersebut tidak dibagikan oleh pihak sekolah.
- Bahwa tidak pernah dilakukan Audit oleh Akuntan publik namun perlu Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 Inspektorat Propinsi NTT melaksanakan kegiatan audit terhadap dana bos dan dana komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa terkait dengan pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan guru dan pegawai PNS sebanyak 48 Orang dengan total sebesar sebesar Rp. 196.000.000 yang seharusnya tidak boleh di bayarkan karena Guru PNS sudah mendapatkan tunjangan dari Pemerintah.
- Bahwa terkait dengan kerugian sebesar Rp. 196.000.000 sebagian sudah dikembalikan oleh para Guru pegawai PNS lewat rekening komite yang baru dimana rekening tersebut di buka oleh Kepala sekolah yang baru an. ALBERTUS JAO NDU,S.Pd untuk memampung pengembalian uang tersebut
- Bahwa yang Saksi lakukan sehubungan dengan keuangan komite adalah menerima sumbangan / dana komite dari peserta didik,orang tua/wali kemudian setelah Saksi menerima Saksi menyerahkan kwitansi pembayaran uang komite kepada peserta didik,orang tua/wali yang telah membayar pada setiap tahun ajaran dan Saksi langsung merekap hasil pembayaran kemudian uang tersebut Saksi simpan di buku tabungan komite dan sebagian Saksi simpan uang tersebut Saksi simpan di rumah, dengan tujuan untuk mempermudah pada saat pengeluaran berdasarkan RAPBS yang sudah Saksi buat pada awal tahun ajaran, namun ada beberapa aitem penggunaan tidak sesuai dengan RABPS seperti Kegiatan Kunjungan siswa kelokasi bencana alam di Kab.Flortim dan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dari kepala sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA, seperti untuk pembelian Satu unit Sepeda Motor Aerox dan pembelian ciccin,serta permintaan pribadi dari kepa sekolah yang mana

Halaman 231 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





uang tersebut Saksi transfer kerekening kepala sekolah, dan ada juga yang Saksi serahkan secara tunai sesuai dengan permintaan dari kepala sekolah serta ada juga yang Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi pinjamkan kepada para guru-guru di SMKN 1 Ende walaupun sampai dengan saat ini uang yang dipinjam oleh para guru sudah dikembalikan.

- Bahwa uang yang Saksi berikan kepada orang lain yang bersumber dari dana komite Saksi pinjamkan kepada wakasek kesiswaan an. Albertus Jao Ndu, Spd dan beberapa guru guru lain sedangkan keuangan yang bersumber dari dana komite yang sudah Saksi ambil Saksi berikan kepada kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa bahwa uang yang Saksi pinjamkan sebesar Rp. 39.325.598 kepada para guru atau pegawai pada SMK N 1 Ende sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan hari senin tanggal 07 November 2022 pada poin 06.
- Bahwa untuk honor komite pada SMKN 1 Ende tidak ada, dan yang ada pembayaran menggunakan dana komite sebagai berikut :
  - Honoh Guru/Pegawai;
  - Honor Operator dapodik;
  - Honor teknisi Sekolah;
  - Honor Kesra PNS.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembayaran honor guru/pegawai adalah kebijakan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA berkaiatn dengan ada guru.pegawai yang berstatus honor yang tidak bisa dibayarkan gajinya/honor menggunakan dana BOS karena belum masuk pada data Dapodik, sedangkan untuk pembayaran honor Operator Dapodik, Operator Teknisi sekolah dan Honor kesra PNS dibayarkan atas kebijakan kepala sekolah berkaitan dengan tugas tambahan dan pembayaran tersebut semua atas perintah Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, Spd.
- Bahwa ada aliran dana komite yang Saksi serahkan kepada Wakil bupati Ende an. ERIC REDE sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) dan OKA sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saudara Oka sekitar bulan Mei 2022 bertempat di Pantai Kota Ratu, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende. sedangkan kepada saudara Erik Rede Saksi menyerahkan uang tersebut lewat prantara dari mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA ,S.Pd dengan cara

Halaman 232 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



uang tersebut Saksi antar kerumahnya di jalan Samratulangi, RT,002,RW.005,Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kab.Ende dan uang tersebut di serahkan sendiri oleh mantan kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd kepada saudara Erik Rede sebesar sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) sekitar bulan Mei 2022

- Bahwa Saksi menyerahkan uang hanya kepada saudara Oka sebesar RP. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan kepada saudara Erik Rede sebesar 20.000.000 (dua puluh juta) dalam rangka meminta bantuan untuk menyelesaikan perkara yang Saksi hadapi.
- Bahwa benar terkadang kepala sekolah memberikan himbauan kepada guru-guru maupun siswa pada saat apel bersama, untuk membayar uang komite yang telah disepakati bersama dengan orang tua wali, kemudian terkadang juga kepala sekolah dalam rapat khusus bersama guru-guru menyampaikan agar para wali kelas membantu bendahara untuk melakukan tagihan kepada siswa yang menunggak pembayaran.
- Bahwa dokumen yang dibuat yaitu Saksi membuat rincian penerimaan dan tunggakan kemudian Saksi serahkan kepada guru wali kelas untuk membantu melakukan penagihan.
- Bahwa benar ada sanksi yaitu penundaan penerimaan rapor, Saksi mendapat informasi tersebut dari guru-guru wali kelas.
- Bahwa menurut guru-guru wali kelas bahwa yang memerintahkan adalah Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, namun saksi mengetahui dasar pemikiran kepala sekolah menyuruh menahan rapor siswa yang dilakukan oleh para wali kelas
- Bahwa setelah Saksi tidak menjadi bendahara komite SM K N 1 Ende, terhadap siswa yang menunggak pembayaran masih tetap melakukan pembayaran.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan pendapat cukup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Ahli dipersidangan sebagai berikut:

**1. Ahli DENDI ARTOSUWIRYO, SE**

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende, Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tahun 2022 dan jabatan ahli saat ini adalah Auditor Muda pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli untuk melaksanakan tugas dalam memberikan keterangan selaku AHLI pada saat ini adalah Surat Tugas Kepala BPKP, nomor : PE.03.02/ST-178/PW24/5/2023, tanggal 24 Februari 2023.
- Terkait dengan latar belakang pendidikan dan jabatan ahli, maka keahlian yang ahli miliki adalah dalam bidang Auditing dan Akuntansi termasuk juga dalam perkara ini yakni Akuntansi Pemerintah Pusat/Daerah.
- Bahwa pengalaman ahli pernah memberikan keterangan selaku ahli yang berkaitan dengan Keahlian, antara lain dalam kasus-kasus sebagai berikut:
  - a. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang Pengadilan atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan Pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK Negeri 5 Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2020.
  - b. Pemberian Keterangan Ahli pada sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).
- Bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1) UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;
  - d. Pengeluaran Negara;
  - e. Penerimaan Daerah;
  - f. Pengeluaran Daerah;
  - g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat

Halaman 234 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- Bahwa Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;
- Bahwa Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 huruf h dan i diatas, dimana penjelasan atas kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Ende yang berstatus sebagai sekolah Negeri dan merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, maka sumbangan/penggalangan dana oleh Komite Sekolah dapat dikategorikan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut. Sehingga ahli berpendapat bahwa sumbangan/ penggalangan dana oleh Komite Sekolah masuk kedalam ruang lingkup keuangan negara.

- Bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 pada Pasal 1 Nomor 1, yang menyatakan bahwa Sekolah adalah sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah. Dari pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa Sekolah Negeri merupakan sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 46 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

*Halaman 235 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesuai dengan Permendikbud 75 tahun 2016 pada Pasal 10 Ayat (1), Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan dan ayat (2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. serta pada ayat 4, yang menyatakan bahwa, Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. sesuai dengan peraturan diatas, ahli berpendapat bahwa dana hasil sumbangan/penggalangan dana yang dimasukan kedalam rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Yang dalam perkara ini adalah SMK Negeri 1 Ende dengan status sekolah negeri yang dikelola dan dimiliki oleh pemerintah, sehingga hasil penggalangan dana dalam bentuk sumbangan yang dilakukan oleh komite sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai ruang lingkup keuangan negara. Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa :

Pertama, Undang Undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.

Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan. Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari Keuangan Negara ;

- Bahwa ditunjukkan kepada Ahli Berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi terkait Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021:
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi di temukan fakta sebagai berikut
- Bahwa SMK N 1 Ende mengumpulkan keuangan Komite sekolah yang bersumber dari luran wajib orang tua/wali siswa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak didukung dengan anggaran dari pemerintah, adapun besaran uang komite sekolah untuk tahun pelajaran 2019/2020 yakni sebesar Rp. 2.300.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2020/2021 yakni sebesar Rp. 1.800.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2021/2022 yakni sebesar Rp.1.800.000, setiap siswa.

Halaman 236 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Adapun realisasi penerimaan Keuangan komite sekolah yang terkumpul yakni :

Tahun Ajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	Rp.902.450.000	Rp.811.100.000	Rp.1.018.600.000	Rp.2.732.150.000
2020/2021	Rp.851.170.000	Rp.722.650.000	Rp.608.400.000	Rp.2.182.220.000
2021/2022	Rp.436.500.000	Rp.344.950.000	Rp.384.650.000	Rp.1.166.100.000
Total secara keseluruhan				Rp.6.080.470.000
Enam miliar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah				

- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa dana komite sekolah dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan (Permendikbud 75 Tahun 2016) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Berdasarkan fakta sebagai berikut :
- Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
  - Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
  - Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai ketentuan yakni sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.
  - Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
  - Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende hasil penggalangan dari orang

Halaman 237 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.

- f. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite, kemudian penggunaan keuangan komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.
  - g. Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bandahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa pendapat ahli atas pertanyaan diatas, bahwa untuk kronologis nomor a.s.d nomor g, tidak sesuai dengan Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
  - Dan atas pertanyaan apakah dari kronologis diatas uang komite merupakan uang negara, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2, yang menyatakan bahwa, Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
  - Bahwa Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
  - Bahwa Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.dan AHLI berpendapat bahwa uang komite adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 2 diatas) dan dalam perkara ini, yang dimaksud fasilitas pemerintah adalah SMK Negeri 1 Ende.Selain itu, mengutip dari pernyataan Sdr. Siswo Sujanto selaku Ahli Keuangan Negara yang menyatakan bahwa, Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karea itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara

Halaman 238 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

**2. Ahli Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd**

Dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende, Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ;
- Bahwa benar ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Pendidikan diantaranya yakni pada kasus Penyalahgunaan Dana BOS pada SMK Mutiara Bangsa Reo- Manggarai diminta oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Tahun 2022.
- Bahwa tugas ahli sebagai Ahli berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. NTT nomor : 094/385/PK2/2022 atas Surat Permohonan Kepala Kepolisian Resor Ende dengan nomor : surat permohonan bantuan Ahli nomor : R/69/X/RES.3.5./2022/ Res Ende, tanggal 03 Oktober 2022.
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan tentang Komite Sekolah namun ahli akan memberikan keterangan sesuai keahlian dalam bidang keuangan BOS dan Keuangan Komite.
- Bahwa kaitan dengan Komite Sekolah diatur dalam Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa Komite dibentuk untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan itu, permendikbus mengatur tentang Kepengurusan Komite, tugas dan tanggung jawab serta peran, melakukan penggalangan dana dengan berbagai macam cara, kreatif inovatif, membuat laporan serta pertanggungjawaban.
- Bahwa Satuan Pendidikan adalah terdiri terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- Bahwa benar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga termasuk dalam satuan pendidikan.
- Bahwa Komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah / satuan pendidikan, berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan.
- Bahwa Tugas Komite yaitu :

Halaman 239 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
    - 1) kebijakan dan program Sekolah;
    - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
    - 3) kriteria kinerja Sekolah;
    - 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
    - 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
  - b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
  - c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.
- Bahwa Ahli menjelaskan :
1. Anggota Komite terdiri dari :
    - a. Orang tua/wali dari siswa yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
    - b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
      - 1) Memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
      - 2) Anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, tidak termasuk anggota/pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik.
    - c. Pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
      - 1) Pensiunan tenaga pendidik; dan/atau
      - 2) Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
    - d. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% (seratus persen) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
  2. Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
  3. Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:
    - a. Pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;

Halaman 240 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- b. Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
- c. Pemerintah desa;
- d. Forum koordinasi pimpinan kecamatan;
- e. Forum koordinasi pimpinan daerah;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
- g. Pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.
- Bahwa Mekanisme pemilihan anggota komite yaitu
  - 1). Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
  - 2). Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
  - 3). Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.
  - 4). Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
  - 5). Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
  - 6). Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.
  - 7). Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.
- Bahwa acuan ahli memberikan keterangan berdasarkan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.
- Bahwa Tidak ada aturan lain yang mengatur Komite Sekolah selain Permendikbud 75 Tahun 2016.
- Bahwa yang menetapkan Komite Sekolah yaitu Kepala Sekolah bersangkutan.
- Setelah Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah maka Komite Sekolah Segera membuat AD dan ART.
- Bahwa Komite Sekolah dapat menggalang dana, hasil penggalangan dana komite sekolah dibukukan pada rekening bersama, bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- Bahwa Hasil Penggalangan dana dapat digunakan untuk :
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Bahwa hasil penggalangan dana dapat digunakan setelah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite Sekolah.
  - Bahwa Komite Sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua / wali peserta didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
  - Bahwa dalam Aturan tidak diperbolehkan tenaga pendidikan dan kependidikan untuk menjadi anggota komite, pihak sekolah sebagai fungsi pengawasan tidak terlibat langsung dalam kepengurusan komite.
  - Bahwa jika dalam kepengurusan komite hanya berjumlah 3 (tiga) orang, tidak diperbolehkan karena dalam ketentuan itu mengatur bahwa kepengurusan komite minimal 5 (lima) orang dan maksimal 15 (lima Belas) orang.
  - Bahwa tidak diperbolehkan kepengurusan komite berasal dari Forum Pimpinan Daerah
  - Bahwa tidak diperbolehkan Pengurus komite dipilih tanpa melalui mekanisme demokratis / musyawarah dan atau melalui pemungutan suara harus melalui mekanisme rapat orang tua / wali siswa dan melalui pemungutan suara / musyawarah mufakat.
  - Bahwa Komite Sekolah harus memiliki AD dan ART karena AD dan ART adalah acuan untuk Komite bekerja.
  - Komite Sekolah dilarang menggunakan keuangan hasil penggalangan untuk kepentingan pribadi karena hasil penggalangan untuk menutupi kekurangan, hasil penggalangan dana juga untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, hasil penggalangan dana untuk Sarpras.
  - Bahwa tidak diperbolehkan hasil penggalangan komite sekolah digunakan untuk biaya transportasi guru-guru PNS kaitan dengan tugas utama sebagai guru PNS sudah dibayar oleh Negara sehingga tidak boleh ada pendobelan pembiayaan. Tetapi ketika ada lembur diluar jam KBM dapat dibiayai tetapi terlebih dahulu dituangkan dalam AD dan ART.
  - Bahwa tidak diperbolehkan keuangan hasil penggalangan digunakan untuk shering dana APBN dalam hal pembangunan fisik, penggalangan komite digunakan untuk shering APBN, karena dalam pembangunan fisik menggunakan keuangan APBN dalam RAB sudah dihitung.

Halaman 242 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komite sekolah wajib membuat laporan secara lisan dan tertulis dihadapan orang tua wali. Tidak diperbolehkan untuk tidak membuat laporan.
- Bahwa Kepala Sekolah Wajib mengetahui dan memahami tentang aturan Komite Sekolah permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.
- Peran kepala sekolah dalam komite sekolah adalah
  - Mengesahkan Kepengurusan Komite
  - Mengawasi Komite Sekolah dalam hal perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Kepala sekolah tidak boleh terlibat secara langsung terhadap pengelolaan keuangan komite karena kepala sekolah bukan pengurus komite.
- Bahwa Kepala sekolah dalam konteksnya adalah koordinasi / diskusi dengan komite sekolah kaitan dengan persoalan kekurangan pembiayaan di sekolah. Komite adalah mitra sekolah dan kepala tidak boleh terlibat langsung untuk mengatur uang komite.
- Bahwa Mekanisme penggunaan hasil penggalangan komite / uang komite antara lain:
  - a. Komite Sekolah harus membuat AD dan ART setelah membuat AD dan ART sudah termuat indicator perencanaan.
  - a. Komite sekolah harus memiliki perencanaan berdasarkan Evaluasi Diri Sekolah (ADS) terhadap 8 (delapan) standar pendidikan.
  - b. Dalam perencanaan harus membuat target untuk berapa tahun melalui Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT).
  - c. Setelah RKT barulah dianggarkan jadilah Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS).
  - f. Dalam pengelolaan harus secara transparan, efisien, akuntabel dan efektif.
  - g. Penatausahaan sampai pada pertanggung jawaban.
- Bahwa Komite sekolah mengelola keuangan sesuai perencanaan yang sudah disahkan, kemudian, Kepala Sekolah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan komite, dan sepenuhnya pengelolaan dilakukan oleh komite, kepala sekolah jika membutuhkan uang untuk keperluan sekolah maka harus tetap sesuai perencanaan sifatnya koordinasi.
- Bahwa hasil penggalangan harus dibukukan kedalam rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. Rekening bersama dimaksud yaitu diketahui oleh sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah.
- Bahwa penggalangan Keuangan Komite harus ditetapkan oleh komite sekolah, berdasarkan kesepakatan komite itu sendiri.

Halaman 243 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penentuan keanggotaan Komite SMK N 1 Ende, tidak melalui mekanisme pemilihan, tidak melalui musyawarah / pemungutan suara, adalah sebuah kesalahan besar, bahwa aturan tentang komite tertuang dalam permendikbud dan harus diikuti.
- Bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan Ketua Komite dari Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Asisten III setda Kab. Ende), dan menetapkan bendahara komite dari tenaga pendidikan dan kependidikan menurut ahli tindakan kepala sekolah tidak benar dan ada pengecualian dalam pemilihan pengurus komite yang tertuang dalam permendagri 75 Tahun 2016 tentang Komite sekolah Pasal 4 Ayat (3)
- Bahwa terkait Bendahara Komite Sekolah saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd, menyimpan uang di rumah dan menyimpan dalam lemari pakaian kemudian menyimpan sebagian uang pada rekening pribadi bukan rekening komite SMK N 1 Ende, menurut ahli tidak dibenarkan, bahwa keuangan hasil penggalangan harus dibubukan di rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah. Pasal 10 Ayat (4)
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende membuat Rencana Anggaran Biaya Sekolah (RABS) namun tidak ditandatangani oleh para pihak Ketua Komite, kepala sekolah dan bendahara. bagaimana menurut Ahli penggunaan keuangan harus mendasar pada RABS yang sudah disahkan.
- Bahwa tindakan Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd bersama Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dalam mengelola keuangan sekolah tidak pernah melibatkan Ketua Komite sdr. Drs. ABRAHAM BADU dan Sekretaris sdr. ALFONS TARI SE tidak dibenarkan dan kaitan dengan pengelolaan Keuangan Komite harus diketahui oleh Ketua Komite dan sekretaris baik dalam hal pengeluaran maupun pertanggung jawaban dan sebagai kepala sekolah tidak mengatur keuangan komite karena kepala sekolah tidak ada dalam kepengurusan komite ;
- SMK N 1 Ende dalam melakukan pembangunan sarana prasarana harus membuat RAB dan dipertanggung jawabkan secara transparan, akuntabel, evisien dan efektif.
- Bahwa dalam pertanggung jawaban keuangan komite tidak harus dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT
- Bahwa benar Keuangan Komite Masuk dalam keuangan Negara dasar hukunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa Hasil Penggalangan dana dapat digunakan untuk :
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;

Halaman 244 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
- c. pengembangan sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- Bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan antara lain :
  - 1) biaya satuan operasional pendidik dan tenaga kependidikan non PNS;
  - 2) biaya satuan operasional bahan dan alat habis pakai serta pemeliharaan dan perbaikan ringan;
  - 3) biaya peningkatan kompetensi guru kaitan dengan standar proses; dan
  - 4) biaya untuk sarana dan prasarana pendidikan.
- Bahwa Kegiatan-kegiatan dalam rangka pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan :
  - Kegiatan Extra Kurikuler
  - Akademik kaitan dengan peningkatan guru dan bimbingan terhadap peserta didik/ mengundang guru tamu dari luar.
- Bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan sarana prasarana
  - Rehap Ringan gedung sekolah
  - Rehap Berat gedung sekolah
  - Penambahan gedung baru sekolah
  - Pembangunan fasilitas olahraga
  - Fasilitas penunjang sekolah
- Bahwa kegiatan-kegiatan dalam rangka pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan
  - Belanja ATK Komite
  - Honor Pengurus Komite
- Bahwa RAPBS Komite Tahun Ajaran 2019/2020

RAPBS						JUMLAH
X, XI		XII				
ITEM KEGIATAN	TOTAL KEUANGAN	ITEM KEGIATAN	TOTAL KEUANGAN			
2	3	4		5		6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji tenaga honor, kerja dan tunjangan tugas tambahan	Rp	1.390.000.00 0	Gaji tenaga honor, kerja dan tunjangan tugas tambahan	Rp	1.390.000. 000	Rp	2.780.000.000
Kelebihan jam mengajar	Rp.	30.000.000	Kelebihan jam mengajar	Rp	30.000.00 0	Rp	60.000.000
Pembangunan lanjutan aula SMKN 1 Ende	Rp	200.000.000	Pembangunan lanjutan aula SMKN 1 Ende	Rp	200.000.0 00	Rp	400.000.000
Pengadaan server Dapodik	Rp	40.000.000	Pengadaan server Dapodik	Rp	40.000.00 0	Rp	80.000.000
Pengadaan mobiler meja kursi siswa runggakan 2018/2019	Rp	96.000.000	Pengadaan mobiler meja kursi siswa runggakan 2018/2019	Rp	96.000.00 0	Rp	192.000.000
Pengadaan Komputer	Rp	150.000.000	Pengadaan Komputer	Rp	150.000.00 0	Rp	300.000.000
Perbaikan Komputer Server	Rp	40.000.000	Perbaikan Komputer Server	Rp	40.000.00 0	Rp.	80.000.000
Pembangunan 1 Ruang Kaprog	Rp	125.000.000	Pembangunan 1 Ruang Kaprog	Rp	125.000.00 0	Rp.	250.000.000
Sharing RPS	Rp	100.000.000		Rp		Rp.	100.000.000
Pulsa Data Operator Sekolah	Rp	5.000.000	Pulsa Data Operator Sekolah	Rp	5.000.000	Rp.	10.000.000
Perbaikan Kursi dan Meja Siswa	Rp	10.000.000	Perbaikan Kursi dan Meja Siswa	Rp	10.000.00 0	Rp.	20.000.000
Operasional Bidang Wakasek dan	Rp	50.000.000	Operasional Bidang Wakasek dan	Rp	50.000.00 0	Rp.	100.000.000

Halaman 246 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Keahlian			Program Keahlian				
Biaya Rapat Guru dan Pegawai	Rp	10.000.000	Biaya Rapat Guru dan Pegawai	Rp	10.000.000	Rp.	20.000.000
Perjalanan Dinas	Rp	166.000.000	Perjalanan Dinas	Rp	166.000.000	Rp.	332.000.000
Lomba Keterampilan Siswa	Rp	10.000.000		Rp		Rp.	10.000.000
UKS BP/BK	Rp	3.000.000	UKS BP/BK	Rp	3.000.000	Rp	6.000.000
Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Rp	25.000.000				Rp	25.000.000
Pengadaan Mesin Foto Copy	Rp	50.000.000				Rp	50.000.000
Kegiatan KerohanianGereja dan Mesjid	Rp	10.000.000				Rp	10.000.000
Bentang Lantai Halaman Depan	Rp	5.000.000				Rp	5.000.000
Pengecatan dan Penataan Ruang	Rp	10.000.000				Rp	10.000.000
Penataan Taman	Rp.	10.000.000				Rp	10.000.000
Mengikuti Lomba Kesiswaan/Turnamen Olahraga	Rp.	15.000.000				Rp	15.000.000
Perpisahan Dengan Kelas XII	Rp.	30.000.000				Rp	30.000.000
Tamu Sekolah	Rp.	50.000.000		Rp.		Rp	50.000.000

Halaman 247 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional MKKS Tingkat SMK	Rp.	4.550.000	Operasional MKKS Tingkat SMK	Rp.	4.550.000	Rp.	9.100.000
Pembayaran Koran dan Tabloid	Rp.	3.120.000				Rp.	3.120.000
Lembur	Rp.	20.000.000		Rp.		Rp.	20.000.000
Reward Siswa Berprestasi	Rp.	5.000.000	Reward Siswa Berprestasi	Rp.	5.000.000	Rp.	10.000.000
HUT SMKN 1 Ende	Rp.	40.000.000		Rp.		Rp.	40.000.000
Perbaikan Lab	Rp.	5.000.000	Perbaikan Lab	Rp.	5.000.000	Rp.	10.000.000
			Pas Foto Peserta UN	Rp.	71.700.000	Rp.	71.700.000
			Ret-Ret dan Muhasabah	Rp.	119.500.000	Rp.	119.500.000
			Biaya Bimbingan Sore	Rp.	30.026.000	Rp.	30.026.000

- **Bahwa Penerimaan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2019/2020**  
**KELAS X**

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 77.150.000	Rp 67.000.000	Rp.10.150.000	
2	X B A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN B	Rp. 82.650.000	Rp.67.000.000	Rp.15.650.000	
3	X C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 69.300.000	Rp.65.650.000	Rp.3.650.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.75.100.000	Rp.71.100.000	Rp .4.000.000	

Halaman 248 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.304.200.000</b>	<b>Rp.270.750.000</b>	<b>Rp.33.450.000</b>	
5	X A AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.71.350.000	Rp.68.650.000	Rp.2.700.000	
6	X B AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.950.000	Rp.65.400.000	Rp.10.550.000	
7	X C AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.650.000	Rp.70.050.000	Rp.5.600.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.222.950.000</b>	<b>Rp.204.100.000</b>	<b>Rp.18.850.000</b>	
8	X BISNIS DARING DAN PEMASARAN	<b>Rp.59.800.000</b>	<b>Rp.56.700.000</b>	<b>Rp.3.100.000</b>	
9	X A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.600.000	Rp.55.850.000	Rp.8.750.000	
10	X B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.68.850.000	Rp.56.700.000	Rp.12.150.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.133.450.000</b>	<b>Rp.112.550.000</b>	<b>Rp.20.900.000</b>	
11	X A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.70.800.000	Rp.69.350.000	Rp.1.450.000	
12	X B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.74.800.000	Rp.65.700.000	Rp.9.100.000	
13	X C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.73.850.000	Rp.66.750.000	Rp.7.100.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.219.450.000</b>	<b>Rp.201.800.000</b>	<b>Rp.17.650.000</b>	
14	X REKAYASA PERANGKAT LUNAK	<b>Rp.64.800.000</b>	<b>Rp.56.550.000</b>	<b>Rp.8.250.000</b>	
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>Rp.1.004.650.000</b>	<b>Rp.902.450.000</b>	<b>Rp.102.200.000</b>	

**KELAS XI**

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.71.300.000	Rp.63.450.000	Rp.7.850.000	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	XI B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.60.700.000	Rp.56.150.000	Rp.4.150.000	
3	XI C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.000.000	Rp.57.200.000	Rp.11.800.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.56.500.000	Rp.56.150.000	Rp.350.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.257.100.000</b>	<b>Rp.232.950.000</b>	<b>Rp 24.150.000</b>	
5	XI A AKUNTANSI	Rp.71.350.000	Rp.58.200.000	Rp.12.100.000	
6	XI B AKUNTANSI	Rp.71.350.000	Rp.59.350.000	Rp.11.950.000	
7	XI C AKUNTANSI	Rp.63.100.000	Rp.57.550.000	Rp.5.550.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.205.700.000</b>	<b>Rp.175.100.000</b>	<b>Rp.30.600.000</b>	
8	PEMASARAN	<b>Rp.32.550.000</b>	<b>Rp.31.750.000</b>	<b>Rp.800.000</b>	
9	XI A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.46.000.000	Rp.42.700.000	Rp.3.300.000	
10	XI B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 48.300.000	Rp.39.300.000	Rp.9.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.94.300.000</b>	<b>Rp.82.000.000</b>	<b>Rp.12.300.000</b>	
11	XI A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.61.950.000	Rp.54.850.000	Rp.7.100.000	
12	XI B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.63.800.000	Rp.49.500.000	Rp.14.300.000	
13	XI C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.74.000.000	Rp.66.800.000	Rp.7.200.000	
14	XID TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.250.000	Rp.60.950.000	Rp.3.300.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.264.000.000</b>	<b>Rp.232.100.000</b>	<b>Rp.31.900.000</b>	
15	XI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	<b>Rp.67.150.000</b>	<b>Rp.57.200.000</b>	<b>Rp.9.550.000</b>	
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>Rp.920.800.000</b>	<b>Rp.811.100.000</b>	<b>Rp.109.700.000</b>	

**KELAS XII**



NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XII A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp . 58.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 3.000.000	
2	XII B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 69.700.000	Rp. 68.900.000	Rp. 800.000	
3	XII C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 70.150.000	Rp.68.800.000	Rp.1.350.000	
4	XII D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 51.750.000	Rp.50.750.000	Rp.1.000.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 249.600.000</b>	<b>Rp.243.450.000</b>	<b>Rp.6.150.000</b>	
5	XII A AKUNTANSI	Rp. 73.600.000	Rp. 73.600.000	-	
6	XII B AKUNTANSI	Rp. 66.700.000	Rp. 66.300.000	Rp.400.000	
7	XII C AKUNTANSI	Rp.70.150.000	Rp. 68.800.000	Rp.1.350.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 210.450.000</b>	<b>Rp. 208.700.000</b>	<b>Rp.1.750.000</b>	
8	PEMASARAN	<b>Rp. 25.000.000</b>	<b>Rp. 24.600.000</b>	<b>Rp. 400.000</b>	
9	XII A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 71.300.000	Rp. 61.000.000	Rp.10.300.000	
10	XII B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 56.700.000	Rp. 54.950.000	Rp.1.750.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.128.000.000</b>	<b>Rp. 115.950.000</b>	<b>Rp.12.050.000</b>	
11	XII A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.71.300.000	Rp. 70.650.000	Rp. 650.000	
12	XII B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 69.450.000	Rp.64.050.000	Rp.5.400.000	
13	XII C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 60.950.000	Rp.57.000.000	Rp .3.950.000	
14	XIID TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.69.000.000	Rp.69.000.000	Rp -	





15	XIIE TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.62.100.000	Rp.54.000.000	Rp .8.100.000	
16	XIIF TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.60.700.000	Rp.58.300.000	Rp. 2.400.000	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 393.500.000</b>	<b>Rp.373.000.000</b>	<b>Rp.20.500.000</b>	
17	XII REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 55.200.000	Rp.52.900.000	Rp .2.300.000	
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>Rp.1.061.750.000</b>	<b>Rp.1.018.600.000</b>	<b>Rp.43.160.000</b>	

**Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan  
Tahun Ajaran 2019/2020**

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1	Gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan	Rp. 1.217.000.000
2	Pas foto peserta Ujian nasional	Rp. 69.300.000
3	Pembayaran siswa prestasi	Rp. 1.650.000
4.	Pembangunan Ruang Tata Niaga	Rp. 125.287.000
5.	Biaya sensor 11 pohon	Rp. 11.000.000
6.	Penataan Taman	Rp. 2.110.000
7.	UKS / P3k	Rp. 1.220.000
8.	Ret – ret muhasabah	Rp. 122.450.000
9.	Tabloit dan surat kabar	Rp. 5.330.000
10.	Pengembangan Bakat Siswa	Rp. 11.150.000
11.	Iuran Musyawarah Kegiatan kepala sekolah SMK	Rp. 4.000.000
12.	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp. 2.105.500
13.	Perbaikan Kursi & Meja Siswa	Rp. 4.805.000
14.	Perbaikan toilet Guru & Siswa	Rp. 2.644.000
15.	Transportasi muat meja dan kursi	Rp. 100.000
16.	Biaya Pengubah lagu Himne SMK	Rp. 600.000
17.	Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela	Rp. 1.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	HUT SMK	Rp. 35.180.000
19.	HUT Satpam	Rp. 750.000
20.	Kegiatan Kerohanian	Rp. 1.050.000
21.	Sewa sound sosialisasi radikalisme dari KODIM	Rp. 350.000
22.	Kunjungan Kadis Pendidikan dan kebudayaan prov NTT	Rp. 6.625.000
23.	Uang kedukaan Mantan Guru SMK negeri 1 an. MIKAEL DEI	Rp. 1.000.000
24.	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	Rp. 3.300.000
25.	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	Rp. 5.700.000
26.	Instalasi air Bersih	Rp. 4.827.000
27.	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasaranan)	Rp. 1.558.000
28.	Krans bunga	Rp. 1.670.000
29.	Pengadaan 1 Buah Flas disk 16 GB untuk kegiatan Pramuka	Rp. 130.000
30.	Pengadaan Senter penjaga Malam	Rp. 450.000
31.	Pemasangan Finger Print	Rp. 200.000
32.	Pembelin 1 buah Bola Voly dan Net Voly	Rp. 900.000
33.	Pengadaan Lampu	Rp. 1.513.000
34.	Pemasangan Trali Jendela	Rp. 6.200.000
35.	Pengadaan Meubeler tahun 2018/2019	Rp. 96.000.000
36.	Persiapan simulasi UNBK	Rp. 300.000
37.	Konsumsi pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	Rp. 3.800.000
38.	Supervisi Mutu program OTKP	Rp. 1.444.500
39.	Upah Kerja Pembangunan 2 ruang RPS	Rp. 130.000.000
40.	Maintenance Komputer Lab Persiapan UNBK	Rp. 51.145.600
41.	Pembelian computer 10 unit	Rp. 80.675.000
42.	Biaya Rapat Guru dan pegawai	Rp. 18.860.000
43.	Pengadaan kelengkapan Cleaning Service	Rp. 860.000
44.	Pulsa Data Operator Operasional Sekolah	Rp. 3.216.000
45.	Tamu Sekolah	Rp. 6.472.000

Halaman 253 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46.	ATK Komite	Rp. 2.229.500
47.	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS SMK/SMA	Rp. 2.000.000
48.	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	Rp. 2.100.000
49.	Konsumsi Penguji Ujian sekolah Praktik Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp. 4.725.000
50.	Konsumsi Penyusunan Soal Ujian Sekolah Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp. 5.220.000
51.	Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK perhari tahun pelajaran 2019/2020	Rp. 2.850.000
52.	Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Kaki Untuk mengikuti turnamen antar pelajar tingkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019	Rp. 5.340.000
53.	Perjalanan Dinas	Rp. 92.970.524
54.	Transportasi Pengantaran siswa PLK Ke Kelitembu	Rp. 1.000.000
55.	Transportasi Untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDB untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah	Rp. 500.000
56.	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk pengawalan Erobik MPLS	Rp. 500.000
57.	Jasa saund Sistem kegiatan MPLS	Rp. 300.000
58.	Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi), pengawas, korwas, dan pemateri	Rp. 1.350.000
59.	Pembelian 1 buah bola kaki kassa	Rp. 162.000
60.	Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT	Rp. 500.000
61.	Pembayaran pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANTONIUS TOLO	Rp. 129.800
62.	Pembelian 15 Dos air Kelimutu untuk kegiatan hari Pramuka	Rp. 285.000
63.	Pembelian 1 cup lens 18.55	Rp. 80.000
64.	Lanjutan Pembangunan Aula	Rp. 502.127.000
65.	Penjilidan istimewa laminasi 4 buku	Rp. 100.000

Halaman 254 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.	Jilid Laminasi 1 Buku ukuran F4	Rp. 30.000
67.	Pengadaan 2 baliho	Rp. 310.000
68.	Pengadaan 1 Spanduk	Rp. 100.000
69.	Penghargaan purna bakti guru	Rp. 8.500.000
70.	Sumbangan duka orang tua dari ketua komite	Rp. 3.000.000
71.	Pengecetan ruang kepala sekolah	Rp. 1.683.000
72.	Biaya pengobatan siswa yang celaka	Rp. 2.000.000
73.	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	Rp. 2.000.000
Total pengeluaran		R p. 2.688.519.424

- Bahwa setelah mempelajari data yang diberikan ahli berpendapat bahwa dalam proses perencanaan tidak direncanakan secara baik. terdapat kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan komite dan dalam pelaksanaan, seharusnya pertanggungjawaban keuangan berpatokan atau merujuk pada RAPBS karena RAPBS adalah perencanaan awal.
- Bahwa Kegiatan dalam pelaksanaan dapat berubah / revisi bilamana anggaran tidak tersedia, oleh karena itu pentingnya laporan pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan secara periodik kemudian perubahan tersebut melalui pelaporan dan pertanggungjawaban didepan orang tua wali murid.
- Kegiatan yang tidak ada dalam RAPBS / tidak direncanakan Tahun Anggaran 2019/2020

NO	KEGIATAN YANG TIDAK DIRENCANAKAN	KET
1	Pembangunan Tata Ruang Niaga	
2	Biaya Sensor 11 Pohon	
3	Penataan Tanaman	
4	Pengembangan Bakat Siswa	
5	Perbaikan Toilet Guru dan Siswa	
6	Transportasi Muat Meja dan Kursi	
7	Biaya Pengubah Lagu Himne SMK	
8	Jasa Pemasangan 1 Pintu Ruang Kelas Tata Niaga dan 12 Jendela	
9	HUT Satpam	

Halaman 255 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Sewa Sound Sosialisasi Radikalisme dari KODIM	
11	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Uang Kedukaan Mantan Guru SMK N 1 an. MIKAEL DEI	
13	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	
14	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	
15	Instalasi Air Bersih	
16	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasarana)	
17	Krans Bunga	
18	Pengadaan 1 Buah Flash Disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	
19	Pengadaan Senter Penjaga Malam	
20	Pemasangan Finger Print	
21	Pembelian 1 Buah Bola Voly dan Net Voly	
22	Pengadaan Lampu	
23	Pemasangan Trali Jendela	
24	Persiapan Simulasi UTBK	
25	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	
26	Supervisi Mutu Program OTKP	
27	Upah Kerja Pembangunan 2 Ruang RPS	
28	Pengadaan Kelengkapan Cleaning Service	
29	ATK Komite	
30	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov. NTT dan MKKS SMK/SMA	
31	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	
32	Konsumsi Penguji Ujian Sekolah Praktik Kelas XII TA 2019/2020	
33	Konsumsi Penyusunan Ujian Sekolah Yeori Kelas XII TA 2019/2020	
34	Konsumsi Panitia Proktor dan Teknisi UNBK Perhari TA 2019/2020	
35	Transportasi Pengantaran Siswa PLK Ke Kelitembu	
36	Transportasi Untuk 2 Orang Tentara yang Memberikan Materi PPDB Untuk Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan	

Halaman 256 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg





37	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk Pengawasan Erobik MPLS	
38	Jasa Saund Sistem Kegiatan MPLS	
39	Pembayaran Transportasi Untuk 6 Orang Nara Sumebr (Dudi), Pengawas, Korwas, dan Pemateri	
40	Pembelian 1 Buah Bola Kaki Kassa	
41	Kontribusi dari SMKN 1 Untuk Kunjungan Kadis PPO Prov. NTT	
42	Pembayaran Pemeriksaan Untuk Siswa an. ALBERTUS BIANTONIUS TOLO	
43	Pembelian 12 Dos Air Kelimutu Untuk Kegiatan Hari Pramuka	
44	Pembelian 1 Cup Lens 18.55	
45	Penjilidan Instimewa Laminasi4 Buku	
46	Jilid Laminasi 1 Buku Ukuran F4	
47	Pengadaan 2 Baliho	
48	Pengadaan 1 Spanduk	
49	Penghargaan Purna Bakti Guru	
50	Sumbangan Duka Orang Tua dari Ketua Komite	
51	Biaya Pengobatan Siswa yang Celaka	
52	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	

**Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020**

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

- Bahwa kegiatan yang tidak direncanakan pada tahun Ajaran 2019/2020, namun dilaksanakan dapat dikatakan melanggar ketentuan mekanisme keuangan komite atau mekanisme pengelolaan keuangan hasil penggalangan TAHUN 2029/2020, seharusnya dalam melaksanakan kegiatan harus merujuk pada RAPBS yang telah dibuat.
- Bahwa kegiatan yang tidak direncanakan tahun ajaran 2019/2020 dalam pelaksanaan dapat dikatakan sebagai Kerugian Keuangan Negara bahwa Ahli

Halaman 257 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa berpendapat terhadap hal tersebut apakah masuk dalam kerugian Negara atau tidak karena yang dapat menentukan bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan Negara adalah pihak lain.

- Bahwa Hasil Penggalangan dan Pertanggungjawaban hasil penggalangan komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2020/2021 sebagai berikut :

## RAPBS Komite Tahun Ajaran 2020/2021

NO	KELAS X, XI DAN XII	TOTAL KEUANGAN
	ITEM PEMBIAYAAN	
1	2	3
1	Gaji Tenaga Honorer, Tunjangan Tugas Tambahan	Rp. 600.000.000
2	Pembangunan WC	Rp. 100.000.000
3	Pengadaan Kursi dan Meja Siswa 4 Paket (Tunggakan 2019/2020)	Rp. 96.000.000
4	Perbaikan Alat-Alat Drum Band	Rp. 6.349.500
5	Pengadaan Alat-Alat Drum Band	Rp. 7.000.000
6	Pengadaan Pakan Drum Band	Rp. 75.000.000
7	Home Visit	Rp. 10.000.000
8	Kelebihan Jam Mengajar	Rp. 30.000.000
9	Pengadaan Sound System	Rp. 100.000.000
10	Pengadaan 3 Buah Laptop	Rp. 18.000.000
11	Pembangunan Lanjutan Aula SMKN 1 Ende	Rp. 500.000.000
12	Pulsa Data Operator Sekolah	Rp. 1.600.000
13	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Pegawai	Rp. 30.000.000
14	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
15	Kegiatan Kesiswaan dan Turnamen Olahraga	Rp. 20.000.000
16	Pembelian Alat Kesehatan	Rp. 120.000.000
17	Pembelian Bolam Lampu Philips (200 Buah)	Rp. 120.000.000
18	Kegiatan Siswa	Rp. 12.800.000
19	UKS	Rp. 10.000.000
20	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Rp. 50.000.000

Halaman 258 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

21	Kegiatan Kerohanian Gereja dan Mesjid	Rp. 10.000.000
22	Perbaikan Lapangan Olahraga	Rp. 30.000.000
23	Penataan Tanaman	Rp. 20.000.000
24	Tamu Sekolah	Rp. 50.000.000
25	Konstruksi MKKS tingkat SMK	Rp. 5.350.000
26	Pembayaran Koran dan Tabloid	Rp. 6.000.000
27	Reward Siswa Berprestasi	Rp. 10.000.000
28	HUT SMKN 1 Ende	Rp. 40.000.000
29	ATK Komite	Rp. 25.000.000
30	Dana Sharing PPDB	Rp. 50.000.000
31	Pengadaan Kostum Olahraga Pembina	Rp. 19.500.000
32	Pengadaan Komputer	Rp. 50.000.000
33	Kerja Rabat dan Tembok Tangga Turun Turun Aula	Rp. 30.000.000
34	Bahan Bahan Mesin Pemotong Rumput	Rp. 1.000.000
35	Faceshild (Alat Pelindung Wajah)	Rp. 1.000.000
36	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
37	Pemberitaan Media	Rp. 10.000.000
38	Krans Bunga	Rp. 500.000
39	Kostum Olahraga Volly dan 1 Buah Bola Volly	Rp. 900.000
40	Mesin Foto Copy Canon 5075	Rp. 40.000.000
41	KJM	Rp. 20.000.000
42	Penulisan Ijasah	Rp. 10.000.000

**Penerimaan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2020/2021**

**KELAS X**

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.55.500.000	Rp.9.300.000	

Halaman 259 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.61.100.000	Rp.3.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.52.150.000	Rp.12.650.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.52.320.000	Rp.12.480.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.221.070.000	Rp.38.130.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.51.100.000	Rp.13.700.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.59.000.000	Rp.5.800.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.51.650.000	Rp.13.150.000	
J U M L A H			Rp. 194.400.000	Rp.161.750.000	Rp.32.650.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.50.400.000	Rp.14.400.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.54.450.000	Rp.10.350.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.50.150.000	Rp.14.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.104.600.000	Rp.25.000.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.61.300.000	Rp.3.500.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.57.700.000	Rp.7.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.50.050.000	Rp.14.750.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.36.300.000	Rp.28.500.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.48.000.000	Rp.16.800.000	

Halaman 260 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp. 253.350.000	Rp.70.650.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 64.800.000	Rp.60.000.000	Rp. 4.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.851.170.000	Rp.185.630.000	

KELAS XI

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 59.400.000	Rp.54.450.000	Rp.4.950.000	
2	XI B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.58.100.000	Rp.6.700.000	
3	XI C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.54.050.000	Rp.3.550.000	
4	XI D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.52.450.000	Rp.5.150.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.219.050.000	Rp.20.350.000	
5	XI A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.56.300.000	Rp. 4.900.000	
6	XI B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.55.700.000	Rp. 5.500.000	
7	XI C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.45.200.000	Rp.10.600.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.157.200.000	Rp.21.000.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	XI	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp. 47.600.000	Rp.1.000.000	
9	XI A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.52.200.000	Rp 48.050.000	Rp.4.150.000	
10	XI B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp 47.950.000	Rp. 6.050.000	
J U M L A H			Rp. 106.200.000	Rp 96.000.000	Rp.10.200.000	
11	XI A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp 52.100.000	Rp.1.900.000	
12	XI B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp 52.000.000	Rp.5.600.000	
13	XI C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp 53.700.000	Rp.3.900.000	
J U M L A H			Rp.169.200.000	Rp.157.800.000	Rp.11.400.000	
14	XI	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp 50.400.000	Rp 45.000.000	Rp.5.400.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.792.000.000	Rp722.650.000	Rp.69.350.000	

## KELAS XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.55.800.000	Rp .48.000.000	Rp.7.800.000	
2	XII B	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.45.000.000	Rp .36.650.000	Rp .8.350.000	
3	XII C	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp. 48.600.000	Rp .45.050.000	Rp.3.550.000	
4	XII D	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.43.200.000	Rp.38.450.000	Rp.4.750.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.168.150.000	Rp.24.450.000	

Halaman 262 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	XII A	AKUNTANSI	Rp. 55.800.000	Rp.41.000.000	Rp.14.800.000	
6	XII B	AKUNTANSI	Rp.55.100.000	Rp.45.050.000	Rp.10.050.000	
7	XII C	AKUNTANSI	Rp.46.800.000	Rp.42.950.000	Rp.3.850.000	
J U M L A H			Rp.157.700.000	Rp.129.000.000	Rp.28.700.000	
8	XII	P E M A S A R A N	Rp.23.400.000	Rp.23.300.000	Rp.100.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.36.000.000	Rp.32.200.000	Rp.3.800.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.34.200.000	Rp.31.300.000	Rp. 2.900.000	
J U M L A H			Rp.70.200.000	Rp.63.500.000	Rp. 6.700.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.44.900.000	Rp.1.900.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.100.000	Rp. 42.450.000	Rp.3.650.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.50.100.000	Rp.3.900.000	
14	XII D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.42.400.000	Rp. 4.400.000	
J U M L A H			Rp.193.700.000	Rp.179.850.000	Rp.13.850.000	
15	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp. 44.600.000	Rp.5.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.688.000.000	Rp.608.400.000	Rp.79.600.000	

## Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2020/2021

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembayaran Honor Komite	Rp.411.750.000
2.	Pembayaran honor teknis	Rp.28.100.000
3.	Honor Operator Dapodik	Rp.19.500.000
4.	Pembayaran Kesra PNS	Rp. 66.200.000

Halaman 263 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp.164.150.000
6.	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp.80.138.433
7.	Penulisan ijasah	Rp.13.800.000
8.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2019/2020	Rp.17.100.000
9.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2020/2021	Rp.13.725.000
10.	Pembayaran honor Input kwitansi penerimaan dana komite	Rp.19.500.000
11.	Pembelian alat perabot pendukung	Rp.5.328.000
12.	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan penjurusan dan pengantaran	Rp.2.100.000
13.	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp.1.995.000
14.	Peringatan hari pancasila	Rp.14.775.000
15.	Rapat dewan Guru	Rp.20.585.000
16.	Pemberitaan dimedia	Rp.2.900.000
17.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah, Flores Pos	Rp.580.000
18.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah Pos Kupang	Rp.840.000
19.	Peringatan hari guru	Rp.8.550.000
20.	Lembur penggandaan soal ujian	Rp.2.000.000
21.	Lembur persiapan kedatangan inspektorat	Rp.4.200.000
22.	Konsumsi kedatangan inspektorat	Rp.4.000.000
23.	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp.2.490.000
24.	Kunjungan kepala dinas provinsi NTT	RP.9.100.000
25.	Biaya penebangan pohon	Rp.2.000.000
26.	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp.2.500.000
27.	Konsumsi Ujian semester ganjil	Rp.11.250.000
28.	Pembelian alat kebersihan	Rp.8.089.000
29.	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp.21.350.000

Halaman 264 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Transportasi maulid di anaraja	Rp.500.000
31.	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp.300.000
32.	Rekreasi kepala sekolah dan guru	Rp.960.000
33.	Pembayaran Tabloid Ekspo	Rp.240.000
34.	Pengadaan kostum olah raga guru Pembina	Rp.19.200.000
35.	Dana Shering PPDP 2020/2021	Rp.38.660.000
36.	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp.1.100.000
37.	Pelaksanaan IHT Kerja SMK negeri 1 ende tahun 2020	Rp.23.430.000
38.	Pembelian kostum dan satu bola voly	Rp.875.000
39.	Perbaikan kursi meja	Rp.2.000.000
40.	Beli 2 bendera, umbul umbul dan tali raffia	Rp.80.000
41.	Sewa kamera canon	Rp.100.000
42.	Jilid istemewa dokumen kurikulum	Rp.150.000
43.	Pengadaan Kipas angin berdiri 10 buah	Rp.6.000.000
44.	Beli facesil 17 buah	Rp. 340.000
45.	Kegiatan Drumband Pelangi nusantara	Rp.15.958.000
46.	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp. 40.000.000
47.	Sewa molen cor tiang aula	Rp.5.000.000
48.	Bayar utang bamboo untuk pembangunan aula 200 batang	Rp. 5.000.000
49.	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang Ruang praktek siswa	Rp.6.000.000
50.	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp.750.000
51.	Service laptop Thosiba	Rp.500.000
52.	Drum band penjemputan gubernur dan rombongan	Rp.1.981.000
53.	Pembelian 1 buah tendon	Rp.1.300.000
54.	Jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.15.000.000
55.	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp.12.000.000
56.	Pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan aula	Rp. 43.800.000

Halaman 265 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp.96.000.000
58.	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp.6.000.000
59.	Bayar sisa pembelian batu fondasi kerja aula	Rp. 4.800.000
60.	Bayar sisa pembelian Kerikil kerja aula t	Rp.11.250.000
61.	Beli peta kab ende 2 buah	Rp. 800.000
62.	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp .195.000.000
63.	Jasa konsultan Pembuatan revisi laporan RPS	Rp .1.750.000
64.	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasangan	Rp .1.500.000
65.	Pembelian 10 baju merah marun	Rp . 300.000
66.	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp .12.200.000
67.	Lembur tanda tangan ijasah	Rp.3.000.000
68.	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp.1.200.000
69.	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp.5.500.000
70.	Bimtek persiapan akreditasi	Rp.5.850.000
71.	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp.500.000
72.	ATK Komite	Rp.13.305.000
73.	Tamu Sekolah	Rp.21.221.482
74.	Pembelian super sill pembersih lantai	Rp.2.250.000
75.	Pembayaran utang tali ijuk	Rp.1.000.000
76.	Biaya pengerjaan Rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp.25.000.000
77.	Pembelian lampu LED nama uala dan nama sekolah	Rp. 35.000.000
78.	Pembelian 1 unit Server	Rp. 20.000.000
79.	Pembelian 10 unit Komputer	Rp.37.500.000
80.	Biaya pengiriman Server dan computer	Rp.572.800
81.	Latihan Paskibraka	Rp.200.000
82.	Pembelia Bola Lampu Philips	Rp.9.474.000
83.	Pembelian Pulsa Data Opeartor Dapodik	Rp.621.000

Halaman 266 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	Pembelian Baliho dan Stempel	Rp.620.000
85.	Pembelian Karangan Bunga ( kedukaan)	Rp.200.000
86.	Transoprtasi guru pendamping latihan Voly	Rp. 4.400.000
87.	Biaya Snack dan aqua latihan Voly	Rp.4.800.000
88	Honor Guru tamu Karate	Rp.9.600.000
89.	Biaya tranfortasi pembelian Umbul-umbul dan bamboo	Rp.200.000
90.	Bahan Bakar mesin potong rumput	Rp.600.000
91.	Pembelian Tangki Air	Rp. 120.000
92.	Pembelian Karung	Rp.67.000
93.	Biaya Administrasi Bantuan Sumur Bor	Rp.5.000.000
94.	Biaya ulang Tahun Sekolah	Rp.15.000.000
95.	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp. 4.400.000
96.	Bayar ke kas Provinsi	Rp. 7.500.000
97.	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa ( bencana Adonara)	Rp.3.250.000
98.	Transfortasi Ende –Larantuka ( Bencana Adonara)	Rp.4.800.000
99.	Tranfortasi Laut Larantuka-Adonara	Rp.2.000.000
100.	Tranfortasi Darat dari Adonara ke- Titik Bencana	Rp.1.000.000
101.	Sering dana Komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word kls XII dan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa antar kelas dalam program keahlian	Rp.14.000.000
102.	Instalasi Listri ruang tata niaga lama	Rp.2.520.000
103.	Pengadaan Foto siswa kls XII 382 Orang @ 25.000	Rp.9.550.000
104.	Pembayaran utang jasa konsultan aula	Rp.51.000.000
105.	Pembangunan Tembok selatan depan aula	Rp.25.000.000
106.	HUT Sekolah	Rp.15.000.000
107.	Konsumsi Work Shop	Rp. 5.300.000
108.	Instalasi Listrik ruang TN Lama	Rp. 2.520.000
109.	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp.3.855.000

Halaman 267 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Total pengeluaran	Rp .1.903.915.715
-------------------	-------------------

- Bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan hasil penggalangan Tahun Ajaran 2020/2021, tidak direncanakan secara baik. Terdapat kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan komite dan dalam pelaksanaan, seharusnya pertanggungjawaban keuangan berpatokan atau merujuk pada RAPBS karena RAPBS adalah perencanaan awal ;
- Dapat ahli menjelaskan Kegiatan yang tidak direncanakan

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Pembangunan Tata Ruang Niaga	
2	Biaya Sensor 11 Pohon	
3	Penataan Tanaman	
4	Pengembangan Bakat Siswa	
5	Perbaikan Toilet Guru dan Siswa	
6	Transportasi Muat Meja dan Kursi	
7	Biaya Pengubah Lagu Himne SMK	
8	Jasa Pemasangan 1 Pintu Ruang Kelas Tata Niaga dan 12 Jendela	
9	HUT Satpam	
10	Sewa Sound Sosialisasi Radikalisme dari KODIM	
11	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Uang Kedukaan Mantan Guru SMK N 1 an. MIKAEL DEI	
13	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	
14	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	
15	Instalasi Air Bersih	
16	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasarana)	
17	Krans Bunga	



18	Pengadaan 1 Buah Flash Disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	
19	Pengadaan Senter Penjaga Malam	
20	Pemasangan Finger Print	
21	Pembelian 1 Buah Bola Voly dan Net Voly	
22	Pengadaan Lampu	
23	Pemasangan Trali Jendela	
14	Persiapan Simulasi UTBK	
25	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	
26	Supervisi Mutu Program OTKP	
27	Upah Kerja Pembangunan 2 Ruang RPS	
28	Pengadaan Kelengkapan Cleaning Service	
29	ATK Komite	
30	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov. NTT dan MKKS SMK/SMA	
31	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	
32	Konsumsi Penguji Ujian Sekolah Praktik Kelas XII TA 2019/2020	
33	Konsumsi Penyusunan Ujian Sekolah Yeorl Kelas XII TA 2019/2020	
34	Konsumsi Panitia Proktor dan Teknisi UNBK Perhari TA 2019/2020	
35	Transportasi Pengantaran Siswa PLK Ke Kelitembu	
36	Transportasi Untuk 2 Orang Tentara yang Memberikan Materi PPDB Untuk Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan	
37	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk Pengawalan Erobik MPLS	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	Jasa Saund Sistem Kegiatan MPLS	
----	---------------------------------	--

## Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

- Bahwa kegiatan yang tidak direncanakan namun dilaksanakan dapat dikatakan melanggar ketentuan atau mekanisme pengelolaan keuangan hasil penggalangan, seharusnya dalam melaksanakan kegiatan harus merujuk pada RAPBS yang telah dibuat Tahun Ajaran 2020/2021.
- Bahwa Ahli tidak dapat berpendapat terhadap hal tersebut apakah masuk dalam kerugian Negara atau tidak karena yang dapat menentukan bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan Negara adalah pihak lain
- Perlu diketahui oleh Ahli rincian RAPBS, Hasil Penggalangan dan Pertanggungjawaban hasil penggalangan komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2021/2022 sebagai berikut :

### • RAPBS Koimite Tahun Ajaran 2021/2022

1	Gaji Honorar	Rp.	600.000.000
2	Penghargaan kelebihan jam mengajar	Rp.	30.000.000
3	Vaksinasi dan persiapan Test P3K	Rp.	50.000.000
4	Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Rp.	35.000.000
5	Tamu Sekolah	Rp.	60.000.000
6	PPDB TP 2021 / 2022	Rp.	100.000.000
7	Kursi Meja	Rp.	75.000.000
8	Perjalanan Dinas	Rp.	300.000.000
9	Listrik	Rp.	150.000.000
10	Taman	Rp.	30.000.000
11	Peralatan Kesehatan	Rp.	150.000.000
12	Rehabilitasi Pagar Tembok Penyokong	Rp.	60.000.000
13	Operasional MKKS	Rp.	15.000.000
14	Publikasi	Rp.	10.000.000

Halaman 270 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15	Home Visit	Rp.	10.000.000
16	Natal Bersama	Rp.	50.000.000
17	Halal Bihalal	Rp.	50.000.000
18	Lembur Panitia Ujian Semester	Rp.	25.000.000
19	Prakerin	Rp.	45.000.000
20	Honor Operator Sekolah	Rp.	12.000.000
21	Pulsa Data Operator	Rp.	5.000.000
22	Gugus Covid	Rp.	45.000.000
23	Rehap Kamar WC Kasek	Rp.	20.000.000
24	Pengadaan Gong (Go lomba)	Rp.	20.000.000
25	Honor Teknisi Sekolah	Rp.	24.600.000
26	Pembangunan Tembok (lokasi TA. 2019/2020 dan TA. 2020/2021, SMK N 1 Ende lama )	Rp.	70.000.000
27	Pengadaan bahan perabot pendukung SARPRAS	Rp.	50.000.000
28	Lembur PNS	Rp.	350.000.000
29	Kunjungan Panti Asuhan	Rp.	10.000.000
30	Kunjungan panti ODGJ	Rp.	10.000.000
31	Perpisahan kelas XII	Rp.	50.000.000
32	Pemilihan pengurus OSIS TP 2021/2022	Rp.	10.000.000
33	HUT sekolah	Rp.	75.000.000
34	Repat Dewan Guru	Rp.	50.000.000
35	Kegiatan kerohanian gereja dan masjid	Rp.	20.000.000
36	Drum Band hari besar nasional	Rp.	25.000.000
37	Latihan dan kegiatan dan kesiswaan	Rp.	125.000.000
38	ATK, Operasional Komite dan Pelaporan	Rp.	35.900.000

**Penerimaan Keuangan Hasil Penggalangan Tahun 2021/2022**

**sampai dengan bulan Desember 2021**

**Kelas X**

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH		TUNGGAKAN	KET.
----	------------------------	--------------	--	-----------	------

Halaman 271 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				JUMLAH TERBAYAR		
1	X 1	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.25.050.000	Rp.39.750.000	
2	X 2	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.32.050.000	Rp.32.750.000	
3	X 3	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
4	X 4	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.27.550.000	Rp.37.250.000	
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.259.200.000</b>	<b>Rp.111.500.000</b>	<b>Rp.147.700.000</b>	
5	X 1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.24.650.000	Rp.40.150.000	
6	X 2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.550.000	Rp.38.250.000	
7	X 3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.194.400.000</b>	<b>Rp.78.050.000</b>	<b>Rp.116.350.000</b>	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.31.050.000	Rp.33.750.000	
9	X 1	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.27.100.000	Rp.37.700.000	
10	X 2	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.26.150.000	Rp.38.650.000	
<b>J U M L A H</b>			<b>Rp.129.600.000</b>	<b>Rp.53.250.000</b>	<b>Rp.76.350.000</b>	
11	X 1	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.25.000.000	Rp.39.800.000	
12	X 2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.30.850.000	Rp.33.950.000	
13	X 3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.31.300.000	Rp.33.500.000	
14	X 4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.27.350.000	Rp.37.450.000	

Halaman 272 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUMLAH			Rp. 259.200.000	Rp.114.500.000	Rp.144.700.000	
15	X 1	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.25.100.000	Rp.39.700.000	
16	X 2	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.23.050.000	Rp.41.750.000	
JUMLAH			Rp.129.600.000	Rp.48.150.000	Rp.81.450.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.436.500.000	Rp.600.300.000	

Kelas XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.28.100.000	Rp.36.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp15.550.000	Rp. 49.250.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.17.800.000	Rp. 47.000.000	
JUMLAH			Rp. 259.200.000	Rp. 77.000.000	Rp182.200.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 63.000.000	Rp. 16.000.000	Rp. 47.000.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 64.800.000	Rp. 30.300.000	Rp. 34.500.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 64.800.000	Rp. 14.000.000	Rp. 50.800.000	
JUMLAH			Rp. 192.600.000	Rp. 60.300.000	Rp132.300.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 64.800.000	Rp. 21.200.000	Rp. 43.600.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.800.000	Rp. 23.100.000	Rp. 41.700.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.800.000	Rp. 9.300.000	Rp. 55.500.000	
JUMLAH			Rp. 129.600.000	Rp. 32.400.000	Rp. 97.200.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 39.450.000	Rp. 25.350.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 24.700.000	Rp. 40.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 23.150.000	Rp. 41.650.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 12.800.000	Rp. 52.000.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.800.000	Rp. 20.850.000	Rp. 43.950.000	
JUMLAH			Rp. 324.000.000	Rp. 120.950.000	Rp. 203.050.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 64.800.000	Rp. 33.100.000	Rp. 31.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp. 1.035.000.000	Rp. 344.950.000	Rp. 690.050.000	

## Kelas XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 59.400.000	Rp. 31.650.000	Rp. 27.750.000	
2	XII B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp. 30.450.000	Rp. 34.350.000	
3	XII C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 57.600.000	Rp. 30.950.000	Rp. 26.650.000	
4	XII D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 57.600.000	Rp. 28.950.000	Rp. 28.650.000	

Halaman 274 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.122.000.000	Rp117.400.000.	
5	XII A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 61.200.000	Rp. 31.050.000	Rp.30.150.000	
6	XII B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 61.200.000	Rp. 23.250.000	Rp.37.950.000	
7	XII C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp. 55.800.000	Rp. 18.600.000	Rp.37.200.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp. 72.900.000	Rp.105.300.000	
8	XII	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 48.600.000	Rp. 19.800.000	Rp.28.800.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 54.000.000	Rp. 21.650.000	Rp.32.350.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 54.000.000	Rp. 20.250.000	Rp.33.750.000	
J U M L A H			Rp.108.000.000	Rp. 41.900.000	Rp.66.100.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 54.000.000	Rp. 34.200.000	Rp.19.800.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 57.600.000	Rp. 36.100.000	Rp.21.500.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 55.800.000	Rp. 31.650.000	Rp.24.150.000	
J U M L A H			Rp.167.400.000	Rp.101.950.000	Rp.65.450.000	
14	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 46.800.000	Rp. 26.100.000	Rp.20.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.788.400.000	Rp.384.650.000	Rp.403.750.000	

## - Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2021/2022

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pengadaan golamba	Rp.18.000.000

Halaman 275 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
3.	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp.5.000.000
4.	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi smea lama jalan mbongawani	Rp.5.000.000
5.	Pembelian material untuk pembangunan pagar di smea lama jalan mbongawani	Rp.3.600.000
6.	Pembelian lampu Philips spiral	Rp.7.600.000
7.	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.32.000.000
8.	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	Rp.10.000.000
9.	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp.1.832.000
10.	Insentif team gugus covid	Rp.5.000.000
11.	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah	Rp.1.175.000
12.	Publikasi media	Rp.3.000.000
13.	HUT sekolah	Rp.7.750.000
14.	Penulisan tamatan	Rp.1.000.000
15.	Lembur persiapan ujian smester ganjil	Rp.1.070.000
16.	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp.11.370.000
17.	Pembelian gorden ruang ujian P3K	Rp. 2.500.000
18.	Pembelian bensin potong rumput	Rp.400.000
19.	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp.2.000.000
20.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.660.000
21.	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp.5.850.000
22.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.350.000
23.	Pembayaran majalah Flobamora	Rp.135.000
24.	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	Rp.2.700.000

Halaman 276 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	Rp.1.220.000
26.	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	Rp.29.545.000
27.	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	Rp.2.850.000
28.	Konsumsi kegiatan vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp.11.480.000
29.	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp.10.200.000
30.	PPDB	Rp.70.060.000
31.	Konsumsi kegiatan seleksi kopetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende	Rp.14.000.000
32.	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	Rp.7.360.000
33.	Lembur pengisian kuisioner BPK	Rp.2.553.000
34.	Pengadaan kursi 69 Buah	Rp.25.875.000
35.	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	Rp.630.000
36.	Service laptop dan printer	Rp.800.000
37.	Snack makan ujian	Rp.610.000
38.	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	Rp.4.550.000
39.	Pembelian baju olah raga guru	Rp.7.200.000
40.	Pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp.460.000
41.	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp.340.000
42.	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp.150.000
43.	Pembuatan taman	Rp.15.000.000
44.	Pengadaan alat kesehatan	Rp.68.895.000
45.	Kegiatan Teacer study	Rp.1.226.000
46.	Pembelian obat obatan, gallon dan dispenser	Rp.1.800.000
47.	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp.1.500.000
48.	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	Rp.1.000.000
49.	Ongkos kerja pemasangan closet dan shower di ruang WC kepala sekolah	Rp.2.000.000
50.	Bayar orang jaga material di smea lama	Rp.1.000.000

Halaman 277 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp.100.000
52.	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp.228.400.000
53.	Pembayaran operator dapodik	Rp.6.500.000
54.	Pembayaran honor teknisi	Rp.12.300.000
55.	Pembelian pembersih lantai super sill	Rp.3.500.000
56.	Transportasi guru pendamping latihan voly	Rp.2.400.000
57.	Biaya permen dan aqua latihan voly	Rp.1.200.000
58.	Honor guru tamu karate	Rp.4.800.000
59.	Biaya aqua dan permen latihan karate	Rp.1.200.000
60.	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp.350.000
61.	Pengadaan 1 shower closed	Rp.300.000
62.	Pengadaan closed duduk	Rp.1.005.000
63.	Pengadaan 1 galon mateks	Rp.115.000
64.	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp.500.000
65.	Tamu sekolah	Rp.7.794.000
66.	ATK Komite	Rp.6.350.500
67.	Perjalanan Dinas	Rp.74.854.594
68.	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp.2.000.000
69.	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	Rp.8.550.000
70.	Pembayaran Sumbangan Nikah	Rp.1.425.000
71.	Instalasi Listrik 4 ruang kelas (Tes P3K)	Rp.40.000.000
72.	Pengerjaan Tembok belakang RPS	Rp.45.000.000
73.	Bangun Penyaringan Kamar WC	Rp.10.000.000
74.	Lembur Tanda Tangan Laporan Pendidikan	Rp.3.000.000
75.	Lembur Tanda Tangan Ijasah	Rp.2.000.000
76.	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	Rp.2.000.000
77.	Pinjaman para Guru	Rp.6.000.000

Halaman 278 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



78.	Pekerjaan Pintu dan Jendela Ruang kelas dibawa aula	Rp.16.000.000
79.	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp.2.000.000
80.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
81.	Pembayaran Bambu untuk pembangunan tembok dilokasi SMEA lama	Rp. 500.000
82.	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	Rp.1.518.000
83	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp. 800.000
84	Pembelian 2 buah Alcare thermometer	Rp. 861.000
Total pengeluaran		Rp.904.319.094

- Bahwa dalam proses perencanaan pengelolaan hasil penggalangan Tahun Ajaran 2021/2022, tidak direncanakan secara baik. Terdapat kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan komite dan dalam pelaksanaan, seharusnya pertanggungjawaban keuangan berpatokan atau merujuk pada RAPBS karena RAPBS adalah perencanaan awal.
- Rincian kegiatan yang tidak direncanakan berdasarkan data yang diperoleh adalah  
..

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
2	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	
3	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	
4	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	
5	Penulusuran tamatan	
6	Lembur persiapan ujian smester ganjil	
7	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	
8	Pembelian gordenn ruang ujian P3K	
9	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	
10	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	

Halaman 279 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



11	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	
12	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	
13	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	
14	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	
15	Service laptop dan printer	
16	Snack makan ujian	
17	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	
18	Pembelian baju olah raga guru	
19	Snack Pemilihan pengurus osis	
20	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	
21	Kegiatan Teacer study	
22	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	
23	Pembelian pembersih lantai super sill	
24	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	
25	Pembayaran Sumbangan Nikah	
26	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	
27	Pinjaman para Guru	
28	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	
29	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
30	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	
31	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	

- Bahwa berdasarkan data yang ahli peroleh, Tahun ajaran 2021/2022 semua kegiatan yang ada dalam laporan pertanggungjawaban.
- Ahli tidak dapat berpendapat terhadap hal tersebut apakah masuk dalam kerugian negara atau tidak karena yang dapat menentukan bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan Negara adalah pihak lain.
- Bahwa anggota Komite dan pengurus Komite SMK N 1 Ende, tidak terbentuk sesuai ketentuan namun hasil penggalangan dana yang telah diterima dari orang tua wali murid adalah sah merupakan keuangan komite, karena hasil penggalangan digunakan untuk 4 kriteria dalam permendikbud 75 Tahun 2016.

Halaman 280 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pembiayaan operasional komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 ayat (5) huruf d, harus berpedoman pada pasal 11 Ayat (2). Sedangkan maksud penjelasan AHLI pada pemeriksaan terdahulu yaitu biaya transportasi pengurus komite dalam melaksanakan tugas.
- Bahwa walaupun proses pembentukan pengurus komite tidak sesuai ketentuan, walaupun proses penggalangan dana tidak sesuai mekanisme namun hasil penggalangan dana yang telah diterima dari orang tua wali siswa merupakan keuangan komite, yang mengumpulkan uang hasil penggalangan adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. perlu ahli tambahkan walapun proses pembentukan pengurus komite tidak sesuai ketentuan, walaupun proses penggalangan dana tidak sesuai mekanisme dan dalam penggunaan disalahgunakan atau terjadi penyimpangan, namun penerimaan keuangan sah merupakan keuangan komite. Jika dalam pelaksanaan terdapat kesalahan mekanisme dan terjadi maka itu adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Pihak Sekolah dilarang menahan atau menunda penerimaan raport siswa jika siswa tidak membayar uang komite, tidak ada dasar hukum yang membolehkan pihak sekolah menahan rapor siswa jika tidak membayar komite.
- Bahwa pihak SMK N 1 Ende, dalam melakukan penerimaan uang komite, dihimbau oleh kepala sekolah saat itu sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bahwa "Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite" jika demikian apakah perbuatan tersangka HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, merupakan paksaan dan mewajibkan bagi orang tua wali murid untuk membayar uang komite sesuai besaran yang ditetapkan yaitu Tahun 2019/2020 sebesar Rp.2.300.000,- dan tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000,- bahwa himbauan yang disampaikan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd tidak dibenarkan, karena tidak ada regulasi atau aturan yang mengatur bahwa jika orang tua wali siswa tidak membayar uang komite maka rapor atau ijazah ditunda penerimaan sampai pelunasan keuangan komite.

### 3. Ahli DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI

Dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli diperiksa sehubungan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende, Tahun

Halaman 281 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 ;

- Bahwa Ahli memiliki surat izin menjadi akuntan public dengan nomor 464/KM.1/2021 yang berlaku hingga 2026.
- Bahwa Ahli bernaung dibawah Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman.
- Bahwa sampai dengan saat ini ijin Kantor Akuntan Publik RICHARD RISAMBESSY & BUDIMAN dengan nomor 604/KM.1/2020 masih berlaku ;
- Bahwa sebagai pimpinan Kantor Akuntan Publik RICHARD RISAMBESSY & BUDIMAN, dapat mewakili kantor akuntan kami dan sebagai akuntan publik yang telah memegang certified professional investigator (CPI) sesuai surat penugasan nomor :KAP-RRB/SUD/0050/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi : (a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (c) Penerimaan Negara; (d) Pengeluaran Negara; (e) Penerimaan Daerah; (f) Pengeluaran Daerah; (g) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; (h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;Dengan demikian, sesuai pasal 2 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pengertian Keuangan Daerah telah secara jelas telah diatur dalam pasal tersebut, artinya Keuangan Daerah termasuk dalam lingkup Keuangan Negara.
- Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 1 ayat (22) yang menyatakan bahwa, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa Penjelasan Pasal 32 UU No 31 Tahun 1999 juncto UU No 20 Tahun 2001 ayat (1) tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat

Halaman 282 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, disebutkan Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Bahwa sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- Bahwa Metode penentuan kerugian Negara :
  - Total loss, yaitu manakala seluruh jumlah yang dibayarkan dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara.
  - Adjusted total loss (total loss penyesuaian ke atas), yaitu total loss ditambah dengan pengeluaran biaya pemusnahan aset yang bermasalah:
  - Net loss (total loss penyesuaian ke bawah), yaitu total loss dikurangi dengan hasil penjualan aset yang bermasalah ;
  - Riil loss, yaitu kerugian dari selisih uang tunai ;
- Cara menentukan kerugian keuangan Negara/daerah dalam pengelolaan keuangan Negara/daerah
- Bahwa kerugian Keuangan Negara/Daerah dapat terjadi manakala terjadi atau terdapatnya penyimpangan dari yang seharusnya dengan senyatanya antara das sollen dengan das sein.
- Bahwa dalam tahap menentukan kerugian keuangan negara/daerah harus: terlebih dahulu dipastikan terjadinya penyimpangan antara aturan yang seharusnya dilakukan dengan pelaksanaan aturan tersebut,
- Penyimpangan terhadap aturan tersebut berkesesuaian atau berkausalitas dengan adanya kerugian keuangan negara kemudian baru dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dengan menghitung selisih antara yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Bahwa menurut ahli sebagaimana keterangan yang diberikan oleh ahli Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang pada pokoknya yang menerangkan bahwa Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan

Halaman 283 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karea itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

- Bahwa secara umum, manakala pengelolaan dana Komite Sekolah tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, yang merupakan bagian dari keuangan Negara/daerah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.
- Bahwa surat penugasan untuk menjadi saksi AHLI dengan Nomor Surat :KAP-RRB/SUD/0050/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2022, ahli menerima Surat Permohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan ahli dan ahli telah menerima berkas dan bukti-bukti dari penyidik yang berkaitan dengan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan pengelolaan dana Komite Sekolah Tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, pada SMK N 1 Ende pada tanggal 17 Oktober 2022 s/d tanggal 22 Oktober 2022.
- Bahwa setelah ahli mempelajari berkas dan bukti-bukti penyidikan tersebut di atas, dalam pandangan ahli cukup untuk memberikan keterangan ahli Pemberian keterangan ahli dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, mulai pukul 09.00 WIB.
- Prosedur perhitungan kerugian Negara adalah sebagai berikut :
  - Mereview berkas dan bukti-bukti yang diserahkan oleh penyidik Polres Ende.
  - Melakukan interview kepada Penyidik untuk memastikan kelengkapan berkas dan bukti-bukti penyidikan untuk mendapatkan pemahaman yang sebenarnya.--
  - Melakukan analisis berkas dan bukti-bukti agar mendapatkan persesuaian hubungan antara satu bukti dengan bukti yang lain.
  - Mempelajari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangandana

Halaman 284 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Sekolah Tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021.

- Memastikan eksistensi Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
- Memilih metode perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah yang tepat untuk kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana Komite Sekolah Tahun ajaran 2019/2020, Tahun ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, pada SMK N 1 Ende.
- Melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah sebagai akibat dari eksistensi perbuatan melawan hukum.
- Bahwa berdasarkan fakta hasil penyidikan, penyidik menemukan bukti yang cukup bahwa Keberadaan Komite SMK N 1 Ende sebagai berikut : Dari keterangan saksi-saksi di temukan fakta sebagai berikut :
- Bahwa SMK N 1 Ende mengumpulkan keuangan Komite sekolah yang bersumber dari iuran wajib orang tua/wali siswa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak didukung dengan anggaran dari pemerintah, adapun besaran uang komite sekolah untuk tahun pelajaran 2019/2020 yakni sebesar Rp. 2.300.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2020/2021 yakni sebesar Rp. 1.800.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2021/2022 yakni sebesar Rp.1.800.000,- setiap siswa.
- Adapun realisasi penerimaan Keuangan komite sekolah yang terkumpul yakni :

Tahun Ajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	Rp. 902.450.000	Rp. 811.100.000	Rp.1.018.600.000	Rp. 2.732.150.000
2020/2021	Rp. 851.170.000	Rp. 722.650.000	Rp. 608.400.000	Rp. 2.182.220.000
2021/2022	Rp. 436.500.000	Rp. 344.950.000	Rp. 384.650.000	Rp. 1.166.100.000
Total secara keseluruhan				Rp. 6.080.470.000
Enam milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah				

- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa dana komite sekolah dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan (Permendikbud 75

Halaman 285 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Berdasarkan fakta sebagai berikut :

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
2. Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
3. Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai ketentuan yakni sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.
4. Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
5. Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende hasil penggalangan dari orang tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.
6. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite,

Halaman 286 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian penggunaan keuangan komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.

7 Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bandahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.

- Bahwa menurut pendapat ahli bahwa dana komite SMK N 1 Ende adalah bagian dari Keuangan Negara sebagaimana dijelaskan oleh ahli Keuangan Negara sdr. Drs. Siswo Sujanto, DEA, sehingga pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 Tahun 2016, tentang Dana Komite. Namun AHLI berpendapat bahwa sebagian pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende tidak sesuai mekanisme yang diatur oleh Permendikbud RI nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah. Data Siswa.

Dari hasil penyelidikan ditemukan antara lain :

1. Data Siswa pada SMK N 1 Ende.

Tahun Ajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	479	416	479	1.374
2020/2021	576	442	392	1.410
2021/2022	576	575	439	1.590

b. Data Penerimaan Tahun Ajaran 2019/2020  
Kelas X

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.77.150.000	Rp.67.000.000	Rp.10.150.000	
2	X B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.82.650.000	Rp.67.000.000	Rp.15.650.000	



3	X C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.300.000	Rp.65.650.000	Rp .3.650.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.75.100.000	Rp.71.100.000	Rp .4.000.000	
	JUMLAH	Rp.304.200.000	Rp.270.750.000	Rp.33.450.000	
5	X A AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.71.350.000	Rp.68.650.000	Rp .2.700.000	
6	X B AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.950.000	Rp .65.400.000	Rp.10.550.000	
7	X C AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.75.650.000	Rp.70.050.000	Rp.5.600.000	
	JUMLAH	Rp.222.950.000	Rp.204.100.000	Rp.18.850.000	
8	X BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 59.800.000	Rp.56.700.000	Rp.3.100.000	
9	X A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 64.600.000;	Rp.55.850.000	Rp.8.750.000	
10	X B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.68.850.000	Rp .56.700.000	Rp.12.150.000	
	JUMLAH	Rp.133.450.000	Rp.112.550.000	Rp.20.900.000	
11	X A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.70.800.000	Rp.69.350.000	Rp.1.450.000	
12	X B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.74.800.000	Rp.65.700.000	Rp.9.100.000	
13	X C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.73.850.000	Rp.66.750.000	Rp.7.100.000	
	JUMLAH	Rp 219.450.000	Rp.201.800.000	Rp.17.650.000	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14	X REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp .64.800.000	Rp.56.550.000	Rp.8.250.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp 1.004.650.000	Rp.902.450.000	Rp.102.200.000	

**KELAS XI**

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.71.300.000	Rp.63.450.000	Rp.7.850.000	
2	XI B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.60.700.000	Rp.56.150.000	Rp .4.150.000	
3	Xi C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.000.000	Rp.57.200.000	Rp.11.800.000	
4	X D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 56.500.000	Rp.56.150.000	Rp.350.000	
	JUMLAH	Rp. 257.100.000	Rp.232.950.000	Rp.24.150.000	
5	XI A AKUNTANSI	Rp. 71.350.000	Rp.58.200.000	Rp.12.100.000	
6	XI B AKUNTANSI	Rp. 71.350.000	Rp.59.350.000	Rp 11.950.000	
7	XI C AKUNTANSI	Rp63.100.000	Rp.57.550.000	Rp.5.550.000	
	JUMLAH	Rp. 205.700.000	Rp.175.100.000	Rp.30.600.000	
8	PEMASARAN	Rp.32.550.000	Rp.31.750.000	Rp.800.000	
9	XI A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 46.000.000	Rp.42.700.000	Rp.3.300.000	
10	XI B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp. 48.300.000	Rp.39..300.000	Rp.9.000.000	
	JUMLAH	Rp. 94.300.000	Rp.82.000.000	Rp.12.300.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	XI A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 61.950.000	Rp.54.850.000	Rp.7.100.000	
12	XI B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 63.800.000	Rp .49.500.000	Rp.14.300.000	
13	XI C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 74.000.000	Rp.66.800.000	Rp.7.200.000	
14	XI D TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 64.250.000	Rp.60.950.000	Rp.3.300.000	
	JUMLAH	Rp. 264.000.000	Rp.232.100.000	Rp.31.900.000	
15	XI REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 67.150.000	Rp.57.200.000	Rp.9.550.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp.920.800.000	Rp.811.100.000	Rp.109.700.000	

## KELAS XII

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XII A OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.58.000.000	Rp.55.000.000	Rp.3.000.000	
2	XII B OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.69.700.000	Rp.68.900.000	Rp.800.000	
3	XII C OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.70.150.000	Rp.68.800.000	Rp.1.350.000	
4	XII D OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 51.750.000	Rp.50.750.000	Rp.1.000.000	
	JUMLAH	Rp. 249.600.000	Rp. 243.450.000	Rp.6.150.000	
5	XII A AKUNTANSI	Rp. 73.600.000	Rp. 73.600.000	-	
6	XII B AKUNTANSI	Rp. 66.700.000	Rp. 66.300.000	Rp .400.000	
7	XII C AKUNTANSI	Rp. 70.150.000	Rp. 68.800.000	Rp.1.350.000	
	JUMLAH	Rp. 210.450.000	Rp.208.700.000	Rp.1.750.000	

Halaman 290 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8	PEMASARAN	Rp. 25.000.000	Rp..24.600.000	Rp.400.000	
9	XII A USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.71.300.000	Rp.61.000.000	Rp.10.300.000	
10	XII B USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.56.700.000	Rp.54.950.000	Rp.1.750.000	
	JUMLAH	Rp.128.000.000	Rp.115.950.000	Rp.12.050.000	
11	XII A TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 71.300.000	Rp. 70.650.000	Rp.650.000	
12	XII B TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 69.450.000	Rp.64.050.000	Rp.5.400.000	
13	XII C TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 60.950.000	Rp.57.000.000	Rp.3.950.000	
14	XII D TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 69.000.000	Rp.69.000.000	Rp -	
15	XII E TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 62.100.000	Rp.54.000.000	Rp.8.100.000	
16	XII F TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 60.700.000	Rp.58.300.000	Rp.2.400.000	
	JUMLAH	Rp. 393.500.000	Rp.373.000.000	Rp.20.500.000	
17	XII REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp. 55.200.000	Rp.52.900.000	Rp.2.300.000	
	TOTAL JUMLAH	Rp.1.061.750.000	Rp.1.018.600.000	Rp.43.160.000	

TAHUN AJARAN 2020/2021

Kelas X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
----	------------------------	--------------	--------------------	-----------	-----

Halaman 291 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.55.500.000	Rp.9.300.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp. 61.100.000	Rp.3.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp. 52.150.000	Rp.12.650.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp. 52.320.000	Rp.12.480.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp. 221.070.000	Rp.38.130.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp. 51.100.000	Rp.13.700.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp. 59.000.000	Rp.5.800.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp. 51.650.000	Rp.13.150.000	
J U M L A H			Rp.194.400.000	Rp. 161.750.000	Rp.32.650.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp. 50.400.000	Rp .14.400.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp. 54.450.000	Rp.10.350.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.50.150.000	Rp.14.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.104.600.000	Rp.25.000.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.61.300.000	Rp.3.500.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.57.700.000	Rp.7.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.50.050.000	Rp. 14.750.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp. 36.300.000	Rp. 28.500.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp . 48.000.000	Rp. 16.800.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp. 253.350.000	Rp. 70.650.000	

Halaman 292 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp. 60.000.000	Rp. 4.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp1.036.800.000	Rp.851.170.000	Rp.185.630.000	

**KELAS XI**

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 59.400.000	Rp.54.450.000	Rp.4.950.000	
2	XI B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp.58.100.000	Rp.6.700.000	
3	XI C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 57.600.000	Rp.54.050.000	Rp.3.550.000	
4	XI D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 57.600.000	Rp.52.450.000	Rp.5.150.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.219.050.000	Rp.20.350.000	
5	XI A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.56.300.000	Rp.4.900.000	
6	XI B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.55.700.000	Rp.5.500.000	
7	XI C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.45.200.000	Rp.10.600.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.157.200.000	Rp.21.000.000	
8	XI	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp 48.600.000	Rp.47.600.000	Rp.1.000.000	
9	XI A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.52.200.000	Rp.48.050.000	Rp.4.150.000	
10	XI B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.47.950.000	Rp.6.050.000	
J U M L A H			Rp.106.200.000	Rp.96.000.000	Rp.10.200.000	
11	XI A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.52.100.000	Rp.1.900.000	
12	XI B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.52.000.000	Rp.5.600.000	
13	XI C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.53.700.000	Rp.3.900.000	
J U M L A H			Rp.169.200.000	Rp.157.800.000	Rp.11.400.000	
14	XI	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.45.000.000	Rp.5.400.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL JUMLAH	Rp 792.000.000	Rp.722.650.000	Rp.69.350.000	
--------------	----------------	----------------	---------------	--

## KELAS XII

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.55.800.000	Rp.48.000.000	Rp.7.800.000	
2	XII B	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.45.000.000	Rp.36.650.000	Rp.8.350.000	
3	XII C	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.48.600.000	Rp.45.050.000	Rp.3.550.000	
4	XII D	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.43.200.000	Rp.38.450.000	Rp.4.750.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.168.150.000	Rp.24.450.000	
5	XII A	A K U N T A N S I	Rp.55.800.000	Rp.41.000.000	Rp.14.800.000	
6	XII B	A K U N T A N S I	Rp.55.100.000	Rp.45.050.000	Rp.10.050.000	
7	XII C	A K U N T A N S I	Rp.46.800.000	Rp.42.950.000	Rp.3.850.000	
J U M L A H			Rp.157.700.000	Rp.129.000.000	Rp.28.700.000	
8	XII	P E M A S A R A N	Rp.23.400.000	Rp.23.300.000	Rp.100.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.36.000.000	Rp.32.200.000	Rp.3.800.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.34.200.000	Rp.31.300.000	Rp.2.900.000	
J U M L A H			Rp.70.200.000	Rp.63.500.000	Rp.6.700.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.44.900.000	Rp.1.900.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.100.000	Rp.42.450.000	Rp.3.650.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.50.100.000	Rp.3.900.000	
14	XII D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.42.400.000	Rp.4.400.000	
J U M L A H			Rp.193.700.000	Rp.179.850.000	Rp.13.850.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.44.600.000	Rp.5.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.688.000.000	Rp.608.400.000	Rp.79.600.000	

TAHUN AJARAN 2021/2022

Kelas X

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X 1	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.25.050.000	Rp.39.750.000	
2	X 2	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.32.050.000	Rp.32.750.000	
3	X 3	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
4	X 4	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.27.550.000	Rp.37.250.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.111.500.000	Rp.147.700.000	
5	X 1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.24.650.000	Rp.40.150.000	
6	X 2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.550.000	Rp.38.250.000	
7	X 3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
J U M L A H			Rp.194.400.000	Rp.78.050.000	Rp.116.350.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.31.050.000	Rp.33.750.000	
9	X 1	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.27.100.000	Rp.37.700.000	
10	X 2	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.26.150.000	Rp.38.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.53.250.000	Rp.76.350.000	
11	X 1	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.25.000.000	Rp.39.800.000	
12	X 2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.30.850.000	Rp.33.950.000	
13	X 3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.31.300.000	Rp.33.500.000	
14	X 4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.27.350.000	Rp.37.450.000	

Halaman 295 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.114.500.000	Rp.144.700.000	
15	X 1	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.25.100.000	Rp.39.700.000	
16	X 2	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.23.050.000	Rp.41.750.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.48.150.000	Rp.81.450.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.436.500.000	Rp.600.300.000	

## Kelas XI

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.28.100.000	Rp.36.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.17.800.000	Rp.47.000.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.77.000.000	Rp.182.200.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.63.000.000	Rp.16.000.000	Rp.47.000.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.30.300.000	Rp.34.500.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.14.000.000	Rp.50.800.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.60.300.000	Rp.132.300.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.21.200.000	Rp.43.600.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.23.100.000	Rp.41.700.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.9.300.000	Rp.55.500.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.32.400.000	Rp.97.200.000	

Halaman 296 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.39.450.000	Rp.25.350.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.24.700.000	Rp.40.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.23.150.000	Rp.41.650.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.12.800.000	Rp.52.000.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.20.850.000	Rp.43.950.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp.120.950.000	Rp.203.050.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.33.100.000	Rp.31.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.035.000.000	Rp.344.950.000	Rp.690.050.000	

## Kelas XII

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.59.400.000	Rp.31.650.000	Rp.27.750.000	
2	XII B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.30.450.000	Rp.34.350.000	
3	XII C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.30.950.000	Rp.26.650.000	
4	XII D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.28.950.000	Rp.28.650.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.122.000.000	Rp.117.400.000	
5	XII A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.31.050.000	Rp.30.150.000	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6	XII B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.23.250.000	Rp.37.950.000	
7	XII C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.18.600.000	Rp.37.200.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.72.900.000	Rp.105.300.000	
8	XII	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp.19.800.000	Rp.28.800.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.21.650.000	Rp.32.350.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.20.250.000	Rp.33.750.000	
J U M L A H			Rp.108.000.000	Rp.41.900.000	Rp.66.100.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.34.200.000	Rp.19.800.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.36.100.000	Rp.21.500.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.55.800.000	Rp.31.650.000	Rp.24.150.000	
J U M L A H			Rp.167.400.000	Rp.101.950.000	Rp.65.450.000	
14	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.46.800.000	Rp.26.100.000	Rp.20.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.788.400.000	Rp.384.650.000 0	Rp.403.750.000	

3. Data Pertanggungjawaban nyata yang disampaikan oleh bendahara saudara  
WENSESLAUS DERTA, S.Pd:

TAHUN AJARAN 2019 s/d 2020

NO	JENIS KEGIATAN	
----	----------------	--

Halaman 298 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		TOTAL
1	Gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan	Rp.1.217.000.000
2	Pas foto peserta Ujian nasional	Rp.69.300.000
3	Pembayaran siswa prestasi	Rp.1.650.000
4.	Pembangunan Ruang Tata Niaga	Rp.125.287.000
5.	Biaya sensor 11 pohon	Rp.11.000.000
6.	Penataan Taman	Rp.2.110.000
7.	UKS / P3k	Rp.1.220.000
8.	Ret – ret muhasabah	Rp.122.450.000
9.	Tabloit dan surat kabar	Rp.5.330.000
10.	Pengembangan Bakat Siswa	Rp.11.150.000
11.	Iuran Musyawarah Kegiatan kepala sekolah SMK	Rp.4.000.000
12.	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp.2.105.500
13.	Perbaikan Kursi & Meja Siswa	Rp.4.805.000
14.	Perbaikan toilet Guru & Siswa	Rp.2.644.000
15.	Transportasi muat meja dan kursi	Rp.100.000
16.	Biaya Pengubah lagu Himne SMK	Rp.600.000
17.	Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela	Rp.1.500.000
18.	HUT SMK	Rp.35.180.000
19.	HUT Satpam	Rp. 750.000
20.	Kegiatan Kerohanian	Rp.1.050.000
21.	Sewa sound sosialisasi radikalisme dari KODIM	Rp.350.000
22.	Kunjungan Kadis Pendidikan dan kebudayaan prov NTT	Rp.6.625.000

Halaman 299 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Uang kedukaan Mantan Guru SMK negeri 1 an. MIKAEL DEI	Rp.1.000.000
24.	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	Rp.3.300.000
25.	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	Rp.5.700.000
26.	Instalasi air Bersih	Rp.4.827.000
27.	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasaranan)	Rp.1.558.000
28.	Krans bunga	Rp.1.670.000
29.	Pengadaan 1 Buah Flas disk 16 GB untuk kegiatan Pramuka	Rp.130.000
30.	Pengadaan Senter penjaga Malam	Rp. 450.000
31.	Pemasangan Finger Print	Rp.200.000
32.	Pembelin 1 buah Bola Voly dan Net Voly	Rp.900.000
33.	Pengadaan Lampu	Rp.1.513.000
34.	Pemasangan Trali Jendela	Rp. 6.200.000
35.	Pengadaan Meubeler tahun 2018/2019	Rp.96.000.000
36.	Persiapan simulasi UNBK	Rp.300.000
37.	Konsumsi pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	Rp.3.800.000
38.	Supervisi Mutu program OTKP	Rp.1.444.500
39.	Upah Kerja Pembangunan 2 ruang RPS	Rp.130.000.000
40.	Maintenance Komputer Lab Persiapan UNBK	Rp.51.145.600
41.	Pembelian computer 10 unit	Rp.80.675.000
42.	Biaya Rapat Guru dan pegawai	Rp.18.860.000
43.	Pengadaan kelengkapan Cleaning Service	Rp.860.000
44.	Pulsa Data Operator Operasional Sekolah	Rp.3.216.000
45.	Tamu Sekolah	Rp.6.472.000
46.	ATK Komite	Rp.2.229.500

Halaman 300 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



47.	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS SMK/SMA	Rp.2.000.000
48.	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	Rp.2.100.000
49.	Konsumsi Penguji Ujian sekolah Praktik Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp.4.725.000
50.	Konsumsi Penyusunan Soal Ujian Sekolah Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp.5.220.000
51.	Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK perhari tahun pelajaran 2019/2020	Rp.2.850.000
52.	Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Kaki Untuk mengikuti turnamen antar pelajar tingkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019	Rp.5.340.000
53.	Perjalanan Dinas	Rp.92.970.524
54.	Transportasi Pengantaran siswa PLK Ke Kelitembu	Rp.1.000.000
55.	Transportasi Untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDB untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah	Rp.500.000
56.	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk pengawalan Erobik MPLS	Rp.500.000
57.	Jasa saund Sistem kegiatan MPLS	Rp.300.000
58.	Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi), pengawas, korwas, dan pemateri	Rp.1.350.000
59.	Pembelian 1 buah bola kaki kassa	Rp.162.000
60.	Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT	Rp.500.000
61.	Pembayaran pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANTONIUS TOLO	Rp.129.800
62.	Pembelian 15 Dos air Kelimutu untuk kegiatan hari Pramuka	Rp.285.000
63.	Pembelian 1 cup lens 18.55	Rp.80.000
64.	Lanjutan Pembangunan Aula	Rp.502.127.000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

65.	Penjilidan istimewa laminasi 4 buku	Rp.100.000
66.	Jilid Laminasi 1 Buku ukuran F4	Rp.30.000
67.	Pengadaan 2 baliho	Rp.310.000
68.	Pengadaan 1 Spanduk	Rp.100.000
69.	Penghargaan purna bakti guru	Rp.8.500.000
70.	Sumbangan duka orang tua dari ketua komite	Rp.3.000.000
71.	Pengecetan ruang kepala sekolah	Rp.1.683.000
72.	Biaya pengobatan siswa yang celaka	Rp.2.000.000
73.	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	Rp. 2.000.000
Total pengeluaran		Rp.2.688.519.424

**TAHUN AJARAN 2020/ 2021**

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembayaran Honor Komite	Rp.411.750.000
2.	Pembayaran honor teknisi	Rp. 28.100.000
3.	Honor Operator Dapodik	Rp.19.500.000
4.	Pembayaran Kesra PNS	Rp.66.200.000
5.	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp.164.150.000
6.	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp.80.138.433
7.	Penulisan ijasah	Rp.13.800.000
8.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2019/2020	Rp.17.100.000
9.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2020/2021	Rp.13.725.000
10.	Pembayaran honor Input kwitansi penerimaan dana komite	Rp.19.500.000
11.	Pembelian alat perabot pendukung	Rp.5.328.000

Halaman 302 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



12.	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan peninjauan dan pengantaran	Rp. 2.100.000
13.	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp.1.995.000
14.	Peringatan hari pancasila	Rp.14.775.000
15.	Rapat dewan Guru	Rp. 20.585.000
16.	Pemberitaan dimedia	Rp.2.900.000
17.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah, Flores Pos	Rp.580.000
18.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah Pos Kupang	Rp.840.000
19.	Peringatan hari guru	Rp.8.550.000
20.	Lembur penggandaan soal ujian	Rp.2.000.000
21.	Lembur persiapan kedatangan inspektorat	Rp. 4.200.000
22.	Konsumsi kedatangan inspektorat	Rp. 4.000.000
23.	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp.2.490.000
24.	Kunjungan kepala dinas provinsi NTT	Rp.9.100.000
25.	Biaya penebangan pohon	Rp.2.000.000
26.	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp.2.500.000
27.	Konsumsi Ujian semester ganjil	Rp.11.250.000
28.	Pembelian alat kesehatan	Rp.8.089.000
29.	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp.21.350.000
30.	Transportasi maulid di anaraja	Rp.500.000
31.	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp.300.000
32.	Rekreasi kepala sekolah dan guru	Rp.960.000
33.	Pembayaran Tabloid Ekspo	Rp.240.000
34.	Pengadaan kostum olah raga guru Pembina	Rp.19.200.000
35.	Dana Shering PPDP 2020/2021	Rp.38.660.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp.1.100.000
37.	Pelaksanaan IHT Kerja SMK negeri 1 ende tahun 2020	Rp.23.430.000
38.	Pembelian kostum dan satu bola voly	Rp.875.000
39.	Perbaikan kursi meja	Rp.2.000.000
40.	Beli 2 bendera, umbul umbul dan tali rafia	Rp.80.000
41.	Sewa kamera canon	Rp.100.000
42.	Jilid istimewa dokumen kurikulum	Rp.150.000
43.	Pengadaan Kipas angin berdiri 10 buah	Rp.6.000.000
44.	Beli facesil 17 buah	Rp.340.000
45.	Kegiatan Drumband Pelangi nusantara	Rp.15.958.000
46.	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp.40.000.000
47.	Sewa molen cor tiang aula	Rp.5.000.000
48.	Bayar utang bamboo untuk pembangunan aula 200 batang	Rp.5.000.000
49.	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang Ruang praktek siswa	Rp.6.000.000
50.	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp.750.000
51.	Service laptop Thosiba	Rp.500.000
52.	Drum band penjemputan gubernur dan rombongan	Rp.1.981.000
53.	Pembelian 1 buah tendon	Rp.1.300.000
54.	Jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.15.000.000
55.	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp.12.000.000
56.	Pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan aula	Rp.43.800.000
57.	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp.96.000.000
58.	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp.6.000.000

Halaman 304 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	Bayar sisa pembelian batu fondasi kerja aula	Rp.4.800.000
60.	Bayar sisa pembelian Kerikil kerja aula t	Rp.11.250.000
61.	Beli peta kab ende 2 buah	Rp.800.000
62.	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp.195.000.000
63.	Jasa konsultan Pembuatan revisi laporan RPS	Rp.1.750.000
64.	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasangan	Rp.1.500.000
65.	Pembelian 10 baju merah marun	Rp.300.000
66.	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp.12.200.000
67.	Lembur tanda tangan ijasah	Rp.3.000.000
68.	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp.1.200.000
69.	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp.5.500.000
70.	Bimtek persiapan akreditasi	Rp.5.850.000
71.	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp.500.000
72.	ATK Komite	Rp.13.305.000
73.	Tamu Sekolah	Rp.21.221.482
74.	Pembelian super sill pembersih lantai	Rp.2.250.000
75.	Pembayaran utang tali ijuk	Rp.1.000.000
76.	Biaya pengerjaan Rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp.25.000.000
77.	Pembelian lampu LED nama uala dan nama sekolah	Rp.35.000.000
78.	Pembelian 1 unit Server	Rp.20.000.000
79.	Pembelian 10 unit Komputer	Rp.37.500.000
80.	Biaya pengiriman Server dan computer	Rp.572.800
81.	Latihan Paskibraka	Rp.200.000
82.	Pembelia Bola Lampu Philips	Rp.9.474.000

Halaman 305 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

83.	Pembelian Pulsa Data Opeartor Dapodik	Rp.621.000
84.	Pembelian Baliho dan Stempel	Rp.620.000
85.	Pembelian Karangan Bunga ( kedukaan)	Rp.200.000
86.	Transoprtasi guru pendamping latihan Voly	Rp .4.400.000
87.	Biaya Snack dan aqua latihan Voly	Rp.4.800.000
88.	Hono Guru tamu Karate	Rp.9.600.000
89.	Biaya tranfortasi pembelian Umbul-umbul dan bamboo	Rp.200.000
90.	Bahan Bakar mesin potong rumput	Rp.600.000
91.	Pembelian Tangki Air	Rp.120.000
92.	Pembelian Karung	Rp.67.000
93.	Biaya Administrasi Bantuan Sumur Bor	Rp.5.000.000
94.	Biaya ulang Tahun Sekolah	Rp.15.000.000
95.	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp.4.400.000
96.	Bayar ke kas Provinsi	Rp.7.500.000
97.	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa ( bencana Adonara)	Rp.3.250.000
98.	Transfortasi Ende –Larantuka ( Bencana Adonara)	Rp.4.800.000
99.	Tranfortasi Laut Larantuka-Adonara	Rp.2.000.000
100.	Tranfortasi Darat dari Adonara ke- Titik Bencana	Rp.1.000.000
101.	Sering dana Komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word kls XII dan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa antar kelas dalam program keAHLlan	Rp.14.000.000
102.	Instalasi Listri ruang tata niaga lama	Rp.2.520.000
103.	Pengadaan Foto siswa kls XII 382 Orang @ 25.000	Rp.9.550.000
104.	Pembayaran utang jasa konsultan aula	Rp.51.000.000
105.	Pembangunan Tembok selatan depan aula	Rp.25.000.000
106.	HUT Sekolah	Rp.15.000.000

Halaman 306 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

107.	Konsumsi Work Shop	Rp.5.300.000
108.	Instalasi Listrik ruang TN Lama	Rp.2.520.000
109.	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp.3.855.000
Total pengeluaran		Rp.1.903.915.715

**TAHUN AJARAN 2021/2022**

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pengadaan golamba	Rp.8.000.000
2.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
3.	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp.5.000.000
4.	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi smea lama jalan mbongawani	Rp.5.000.000
5.	Pembelian material untuk pembangunan pagar di smea lama jalan mbongawani	Rp.3.600.000
6.	Pembelian lampu Philips spiral	Rp.7.600.000
7.	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.32.000.000
8.	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	Rp.10.000.000
9.	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp.1.832.000
10.	Insentif team gugus covid	Rp.5.000.000
11.	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah	Rp.1.175.000
12.	Publikasi media	Rp.3.000.000
13.	HUT sekolah	Rp.7.750.000
14.	Penulusuran tamatan	Rp.1.000.000
15.	Lembur persiapan ujian smester ganjil	Rp.1.070.000

Halaman 307 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



16.	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp.11.370.000
17.	Pembelian gordena ruang ujian P3K	Rp.2.500.000
18.	Pembelian bensin potong rumput	Rp.400.000
19.	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp.2.000.000
20.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.660.000
21.	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp.5.850.000
22.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.350.000
23.	Pembayaran majalah Flobamora	Rp.135.000
24.	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	Rp.2.700.000
25.	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	Rp.1.220.000
26.	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	Rp.29.545.000
27.	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	Rp.2.850.000
28.	Konsumsi kegiatan vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp.11.480.000
29.	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp.10.200.000
30.	PPDB	Rp.70.060.000
31.	Konsumsi kegiatan seleksi kompetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende	Rp.14.000.000
32.	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	Rp.7.360.000
33.	Lembur pengisian kuisioner BPK	Rp.2.553.000
34.	Pengadaan kursi 69 Buah	Rp.25.875.000
35.	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	Rp.630.000
36.	Service laptop dan printer	Rp.800.000
37.	Snack makan ujian	Rp.610.000
38.	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	Rp. 4.550.000
39.	Pembelian baju olah raga guru	Rp.7.200.000

Halaman 308 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



40.	Pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp.460.000
41.	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp.340.000
42.	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp.150.000
43.	Pembuatan taman	Rp.15.000.000
44.	Pengadaan alat kesehatan	Rp.68.895.000
45.	Kegiatan Teacer study	Rp.1.226.000
46.	Pembelian obat obatan, gallon dan dispenser	Rp.1.800.000
47.	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp.1.500.000
48.	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	Rp.1.000.000
49.	Ongkos kerja pemasangan closet dan shower di ruang WC kepala sekolah	Rp.2.000.000
50.	Bayar orang jaga material di smea lama	Rp.1.000.000
51.	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp.100.000
52.	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp.228.400.000
53.	Pembayaran operator dapodik	Rp.6.500.000
54.	Pembayaran honor teknisi	Rp.12.300.000
55.	Pembelian pembersih lantai super sill	Rp.3.500.000
56.	Transportasi guru pendamping latihan voly	Rp.2.400.000
57.	Biaya permen dan aqua latihan voly	Rp.1.200.000
58.	Honor guru tamu karate	Rp. 4.800.000
59.	Biaya aqua dan permen latihan karate	Rp.1.200.000
60.	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp.350.000
61.	Pengadaan 1 shower closed	Rp.300.000
62.	Pengadaan closed duduk	Rp.1.005.000
63.	Pengadaan 1 galon mateks	Rp.115.000
64.	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp.500.000



65.	Tamu sekolah	Rp.7.794.000
66.	ATK Komite	Rp.6.350.500
67.	Perjalanan Dinas	Rp.74.854.594
68.	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp.2.000.000
69.	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	Rp.8.550.000
70.	Pembayaran Sumbangan Nikah	Rp.1.425.000
71.	Instalasi Listrik 4 ruang kelas (Tes P3K)	Rp.40.000.000
72.	Pengerjaan Tembok belakang RPS	Rp. 45.000.000
73.	Bangun Penyaringan Kamar WC	Rp.10.000.000
74.	Lembur Tanda Tangan Laporan Pendidikan	Rp. 3.000.000
75.	Lembur Tanda Tangan Ijasah	Rp.2.000.000
76.	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	Rp.2.000.000
77.	Pinjaman para Guru	Rp.6.000.000
78.	Pekerjaan Pintu dan Jendela Ruang kelas dibawa aula	Rp.16.000.000
79.	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp.2.000.000
80.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
81.	Pembayaran Bambu untuk pembangunan tembok dilokasi SMEA lama	Rp.500.000
82.	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	Rp.1.518.000
83.	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp.800.000
84.	Pembelian 2 buah Alcare thermometer	Rp.861.000
Total pengeluaran		Rp.904.319.094

Dari hasil penyelidikan bahwa terdapat selisih antara penerimaan dan pengeluaran keuangan Komite SMK N 1 Ende antara lain :

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih
-------	------------	-------------	---------



2019/2020	2.732.150.000	2.688.519.424	Rp. 43.630.576
2020/2021	2.182.220.000	1.903.915.715	Rp. 278.304.285
2021/2022	1.166.100.000	904.319.094	Rp. 261.780.906
Total keseluruhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan			Rp. 583.715.767

- Bahwa dari data yang dipelajari perbandingan antara total penerimaan, data pertanggung jawaban dan data pertanggung jawaban secara reel, maka AHLI berpendapat telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 583.715.767. (lima ratus delapan puluh tiga jutatujuh ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), hal tersebut sesuai data yang telah diserahkan oleh penyidik dan penelitian AHLI.
- Bahwa setelah AHLI melakukan kejian dan penelitian terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Pada jenis kegiatan pembayaran gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan sebesar Rp. 1.217.000.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.163.900.000 terjadi selisih sebesar Rp. 53.100.000,- Terhadap pertanggung jawaban sebesar Rp. 1.163.900.000,- seharusnya hanya dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 967.900.000,- karena terdapat pembayaran jenis kegiatan yakni biaya transportasi dan tunjangan jabatan bagi guru dan pegawai PNS sebesar Rp. 196.000.000,- terhadap 48 orang guru dan pegawai PNS, terhitung mulai bulan Januari 2020 s/d bulan Juni 2020. dan menjadi temuan Inspektorat Propinsi NTT kemudian Inspektorat Propinsi NTT memberikan rekomendasi untuk mengembalikan keuangan tersebut kepada komite SMK N 1 Ende namun sampai dengan saat ini ada yang belum mengembalikan, walaupun bendahara dapat mempertanggung jawabkan pengeluaran tersebut namun pembayaran tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai ketentuan
  - b. Jenis kegiatan pembayaran siswa berprestasi dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 1.650.000,- yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.050.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 600.000,-

- c. Jenis kegiatan pembayaran Pembangunan Ruang Tata Niaga dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 125.287.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 103.590.200, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 21.696.800,-
- d. Jenis kegiatan Ret-ret dan Mushabah dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 122.450.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 121.000.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.450.000.
- e. Jenis kegiatan Pengembangan bakat siswa dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 11.150.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 8.450.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.700.000,.
- f. Jenis kegiatan Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 4.000.000,- namun kegiatan tersebut sesuai ketentuan tidak diperbolehkan menggunakan uang komite.
- g. Jenis kegiatan Perbaikan Lab prog. Adm Perkantoran dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.105.500,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.889.500,- sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 216.000,
- h. Jenis kegiatan Instalasi Air bersih dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 4.827.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.826.500, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 500,.
- i. Jenis kegiatan Upah Kerja Pembangunan 2 ruang RPS sebesar Rp. 130.000.000,- tidak boleh menggunakan uang komite karena pembangunan 2 ruang RPS tersebut sudah menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN.
- j. Jenis kegiatan Maintenance Computer Lab Persiapan UNBK dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 51.145.600,- kegiatan tersebut fiktif, tidak ada pembelian / perbaikan computer.

Halaman 312 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- k. Jenis kegiatan Pulsa data operator operasional sekolah dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 3.216.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- l. Jenis kegiatan ATK Komite dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.229.500,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.079.500, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 150.000,-
- m. Jenis kegiatan perjalanan dinas dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 92.970.524,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 82.264.983, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 10.705.541,-
- n. Jenis kegiatan Pembelian 1 Cap Lens 1855 dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 80.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- o. Jenis kegiatan Lanjutan pembangunan Aula dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 502.127.000,- yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 398.663.000, sehingga terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 103.464.000,-
- p. Jenis kegiatan Biaya Pengobatan siswa yang celaka dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- q. Jenis kegiatan pembayaran tamu sekolah unit produksi dalam laporan pertanggung jawaban sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Inspektorat Propinsi NTT keterangan sdr. FRANSISKUS BIN, SE, M.M terdapat temuan Inspektorat Propinsi NTT bahwa terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,- hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikaitkan dengan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.
- Bahwa menurut pendapat AHLI bahwa uang komite senilai Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah) walaupun sudah dipertanggung jawabkan namun sesuai ketentuan tidak diperbolehkan maka telah terjadi Kerugian lain pada Keuangan Negara sebesar Rp. 196.000.000,- (seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).total kerugian tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.430.155.017. dengan rincian :
  - a. selisih antara RAB dan pertanggung jawaban Rp. 43.630.576,-
  - b. hasil uji petik data pertanggung jawaban sebesar Rp. 386.524.441,-
  - c. Kerugian lain pada kerugian Negara yaitu Rp. 196.000.000,-Total Rp. 626.155.017,-
- Bahwa setelah ahli melakukan kejian dan penelitian terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2020/2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Pada jenis kegiatan pembayaran honor komite, sebesar Rp. 411.750.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 386.750.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 25.000.000,-
  - Pada jenis kegiatan pembayaran honor teknisi, sebesar Rp. 28.100.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 27.000.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.100.000,-
  - Pada jenis kegiatan pembayaran operator dapodik, sebesar Rp. 19.500.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 18.000.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 1.500.000,-
  - Pada jenis kegiatan pembayaran Kesra PNS, sebesar Rp. 66.200.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 32.450.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 33.750.000,-
  - Pada jenis kegiatan Perjalanan Dinas Guru Pegawai, sebesar Rp. 80.138.433,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 77.438.433,

Halaman 314 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar 2.700.000,-

- Pada jenis kegiatan KONsumsi dan snack pembangunan Bak Air, sebesar Rp. 2.490.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.480.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 10.000,-
- Pada jenis kegiatan Kunjungan Kadis PK Prop NTT, sebesar Rp. 9.100.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 5.100.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.000.000,-
- Pada jenis kegiatan pembelian alat kesehatan, sebesar Rp. 8.089.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 4.378.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.711.000,-
- Pada jenis kegiatan transportasi maule di Anaraja, sebesar Rp. 500.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan. –
- Pada jenis kegiatan Rekreasi Kepala Sekolah dan guru, sebesar Rp. 960.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan drumband pelangi nusantara, sebesar Rp. 15.958.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 12.468.000,-, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 3.490.000,-
- Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS, sebesar Rp. 750.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.-
- Pada jenis kegiatan bayar utang jasa tukang pengerjaan aula, sebesar Rp. 195.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan. –
- Pada jenis kegiatan lembur tanda tangan ijasah, sebesar Rp. 3.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.-
- Pada jenis kegiatan pembelian ATK Komite, sebesar Rp. 13.305.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 13.212.500, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 92.500,-
- Pada jenis kegiatan transportasi guru pendamping latihan voli, dan biaya snak latihan voli sebesar Rp. 9.200.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 4.800.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.400.000,-
- Pada jenis kegiatan biaya administrasi bantuan sumur bor, sebesar Rp. 5.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenis kegiatan biaya perbaikan jaringan telkom, sebesar Rp. 4.400.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pada jenis kegiatan konsumsi selama 3 hari 22 orang guru, sebesar Rp. 3.250.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan shering dana komite untuk kegiatan PKL dan bentuk project work kelas XII dalam kegiatan lomba kompetensi siswa antar kelas, sebesar Rp. 14.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan instalasi listrik ruang tata niaga lama, sebesar Rp. 3.520.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 300.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 2.220.000,-
- Pada jenis kegiatan pengadaan foto siswa kelas XII untuk 382 orang dikalikan Rp. 25.000/orang, sebesar Rp. 9.550.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan HUT Sekolah, sebesar Rp. 15.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Pada jenis kegiatan konsumsi work shop, sebesar Rp. 5.300.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan instalasi listrik ruang TN lama, sebesar Rp. 2.520.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan instalasi listrik ruang kepek bendahara dan kurikulum, sebesar Rp. 3.855.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 2.000.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.855.000,-
- Bahwa total kerugian tahun ajaran 2019/2021 sebesar Rp. 621.562.785. dengan rincian :
  - a. selisih antara RAB dan pertanggung jawaban Rp. 278.304.285,-
  - b. hasil uji petik data pertanggung jawaban sebesar Rp. 344.258.500,-
  - Total Rp. 621.562.785,-
- Bahwa setelah AHLI melakukan kejian dan penelitian terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2021/2022, dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - Pada jenis kegiatan pembelian material untuk pembangunan pagar SMEA lama, sebesar Rp. 3.600.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 3.300.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 316 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenis kegiatan pembelian lampu Philips spiral, sebesar Rp. 7.600.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 7.570.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 30.000,-
- Pada jenis kegiatan pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru, sebesar Rp. 32.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pelunasan jasa konsultan gambar WC Aula, sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan lembur persiapan ujian semester ganjil, sebesar Rp. 1.070.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan lembur pengadaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil, sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan biaya rapat guru dan pegawai, sebesar Rp. 5.850.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
- Pada jenis kegiatan snack dan konsumsi lembur persiapan bahan magang calon pengawas, sebesar Rp. 2.700.000,- tidak dapat dipertanggung jawabkan;
- Pada jenis kegiatan lembur rancang bangun lab computer TKJ, sebesar Rp. 2.850.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan PPDB, sebesar Rp. 70.060.000,-tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pengadaan alat kesehatan, sebesar Rp. 68.895.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 54.895.590, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 13.999.410,-
- Pada jenis kegiatan bayar orang jaga material di SMEA lama, sebesar Rp. 1.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan instalasi listrik 4 ruang kelas (tes P3K), sebesar Rp. 40.000.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 11.664.000,- terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 28.336.000,-
- Pada jenis kegiatan biaya pengerjaan tembok belakang RPS, sebesar Rp. 45.000.000,- yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 22.724.000, terjadi selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 22.276.000,-

Halaman 317 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jenis kegiatan bangun penyaringan kamar WC, sebesar Rp. 10.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan lembur tanda tangan laporan pendidikan, sebesar Rp. 3.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan lembur tanda tangan ijazah, sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pembayaran tamu sekolah di unit produksi, sebesar Rp. 2.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pinjaman para guru, sebesar Rp. 6.000.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp. 350.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pembayaran bamboo Rp. 500.000,- untuk pembangunan tembok di SMEA lama, tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Pada jenis kegiatan pembelian 2 (dua) buah Alcare termometer, sebesar Rp. 861.000,- tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Menurut pendapat ahli bahwa total kerugian tahun ajaran 2021/2022 sebesar Rp. 478.963.316. dengan rincian :
  - a. selisih antara RAB dan pertanggung jawaban Rp. 261.780.906,-
  - b. hasil uji petik data pertanggung jawaban sebesar Rp. 217.182.410,-

Total Rp. 478.963.316,
- Berdasarkan temuan ahli bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara dengan rincian :
  - 1 Tahun 2019/2020 terjadi Kerugian Negara Rp. 625.155.017,-
  - 2 Tahun 2020/2021 terjadi kerugian Negara Rp. 621.562.785,-
  - 3 Tahun 2021/2021 sampai dengan bulan Desember 2021 telah terjadi kerugian Negara

Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.726.681.118,-
- Bahwa telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.726.681.118,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah) dan Pihak yang bertanggung jawab adalah

Halaman 318 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd dan bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd dan seluruh guru dan pegawai PNS yang menerima biaya transportasi dan tunjangan jabatan bersumber dari dana komite.

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik dan telah dilakukan penelitian maka Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021, dan Tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, senilai Rp. 1.726.681.118,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan belas rupiah).
- Acuan ahli yang menjadi dasar dalam melakukan perbantuan dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah :
  - (1) memastikan terjadinya perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan dari hasil penyidikan,
  - (2) keterangan AHLI keuangan negara Drs. Siswo Sujanto, DEA, dan
  - (3) barang bukti dokumen yang telah disita dan dibawa serta ditunjukkan oleh penyidik kepada ahli.
- Bahwa tidak terdapat hambatan dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi hasil perhitungan kerugian Keuangan Negara.
- Selisih kegiatan antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban tahun ajaran 2019/2020, berpotensi terjadi kerugian Negara namun tidak dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini karena penerimaan hasil penggalangan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2019/2020, tidak dapat dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara karena RAPBS merupakan tahapan awal perencanaan, hal tersebut dapat terjadi bilamana seluruh penerimaan hasil penggalangan dari orang tua wali murid semuanya terkumpul. Sementara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh bahwa sebagian siswa belum membayar keuangan komite.
- Yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara Tahun Ajaran 2019/2020 sesuai data yang diperoleh ahli :
  1. Terdapat selisih antara penerimaan penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan Hasil Penggalangan Komite	Rp.2.732.150.000
- Laporan Pertanggungjawaban	Rp.2.688.519.424

Halaman 319 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Terdapat Selisih sebesar Rp. 43.630.576

Terhadap Selisih sebesar Rp.43.630.576,- tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

2. Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih antara laporan pertanggung jawaban dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 190.473.800,-Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
3. Terdapat belanja fiktif sebesar Rp. 51.145.600,-Dihitung sebagai kerugian keuangan negara
4. Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan / memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.000.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 615.249.976,-

- Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dirincikan sebagai berikut :
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) Komite Tahun Ajaran 2020/2021

NO	KELAS X, XI DAN XII	TOTAL KEUANGAN
	ITEM PEMBIAYAAN	
1	2	3
1	Gaji Tenaga Honorer, Tunjangan Tugas Tambahan	Rp. 600.000.000
2	Pembangunan WC	Rp. 100.000.000
3	Pengadaan Kursi dan Meja Siswa 4 Paket (Tunggakan 2019/2020)	Rp. 96.000.000
4	Perbaikan Alat-Alat Drum Band	Rp. 6.349.500
5	Pengadaan Alat-Alat Drum Band	Rp. 7.000.000
6	Pengadaan Pakan Drum Band	Rp. 75.000.000
7	Home Visit	Rp. 10.000.000
8	Kelebihan Jam Mengajar	Rp. 30.000.000



9	Pengadaan Sound System	Rp. 100.000.000
10	Pengadaan 3 Buah Laptop	Rp. 18.000.000
11	Pembangunan Lanjutan Aula SMKN 1 Ende	Rp. 500.000.000
12	Pulsa Data Operator Sekolah	Rp. 1.600.000
13	Konsumsi Rapat Dewan Guru dan Pegawai	Rp. 30.000.000
14	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
15	Kegiatan Kesiswaan dan Turnamen Olahraga	Rp. 20.000.000
16	Pembelian Alat Kesehatan	Rp. 120.000.000
17	Pembelian Bolam Lampu Philips (200 Buah)	Rp. 120.000.000
18	Kegiatan Siswa	Rp. 12.800.000
19	UKS	Rp. 10.000.000
20	Perayaan Hari-Hari Besar Nasional	Rp. 50.000.000
21	Kegiatan Kerohanian Gereja dan Mesjid	Rp. 10.000.000
22	Perbaikan Lapangan Olahraga	Rp. 30.000.000
23	Penataan Tanaman	Rp. 20.000.000
24	Tamu Sekolah	Rp. 50.000.000
25	Konstruksi MKKS tingkat SMK	Rp. 5.350.000
26	Pembayaran Koran dan Tabloid	Rp. 6.000.000
27	Reward Siswa Berprestasi	Rp. 10.000.000
28	HUT SMKN 1 Ende	Rp. 40.000.000
29	ATK Komite	Rp. 25.000.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

30	Dana Sharing PPDB	Rp. 50.000.000
31	Pengadaan Kostum Olahraga Pembina	Rp. 19.500.000
32	Pengadaan Komputer	Rp. 50.000.000
33	Kerja Rabat dan Tembok Tangga Turun Turun Aula	Rp. 30.000.000
34	Bahan Bahan Mesin Pemotong Rumput	Rp. 1.000.000
35	Faceshild (Alat Pelindung Wajah)	Rp. 1.000.000
36	Perjalanan Dinas	Rp. 100.000.000
37	Pemberitaan Media	Rp. 10.000.000
38	Krans Bunga	Rp. 500.000
39	Kostum Olahraga Volly dan 1 Buah Bola Volly	Rp. 900.000
40	Mesin Foto Copy Canon 5075	Rp. 40.000.000
41	KJM	Rp. 20.000.000
42	Penulisan Ijasah	Rp. 10.000.000

Penerimaan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2020/2021

**KELAS X**

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp. 55.500.000	Rp.9.300.000	
2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp. 61.100.000	Rp.3.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp. 52.150.000	Rp.12.650.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp 64.800.000	Rp.52.320.000	Rp.12.480.000	
J U M L A H			Rp 259.200.000	Rp.221.070.000	Rp.38.130.000	

Halaman 322 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp 64.800.000	Rp.51.100.000	Rp.13.700.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp 64.800.000	Rp.59.000.000	Rp. 5.800.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp 64.800.000	Rp.51.650.000	Rp.13.150.000	
J U M L A H			Rp 194.400.000	Rp.161.750.000	Rp.32.650.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp 64.800.000	Rp.50.400.000	Rp.14.400.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp 64.800.000	Rp.54.450.000	Rp.10.350.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp 64.800.000	Rp.50.150.000	Rp.14.650.000	
J U M L A H			Rp 129.600.000	Rp.104.600.000	Rp.25.000.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.61.300.000	Rp.3.500.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.57.700.000	Rp.7.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.50.050.000	Rp.14.750.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp 64.800.000	Rp.36.300.000	Rp.28.500.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.48.000.000	Rp.16.800.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp.253.350.000	Rp.70.650.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.60.000.000	Rp.4.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.036.800.000	Rp.851.170.000	Rp.185.630.000	

## KELAS XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET
1	XI A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.59.400.000	Rp.54.450.000	Rp.4.950.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	XI B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.58.100.000	Rp.6.700.000	
3	XI C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.54.050.000	Rp.3.550.000	
4	XI D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 57.600.000	Rp.52.450.000	Rp.5.150.000	
J U M L A H			RP.239.400.000	Rp.219.050.000	Rp.20.350.000	
5	XI A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.56.300.000	Rp.4.900.000	
6	XI B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.55.700.000	Rp.5.500.000	
7	XI C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.45.200.000	Rp.10.600.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.157.200.000	Rp.21.000.000	
8	XI	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp.47.600.000	Rp.1.000.000	
9	XI A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.52.200.000	Rp.48.050.000	Rp. 4.150.000	
10	XI B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.47.950.000	Rp.6.050.000	
J U M L A H			Rp. 106.200.000	Rp.96.000.000	Rp.10.200.000	
11	XI A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp. 54.000.000	Rp.52.100.000	Rp.1.900.000	
12	XI B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.52.000.000	Rp.5.600.000	
13	XI C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.53.700.000	Rp.3.900.000	
J U M L A H			Rp .169.200.000	Rp.157.800.000	Rp.11.400.000	
14	XI	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.45.000.000	Rp.5.400.000	

Halaman 324 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL JUMLAH	Rp.792.000.000	Rp.722.650.000	Rp.69.350.000	
--------------	----------------	----------------	---------------	--

## KELAS XII

NO	KELAS & KEAHLIAN	PROG.	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.55.800.000	Rp. 48.000.000	Rp.7.800.000	
2	XII B	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.45.000.000	Rp.36.650.000	Rp. 8.350.000	
3	XII C	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.48.600.000	Rp. 45.050.000	Rp.3.550.000	
4	XII D	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Rp.43.200.000	Rp.38.450.000	Rp.4.750.000	
J U M L A H			Rp. 192.600.000	Rp. 168.150.000	Rp.24.450.000	
5	XII A	A K U N T A N S I	Rp.55.800.000	Rp. 41.000.000	Rp.14.800.000	
6	XII B	A K U N T A N S I	Rp.55.100.000	Rp. 45.050.000	Rp.10.050.000	
7	XII C	A K U N T A N S I	Rp.46.800.000	Rp.42.950.000	Rp.3.850.000	
J U M L A H			Rp.157.700.000	Rp.129.000.000	Rp.28.700.000	
8	XII	P E M A S A R A N	Rp.23.400.000	Rp.23.300.000	Rp.100.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.36.000.000	Rp.32.200.000	Rp.3.800.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.34.200.000	Rp.31.300.000	Rp. 2.900.000	
J U M L A H			Rp.70.200.000	Rp.63.500.000	Rp. 6.700.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.44.900.000	Rp.1.900.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.100.000	Rp.42.450.000	Rp 3.650.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.50.100.000	Rp 3.900.000	
14	XII D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.46.800.000	Rp.42.400.000	Rp 4.400.000	
J U M L A H			Rp.193.700.000	Rp.179.850.000	Rp.13.850.000	
15	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.50.400.000	Rp.44.600.000	Rp 5.800.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.688.000.000	Rp.608.400.000	Rp.79.600.000	

## Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran 2020/2019

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pembayaran Honor Komite	Rp. 411.750.000
2.	Pembayaran honor teknis	Rp.28.100.000
3.	Honor Operator Dapodik	Rp.19.500.000
4.	Pembayaran Kesra PNS	Rp.66.200.000
5.	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp.164.150.000
6.	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp.80.138.433
7.	Penulisan Ijasah	Rp.13.800.000
8.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2019/2020	Rp.17.100.000
9.	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun pelajaran 2020/2021	Rp.13.725.000
10.	Pembayaran honor Input kwitansi penerimaan dana komite	Rp.19.500.000

Halaman 326 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Pembelian alat perabot pendukung	Rp. 5.328.000
12.	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan penjajakan dan pengantaran	Rp.2.100.000
13.	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp.1.995.000
14.	Peringatan hari pancasila	Rp.14.775.000
15.	Rapat dewan Guru	Rp.20.585.000
16.	Pemberitaan dimedia	Rp. 2.900.000
17.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah, Flores Pos	Rp.580.000
18.	Pembayaran Tabloid Dan Majalah Pos Kupang	Rp.840.000
19.	Peringatan hari guru	Rp.8.550.000
20.	Lembur penggandaan soal ujian	Rp. 2.000.000
21.	Lembur persiapan kedatangan inspektorat	Rp.4.200.000
22.	Konsumsi kedatangan inspektorat	Rp.4.000.000
23.	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp.2.490.000
24.	Kunjungan kepala dinas provinsi NTT	Rp.9.100.000
25.	Biaya penebangan pohon	Rp.2.000.000
26.	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp. 2.500.000
27.	Konsumsi Ujian semester ganjil	Rp.11.250.000
28.	Pembelian alat kebersihan	Rp. 8.089.000
29.	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp.21.350.000
30.	Transportasi maulid di anaraja	Rp.500.000
31.	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp.300.000
32.	Rekreasi kepala sekolah dan guru	Rp.960.000
33.	Pembayaran Tabloid Ekspo	Rp.240.000
34.	Pengadaan kostum olah raga guru Pembina	Rp.19.200.000

Halaman 327 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Dana Shering PPDP 2020/2021	Rp.38.660.000
36.	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp.1.100.000
37.	Pelaksanaan IHT Kerja SMK negeri 1 ende tahun 2020	Rp.23.430.000
38.	Pembelian kostum dan satu bola voly	Rp.875.000
39.	Perbaikan kursi meja	Rp.2.000.000
40.	Beli 2 bendera, umbul umbul dan tali rafia	Rp. 80.000
41.	Sewa kamera canon	Rp.100.000
42.	Jilid istemewa dokumen kurikulum	Rp.150.000
43.	Pengadaan Kipas angin berdiri 10 buah	Rp. 6.000.000
44.	Beli facesil 17 buah	Rp.340.000
45.	Kegiatan Drumband Pelangi nusantara	Rp.15.958.000
46.	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp.40.000.000
47.	Sewa molen cor tiang aula	Rp.5.000.000
48.	Bayar utang bamboo untuk pembangunan aula 200 batang	Rp.5.000.000
49.	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang Ruang praktek siswa	Rp.6.000.000
50.	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp.750.000
51.	Service laptop Thosiba	Rp.500.000
52.	Drum band penjemputan gubener dan rombongan	Rp.1.981.000
53.	Pembelian 1 buah tendon	Rp.1.300.000
54.	Jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.15.000.000
55.	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp.12.000.000
56.	Pembayaran sisa utang pembelian batako pembangunan aula	Rp.43.800.000
57.	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp.96.000.000
58.	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp.6.000.000

Halaman 328 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59.	Bayar sisa pembelian batu fondasi kerja aula	Rp.4.800.000
60.	Bayar sisa pembelian Kerikil kerja aula t	Rp.11.250.000
61.	Beli peta kab ende 2 buah	Rp.800.000
62.	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp.195.000.000
63.	Jasa konsultan Pembuatan revisi laporan RPS	Rp.1.750.000
64.	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasangan	Rp.1.500.000
65.	Pembelian 10 baju merah marun	Rp.300.000
66.	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp.12.200.000
67.	Lembur tanda tangan ijasah	Rp.3.000.000
68.	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp.1.200.000
69.	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp.5.500.000
70.	Bimtek persiapan akreditasi	Rp. 5.850.000
71.	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp. 500.000
72.	ATK Komite	Rp.13.305.000
73.	Tamu Sekolah	Rp.21.221.482
74.	Pembelian super sill pembersih lantai	Rp.2.250.000
75.	Pembayaran utang tali ijuk	Rp. 1.000.000
76.	Biaya pengerjaan Rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp.25.000.000
77.	Pembelian lampu LED nama uala dan nama sekolah	Rp.35.000.000
78.	Pembelian 1 unit Server	Rp.20.000.000
79.	Pembelian 10 unit Komputer	Rp.37.500.000
80.	Biaya pengiriman Server dan computer	Rp.572.800
81.	Latihan Paskibraka	Rp.200.000
82.	Pembelia Bola Lampu Philips	Rp.9.474.000
83.	Pembelian Pulsa Data Opeartor Dapodik	Rp.621.000

Halaman 329 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84.	Pembelian Baliho dan Stempel	Rp.620.000
85.	Pembelian Karangan Bunga ( kedukaan)	Rp. 200.000
86.	Transoprtasi guru pendamping latihan Voly	Rp.4.400.000
87.	Biaya Snack dan aqua latihan Voly	Rp.4.800.000
88	Honor Guru tamu Karate	Rp.9.600.000
89.	Biaya tranfortasi pembelian Umbul-umbul dan bamboo	Rp200.000
90.	Bahan Bakar mesin potong rumput	Rp.600.000
91.	Pembelian Tangki Air	Rp.120.000
92.	Pembelian Karung	Rp.67.000
93.	Biaya Administrasi Bantuan Sumur Bor	Rp.5.000.000
94.	Biaya ulang Tahun Sekolah	Rp.15.000.000
95.	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp. 4.400.000
96.	Bayar ke kas Provinsi	Rp.7.500.000
97.	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa ( bencana Adonara)	Rp.3.250.000
98.	Transfortasi Ende –Larantuka ( Bencana Adonara)	Rp. 4.800.000
99.	Tranfortasi Laut Larantuka-Adonara	Rp. 2.000.000
100.	Tranfortasi Darat dari Adonara ke- Titik Bencana	Rp.1.000.000
101.	Sering dana Komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word kls XII dan kegiatan Lomba Kompetensi Siswa antar kelas dalam program keahlian	Rp.14.000.000
102.	Instalasi Listri ruang tata niaga lama	Rp.2.520.000
103.	Pengadaan Foto siswa kls XII 382 Orang @ 25.000	Rp.9.550.000
104.	Pembayaran utang jasa konsultan aula	Rp.51.000.000
105.	Pembangunan Tembok selatan depan aula	Rp.25.000.000
106.	HUT Sekolah	Rp.15.000.000
107.	Konsumsi Work Shop	Rp.5.300.000

Halaman 330 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.	Instalasi Listrik ruang TN Lama	Rp.2.520.000
109.	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp.3.855.000
Total pengeluaran		Rp.1.903.915-715

- Bahwa ada terdapat selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan Pertanggung jawaban dimana dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Pembangunan Tata Ruang Niaga	
2	Biaya Sensor 11 Pohon	
3	Penataan Tanaman	
4	Pengembangan Bakat Siswa	
5	Perbaikan Toilet Guru dan Siswa	
6	Transportasi Muat Meja dan Kursi	
7	Biaya Pengubah Lagu Himne SMK	
8	Jasa Pemasangan 1 Pintu Ruang Kelas Tata Niaga dan 12 Jendela	
9	HUT Satpam	
10	Sewa Sound Sosialisasi Radikalisme dari KODIM	
11	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan	
12	Uang Kedukaan Mantan Guru SMK N 1 an. MIKAEL DEI	
13	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	
14	Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah	
15	Instalasi Air Bersih	
16	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan prasarana)	
17	Krans Bunga	

Halaman 331 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



18	Pengadaan 1 Buah Flash Disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	
19	Pengadaan Senter Penjaga Malam	
20	Pemasangan Finger Print	
21	Pembelian 1 Buah Bola Voly dan Net Voly	
22	Pengadaan Lampu	
23	Pemasangan Trali Jendela	
14	Persiapan Simulasi UTBK	
25	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	
26	Supervisi Mutu Program OTKP	
27	Upah Kerja Pembangunan 2 Ruang RPS	
28	Pengadaan Kelengkapan Cleaning Service	
29	ATK Komite	
30	Konsumsi Pangan Lokal Dengan Kadis P dan K Prov. NTT dan MKKS SMK/SMA	
31	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	
32	Konsumsi Penguji Ujian Sekolah Praktik Kelas XII TA 2019/2020	
33	Konsumsi Penyusunan Ujian Sekolah Yeori Kelas XII TA 2019/2020	
34	Konsumsi Panitia Proktor dan Teknisi UNBK Perhari TA 2019/2020	
35	Transportasi Pengantaran Siswa PLK Ke Kelitembu	
36	Transportasi Untuk 2 Orang Tentara yang Memberikan Materi PPDB Untuk Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan	



37	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Untuk Pengawalan Erobik MPLS	
38	Jasa Saund Sistem Kegiatan MPLS	

- Selisih kegiatan antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban tahun ajaran 2020/2021, berpotensi terjadi kerugian Negara namun tidak dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini karena penerimaan hasil penggalangan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
  - Selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2020/2021, tidak dapat dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) merupakan tahapan awal perencanaan, hal tersebut dapat terjadi bilamana seluruh penerimaan hasil penggalangan dari orang tua wali murid semuanya terkumpul. Sementara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh bahwa sebagian siswa belum membayar keuangan komite.
  - Yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara Tahun Ajaran 2020/2021 sesuai data dan fakta yang diperoleh ahli :
    - a. Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp.2.182.220.000,-  
Laporan Pertanggungjawaban Rp.1.903.915.715,-  
Terdapat Selisih sebesar Rp.278.304.285,-  
Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.
    - b. Data pertanggungjawaban keuangan hasil Penggalangan ditemukan selisih antara laporan pertanggung jawaban dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 350.346.000,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
    - c. Terdapat belanja fiktif sebesar Rp.750.000,-Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
    - d. Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan / memperkaya orang lain sebesar Rp. 960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan negara
- Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2020/2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 630.360.285,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih RAPBS dan Laporan Pertanggungjawaban Rp. 278.304.285,-
- Selisih Laporan pertanggungjawaban dan uji petik Rp. 352.056.000,-
  - Total Rp. 630.360.285
- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh maka dapat dirincikan Penerimaan Hasil penggalangan keuangan dan Laporan pertanggungjawaban Komite SMK N 1 Ende Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022 sebagai berikut :  
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) Komite Tahun Ajaran 2021/2022

NO	JENIS KEGIATAN	
1	Gaji Honorer	Rp. 600.000.000
2	Penghargaan kelebihan jam mengajar	Rp. 30.000.000
3	Vaksinasi dan persiapan Test P3K	Rp. 50.000.000
4	Upacara Hari-Hari Besar Nasional	Rp. 35.000.000
5	Tamu Sekolah	Rp. 60.000.000
6	PPDB TP 2021 / 2022	Rp. 100.000.000
7	Kursi Meja	Rp. 75.000.000
8	Perjalanan Dinas	Rp. 300.000.000
9	Listrik	Rp. 150.000.000
10	Taman	Rp. 30.000.000
11	Peralatan Kesehatan	Rp. 150.000.000
12	Rehabilitasi Pagar Tembok Penyokong	Rp. 60.000.000
13	Operasional MKKS	Rp. 15.000.000
14	Publikasi	Rp. 10.000.000
15	Home Visit	Rp. 10.000.000
16	Natal Bersama	Rp. 50.000.000
17	Halal Bihalal	Rp. 50.000.000
18	Lembur Panitia Ujian Semester	Rp. 25.000.000

Halaman 334 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

19	Prakerin	Rp. 45.000.000
20	Honor Operator Sekolah	Rp. 12.000.000
21	Pulsa Data Operator	Rp. 5.000.000
22	Gugus Covid	Rp. 45.000.000
23	Rehap Kamar WC Kasek	Rp. 20.000.000
24	Pengadaan Gong (Go lomba)	Rp. 20.000.000
25	Honor Teknisi Sekolah	Rp. 24.600.000
26	Pembangunan Tembok (lokasi TA. 2019/2020 dan TA. 2020/2021, SMK N 1 Ende lama )	Rp. 70.000.000
27	Pengadaan bahan perabot pendukung SARPRAS	Rp. 50.000.000
28	Lembur PNS	Rp. 350.000.000
29	Kunjungan Panti Asuhan	Rp. 10.000.000
30	Kunjungan panti ODGJ	Rp. 10.000.000
31	Perpisahan kelas XII	Rp. 50.000.000
32	Pemilihan pengurus OSIS TP 2021/2022	Rp. 10.000.000
33	HUT sekolah	Rp. 75.000.000
34	Repat Dewan Guru	Rp. 50.000.000
35	Kegiatan kerohanian gereja dan masjid	Rp. 20.000.000
36	Drum Band hari besar nasional	Rp. 25.000.000
37	Latihan dan kegiatan dan kesiswaan	Rp. 125.000.000
38	ATK, Operasional Komite dan Pelaporan	Rp. 35.900.000

Penerimaan Keuangan Hasil Penggalangan Tahun 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021

Kelas X

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN	TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
----	------------------------	--------------	-----------------	-----------	------

Halaman 335 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	X1	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.25.050.000	Rp.39.750.000	
2	X2	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.32.050.000	Rp.32.750.000	
3	X3	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
4	X4	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.27.550.000	Rp.37.250.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.111.500.000	Rp.147.700.000	
5	X1	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.24.650.000	Rp.40.150.000	
6	X2	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.550.000	Rp.38.250.000	
7	X3	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.26.850.000	Rp.37.950.000	
J U M L A H			Rp.194.400.000	Rp.78.050.000	Rp.116.350.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp. 64.800.000	Rp.31.050.000	Rp.33.750.000	
9	X1	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.27.100.000	Rp.37.700.000	
10	X2	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.26.150.000	Rp.38.650.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.53.250.000	Rp.76.350.000	
11	X1	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.25.000.000	Rp.39.800.000	
12	X2	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.30.850.000	Rp.33.950.000	
13	X3	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.31.300.000	Rp.33.500.000	
14	X4	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.27.350.000	Rp.37.450.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.114.500.000	Rp.144.700.000	
15	X1	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp. 25.100.000	Rp.39.700.000	
16	X2	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.23.050.000	Rp.41.750.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.48.150.000	Rp.81.450.000	
TOTAL JUMLAH			Rp 1.036.800.000	Rp.436.500.000	Rp 600.300.000	

## Kelas XI

NO	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	X A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp. 64.800.000	Rp.15.550.000	Rp. 49.250.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	X B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.28.100.000	Rp.36.700.000	
3	X C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.15.550.000	Rp.49.250.000	
4	X D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.17.800.000	Rp.47.000.000	
J U M L A H			Rp.259.200.000	Rp.77.000.000	Rp.182.200.000	
5	X A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.63.000.000	Rp.16.000.000	Rp.47.000.000	
6	X B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.30.300.000	Rp.34.500.000	
7	X C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.64.800.000	Rp.14.000.000	Rp.50.800.000	
J U M L A H			Rp.192.600.000	Rp.60.300.000	Rp.132.300.000	
8	X	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.64.800.000	Rp.21.200.000	Rp.43.600.000	
9	X A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.23.100.000	Rp.41.700.000	
10	X B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.64.800.000	Rp.9.300.000	Rp.55.500.000	
J U M L A H			Rp.129.600.000	Rp.32.400.000	Rp.97.200.000	
11	X A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.39.450.000	Rp.25.350.000	
12	X B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.24.700.000	Rp.40.100.000	
13	X C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.23.150.000	Rp.41.650.000	
14	X D	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.12.800.000	Rp.52.000.000	
15	X E	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.64.800.000	Rp.20.850.000	Rp.43.950.000	
J U M L A H			Rp.324.000.000	Rp.120.950.000	Rp.203.050.000	
16	X	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.64.800.000	Rp.33.100.000	Rp.31.700.000	
TOTAL JUMLAH			Rp.1.035.000.000	Rp.344.950.000	Rp.690.050.000	

Kelas XII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	KELAS & PROG. KEAHLIAN		TOTAL JUMLAH	JUMLAH TERBAYAR	TUNGGAKAN	KET.
1	XII A	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.59.400.000	Rp.31.650.000	Rp.27.750.000	
2	XII B	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.64.800.000	Rp.30.450.000	Rp.34.350.000	
3	XII C	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.30.950.000	Rp.26.650.000	
4	XII D	OTOMATISASI DAN TATA KELOLA PERKANTORAN	Rp.57.600.000	Rp.28.950.000	Rp.28.650.000	
J U M L A H			Rp.239.400.000	Rp.122.000.000	Rp.117.400.000	
5	XII A	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.31.050.000	Rp.30.150.000	
6	XII B	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.61.200.000	Rp.23.250.000	Rp.37.950.000	
7	XII C	AKUNTANSI DAN KEUANGAN LEMBAGA	Rp.55.800.000	Rp.18.600.000	Rp.37.200.000	
J U M L A H			Rp.178.200.000	Rp.72.900.000	Rp.105.300.000	
8	XII	BISNIS DARING DAN PEMASARAN	Rp.48.600.000	Rp.19.800.000	Rp.28.800.000	
9	XII A	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.21.650.000	Rp.32.350.000	
10	XII B	USAHA PERJALANAN WISATA	Rp.54.000.000	Rp.20.250.000	Rp.33.750.000	
J U M L A H			Rp.108.000.000	Rp.41.900.000	Rp.66.100.000	
11	XII A	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.54.000.000	Rp.34.200.000	Rp.19.800.000	
12	XII B	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.57.600.000	Rp.36.100.000	Rp.21.500.000	
13	XII C	TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN	Rp.55.800.000	Rp.31.650.000	Rp.24.150.000	
J U M L A H			Rp.167.400.000	Rp.101.950.000	Rp.65.450.000	
14	XII	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Rp.46.800.000	Rp.26.100.000	Rp.20.700.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL JUMLAH	Rp.788.400.00 o	Rp.384.650.00 o	Rp.403.750.00 o	
--------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Hasil Penggalangan Tahun Ajaran  
2021/2022

NO	JENIS KEGIATAN	TOTAL
1.	Pengadaan golamba	Rp.18.000.000
2.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
3.	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp.5.000.000
4.	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi smea lama jalan mbongawani	Rp.5.000.000
5.	Pembelian material untuk pembangunan pagar di smea lama jalan mbongawani	Rp.3.600.000
6.	Pembelian lampu Philips spiral	Rp.7.600.000
7.	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp.32.000.000
8.	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	Rp.10.000.000
9.	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp.1.832.000
10.	Insentif team gugus covid	Rp.5.000.000
11.	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah	Rp.1.175.000
12.	Publikasi media	Rp.3.000.000
13.	HUT sekolah	Rp.7.750.000

Halaman 339 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



14.	Penulusuran tamatan	Rp.1.000.000
15.	Lembur persiapan ujian smester ganjil	Rp.1.070.000
16.	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp.11.370.000
17.	Pembelian gorden ruang ujian P3K	Rp.2.500.000
18.	Pembelian bensin potong rumput	Rp.400.000
19.	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp.2.000.000
20.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.660.000
21.	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp.5.850.000
22.	Pembayaran majalah flores pos	Rp.350.000
23.	Pembayaran majalah Flobamora	Rp.135.000
24.	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	Rp.2.700.000
25.	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	Rp.1.220.000
26.	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	Rp.29.545.000
27.	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	Rp.2.850.000
28.	Konsumsi kegiatan vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp.11.480.000
29.	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp.10.200.000
30.	PPDB	Rp.70.060.000
31.	Konsumsi kegiatan seleksi kompetensi P3K guru di SMK Negeri 1 Ende	Rp.14.000.000



32.	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	Rp.7.360.000
33.	Lembur pengisian kuisoner BPK	Rp.2.553.000
34.	Pengadaan kursi 69 Buah	Rp.25.875.000
35.	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisoner BPK	Rp.630.000
36.	Service laptop dan printer	Rp.800.000
37.	Snack makan ujian	Rp.610.000
38.	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	Rp.4.550.000
39.	Pembelian baju olah raga guru	Rp.7.200.000
40.	Pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp.460.000
41.	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp.340.000
42.	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp.150.000
43.	Pembuatan taman	Rp.15.000.000
44.	Pengadaan alat kesehatan	Rp.68.895.000
45.	Kegiatan Teacer study	Rp.1.226.000
46.	Pembelian obat obatan, gallon dan dispenser	Rp.1.800.000
47.	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp.1.500.000
48.	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	Rp.1.000.000
49.	Ongkos kerja pemasangan closet dan shower di ruang WC kepala sekolah	Rp.2.000.000
50.	Bayar orang jaga material di smea lama	Rp.1.000.000



51.	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp.100.000
52.	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp.228.400.000
53.	Pembayaran operator dapodik	Rp.6.500.000
54.	Pembayaran honor teknisi	Rp.12.300.000
55.	Pembelian pembersih lantai super sill	Rp.3.500.000
56.	Transportasi guru pendamping latihan voly	Rp.2.400.000
57.	Biaya permen dan aqua latihan voly	Rp.1.200.000
58.	Honor guru tamu karate	Rp.4.800.000
59.	Biaya aqua dan permen latihan karate	Rp.1.200.000
60.	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp.350.000
61.	Pengadaan 1 shower closed	Rp.300.000
62.	Pengadaan closed duduk	Rp.1.005.000
63.	Pengadaan 1 galon mateks	Rp.115.000
64.	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp.500.000
65.	Tamu sekolah	Rp.7.794.000
66.	ATK Komite	Rp.6.350.500
67.	Perjalanan Dinas	Rp.74.854.594
68.	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp.2.000.000
69.	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	Rp.8.550.000
70.	Pembayaran Sumbangan Nikah	Rp.1.425.000
71.	Instalasi Listrik 4 ruang kelas (Tes P3K)	Rp.40.000.000





72.	Pengerjaan Tembok belakang RPS	Rp.45.000.000
73.	Bangun Penyaringan Kamar WC	Rp.10.000.000
74.	Lembur Tanda Tangan Laporan Pendidikan	Rp.3.000.000
75.	Lembur Tanda Tangan Ijasah	Rp.2.000.000
76.	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	Rp.2.000.000
77.	Pinjaman para Guru	Rp.6.000.000
78.	Pekerjaan Pintu dan Jendela Ruang kelas dibawa aula	Rp.16.000.000
79.	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp.2.000.000
80.	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp.350.000
81.	Pembayaran Bambu untuk pembangunan tembok dilokasi SMEA lama	Rp.500.000
82.	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	Rp.1.518.000
83.	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp.800.000
84.	Pembelian 2 buah Alcare thermometer	Rp.861.000
Total pengeluaran		Rp.904.319.094

- Bahwa benar terdapat selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan Pertanggung jawaban Tahun Ajaran 2021/2022 dimana dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS KEGIATAN	KET
1	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
2	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	



3	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	
4	Pelunasan jasa konsultan gambar WC aula	
5	Penulusuran tamatan	
6	Lembur persiapan ujian smester ganjil	
7	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	
8	Pembelian gordien ruang ujian P3K	
9	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan mangang calon pengawas	
10	Pembelian 1 buah tendon untuk smea lama	
11	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	
12	Lembur rancang bangun lab computer TKJ	
13	Insentif panitia seleksi (panitia non provinsi)	
14	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	
15	Service laptop dan printer	
16	Snack makan ujian	
17	Snack dan konsumsi Peringatan hari guru	
18	Pembelian baju olah raga guru	
19	Snack Pemilihan pengurus osis	
20	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	
21	Kegiatan Teacer study	
22	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nagekeo	
23	Pembelian pembersih lantai super sill	
24	Pembayaran Dana Duka Guru (4 orang)	
25	Pembayaran Sumbangan Nikah	



26	Pembayaran Tamu Sekolah di Unit Produksi	
27	Pinjaman para Guru	
28	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	
29	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	
30	Instalasi Jaringan Pipa dari Mesin Pompa	
31	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	

- Bahwa selisih kegiatan antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban tahun ajaran 2021/2022, sampai dengan bulan Desember 2021, berpotensi terjadi kerugian Negara namun tidak dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara dalam kasus ini karena penerimaan hasil penggalangan tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa selisih antara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) dan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2021/2022 Sampai dengan Bulan Desember 2021, tidak dapat dihitung sebagai kerugian Keuangan Negara karena Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) merupakan tahapan awal perencanaan, hal tersebut dapat terjadi bilamana seluruh penerimaan hasil penggalangan dari orang tua wali murid semuanya terkumpul. Sementara berdasarkan data dan fakta yang diperoleh bahwa sebagian siswa belum membayar keuangan komite.
- Bahwa yang dapat dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara sesuai data yang diperoleh ahli :
- Terdapat selisih antara penerimaan penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban Tahun Ajaran 2021/2022 Sampai dengan Bulan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :
  - Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 1.166.100.000,-
  - Laporan Pertanggungjawaban Rp. 904.319.094,-
  - Terdapat Selisih sebesar Rp. 261.780.906,-
  - Terhadap Selisih sebesar Rp.261.780.906,- tidak dapat dibuktikan maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.
- Bahwa Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih antara laporan pertanggung jawaban dengan nota belanja/ kwitansi dan



laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 232.148.984,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.

- Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2022/2021 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 492.411.890,-dengan rincian :

• Selisih RAPBS dan Pertanggungjawaban	Rp. 261.780.906,-
• Selisih Laporan pertanggung jawaban dan uji Petik	Rp. 232.148.984,-
◦ Total	Rp. 493.929.890,-

- Bahwa terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan Hasil Penggalangan Komite	Rp. 6.080.470.000,-
- Laporan Pertanggungjawaban	Rp. 5.496.754.233,-
Terdapat Selisih sebesar	Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggung jawabkan maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

- Bahwa dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
  - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
  - LPJ fiktif sebesar Rp.51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
  - Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik	Rp. 1.155.824.384,-
Total	Rp. 1.739.540



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara yaitu kurang cermat para pihak dalam membuat laporan pertanggungjawaban dimana ternyata berdasarkan hasil penyidikan dan data yang disajikan penyidik setelah dilakukan perhitungan oleh AHLI ditemukan :

- Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-

- Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-

Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-

Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

- Bahwa Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-

- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut:

- LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.

- LPJ fiktif sebesar Rp.51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)

- Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara;

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ Rp. 583.715.767,-

- Selisih LPJ dan hasil uji petik Rp. 1.155.824.384,-

Total Rp. 1.739.540.151,-

Sesuai temuan penyidikan serta hasil perhitungan kerugian diatas dapat disimpulkan bahwa Pihak-pihak yang menguntungkan antara lain :

- Bahwa Kepala sekolah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan komite karena tidak melibatkan Ketua Komite dan Sekretaris Komite,

Halaman 347 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



kemudian pihak yang mendapat keuntungan atas pembayaran yang tidak sesuai ketentuan atau mekanisme penggunaan keuangan komite SMK N 1 Ende.

- Bahwa Ahli menghitung Selisih antara realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.080.470.000,- dengan pertanggung jawaban sebesar Rp. 5.496.754.233,- seharusnya yang dipertanggungjawabkan menurut realisasi sebesar Rp. 6.080.470.000,- namun yang dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.496.754.233,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 583.715.767,- dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut patut dianggap sebagai Kerugian Keuangan Negara, karena semua realisasi penerimaan yang telah dibayarkan dan diterima oleh komite sekolah SMK N 1 Ende merupakan uang negara yang harus di kelola disatuan pendidikan tersebut.
- Bahwa Ahli menghitung Selisih antara laporan pertanggungjawaban dan hasil uji petik sebagai Kerugian Keuangan Negara karena beberapa kegiatan tidak dapat dibuktikan dan penggunaan tidak sesuai mekanisme/tidak sesuai ketentuan, laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.5.496.754.233,- seharusnya yang dipertanggungjawabkan menurut realisasi sebesar Rp.5.496.754.233,- namun yang dapat dibuktikan dan digunakan sesuai ketentuan sebesar Rp. 3.757.214.082,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp.1.155.824.384,- hal tersebut patut dianggap sebagai Kerugian Keuangan Negara, karena semua realisasi penerimaan yang telah dibayarkan dan diterima oleh komite sekolah SMK N 1 Ende merupakan uang negara yang harus di kelola disatuan pendidikan tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tambahan dan berdasarkan data yang diperoleh dari penyidik kemudian ahli melakukan penelitian maka terdapat beberapa kegiatan dalam laporan pertanggungjawabkan yang dapat dibuktikan dan data yang tidak dapat dibuktikan dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	LPJ ( Rp )	Awal		Perubahan		Keterangan
			Dibuktikan ( Rp )	Tidak Dibuktikan ( Rp )	Dibuktikan ( Rp )	Tidak Dibuktikan ( Rp )	
	Tahun 2019/2020						





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	2.105.500	1.889.500	216.000	2.105.500	-	Selisih
2	Instalasi Air Bersih	4.827.000	4.826.500	500	4.827.000	-	Selisih
3	Tamu sekolah	6.472.000	6.472.000	-	6.455.000	17.000	Selisih
4	Perjalanan Dinas	92.970.524	82.264.983	10.705.541	92.970.524	-	Selisih
	Total	106.375.024	95.452.983	10.922.041	106.358.024	17.000	
	2020/2021						
1	Pembayaran Kesra PNS	66.200.000	32.450.000	33.750.000	32.000.000	34.200.000	Selisih
2	Pemberitaan dimedia	2.900.000	2.900.000			2.900.000	Selisih
3	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	2.490.000	2.480.000	10.000	1.550.000	940.000	Selisih
4	Pembelian 10 baju merah maron	300.000	300.000			300.000	Selisih
5	ATK Komite	13.305.000	13.212.500	92.500	13.305.000		Selisih
6	Pembelian baliho dan stempel	620.000	620.000	-	560.000	60.000	Selisih
7	Bayar kekas propinsi	7.500.000	7.500.000	-		7.500.000	Selisih
8	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa	3.250.000		3.250.000	3.250.000	-	Selisih

Halaman 349 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



	(bencana Adonara)						
	Total	96.565.000	59.462.500	37.102.500	50.665.000	45.900.000	
	2021/2022						
1	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	5.000.000	5.000.000	-	3.500.000	1.500.000	Selisih
2	Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	3.600.000	3.300.000	300.000	3.600.000	-	Selisih
3	pengadaan alat kesehatan	68.895.000	54.895.590	13.999.410	47.549.600	21.345.400	Selisih
4	Pengadaan 1 galon matex	115.000	115.000	-	-	115.000	Selisih
5	Tamu sekolah	7.794.000	7.794.000	-	7.605.416	188.584	Selisih
6	ATK komite	6.350.500	6.350.500	-	6.278.500	72.000	Selisih
7	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
8	Pembayaran dana duka guru (4 orang)	8.550.000	8.550.000	-	-	8.550.000	Selisih



9	Pembayaran sumbangan nikah	1.425.000	1.425.000	-	-	1.425.000	Selisih
10	Instalasi listrik 4 ruang kelas ( Tes P3k)	40.000.000	11.664.000	28.336.000	12.975.000	27.025.000	Selisih
11	Pengerjaan tembok belakang RPS	45.000.000	22.724.000	22.276.000	30.861.000	14.139.000	Selisih
12	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
13	Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	1.518.000	1.518.000	-	-	1.518.000	Selisih
	Total	192.247.500	127.336.090	64.911.410	112.369.516	79.877.984	
	Total Keseluruhan						

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain :
- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020
  - 1 Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS
  - 2 Iuran Musyawah Kegiatan Kepala Sekolah SMK
- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021
  - 1 Rekreasi Kepala sekolah dan Guru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapat AHLI setelah mengkaji bukti-bukti yang diserahkan oleh penyidik maka berdasarkan Permendagri nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite Sekolah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum antara lain :
  1. Komite SMK N 1 Ende tidak memiliki anggota komite, yang ada hanya Ketua, Sekretaris dan Bendahara Komite (Pasal 4 Ayat 2)
  2. Bendahara komite seorang tenaga pendidik yaitu guru bidang studi matematika pada SMK N 1 Ende (pasal 4 Ayat 3)
  3. Anggota Komite tidak ada yang ada hanya Ketua, sekretaris dan bendahara komite (pasal 6 Ayat 1)
  4. Pengangkatan ketua, sekretaris dan bendahara komite tidak melalui musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara (Pasal 6 Ayat 2).
  5. Komite SMK N 1 Ende tidak memiliki AD dan ART. (Pasal 7 Ayat 1)
  6. Masa jabatan keanggotaan komite lebih dari 3 tahun (pasal 8 Ayat 1)
  7. Proses penggalangan dana komite tidak didahului dengan pembuatan proposal (Pasal 10 Ayat 3)
  8. Hasil penggalangan dana tidak dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah (Pasal 10 Ayat 4)
  9. Pengelolaan keuangan hasil penggalangan dana komite terdapat penyimpangan(pasal 10 Ayat 5)
  10. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah tidak mendapat persetujuan dari komite sekolah, tidak dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak dilaporkan kepada komite sekolah (Pasal 10 Ayat 6)
  11. Komite SMK N 1 Ende tidak membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada orang tua wali siswa (Pasal 13 Ayat 1)
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang terjadi berpotensi merugikan keuangan negara, hal tersebut sesuai perhitungan AHLI sesuai penjelasan pada pemeriksaan AHLI sebelumnya yaitu telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).

#### 4. Ahli Drs SISWO SUJANTONTO DEA,

Dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan instansi Pemerintah, sebelum diberlakukannya Paket undang-undang Bidang Keuangan Negara pada pokoknya adalah :

Halaman 352 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ICW (Indische Comptabiliteits Wet) yang merupakan Undang-Undang.
2. IAR (Instructie enverdere bepalingen voor Algemene Rekenkamer).
3. RAB (Regelenvoorhet Administratief Beheer).
4. Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan APBN, terakhir Keppres No. 42 Tahun 2002. Disamping itu digunakan pula ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedoman pelaksanaan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003. Sebelumnya Keppres No. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya.
5. Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan pelaksanaan anggaran.

Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah :

1. UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara.
3. UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres, PermenKeu, maupun Perdirjen Perbendaharaan dan Perdirjen Anggaran.

- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Mengenai pengertian keuangan negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 UU No 17 tahun 2003, yang meliputi :

- 1). Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
  - 2). Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- Bahwa dengan lahirnya paket Undang-Undang bidang keuangan Negara yang terdiri dari Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,



dan Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, seluruh ketentuan perundang-undangan dan turunannya yang mengatur pengelolaan keuangan di Indonesia harus disesuaikan, Hal ini karena Paket Undang-undang Keuangan Negara mengatur secara komprehensif Pengelolaan Keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative. Paket undang-undang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang Keuangan Negara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan undang-undang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yang berisi, prinsip-prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang pada hakekatnya merangkum, mengkodifikasikan seluruh prinsip, system, prosedur, mekanisme tata kelola keuangan Negara yang selama ini telah dipraktekkan di Indonesia. Tiga undang-undang dimaksud lebih luas drpd Indische Comptabiliteits Wet 1925 (ICW), dan Regelen voor het Administratief Beheer 1933 (RAB) dan menggantikan kedua perundang-undangan tersebut yang selama ini dijadikan dasar pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

- Bahwa dengan terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara, maka dalam hal administrasi dan pengelolaan (termasuk pengumpulan maupun penggunaan) penerimaan negara harus mengacu pada paket undang-undang tersebut, ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara harus disesuaikan secara bertahap.
- Bahwa, Bila diperhatikan, definisi keuangan Negara yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara merupakan definisi yang digunakan di Indonesia sejak Indonesia Merdeka. Bila AHLI perhatikan definisi yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tidak berbeda dengan yang termuat dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dan Keuangan Daerah Sesuai dengan konsep teoritis, Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.





- Bahwa Secara politis yang dimaksud dengan APBN/D adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang.
- Bahwa organisasi pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004, Mengacu pada pembagian kewenangan dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Undang-undang no. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bangunan organisasi dalam pelaksanaan anggaran setiap kementerian/lembaga terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di instansi masing-masing. Selanjutnya, di bawah KPA terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM). Bangunan pembagian kewenangan dimaksud, pada prinsipnya, menjamin terselenggaranya mekanisme check and balance (saling uji) antar pejabat pelaksana perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran. Dalam konsep pengelolaan keuangan Negara, jabatan tersebut merupakan jabatan ex-officio, artinya terkait dengan jabatan structural. Misalnya, KPA adalah Kepala Satker, yaitu selaku penanggungjawab satuan kerja yang melaksanakan dan berkewajiban mewujudkan sebagian visi dan misi kementerian/ lembaganya, dan untuk itulah instansi dimaksud memperoleh alokasi anggaran.
- Bahwa secara prinsip yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang diterima oleh negara melalui kas negara terkait dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban negara maupun karena hal lain
- Bahwa yang termasuk Sumber Penerimaan Negara :

Dalam praktek, nomenclature penerimaan Negara tersebut dalam anggaran Negara sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan suatu Negara. Pertimbangan yang digunakan dapat didasarkan pada akibat/ pengaruh internasional terhadap perekonomian nasional, dapat dilihat dari pengaruh suatu jenis penerimaan utama terhadap perekonomian nasional, ataupun dapat pula didasarkan pada kemampuan masyarakat dalam menanggung beban kehidupan bangsa. Untuk yang terakhir ini, misalnya melalui penempatan sector perpajakan sebagai unsure utama.

Di Indonesia, pada masa lalu, menggunakan nomenklatur

1. Penerimaan Dalam Negeri,
2. Penerimaan Luar Negeri.

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari : penerimaan migas, penerimaan non migas, dan penerimaan lain-lain. Dalam nomenklatur tersebut, Penerimaan

*Halaman 355 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg*



lain-lain yang berasal dari dalam negeri terdiri dari : Penerimaan yang berasal dari hibah, penerimaan yang berasal dari pembagian laba perusahaan Negara, penerimaan yang berasal dari hasil undian, dan lain sebagainya, yang a.l. berasal dari penjualan asset yang tidak digunakan. Pengelompokan penerimaan pada masa lalu, tampaknya bersifat klasik dengan menekankan pada analisis peran internasional dalam perekonomian Negara

- Bahwa syarat-syarat sehingga suatu Penerimaan Kementerian / Badan dapat dikategorikan sebagai Penerimaan Negara Dalam pelaksanaan undang-undang (termask UU APBN), suatu penerimaan dinyatakan sebagai penerimaan negara bilamana memenuhi 3 unsur yaitu :

1. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Dideklarasikan kepada masyarakat.
3. Dipaksakan pemungutannya:

- Bahwa penerimaan negara bukan pajak Sebagaimana dinyatakan dalam jenisnya, penerimaan ini merupakan penerimaan Negara yang berasal dari sector bukan perpajakan. Penerimaan ini, yang merupakan penerimaan yang direalisasikan pada setiap kementerian/ lembaga, dibedakan kedalam penerimaan yang bersifat fungsional, artinya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga yang bersangkutan, dan penerimaan non fungsional yang berasal, a.l. dari penjualan inventaris bekas.
- Bahwa sesuai dengan nomenklatur "Penerimaan Dalam Negeri", penerimaan lain-lain dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak Hal tersebut hanyalah merupakan masalah teknis dalam penyusunan anggaran Negara, khususnya terkait dengan sistematika ataupun nomenklatur yang digunakan.
- Bahwa tentang bagaimana tarif penerimaan negara ditetapkan Dari sudut pemikiran filosofi, penerimaan negara, terutama yang berasal dari masyarakat, pada hakekatnya merupakan pungutan yang membebani masyarakat. Oleh karena itu, setiap pungutan harus dibahas dan ditetapkan oleh wakil rakyat. Pembahasan dan penetapan, baik jenis maupun besaran pungutan tersebut, pada hakekatnya, merupakan perlindungan kepada masyarakat agar tidak semena-mena dibebani oleh pihak tertentu (Pemerintah).
- Dalam praktek, dalam hal-hal tertentu, penetapan jenis pungutan maupun besarnya oleh wakil rakyat didelegasikan kepada Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan, selaku Bendahara Umum Negara yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Keuangan Negara. Oleh karena itu,

Halaman 356 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



semua pungutan yang membebani masyarakat, sepanjang tidak ditetapkan oleh Lembaga Legislatif, harus dibahas dan memperoleh penetapan dari Menteri Keuangan

- Bahwa dalam keuangan negara terdapat kegiatan Pemerintah yang bersifat layanan dasar yang sepenuhnya secara prinsip dibiayai melalui system perpajakan. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya masyarakat berbagai kebutuhan yang semula merupakan layanan dasar bergeser menjadilayanan semi dasar yang bersifat pilihan. Dalam rangka merespons kebutuhan dimaksud, khususnya untuk kelompok masyarakat tertentu, dengan kualitas yang diharapkan menjadi semakin baik diperlukan tambahan pendanaan yang berasal dari kesertaan masyarakat. Hal ini lah yang menjadi landasan pemikiran bahwa pembiayaan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah dapat melakukan pungutan dari masyarakat disamping pendanaan yang berasal dari Pemerintah (APBN/APBD). Pungutan dari masyarakat tersebut pada hakekatnya merupakan bentuk kontribusi terhadap layanan yang mereka nikmati
- Bentuk pertanggung jawaban instansi yang mengelola sendiri Keuangan Negara yang diterima/dipungutnya bahwa yang penting bagi pemerintah, dalam hal ini Bendahara Umum Negara, adalah bahwa seluruh penerimaan tersebut wajib dilaporkan, dicatat, dan dipergunakan secara bertanggungjawab, memberikan arti bahwa penggunaan dana/ penerimaan dimaksud harus tetap berpegang pada kaidah baku yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara. Didalam pertanggungjawaban, pengeluaran tersebut harus mengikuti pola pengujian yang sudah ada dan melampirkan bukti-bukti asli dan sah sesuai ketentuan. Sebagai contoh pengujian Wet matigheid mensyaratkan bahwa pengeluaran tersebut harus memiliki alokasi dana. Pengujian Recth Mategheid mensyaratkan terdapatnya akta perjanjian, serah terima barang, dan juga faktur harga pembayaran yang harus dibayar oleh negara, dan Berita Acara serah terima barang, dan faktur pajak bila diperlukan. Dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan dalam pengujian dimaksud pada hakekatnya merupakan bukti yang harus dilampirkan dalam pembuatan pertanggung jawaban pengeluaran Negara
- Bahwa dasar formil bahwa lembaga instansi boleh mengelola Keuangan Negara yang tidak disetor ke kas Negara bahwa pada prinsipnya pengelolaan seluruh penerimaan Negara merupakan kewenangan Bendahara Umum Negara (yaitu, Menteri Keuangan), dispensasi untuk tidak menyetorkan sejumlah dana yang diterima oleh suatu kementerian/ lembaga dan

Halaman 357 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



kewenangan penggunaan secara langsung harus dituangkan dalam ketentuan pemerintah, baik dalam undang-undang ataupun dalam keputusan Menteri Keuangan yang merupakan ijin. Sementara itu, pengaturan operasional dan teknis penggunaan dana/ penerimaan dimaksud dapat diatur dalam keputusan menteri yang bersangkutan. " ***namun tidak boleh bertentangan dengan peraturan terkait di atasnya***"

- Bahwa Konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan atau pemberiandukungan kepada kegiatan Pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
- Bahwa konsep dasar proses pertanggungjawaban atas pengelolaan dana-dana yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan atau pemberiandukungan kepada kegiatan Pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Bahwa Secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian.
- Bahwa dalam system pengelolaan keuangan Negara, pada prinsipnya, kekuasaan pengelolaan keuangan ada di tangan Kepala Pemerintahan. Selanjutnya, kekuasaan dimaksud sebagian didelegasikan kepada pemegang fungsi Bendahara Umum Negara (dalam hal ini Menteri Keuangan), dan sebagian lagi didelegasikan kepada pemegang fungsi teknis, yaitu para kepala Kementerian. Pendelegasian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya mekanisme check and balances dalam system dimaksud. Sistem tersebut, pada saat ini tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan negara sebagaiberikut :
  - (1). Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
  - (2). Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :



- a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. Dikuasakan kepada menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;
- c. Diserahkan kepada gubernur/ bupati/ walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

- Bahwa konsep dasar apa yang harus diikuti pada saat pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara :

Harus dihindarkan terjadinya kerugian Negara dalam bentuk berkurangnya barang milik Negara yang diakibatkan salah pengelolaan atau fraude.

Pemikiran utama yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat / pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindari terjadinya kerugian negara.

Tindakan tersebut diawali dengan terjaminnya mekanisme cek and balance diantara para pemegang kewenangan agar dapat dilaksanakan pengujian-pengujian yang harus dilakukan yaitu pengujian dari aspek wet matigheid, rechtmatigheid dan doelmatigheid. Yang dimaksud dengan pengujian wet matigheid pada prinsipnya mempertanyakan dasar hukum pengeluaran negara yang akan dilakukan. Dalam hal ini yang dipertanyakan adalah tersedianya alokasi anggaran dalam UU APBN yang kemudian dituangkan dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengujian Recht Matigheid pada hakekatnya mempertanyakan mengapa pihak ke 3 melakukan tagihan kepada negara. Yang secara prinsip jawabannya adalah mengungkapkan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan pihak ketiga, penyerahan barang/jasa yang diperjanjikan dan besaran biaya/harga yang ditagihkan atas dasar perjanjian tersebut.

Pengujian Doel Matigheid pada dasarnya mempertanyakan kelayakan / tujuan penggunaan dana yang tersedia.





Kedua, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang wajar.

Ketiga, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkan terjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, sehingga akuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapat diwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*).

- Bahwa setelah Berupa Berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi terkait Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021:
- Bahwa SMK N 1 Ende mengumpulkan keuangan Komite sekolah yang bersumber dari iuran wajib orang tua/wali siswa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sekolah yang tidak didukung dengan anggaran dari pemerintah, adapun besaran uang komite sekolah untuk tahun pelajaran 2019/2020 yakni sebesar Rp. 2.300.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2020/2021 yakni sebesar Rp. 1.800.000,- setiap siswa, tahun pelajaran 2021/2022 yakni sebesar Rp.1.800.000,- setiap siswa.

Adapun realisasi penerimaan Keuangan komite sekolah yang terkumpul yakni :

Tahun Ajaran	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	Jumlah
2019/2020	Rp. 902.450.000	Rp. 811.100.000	Rp. 1.018.600.000	Rp. 2.732.150.000
2020/2021	Rp. 851.170.000	Rp. 722.650.000	Rp. 608.400.000	Rp. 2.182.220.000
2021/2022	Rp. 436.500.000	Rp. 344.950.000	Rp. 384.650.000	Rp. 1.166.100.000
Total secara keseluruhan				Rp. 6.080.470.000
Enam milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah				

- Bahwa dari hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa dana komite sekolah dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan (Permendikbud 75 Tahun 2016) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Berdasarkan fakta sebagai berikut :
  1. Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel





dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.

2. Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
3. Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai ketentuan yakni sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.
4. Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
5. Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende hasil penggalangan dari orang tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.
6. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite, kemudian penggunaan keuangan



komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.

7. Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bandahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa dengan mengacu pada jawaban yang telah AHLI sampaikan, maka Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karea itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
  - Bahwa Pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam hal ini penerimaan negara bukan pajak, pada prinsipnya, harus mengikuti prosedur baku, yaitu disetorkan terlebih dahulu ke Kas Negara, baru sebagian dana yang digunakan untuk proses produksi dapat diajukan ke Kas Negara sesuai koefisien yang telah ditetapkan untuk dapat digunakan oleh instansi pengguna. Dalam hal tertentu, karena penyetoran ke Kas Negara sebelum digunakan oleh instansi pengguna secara esensi hanya merupakan tindakan agar terjamin ketertiban administratif, tidak jarang pelaksanaannya sangat longgar. Yang penting bagi pemerintah, dalam hal ini Bendahara Umum Negara, adalah bahwa seluruh penerimaan tersebut wajib dilaporkan, dicatat, dan dipergunakan secara bertanggungjawab. Oleh sebab itu, beberapa jenis penerimaan yang termasuk dalam kelompok PNBPN ini dapat digunakan secara langsung oleh kementerian/ lembaga yang bersangkutan.
  - Bahwa menurut definisi yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset Negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pengelolaanya ataupun pihak-pihak lain. Kekurangan asset dimaksud, dalam hal uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke kas Negara, tetapi tidak masuk ke kas Negara atau uang yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara, tetapi keluar dari kas Negara. Dalam hal asset diluar uang, kerugian dimaksud dapat terjadi karena

Halaman 362 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



asset yang seharusnya menjadi milik Negara, tetapi tidak menjadi milik Negara atau asset yang seharusnya tidak terlepas penguasaan Negara menjadi terlepas dari penguasaan Negara.

- Bahwa setelah melakukan mempelajari persoalan yang terjadi maka menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terdiantara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.
- Bahwa dalam menjawab pertanyaan tersebut di atas perlu disampaikan adanya beberapa hal yang dijadikan dasar pemikiran :
  - 1) Pertama, undang undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.
  - 2) Kedua, bahwa pelaksanaan pemungutan dana dari masyarakat menggunakan kaidah-kaidah hukum keuangan negara. Yaitu, antara lain, ditetapkan oleh pejabat yang mendapatkan legitimasi/ kewenangan dari Pemerintah, dideklarasikan/ diumumkan kepada peserta didik, dan pemungutannya memiliki sifat keharusan. Kedua hal tersebut di atas, memberikan sifat/ karakter bahwa pungutan uang yang dilakukan oleh Komite Sekolah merupakan bagian dari keuangan negara.
- Bahwa AHLI berpendapat bilamana pembentukan keanggotaan dan pengurus komite bertentangan dengan ketentuan pasal 6 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 75 tahun 2016, seharusnya mereka tidak berhak melakukan pungutan yang secara substansi merupakan unsur penerimaan (keuangan) negara. Oleh karena itu, pelanggaran dimaksud, ditinjau dari segi Hukum Keuangan Negara tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai kepala sekolah SMK N 1 Ende, bulan Maret 2016, berdasarkan SK Bupati Ende nomor saksi lupa, kemudian tahun 2019, dirubah dengan SK Gubernur NTT karena status SMK/SMA dialihkan ke Dinas P & K pembayaran Prop. NTT nomor surat keputusan terdakwa lupa dan akan terdakwa serahkan pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa terdakwa memiliki rekening pribadi an. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, pada bank BPD nomor rekening : 00402060041881, an. HERMIN GILDUS RANGGA, nomor rekening istri terdakwa tidak hafal pada Bank BPD an. YOFITA IDA TENA, dan rekening anak an. ROSARI MEILASTRI WULANDARI, nomor rekening lupa, Bank BRI.
- Bulan Februari Tahun 2022. Besar pinjaman Rp. 100.000.000,- Nomor rekening pinjaman di koperasi kembang terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki tambahan aset yakni :
  1. Sound System 1 (satu) set dengan nilai Rp. 25.000.000,- namun pembelian aset tersebut menggunakan uang pribadi, pembelian terdakwa lupa tanggal pembelian.
  2. Tahun 2021 bulan terdakwa lupa, aset tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam senilai Rp. 67.000.000,- uang untuk pembelian tersebut diambil dari uang pribadi terdakwa.
  3. Ada penambahan aset tenda jadi 6 unit milik bersama antara terdakwa dengan saudara KAREL LUDJI, aset tersebut awalnya milik sdr. KAREL LUDJI, karena KAREL LUDJI kesulitan uang dan menggadai tenda tersebut kepada terdakwa uang yang digunakan yaitu Rp. 13.000.0000,-
  4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi : EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740, an. HERMIN GILDUS RANGGA, penambahan aset tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, sebesar Rp. 26.500.000,-
  5. 1 (satu) buah cincin emas kepala MP Grombol dengan 16 karat sebesar 13,6/13.0 gram, harga  $\pm$  sekitar Rp. 7.000.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah diatur dalam Bab VI Pasal 15 Ayat (1) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018,
  - a. Melaksanakan tugas manajerial,
  - b. Pengembangan kewirausahaan,
  - c. Supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

Halaman 364 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Sekolah melaksanakan tugas manajerial untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan, ruang lingkup antara lain mengawasi kegiatan proses belajar mengajar, memonitoring kegiatan literasi dan numerasi, melakukan supervise terhadap guru yang melaksanakan proses belajar mengajar, pengecekan administrasi surat-surat yang masuk dan keluar, memonitoring kebersihan sekolah, melaksanakan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah.
- Bahwa Kepala Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan kewirausahaan, terhadap guru mata pelajaran yang memberikan materi pelajaran kepada siswa dalam hal pengembangan kewirausahaan, ruang lingkup untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan dibidang kewirausahaan.
- Bahwa Kepala Sekolah melakukan supervise administrasi dan kegiatan proses belajar dalam kelas, serta penilaian terhadap kinerja para guru.
- Bahwa Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab harus berdasarkan aturan sebagaimana diatas. Kepala sekolah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab diluar dari aturan Permendikbud Nomor 6 Tahun 201
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas P & K Prop. NTT, bentuk pertanggung jawaban yaitu laporan secara berkala guna melaporkan tentang jumlah siswa, jumlah guru jumlah tenaga kependidikan, serta kurikulum yang digunakan di sekolah, laporan tersebut secara tertulis melalui Data Pokok Kependidikan (DAPODIK) dan laporan penggunaan keuangan sekolah (dana BOS).
- Bahwa t status SMK N 1 Ende adalah Sekolah Negeri, berdasarkan SK Pendirian Sekolah : 607/B3/KEDJ, tanggal 10 September 1956, Nomor Pendidikan Sekolah Negeri : 50305392, Jenjang Pendidikan SMK.
- Bahwa berakhirnya masa jabatan sebagai Kepala Sekolah SMK N 1 Ende pada tanggal 27 Desember 2021, yang menggantikan terdakwa yaitu sdr. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd.
- Bahwa keuangan yang dikelola pada SMK N 1 Ende yaitu Dana BOS dan Keuangan Komite.
- Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan komite harus berpedoman pada Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Namun dalam pelaksanaan terdakwa tidak mengetahui terkait dengan aturan. Terdakwa

Halaman 365 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baru mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur setelah ada penyelidikan dan penyidikan.

- Bahwa terdakwa baru mengetahui aturan tersebut setelah ada penyelidikan dari kepolisian, terdakwa berpendidikan tinggi namun terdakwa tidak membaca aturan tersebut.
- Bahwa dalam SK pembentukan Kepala sekolah disebutkan dasar pembuatan SK tersebut yaitu Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. terdakwa tidak membaca secara detail Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah. Yang membuat SK tersebut adalah staf guru.
- Bahwa Kepala Sekolah wajib mengetahui tentang aturan komite sekolah namun dalam pelaksanaan terdakwa tidak membaca aturan tersebut.
- Bahwa tidak ada tujuan lain tujuan tidak membaca dan tidak memahami aturan permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah
- Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan komite mengikuti Permendikbud 75 Tahun 2016 namun dalam pelaksanaan saksi tidak melaksanakan sesuai Permendikbud 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah karena terdakwa tidak pernah membaca isi dari aturan tersebut.
- Bahwa kapasitas / peran terdakwa dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende sebagai penanggung jawab dan fungsi pengawasan.
- Bahwa pengurus Komite pada tahun 2019 s/d tahun 2021, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, nomor 139.a/ I 21.27/SMK.1/2017, tanggal 3 Juli 2017:
  - a. Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, M.Si
  - b. Sekertaris : ALFONS TARI SE, S.E
  - c. Bendahara : WENSESLAUS DERTA
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah ada SK yang baru atau tidak yang jelas bahwa ada SK pembentukan awal ada sampai bulan Januari 2020.
- Bahwa mekanisme yang terdakwa dilakukan dalam pembentukan komite yaitu mengumpulkan beberapa guru untuk membahas dan menentukan, ketua komite dengan berbagai pertimbangan bahwa betul-betul orang yang punya motifasi terhadap pendidikan, dengan dasar tersebut bahwa sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si adalah Alumni SMK N 1 Ende dan memiliki koneksi yang kuat dengan pihak luar, setelah penentuan oleh para guru kemudian mengundang yang bersangkutan untuk meminta kesediaan dan pada akhirnya beliau bersedia kemudian mengundang orang tua wali murid untuk diperkenalkan dalam forum rapat sekolah.

Halaman 366 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua tidak dihadirkan di rapat awal pemilihan pengurus komite. Kemudian pengurus komite yang dipilih diperkenalkan kepada orang tua pada saat tahun ajaran baru dan tidak ada keberatan dari orang tua wali dan semuanya menyetujui.
- Bahwa Pembentukan pengurus komite SMK N 1 Ende berasal dari unsur :
  1. Ketua berasal dari unsur Alumni SMK 1 Ende dan punya pengalaman di bidang pendidikan.
  2. Sekretaris berasal dari unsur komunikasi dengan pimpinan level atas.
  3. Bendahara adalah tenaga pendidik / guru di SMK N 1 Ende dengan maksud untuk mempermudah dalam penerimaan keuangan komite.
- Bahwa bendahara adalah tenaga pendidik / guru di SMK N 1 Ende dengan maksud untuk mempermudah dalam penerimaan keuangan komite dari unsur sekolah.
- Bahwa pengurus komite berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- Bahwa penentuan pengurus komite tidak melalui rapat orang tua namun setelah penentuan saksi menyampaikan kepada orang dalam forum rapat orang dan saat itu tidak ada yang keberatan dan semua orang tua wali menyetujui Drs. ABRAHAM BADU, M.Si sebagai ketua komite.
- Bahwa pemilihan ketua komite dan sekretaris tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara, waktu itu tidak dilaksanakan musyawarah atau pemungutan suara ditentukan melalui rapat para guru.
- Bahwa terdakwa yang menetapkan pengurus komite SMK N 1 Ende tahun 2017 s/d tahun 2021.
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende menerima uang sumbangan wajib dari orang tua wali murid. Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan orang tua wali yang sebelumnya sudah melalui rapat kerja guru sekolah SMK N 1 Ende, kemudian dalam rapat orang tua wali siswa disampaikan kebutuhan sekolah yang tidak diakomodir dari dana bos. Dasar kesepakatan dicatat dalam notulen rapat.
- Bahwa Penggalangan dana berdasarkan kesepakatan orang tua wali siswa dan pihak sekolah, tidak ada penetapan namun kami menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama.
- Bahwa Nama Komite SMK N 1 Ende, AD ART terdakwa perintahkan kepada bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA untuk membuat namun sudah atau tidak terdakwa tidak mengetahui.

Halaman 367 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus dilakukan sesuai ketentuan yaitu Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat kemudian hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. Namun yang terdakwa lakukan tidak melalui mekanisme tersebut kepala sekolah langsung mengambil alih tanpa melibatkan ketua komite.
- Bahwa yang seharusnya menetapkan adalah Ketua Komite namun yang terjadi adalah kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, yang menetapkan berdasarkan kesepakatan orang tua wali dan ketua komite yang tertuang dalam berita acara kesepakatan bersama.
- Bahwa besaran uang komite rincian :
  1. Tahun 2019/2020 yaitu Rp. 2.300.000,-/siswa,
  2. Tahun 2020/2021, yaitu Rp. 1.800.000,-/siswa
  3. Tahun 2021/2022, yaitu Rp. 1.800.000,-/siswa
- Bahwa pada tahun Ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- ditetapkan melalui kesepakatan bersama, namun TA. 2020/2021 dan Tahun 2021/2022 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.800.000,- atas pertimbangan terdakwa sebagai kepala sekolah karena situasi covid yang tidak bisa mengumpulkan masa/banyak orang.
- Bahwa seharusnya ditetapkan oleh ketua komite berdasarkan usulan kebutuhan sekolah yang dibicarakan dalam forum rapat yang dipimpin oleh ketua komite.
- Bahwa tidak ada berita acara kesepakatan bersama karena situasi covid, Ketua komite berhalangan karena mengurus covid kabupaten, dan tidak boleh menghimpun masa.
- Bahwa penetapan uang komite harus menghadirkan orang/wali siswa namun terdakwa tidak melaksanakan mengingat situasi covid 19. Hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa orang tua wali siswa dapat datang sendiri dan menyettor kepada bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dan juga bisa siswa membawa uang dan menitipkan kepada wali kelas, bisa juga siswa langsung menyettor kepada bendahara.
- Bahwa setelah kesepakatan bersama dan penetapan besaran komite Saksi selaku kepala sekolah Saksi mengeluarkan surat edaran kepada orang tua untuk menyampaikan besaran uang komite dan cara penyettoran langsung ke bendahara maupun dititipkan melalui guru wali kelas.

Halaman 368 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme yang dilakukan yaitu penggunaan berdasarkan item kegiatan berdasarkan RABS yang telah dibuat oleh perumus RABS, Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, membuat RABS berdasarkan item pembiayaan yang sudah dirancang tetapi tidak bisa dibiayai dana BOS. Cara penggunaan uang yaitu atas perintah Kepala Sekolah berupa lisan dan tertulis/memo dan RAB dalam proposal kegiatan, yang diserahkan dari panitia-panitia kegiatan yang sudah disetujui oleh kepala sekolah yaitu terdakwa sendiri HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd.
- Bahwa penggunaan keuangan komite seharusnya mendapat persetujuan Komite sekolah namun pelaksanaannya terdakwa tidak menyampaikan kepada Komite Sekolah.
- Bahwa ketika penggunaan keuangan komite tidak mendapat persetujuan dari Komite Sekolah Bertentangan dengan mekanisme penggunaan keuangan komite,
- Bahwa mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan kepada orang tua wali siswa. terdakwa selalu mempertanggungjawabkan keuangan kepada orang tua pada tahun ajaran baru dan pada tahun ajaran 2020/2021 dan TA 2021/2022 tidak bisa dipertanggung jawabkan karena covid.
- Bahwa seharusnya laporan pertanggung jawaban kepada orang tua wali, dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 semester namun yang terdakwa lakukan pada tahun 2019/2020 hanya pertemuan diawal tahun ajaran sedangkan tahun 2020/2021 dan 2021/2022 tidak ada pertanggung jawaban.
- Bahwa seharusnya dibuat laporan secara tertulis kepada Ketua Komite namun terdakwa bersama bendahara tidak membuat laporan penggunaan keuangan kepada ketua komite.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah penerima keuangan dari orang tua siswa, karena yang mengetahui lebih jelas adalah bendahara.
- Bahwa anak yang tidak membayar uang komite, terdakwa menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan raport sampai melunasi keuangan komite.
- Bahwa item kegiatan yang dibiayai, ada pada bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, terdakwa hanya mendapat laporan secara lisan terkait dengan siswa yang belum membereskan keuangan komite.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi pernah menerima uang komite dari bendahara untuk kepentingan keperluan pribadi dan keluarga terdakwa.

Halaman 369 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas pertanyaan pemeriksa pernah menerima uang dari bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd;
- Bahwa tidak semua laporan pertanggung jawaban yang di sampaikan oleh bendahara komite saudara WENSESLAUS DERTA, S.Pd benar dikarenakan ada beberapa laporan pertanggung jawaban yang tidak sesuai dan ada juga laporan pertanggung jawaban yang terdakwa sendiri tidak pernah terima.
- Bahwa berdasarkan data pertanggung jawaban yang diserahkan oleh bendahara Komite an. WENSESLAUS DERTA, S.Pd keuangan yang digunakan oleh Saksi adalah sebesar Rp. 153.500.000 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan berkaitan dengan data pertanggung jawaban keuangan yang menurut Saksi tidak bisa dipertanggung jawabkan, apabila dikemudian hari bendahara Komite an. WENSESLAUS DERTA, Spd dapat memperlihatkan bukti berupa kwitansi penyerahan, maka terkait dengan hal tersebut Saksi akan mengakui kebenarannya.
- Bahwa terdakwa yang meminta kepada saudara bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd untuk memberikan uang kepada Saksi, terkadang bendahara untuk memberikan uang kepada Saksi.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah uang yang diberikan oleh bendahara komite adalah uang komite atau tidak, dalam pikiran Saksi bahwa bendahara, ada penjualan tiket sehingga Saksi sering minta tolong/ minta bantuan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah bendahara punya uang yang banyak atau tidak namun yang pasti Saksi meminjam uang dari bendahara.-
- Bahwa Kepala sekolah dapat melakukan pengelolaan keuangan komite namun sudah mendapat persetujuan ketua komite.
- Bahwa terdakwa tidak boleh selaku kepala sekolah langsung uang tunai dari bendahara komite
- Bahwa terdakwa berpikir bendahara masih ada ikatan emosional dengan Saksi sehingga terdakwa meminta bantuan / meminta tolong bendahara,-
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 03 November 2021, terjadi pembelian tiket untuk saudara, bersama YOVITA IDA TENA dan DELFINA J. EBO, dengan rincian tiket untuk saudara sebesar Rp.1.332.063, untuk YOFITA IDA TENA sebesar Rp.1.332.661,- dan untuk DELFINA J. EBO sebesar Rp.1.332.511,- dimana pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Maumere – Balikpapan, benar bahwa pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSELLAUS DERTA, untuk pembelian tiket yang ditujukan kepada YOVITA IDA TENA dan DELFINA J.

Halaman 370 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBO adalah untuk urusan pribadi, sedangkan pembelian tiket yang ditujukan untuk Saksi adalah untuk kepentingan dinas dimana urusan dinas tersebut terkait dengan mencari informasi bagi siswa/siswi dibidang dunia kerja, sehingga ketika tamat dari SMK Negeri 1 Ende, siswa/siswi tersebut dapat diterima untuk bekerja di sana.

- Bahwa kegiatan yang lakukan menggunakan tiket yang dibeli oleh bendahara komite WENSESLAUS DERTA benar-benar untuk Kepentingan pribadi dalam rangka pemeriksaan kesehatan istri dan anak terdakwa dan terdakwa ada urusan dinas terkait dengan informasi dibidang dunia kerja.
- Bahwa terdakwa mendapat transferan uang dari bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA dan uang yang digunakan adalah uang komite.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2019, bendahara Komite SMK N 1 Ende sdr. WENSESLAUS DERTA, membeli tiket tujuan Ende Berangkat dari Kupang.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 untuk ROSARI MELLASTRI WULANDARI, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Ende-Kupang sebesar Rp. 435.299, Untuk kepentingan pribadi, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara.
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 untuk ROSARI MELLASTRI WULANDARI, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang-Ende sebesar Rp. 547.600,- uang pembelian dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara.
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 untuk ROSARI MELLASTRI WULANDARI, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang-Surabaya sebesar Rp. 2.068.789,- benar anak terdakwa terbang dari kupang ke Surabaya dalam rangka melanjutkan pendidikan, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara komite WENSESLAUS DERTA,- uang pembelian dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara. Untuk kepentingan pribadi, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tahu karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2021, untuk DELFINA J. EBO, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan

Halaman 371 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kupang-Ende sebesar Rp. 512.737, untuk kepentingan pribadi, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara.

- Bahwa pada tanggal 10 September 2019, untuk YOVITA IDA TENA, DELFINA J. EBO, FILARIUS MARI dan ANGELICA PIA, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Ende-Kupang sebesar Rp. 2.658.800, untuk kepentingan pribadi kami sekeluarga mengikuti acara syukuran wisuda anak terdakwa WULANDARI, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara,
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, untuk YOVITA IDA TENA, DELFINA J. EBO, FILARIUS MARI dan ANGELICA PIA, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang-Ende sebesar Rp. 2.142.400, untuk kepentingan pribadi kami sekeluarga kembali dari kupang mengikuti acara syukuran wisuda anak terdakwa WULANDARI, uang pembelian tiket dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara,-
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, untuk YOVITA IDA TENA dan KRISPINUS PEDANG, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Ende Kupang sebesar Rp. 1.204.865, untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk pak KRIS kepentingan dinas, uang pembelian tiket untuk istri terdakwa YOVITA IDA TENA dari bendahara apakah berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara,-
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, untuk YOVITA IDA TENA dan KRISPINUS PEDANG, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang Ende sebesar Rp. 923.387 ? untuk keperluan Istri Saksi untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk pak KRIS kepentingan dinas, uang pembelian tiket untuk istri terdakwa YOVITA Ida Tena dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara,
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, untuk YOVITA IDA TENA dan KRISPINUS PEDANG, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang Ende sebesar Rp. 1.204.865,

Halaman 372 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tiket pada tanggal 25 Oktober 2019, saat itu tidak jadi berangkat sehingga dilakukan pembelian tiket lagi pada tanggal 26 Oktober 2019 dengan tujuan yang sama dan tujuan pembelian tiket pesawat tersebut adalah Istri terdakwa untuk kepentingan pribadi sedangkan untuk pak KRIS kepentingan dinas, uang pembelian tiket untuk istri terdakwa YOVITA IDA TENA dari bendahara berasal dari uang komite atau tidak terdakwa tidak tau karena terkadang terdakwa juga memberikan uang kepada bendahara.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2021, untuk YOVITA IDA TENA, pembelian tiket dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA penerbangan Kupang Ende sebesar Rp. 511.914, Untuk pembelian tiket pada tanggal 26 September 2021, dengan tujuan Kupang –Ende yang dilakukan oleh bendahara WENSESLAUS DERTA dan ditujukan untuk YOVITA IDA TENA adalah untuk kepentingan pribadi.-
- Bahwa pada tahun 2019, komite SMK N 1 Ende mencairkan uang untuk shering pembangunan gedung Ruang Praktek Siswa sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk membayar biaya tukang diperbolehkan oleh dana komite shering dana APBN, dalam bimtek dijelaskan bahwa bisa di shering.
- Bahwa Dana sehiring dapat digunakan untuk shering namun untuk kegiatan atau item apa terdakwa tidak mengetahui, yang memerintahkan adalah terdakwa dan disetujui oleh panitia pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020, dalam rekening terdakwa mendapat transfer dana dari sdri. KRISPINA AGNES NAMBA, sebesar Rp. 245.000.000, Uang tersebut adalah uang keuntungan pembelian seragam sekolah oleh bendahara dan ditransfer masuk ke rekening terdakwa.
- Bahwa kegunaan uang yang ditransfer oleh sdr. KRISPINA AGNES NAMBA sebesar Rp. 245.000.000, untuk keperluan pribadi, terdakwa mulai menggunakan uang tersebut diatas mulai tanggal 14 Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 06 April 2021, dalam rekening terdakwa mendapat transfer dana dari WENSESLAUS DERTA, sebesar Rp. 37.000.000, digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa dalam hal pembangunan Aula SMK N 1 Ende, ada RABS namun ada pada bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. dan konsultan perencanaan sdr. MARIO BANUNAEK, sebagai konsultan perencanaan.
- Bahwa terkait pembangunan AULA SMK N 1 Ende, terdakwa mengetahui dan menyetujui pembangunan harus dilaksanakan.

Halaman 373 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memerintahkan tetapi terdakwa menyetujui dalam perencanaan, sedangkan pengelolaan dan pengerjaan itu ada pada konsultan dan bendahara.
- Bahwa terdakwa tidak memerintahkan bendahara untuk mengeluarkan uang untuk pembangunan aula tetapi Saksi menyetujui atas usulan bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembanguan AULA yaitu terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, AMADIUS GOTORI, WENSESLAUS DERTA, dan Konsultan Sdr. MARIO BANUNAEK.
- Bahwa tidak ada kepanitian dalam pembangunan Aula SMK N 1 ENde, namun terkait pembangunan semuanya diserahkan kepada bendahara Pak WENSESLAUS, Pak AMADEUS dan pak MARIO BANUNAEK.
- Bahwa bendahara WENSESLAUS DERTA terkait pembangunan gedung SMK N 1 Ende menggunakan keuangan sebesar Rp. 502.127.000, namun yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 398.663.000, sisanya Rp.103.464.000,- terdakwa tidak mengetahui yang mengelola keuangan tentang pembangunan adalah bendahara.
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp. 125.187.000,- yang mengelola yaitu bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA dan sdr. MARIO BANUNAEK.
- Bahwa dalam pembangunan ruang Tata Niaga tersebut tidak ada panitia. terdakwa serahkan sepenuhnya kepada bendahara dan MARIO BANUNAEK.
- Bahwa yang memerintahkan untuk kegiatan pembangunan .
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2021, pukul 06.31.24, YOVITA IDA TENA nomor rekening 00402024455611, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), YOVITA IDA TENA mendapat transfer dari sdr. WENSESLAUS DERTA bendahara komite. YOVITA IDA TENA adalah istri terdakwa. Istri merasa kaget ketika uang masuk ke rekening dan menanyakan kepada terdakwa, dan istri terdakwa tidak mau jika itu bukan hasil keringat sendiri, kemudian terdakwa menjawab itu uang keuntungan pengadaan seragam sekolah.
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.42.11, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 374 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.40.09, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.41.13, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 06.28.15, HERMIN GILDUS RANGGA nomor rekening 00402060041881, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditranfer oleh bendahara WENSESLAUS DERTA ke rekening saudara maupun rekening istri saudara, total transfer pada tanggal 30 Agustus 2021, senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bahwa uang tersebut terdakwa terima, dan Saksi gunakan untuk keperluan pribadi dan juga digunakan untuk bersenang-senang, ke tempat hiburan malam dan bermain judi kartu.
- Bahwa pada tanggal 16 September 2021, pukul 11.51, ROSARI MEILASTRI WULANDARI nomor rekening 3141107788, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah ), ROSARI MEILASTRI WULANDARI adalah anak pertama (anak kandung) terdakwa, namun terkadang kalau transfer ke anak terdakwa mengganti uang sdr. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 10.52, ROSARI MEILASTRI WULANDARI nomor rekening 3141107788, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) benar ROSARI MEILASTRI WULANDARI adalah anak pertama (anak kandung) terdakwa, namun terkadang kalau transfer ke anak terdakwa, terdakwa mengganti uang sdr. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021, pukul 10.54, ROSARI MEILASTRI WULANDARI nomor rekening 3141107788, mendapat transfer uang dari Rekening mandiri nomor 1810000307034 an. WENSESLAUS DERTA jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), benar ROSARI MEILASTRI WULANDARI adalah anak pertama (anak kandung) terdakwa, namun

Halaman 375 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang kalau transfer ke anak terdakwa, terdakwa mengganti uang sdr. WENSESLAUS DERTA.

- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 7 Oktober 2021, bendahara WENSESLAUS DERTA transfer dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kerekening anak terdakwa yang bernama MEILASTRI, namun uang tersebut adalah uang pinjaman dan terdakwa kembalikan pada keesokan harinya terkadang berselang beberapa hari baru terdakwa kembalikan.
- Bahwa uang yang ditransfer kepada anak terdakwa MEILASTRI WULANDARI semuanya adalah uang terdakwa, awalnya terdakwa pinjam di pak bendahara komite kemudian keesokan harinya terdakwa gantungan uang bendahara komite.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, bendahara WENSESLAUS DERTA mentransfer dana sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 7 Oktober 2020, bendahara WENSESLAUS DERTA mentransfer dana sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kerekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan pada tanggal 15 September 2020, bendahara WENSESLAUS DERTA menyerahkan uang kepada sdr. AGNES MUDE kemudian sdr. AGNES MUDE mentransfer dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ibu AGNES MUDE untuk kepentingan pribadi,-
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengingat lagi apakah pernah menerima uang pengadaan foto siswa kelas XII Tahun Ajaran 2020/2021, 382 orang @ 25.000,- total Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA yang disaksikan oleh sdr. KRISPINA AGNES NAMBA.
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa bersama para guru-guru pernah melaksanakan rekreasi di pantai Nangalala, Saksi tidak mengetahui menggunakan uang komite atau tidak seharusnya uang komite tidak dapat digunakan untuk rekreasi guru-guru.
- Bahwa dalam pengelolaan pembangunan fisik di SMK N 1 ENde Tidak menggunakan pihak ketiga atau rekanan karena secara pribadi terdakwa tidak tahu pihak ketiga namun terdakwa menyampaikan kepada pak WENSELAUS DERTA bahwa terkait pembangunan fisik di SMK N 1 Ende harus melibatkan konsultan perencana pak MARIO SERA BANUNAEK.

Halaman 376 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 376



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal MARIO SERA BANUNAEK adalah konsultan yang selalu dipakai di Dinas PPO diperkenalkan oleh pak bendahara Pak. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah MARIO SERA BANUNAEK memiliki sertifikat konsultan atau tidak.
- Bahwa Inspektorat Prov. NTT pernah melakukan pemeriksaan terhadap keuangan BOS dan Keuangan Komite SMK N 1 Ende. Pemeriksaan Inspektorat Prop. NTT, dilaksanakan pada tanggal tanggal 13 Oktober 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020,- Tim Inspektorat Prov. NTT adalah FRANS BIN, SE.,M.M, KLARA MASITE KELEN, SE dan MIGAL HENDRIK LONA. Objek pemeriksaan adalah Keuangan Dana BOS dan Dana Komite SMK N 1 Ende, yang diperiksa saat itu bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, SPd dan Bendahara BOS ibu ISRATIH MAHAR,-
- Bahwa ada temuan Inspektorat Prov. NTT, yaitu pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan bagi para guru dan pegawai PNS d SMK N 1 Ende, sejak bulan Januari 2020 s/d Juni 2020. Sedangkan untuk dana bos terdakwa lupa. terdakwa pernah tanda tangan surat pernyataan untuk pengembalian.
- Bahwa terhadap temuan Inspektorat Prov. NTT, seluruh PNS dan Guru yang mendapat uang transportasi sudah ada pengembalian. Cara pengembalian adalah teknik dari bendahara dan kami menandatangani slip penyetoran, tidak memberikan uang secara tunai, uang diambil dari keuangan komite kemudian setelah disetor ke rekening BRI Ndururea kemudian didokumentasikan dan dilaporkan ke Inpektorat seakan sudah ada pengembalian namun nyatanya tidak ada pengembalian.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebagai kepala sekolah saat itu dan guru-guru serta PNS mengembalikan uang tunai atau hanya menandatangani slip penyetoran bank uang tunai tidak diserahkan.
- Bahwa yang mempunyai ide yaitu bendahara Komite sdr. WENSESLAUS DERTA, dengan bendahara pembantu sdri. KRISPINA AGNES NAMBA.-
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah terdakwa mendapat rekomendasi dari Inspektorat Prop. NTT, kemudian terdakwa mengumpulkan para guru dan PNS dan mengadakan rapat penyampaian hasil temuan Inspektorat Prov. NTT, ketika dalam rapat terdakwa menyampaikan besar keuangan yang menjadi temuan Inspektorat Prov. NTT untuk dikembalikan, dan Saksi sampaikan dalam rapat bahwa kita harus kembalikan namun saat itu ada beberapa pemikiran dari guru-guru dianjurkan bahwa sebaiknya kita melakukan satu kegiatan proyek work untuk kelas XII karena situasi covid, dan

Halaman 377 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengembalian diserahkan teknisnya kepada bendahara komite dengan catatan bahwa para guru tidak terima lagi pada kegiatan proyek work.

- Bahwa kegiatan Proyek Work sebelumnya terdakwa tidak tahu. Bahwa apakah penggunaan keuangan komite untuk kegiatan Proyek Work sudah dilaporkan kepada Inspektorat Prop. NTT bahwa pengembalian keuangan digantikan dengan kegiatan Proyek Work terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Kegiatan proyek work berjalan, yang mengetahui kegiatan adalah para Kepro yaitu Ibu EMI, Pak EFRAIM, Ibu ELSE SAKERA, Pak. KRIS PEDANG dan Ibu. LESTY dan Kepro RPL.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), terdakwa belum mengembalikan karena belum ada uang.
- Bahwa nama guru dan PNS yang menerima honor tambahan berupa transportasi dan tunjangan jabatan yang mengetahui adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA. Namun terdakwa mengetahui total yang harus dikembalikan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Prop. NTT sebesar Rp. 196.000.000,- seratus Sembilan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa tidak ada saksi saksi yang dapat meringankan terdakwa.
- Bahwa Pada Tahun ajaran 2019/202, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan desember 2021, berdasarkan perhitungan kerugian keuangan oleh AHLI Akuntan Publik bahwa dalam pengelolaan keuangan komite SMK N 1 Ende Negara mengalami kerugian sebesar Rp. **1.726.681.118,-** menurut terdakwa yang bertanggungjawab adalah terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebagai kepala sekolah saat itu dan bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa ada keterangan yang perlu terdakwa tambahkan yaitu aliran keuangan ke pihak lain yaitu kepada wakil bupati Ende sdr. ERIK REDE, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Ada aliran dana kepada pak. OKA melalui DANI mengatasmakan Pak OKA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). ada aliran dana ke sdr. JOLAN dan DEDI WOLO sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada bukti kwitansi karena pemberian dilakukan di tempat jualan kue milik JOLAN, yang dapat dibuktikan yaitu penyerahan uang kepada wakil bupati di rumah wakil bupati jl. D.I Panjaitan diketahui oleh sopir dan ajudan wakil bupati. Bukti yang dapat dapat terdakwa tunjukan yaitu rekaman percakapan setelah ada kejadian yang ditangani pihak kepolisian,

Halaman 378 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pak kami serahkan di pantai kota raja, saat itu terdakwa bersama pak WENSESLAUS DERTA dan salah satu teman Pak Oka bernama DANI.

- Bahwa perlu terdakwa jelaskan dan tambahkan pada saat kegiatan persiapan pelantikan wakil Bupati ada permintaan dari sdr. ARMIN WINI WASA untuk membantu melancarkan urusan acara syukuran pelantikan wakil bupati di Moni sebesar Rp.5.000.000, penyerahan secara tunai kepada pak ARMIN bertempat di rumah wakil bupati di Jl. Di. Panjaitan, kemudian Saksi juga menyerahkan sebesar Rp. 1.800.000 kepada ketua GARDA untuk pembelian kostum.
- Bahwa penyerahan uang Kepada bupati terdakwa serahkan secara langsung di rumahnya di Jl. DI. Panjaitan, kepada JOLAN dan DEDI langsung diserahkan di tempat jualan kue JOLAN sementara untuk Pak. OKA sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) melalui perantara bernama DAN sedangkan Rp. 25.000.000,- langsung diserahkan kepada pak OKA.
- Bahwa alasan tersengka menyerahkan uang berdasarkan keterangan sdr. DAN bahwa persoalan yang dihadapi oleh Saksi dapat diselesaikan, oleh pihak-pihak tersebut.
- Bahwa ada hal yang perlu terdakwa sampaikan sebagian keuangan yang terdakwa terima dari WENSESLAUS DERTA, terdakwa investasikan ke koperasi ASIA DINASTI yang beralamat di Jl. Cendana Kel. Potulando, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende, uang yang terdakwa investasikan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). terdakwa menggunakan nama terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, nomor rekening / nomor anggota terdakwa tidak ingat.
- Bahwa terdakwa sudah mendapat keuntungan dari hasil investasi di ASIA DINASTI yakni terdakwa sudah pernah mencaikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- pada sekitar tahun 2020, dan sisa uang belum dicairkan sampai saat ini karena Koperasi ASIA DINASTI bermasalah.
- Bahwa pemilihan anggota komite, tidak melalui mekanisme rapat orang tua wali siswa, namun yang terjadi terdakwa selaku kepala sekolah bersama beberapa wakil kepala sekolah antara lain Pak. AMADEUS GOTORI, Pak. ALBERTUS JAO NDU, Pak. WENSESLAUS DERTA dan Pak UMAR, duduk bersama untuk menentukan siapa yang menjadi pengurus komite, kemudian disepakati nama Pak. ABRAHAM BADU, sebagai ketua komite pada dasarnya kami menentukan Pak. ABRAHAM BADU sebagai ketua komite karena Pak. ABRAHAM BADU berpengalaman dalam bidang pendidikan, kemudian alumni SMK N 1 Ende, dan memiliki jaringan ke pemerintahan di level atas

Halaman 379 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bagus untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan sekolah. Kemudian hal yang sama kami miliki Pak. ALFON TARI, SE, sebagai Sekrestaris karena pak ALFONS TARI, memiliki kemampuan di bidang administrasi, kemudian untuk bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, terdakwa sampaikan dalam forum rapat dan menurut forum bahwa untuk pendekatan pelayanan dan penerimaan maka ditunjuk guru di sekolah untuk menjadi bendahara, sehingga ditunjuklah Pak. WENSESLAUS DERTA sebagai bendahara komite. Kemudian setelah penentuan pengurus maka terdakwa melakukan pendekatan dengan Pak. ABRAHAM BADU dan pak komite dalam Rapat Orang Tua Wali di tahun ajaran baru, terdakwa perkenalkan Pak. ABRAHAM BADU sebagai ketua komite, Pak. ALFON TARI sebagai Sekretaris Komite dan Pak. WENSESLAUS DERTA sebagai Bendahara, dan disetujui oleh seluruh orang tua wali yang hadir.

- Bahwa dalam menentukan susunan pengurus komite tidak melalui mekanisme musyawarah mufakat bersama orang tua wali, atau melalui pemungutan suara, namun hanya berdasarkan kesepakatan forum rapat para wakil sekolah dan saksi dalam hal penentuan kemudian pada saat rapat awal tahun ajaran baru, disampaikan kepada orang tua wali siswa.
- Bahwa yang menentukan Ketua Komite, Sekretaris dan Bendahara adalah forum rapat terdakwa bersama para wakil kepala sekolah antara lain Pak. AMADEUS GOTORI, Pak. ALBERTUS JAO NDU, Pak. WENSESLAUS DERTA dan Pak UMAR, rapat tersebut dilaksanakan bertempat di ruangan kepala sekolah, rapat tersebut dilaksanakan pada Bulan Juli 2017. Sedangkan untuk Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, tidak pernah dilakukan rapat pemilihan pengurus komite.
- Bahwa setelah tahun ajaran 2017/2018, tidak ada lagi rapat untuk penentuan pengurus komite, sampai masa berakhirnya jabatan saksi pada bulan Desember 2021. Dalam SK tersebut dijelaskan bahwa masa berlaku 5 (lima) sampai dengan Tahun 2021
- Bahwa pengurus Komite SMK N 1 Ende sesuai Surat Keputusan terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017, tanggal 3 Juli 2017, adalah Ketua Komite sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris ALFONSIUS TARI SE dan Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd, dan tidak ada anggota dalam pengurus komite, penentuan 3 (tiga) orang berdasarkan konsultasi terdakwa dengan almarhum mantan ketua komite bahwa penentuan pengurus tidak harus banyak dan yang penting ada

Halaman 380 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Sekretaris dan Bendahara, sehingga terdakwa mengeluarkan keputusan untuk Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

- Bahwa terdakwa dapat jelaskan Pak ABRAHAM BADU, Pak. ALFON TARI SE dan Pak WENSESLAUS DERTA bukan orang tua wali yang masih aktif, namun Pak ABRAHAM BADU dan Pak ALFONS TARI SE adalah Tokoh Masyarakat, sedangkan Pak WENSESLAUS adalah guru di SMK N 1 Ende dalam rapat / forum untuk memudahkan pelayanan dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan komite
- Bahwa terdakwa tidak ada tujuan lain dalam hal melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan komite tidak sesuai ketentuan permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, bahwa terdakwa pada dasarnya tidak mengetahui tentang aturan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah, saat itu terdakwa baru menjabat sebagai kepala sekolah baru dan tidak ada serah terima jabatan dari kepala sekolah lama kepada terdakwa sehingga terdakwa bekerja berdasarkan kordinasi dan konsultasi dengan teman-teman guru dan mantan ketua komite alm. DANIEL TIBO WERO.
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan terdakwa tidak mengetahui tentang ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016, tentang komite sekolah, terdakwa bekerja hanya berdasarkan koordinasi dengan teman-teman guru dan konsultasi dengan mantan Ketua Komite alm. DANIEL TIBO WERO. Bahwa tidak ada lagi pemilihan / penentuan pengurus baru karena dalam SK yang saksi buat jangka waktu 5 (lima) tahun. terdakwa tidak ada tujuan lain namun perlu terdakwa jelaskan benar-benar terdakwa tidak terlalu paham tentang aturan dalam oermendikbud 75 tahun 2016.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah bahwa Ketua Komite pernah memberikan pertimbangan dan masukan dalam pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan dilaporkan kepada orang tua wali. waktu ketua komite memberikan pertimbangan, terdakwa lupa kapan terjadi, namun pertimbangan tersebut disampaikan pada saat rapat orang tua di tahun ajaran baru bertempat di SMK N 1 Ende.
- Bahwa proposal tidak pernah dibuat oleh pengurus komite yang diketahui sekolah, terdakwa juga tidak pernah meminta kepada komite untuk membuat proposal penggalangan dana, yang terjadi bahwa terdakwa selaku kepala sekolah dalam hal penggalangan dana langsung disampaikan secara langsung pada saat rapat orang tua wali, kebutuhan penggalangan dana disesuaikan dengan hasil rapat terdakwa dengan beberapa guru sebelum disampaikan dalam rapat orang tua wali siswa di awalan tahun ajaran.

Halaman 381 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggalangan dana dilakukan oleh pihak sekolah, hasil penggalangan dana disetor kepada bendahara komite melalui bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd kemudian bendahara yang menyimpan hasil penggalangan dana komite.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah rapat orang tua wali di awal tahun ajaran kemudian terdakwa selaku kepala sekolah mengeluarkan surat edaran kepada orang tua tentang besaran uang komite dan tahapan pembayaran, kemudian terdakwa juga menyampaikan kepada siswa pada saat apel pagi untuk mengingatkan siswa membayar uang komite, pembayaran uang komite dapat terjadi orang tua wali langsung ke sekolah untuk membayar langsung ke bendahara, atau orang tua titipkan uang sekolah kepada anak untuk membayar langsung ke bendahara atau bisa juga siswa / murid menitipkan uang sekolah kepada wali kelas untuk membayar kepada bendahara dan bukti kwitansi diserahkan kepada anak / peserta didik.
- Bahwa hasil penggalangan keuangan komite yang menyimpan adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, penyimpanan uang komite di rekening komite SMK N 1 Ende, nomor 465101010761532, BRI Unit Ndururea Nangapanda, namun yang mengetahui jelas adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, apakah uang komite semuanya disimpan di rekening tersebut atau tidak terdakwa tidak tahu. Apakah rekening tersebut digunakan atau tidak yang lebih mengetahui adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa terdakwa memberi kepercayaan penuh kepada bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, dan terdakwa juga sudah memerintahkan untuk bendahara membuat laporan pertanggungjawaban kepada komite dan kepada orang tua wali peserta didik/siswa, namun sampai dengan saat bendahara tidak membuat laporan pertanggungjawaban kepada orangtua wali, karena situasi covid dan tidak dapat mengumpulkan masa. Pada saat yang bersamaan Ketua Komite Pak. ABRAHAM BADU adalah ketua penanganan covid 19 kab. Ende beliau menyampaikan secara dan melalui surat edaran untuk sementara tidak boleh mengumpulkan masa.
- Bahwa Komite SMK N 1 Ende tidak memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), terdakwa sudah berulang kali memerintahkan kepada bendahara untuk membuat AD dan ART dan terdakwa juga sudah pernah memberikan dokumen contoh AD ART kepada bendahara pada Tahun Ajaran 2019 bertempat di SMK N 1 Ende, untuk dibuat namun sampai saat ini bendahara tidak membuat. Terkait dengan

Halaman 382 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) SMK N 1 Ende ada di sekolah namun untuk RABS itu menjadi tanggungjawab bendahara untuk membuat, namun dari TA. 2019 sampai Desember 2021, belum diserahkan kepada terdakwa untuk ditandatangani.

- Bahwa itu menjadi kelamahan terdakwa dalam pengawasan, terdakwa memberikan kepercayaan penuh kepada bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd untuk mengelola keuangan dan melaporkan keuangan kepada terdakwa namun itu semua tidak dilaksanakan dengan baik oleh bendahara. yang menjadi acuan dalam penggunaan keuangan komite, harus berdasarkan RAPBS dan yang mengetahui RABS tersebut adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Bahwa jumlah peserta didik terdakwa tidak mengetahui secara pasti, yang lebih mengetahui secara pasti adalah bagian kesiswaan dan bendahara sdr. WENSELAUS DERTA, S.Pd, terdakwa pernah disampaikan secara lisan jumlah peserta didik / siswa namun terdakwa lupa. Jumlah total penerimaan sumbangan dari Tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 terdakwa tidak mengetahui karena yang mengetahui adalah bendahara karena ada yang sudah membayar dan ada yang belum membayar ada yang masih membayar setengah sehingga yang mengetahui jumlah keuangan yang diterima adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. sedangkan untuk penerimaan siswa tahun 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000/siswa sedangkan Tahun Anggaran 2020/2021 dan Tahun Anggaran 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,-/siswa.
- Bahwa penggunaan keuangan setiap tahun ajaran yang lebih mengetahui kepada siapa digunakan adalah Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA karena bendahara yang memiliki data penggunaan keuangan komite, kegiatan yang dibiayai menggunakan keuangan komite tersebut terdapat dalam RABS yang dibuat oleh bendahara komite, dan tentunya yang lebih mengetahui kegiatan apa saja yang dibiayai semuanya bendahara lebih pasti mengetahui, terdakwa hanya menandatangani terkait kegiatan-kegiatan besar sekolah yang dibiayai oleh dana komite.
- Bahwa yang terdakwa ketahui penggunaan keuangan hasil penggalangan sebagian dilaksanakan sesuai ketentuan, sebagian tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 10 Ayat (5) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.

Halaman 383 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang terdakwa ketahui adalah pengembangan sarana prasarana, pembayaran insentif tenaga honor dan tugas tambahan, insentif tenaga Dapodik, insentif teknisi dan honor tenaga satpam, pengembangan bakat siswa, dan pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan yaitu menggunakan keuangan komite untuk kepentingan pribadi, pembayaran biaya transportasi dan tunjangan jabatan PNS.
- Bahwa yang mengetahui secara pasti mana yang dibolehkan dan mana yang tidak boleh adalah bendahara karena yang membuat RABS adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd
- Bahwa penggunaan keuangan komite tidak melalui persetujuan komite sekolah, kemudian laporan pertanggungjawaban dibuat diakhir tahun ajaran, laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 belum dipertanggungjawabkan karena masa pandemic covid 19, dan tidak dapat mengumpulkan masa (orang tua wali siswa), dapat dijelaskan bahwa keuangan komite tahun 2021/2022 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena masa jabatan saksi berakhir pada bulan Desember 2021 pergantian kepala sekolah terjadi dipertengahan tahun ajaran.
- Bahwa dalam penggunaan keuangan komite tidak melibatkan komite sekolah, namun kami melaporkan pertanggungjawaban tentang penggunaan keuangan kepada Ketua Komite dan orang tua wali di akhir tahun pelajaran.
- Bahwa terdakwa menjelaskan semua yang kami lakukan tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, karena penyebabnya adalah saksi sebagai kepala tidak membaca dan memahami tentang Permendikbud tersebut dan pada saat saksi menjabat kepala sekolah tidak melalui serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima sehingga dalam penggunaan tidak sesuai ketentuan. Kami bekerja hanya mengikuti sesuai dengan pengalaman / kebiasaan pemimpin masa lalu, itupun kami harus bertanya kepada guru-guru senior dan melalui rapat kerja sekolah yang dilakukan setiap tahun.
- Bahwa yang melakukan penyimpangan terdakwa tidak mengetahui secara pasti, yang terdakwa ketahui bahwa pengambilan kebijakan adalah terdakwa sebagai kepala sekolah dan menyetujui, bahwa penggunaan keuangan komite sesuai RABS yang tentunya diketahui secara pasti oleh bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd. karena yang membuat RABS terdakwa hanya menyetujui dan menandatangani.

Halaman 384 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang penggalangan dana yang tidak sesuai ketentuan yang mengetahui secara pasti adalah bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, yang pastinya terdakwa ikut bertanggung jawab karena terdakwa juga menggunakan sebagian kecil hasil penggalangan komite uang untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa ada keuangan hasil penggalangan komite yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan terdakwa sudah jelaskan pada pemeriksaan sebelum, silahkan pemeriksa melihat kembali pada pemeriksaan tertanggal 31 Oktober 2022.
- Bahwa yang mengetahui seluruh pengeluaran keuangan hasil penggalangan komite secara jelas dan pasti adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd, bahwa benar ada yang disampaikan / dilaporkan kepada terdakwa dan terdakwa selaku kepala sekolah menyetujui yang dibubuhkan dengan tandatangan dan juga ada yang tidak dilaporkan dan terdakwa tidak mengetahui contohnya pinjaman pribadi kepada guru-guru di SMK N 1 Ende.
- Bahwa penggunaan dana komite sebagian atas persetujuan dan sepengetahuan terdakwa selaku kepala sekolah dan ada yang tidak sepengetahuan terdakwa, sepengetahuan terdakwa misalnya pembayaran honor guru komite, namun yang terdakwa tidak ketahui berupa pinjaman pribadi kepada guru-guru.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah ada operasional komite atau tidak karena RABS dibuat oleh bendahara komite dan sampai saat ini bendahara tidak diserahkan RABS kepada terdakwa untuk ditandatangani.
- Bahwa pertanggungjawaban setiap semester tidak dilakukan, yang dilakukan adalah pertanggungjawaban yang dilaporkan diakhir tahun ajaran secara lisan didepan rapat orang tua wali siswa. terdakwa sudah memerintahkan kepada bendahara untuk membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis namun sampai saat ini laporan pertanggungjawaban belum diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya memerintahkan dan mengingatkan untuk menyiapkan laporan pertanggungjawaban secara tertulis karena beberapa tahun sebelumnya dipertanggungjawabkan karena situasi pandemic covid 19 dan direncanakan Tahun 2022 bulan Agustus akan dipertanggungjawabkan tetapi terjadi pergantian kepala sekolah di Desember 2021 sehingga tidak terjadi pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan.

Halaman 385 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran keuangan komite bersifat wajib, secara bertahap atas kesepakatan dalam rapat orang tua wali siswa diawal tahun ajaran, pembayaran dilakukan 2 tahap yaitu tahap bulan Juli sampai Desember tahun berjalan dan Tahap II terhitung mulai bulan Januari sampai Juni tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaan terkadang tidak sesuai kesepakatan ada yang membayar satu tahap ada yang membayar II tahap, ada juga yang membayar secara cicil lebih dari II Tahap dan yang mengetahui tentang penerimaan secara jelas dan pasti adalah bendahara komite sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
- Penetapan besaran dan jangka waktu pembayaran terjadi pada saat rapat orang tua wali diawal tahun ajaran, kemudian ditindak lanjuti dengan surat edaran kepala sekolah orang tua wali tentang besaran keuangan komite.
- Penetapan besaran dan jangka waktu pembayaran berdasarkan pertimbangan penghasilan ekonomi orang tua wali siswa, sehingga tidak membebani orang tua wali siswa dalam hal pembayaran.
- Besaran sumbangan orang tua wali siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000/siswa, Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000/siswa dan Tahun ajaran 2021/2021 sampai dengan bulan Desember 2021, sebesar Rp. 1.800.000,-
- Bahwa bagi siswa yang belum melunasi keuangan komite dihimbau untuk menghubungi orang tua terkadang ada siswa yang menyampaikan ijin kepada wali kelas untuk kembali kerumah dan mengambil uang, kemudian pada semester pertama semua penerimaan laporan diterima namun perlu dijelaskan bahwa untuk penerimaan rapat semester II atau kenaikan kelas wajib untuk melunasi jika tidak maka rapat ditunda penerimaannya namun nilai dan status naik kelas disampaikan, raport akan diberikan setelah melunasi keuangan komite, dan terhadap kelas XII setelah taman iijah tetap dapat diambil setelah melunasi keuangan komite.
- Bahwa Akuntan publik tidak pernah melakukan audit, perlu terdakwa jelaskan bahwa yang melakukan pemeriksaan adalah Inspektorat Prop. NTT, pada Bulan Oktober 2020. Hasil pemeriksaan inspektorat terdapat temuan pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan PNS sebesar Rp. 196.000.000,-
- Bahwa yang terdakwa lakukan dalam pengelolaan keuangan komite yaitu tidak melibatkan ketua komite dan sekertaris dalam pengelolaan keuangan terkadang terdakwa langsung memerintah bendahara untuk membayar gaji guru honor dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat mendesak, terdakwa

Halaman 386 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola keuangan komite bertantangan dengan permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah.

- Bahwa terdakwa bertemu dengan pak ALEX beliau adalah salah satu karyawan di tambang batubara, tepatnya di daerah Kota Samarinda kami bertemu di rumah Pak ALEX, nama perusahaan Pak ALEX terdakwa tidak mengetahui, terdakwa ke Samarinda dalam rangka untuk mencari informasi tentang dunia kerja untuk tamatan SMK yang kebetulan sekolah kami dipercayakan sebagai Bursa Kerja. terdakwa tidak memerintahkan staf terdakwa karena bertepatan dengan terdakwa ingin melakukan pengobatan terhadap istri terdakwa. Dalam perjalanan dinas tersebut terdakwa lupa apakah ada dokumen perjalanan dinas atau tidak, terdakwa tidak membuat laporan hasil pelaksanaan tugas, terdakwa berangkat ke Samarinda bersama Istri dan anak untuk pengobatan oleh salah satu pendeta tetapi waktu itu pendeta tersebut ada dimakasar sehingga tidak sempat bertemu,
- Pembelian tiket terdakwa bersama istri YOFITA IDA TENA dan anak bernama DELFINA EBO KEU dilakukan oleh Pak WENSESLAUS DERTA, tiket yang dibeli adalah tiket waktu pergi dan waktu kembali ke Ende, terdakwa tidak mengetahui apakah apakah itu uang komite atau bukan karena Pak WENS sering menjual tiket, terdakwa membeli tiket melalui BON namun sampai saat ini belum terdakwa mengembalikan uang milik Pak. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa istri dan anak terdakwa bukan karyawan SMK N 1 Ende, namun mereka tidak turut menggunakan keuangan komite karena semuanya atas kemauan terdakwa dalam hal penggunaan. terdakwa tidak tahu itu menggunakan uang komite atau tidak. Menyangkut transfer ke anak, terdakwa yang meminta bantuan ke anak terdakwa untuk mentransfer dan selanjutnya biasanya satu atau dua hari sesudah itu terdakwa kembalikan, terdakwa tidak ada bukti pengembalian namun terdakwa sudah kembalikan uang yang terdakwa pinjamkan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah Pak WENSESLAUS DERTA memiliki uang pribadi yang banyak atau tidak, yang pastinya terdakwa meminta bantuan.
- Bahwa terdakwa tidak bahwa sebenarnya uang yang digunakan untuk mentransfer rekening istri dan anak kemudian diberikan kepada saudara dan pembelian tiket pesawat adalah uang komite SMK N 1 Ende
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen, terdakwa mengetahui semua rencana pembangunan RPS, terdakwa lupa apakah terdakwa mengusulkan

Halaman 387 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak namun terdakwa mengetahui setelah ada panggilan untuk Bimbingan Teknik. Setelah kegiatan bimtek terdakwa serahkan sepenuhnya kepada Konsultas pengawas.

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana bukti pengeluaran uang Rp. 130.000.000,- untuk membiayai tukang, dasar uang komite disering APBN adalah penyampaian lisan dari tiem kementrian pada saat Bimtek bahwa dana APBN dapat dishering dengan dana lainnya.
- Bahwa tidak disampaikan komite dapat dishering dalam APBN yang disampaikan hanya dapat disehring dengan dana shering lainnya. terdakwa tidak punya acuan tapi terdakwa berpendapat bahwa dana lain yang bisa di shering di SMK N 1 Ende adalah dana komite.
- Bahwa akan serahkan buku rekening terdakwa kepada pemeriksa.
- Bahwa pada awal tahun ajaran baru terdakwa lupa, pada saat pak WENSESLAUS DERTA akan berangkat untuk belanja, Pak WENSESLAUS DERTA bersama terdakwa dan ibu KRISPINA AGNES NAMBA berada diruangan bendahara Pak WENSESLAUS menyampaikan bahwa akan berangkat untuk belanja pakaian kemudian disampaikan ini ada uang ada pakaian sambil diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa bertanya ini uang bagaman ini besar sekali dan berapa harga pakaian disana jangan sampai kurang, dan jawab oleh Pak WENSESLAUS DERTA bahwa tidak kurang, kemudian saksi sampaikan jika ada kurang supaya saksi transfer lagi. Saat itu terdakwa meminta Ibu ANITA untuk mengisi uang tersebut ke rekening pribadi saksi di BPBD.
- Bahwa uang sebesar Rp. 245.000.000,- terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti pemesanan obat ambeyen, obat dara tinggi, terdakwa berikan kepada orang yang membuntuhkan (membantu), dan pembayaran listrik air, pemesanan anak ayam, pembelian pakan babi dan ayam, bermain judi dan urusan keluarga (uru mana).
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 245.000.000,- adalah benar-benar uang keuntungan pembelian atau tidak, yang mengetahui adalah Bendahara Pak. WENSESLAUS DERTA.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menjadi acuan sehingga membuat keputusan untuk memberikan pembayaran transportasi dan Tunjangan jabatan kepada 48 guru PNS dengan total seluruhnya senilai Rp 196.000.000 Pertimbangan beban kerja para guru PNS, tidak ada aturan yang mengatur.
- Bahwa terdakwa membuat surat edaran kepada orang tua wali kelas XI dan XII untuk memberitahu tentang besaran keuangan komite sedangkan kelas X

Halaman 388 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan langsung pada saat rapat awal tahun ajaran bersama orang tua wali tentang keuangan komite.

- terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa memberikan uang:
- kepada Pak ERIK REDE pada tanggal lupa tepatnya pagi hari, terdakwa berikan uang kepada ERIK REDE dirumahnya Pak ERIK REDE di Jl. D.I Panjaitan, saat itu Pak ERIK REDE mau berangkat ke kantor dan sudah ada diatas mobil kemudian Pak ERIK REDE menyampaikan kepada terdakwa untuk meletakkan uang tersebut ditempat duduk mobil. Yang terdakwa maksudkan ERIK REDE adalah wakil bupati Ende. Sampai terdakwa memberikan uang karena diminta oleh Pak ERIK REDE karena terdakwa mengalami masalah sehingga pak ERIK mau membantu.
- Kepada Pak OKA, sebesar Rp.25.000.000,- tanggal penyerahan terdakwa lupa, tempat penyerahan di taman kota raja dekat pohon ketapang, diketehauhi oleh pak WENSESLAUS DERTA, kemudian DAN dan temannya, terdakwa tidak kenal. yang terdakwa maksudkan Pak OKA ada Polisi di Polres Ende. Pemberian uang kepada PAK OKA karena permintaan melalui DAN untuk membantu menyelesaikan persoalan terdakwa, sdr. DAN terdakwa kenal dirumah pak WENSESLAUS DERTA.
- Kepada DAN penyerahan Rp. 5.000.000,- dirumah pak WENSESLAUS DERTA, , tanggal terdakwa lupa, kemudiaan Rp. 3.000.000,- bertempat di rumah Pak WENSESLAUS tanggal terdakwa lupa dan Rp. 2.000.000 bertempat di Jl. Nangka di rumah pak YANUS. Yang terdakwa maksudkan DAN rumahnya di dekat kampus II Unflor.
- Kepada JOLAN penyerahan terjadi dalam rumah tempat penjualan kue, tanggal terdakwa lupa, saat penyerahan uang disaksikan sdr. DEDI WOLO. Saudara JOLAN menelpon terdakwa untuk bertemu.
- Perlu terdakwa jelaskan bahwa terhadap orang-orang yang terdakwa sebutkan diatas pada saat penyerahan uang tidak ada bukti kwitansi atau transfer rekening.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal Cincin tersebut adalah milik terdakwa, pembelian cincin tersebut pada tahun 2020, seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi : EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740, an. HERMIN GILDUS RANGGA, penambahan asset tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, sebesar Rp. 26.500.000), terdakwa kenal barang tersebut, motor tersebut terdakwa bersama Pak

Halaman 389 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WENSESLAUS, jalan bersama ke dieler Yamaha YES kemudian disana bendahara bertanya kepada terdakwa “kae mau motor yang mana” kemudian terdakwa menunjuk motor tersebut selanjutnya bendahara Pak. WENS langsung menghadap kasir dan membayar kemudian motor tersebut kami bawa pulang.

- Bahwa penggalangan dana diawali dengan rapat bersama yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Ketua Komite dan orang tua wali siswa, setelah rapat bersama ditetapkan besaran keuangan komite kemudian orang tua wali menyerahkan uang komite bisa melalui siswa untuk diserahkan kepada bendahara atau dari siswa ke guru wali kelas baru di setor ke bendahara kelas kemudian kwitansi diserahkan kepada siswa, sedangkan untuk pengelolaan keuangan komite yang berperan yaitu Kepala Sekolah, Bendahara serta panitia kegiatan yang menggunakan keuangan komite.
- Bahwa berawal dari kejadian kasus yang terdakwa alami saat ini, pada saat terdakwa sudah mendapat panggilan dari pihak penyidik dan Pak ERIK REDE mendapat informasi dari orang lain bahwa terdakwa bermasalah kemudian pak ERIK REDE menghubungi terdakwa untuk datang kerumahnya di Jl. D.I. Panjaitan, hari dan tanggal terdakwa lupa, saat itu terdakwa bersama pak WENS mendatangi rumah Pak ERIK REDE di Jl. D.I Panjaitan, ketika bertemu Pak. ERIK REDE dirumahnya, awalnya kami duduk di teras rumah lalu Pak ERIK REDE mengajak saksi untuk masuk keruang tamu sedangkan Pak WENS tidak masuk keruang tamu dan tetap duduk didepan teras rumah, saat itu diruang tamu Pak ERIK yang menyampaikan kepada terdakwa “Kae, usahakan secepatnya siapkan uang lima puluh juta nanti terdakwa yang urus” mendengar hal tersebut terdakwa memanggil pak WENS yang duduk di depan teras rumah untuk masuk keruang tamu namun Pak WENS menyampaikan “biar kae saja yang omong dengan Pak ERIK, hasilnya baru sampaikan” karena pak WENS tidak masuk kedalam ruang tamu kemudian pertemuan tersebut selesai, setelah pertemuan tersebut terjadi, terdakwa menyampaikan kepada Pak WENS dan Pak WENS tentang apa yang disampaikan oleh Pak ERIK REDE kemudian Pak WENS menyampaikan “bae sudah Kae, kita tanggung bersama” setelah itu kami kembali kerumah masing-masing lalu besok harinya Pak. WENS mengantar uang kepada terdakwa senilai Rp.20.000.000,- dan saat itu terdakwa mengajak pak WENS untuk mengantar uang tersebut yang sudah digabungkan dengan uang dari terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- sama-sama ke Pak ERIK namun dijawab oleh Pak WENS “biar kae yang pergi saja, terdakwa pake celana pendek,

Halaman 390 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





terdakwa tidak usah pergi” kemudian pada besok harinya pak ERIK REDE kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan “Kae sudah ada ko” terdakwa menjawab “sudah ada” kemudian pak ERIK menyampaikan “antar cepat sudah” sehingga saat itu terdakwa langsung antar kerumah pak ERIK di pagi hari, setelah bertemu Pak ERIK, saat itu pak ERIK REDE bersiap untuk ke kantor dan berdiri dekat mobil dinas, lalu terdakwa sampaikan “terdakwa minta dengan kertas kresek untuk isi uang, takut kececer”, lalu dijawab oleh Pak ERIK REDE “biar saja kae taruh saja di situ (tempat duduk mobil)” kemudian terdakwa meletakan uang sebanyak Rp.50.000.000 ditempat duduk mobil dinas bagian belakang. Tujuan terdakwa memberikan uang kepada Pak ERIK REDE karena pak ERIK REDE menjanjikan akan berkoordinasi ditingkat atas untuk menyelesaikan masalah yang terdakwa bersama Pak WENS hadapi saat ini.

- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada Pak OKA berawal dari permintaan uang oleh DANI untuk diberikan kepada Pak OKA dalam rangka Pak OKA membantu menyelesaikan masalah yang terdakwa hadapi bersama Pak. WENS, sdr. DANI awalnya bertemu dengan pak WENS kemudian Pak WENS menyampaikan kepada terdakwa untuk datang kerumah Pak WENS, setelah berada dirumah pak WENS bertemu DANI dan saat itu DANI menyampaikan bahwa DANI punya sahabat baik Pak. Oka orang ketiga polres dan bisa membantu mengatasi masalah yang kami hadapi, kemudian DANI meminta uang awalnya Rp.10.000.000,- dan disanggupi oleh kami, kemudian keesokan harinya baru Uang tersebut diserahkan pada malam hari yang menyerahkan terdakwa sendiri dirumah Pak WENS, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh DANI untuk meminta uang Rp.2.000.000,- mengatasnamakan Pak OKA dan saat itu juga terdakwa menyerahkan uang di Jl. Nangka, beberapa hari kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh DANI bahkan DANI datang kerumah terdakwa menyampaikan besarnya untuk diserahkan kepada Pak. OKA, Rp.25.000.000,- kemudian pada bulan Mei 2022 bertempat di Taman Kota Raja sebelah rumah bhabin dekat pohon ketapang bagian selatan saksi bertemu Pak OKA saat itu saksi bersama-sama dengan Pak WENS dan saat itu ada DANI dan temannya, kemudian kami menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- dalam amplop, setelah penyerahan uang terdakwa sampaikan kepada Pak OKA “ini uang pak, terima kasih atas bantuannya” dijawab oleh Pak OKA “Nanti baru saksi urus” setelah penyerahan uang kami langsung kembali kerumah masing-masing.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan mendasar saksi menyerahkan uang kepada Pak OKA dengan harapan Pak OKA dapat mengatasi masalah terdakwa di Polres.

- Bahwa pemberian uang JOLAN Awalnya terdakwa telpon JOLAN menanyakan ada dimana dan dijawab ada di luar rumah dan menyampaikan agar bertemu di rumahnya di Jl. Wirajaya, dan dalam pertemuan tersebut JOLAN menyampaikan "Kae, siap dan bawa memang uang lima juta" dan menyampaikan JOLAN punya koneksi dan sahabat baik dengan temannya di Polres sehingga meminta uang Rp.5.000.000,- untuk ajak makan temannya di Polres. Tujuan mendasar terdakwa menyerahkan uang karena JOLAN menyampaikan mereka adalah wartawan dan ada hubungan baik dengan orang Polres.
- Bahwa yang mengetahui secara pasti besaran penerimaan, kegiatan dalam RABS, laporan pertanggungjawaban, kegiatan yang tidak boleh didanai dari Keuangan Komite dan selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang mengetahui secara pasti adalah bendahara Pak. WENS, terdakwa hanya disampaikan secara garis besar tidak mendetail sehingga terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana RAB pembangunan gedung praktek siswa yang pendanaannya bersumber dari APBN sebesar Rp. 512.400.000, karena RAB tersebut ada pada pak MARIO BANUNAEK sebagai Konsultan Pengawas dan pak WENS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan operasional komite SMK N 1 Ende menggunakan keuangan Komite yang tahu persis bendahara pak WENS.
- Bahwa pada Tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 kegiatan operasional komite SMK N 1 Ende menggunakan uang hasil penggalangan komite berupa pembelian ATK Komite. Sedangkan honor untuk pengurus komite tidak ada.
- Bahwa terdakwa sebagai kepala sekolah memerintahkan diri terdakwa sendiri untuk mencari informasi tetang dunia kerja di Samarinda, sehingga terdakwa tidak membawa surat tugas, perlu terdakwa jelaskan bahwa perjalanan dinas yang ada surat tugasnya kecuali ada panggilan satuan atas, dari propinsi atau kementerian.
- Bahwa ada beberapa dokumen dan barang bukti yang terdakwa ketahui karena terdakwa yang menyerahkan namun ada bukti lain yang terdakwa tidak mengetahui.

Halaman 392 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah sampaikan terkait sanksi, namun terdakwa menghimbau agar orang tua yang memiliki anak yang sudah tamat namun belum mengambil ijasah agar segera mengambil.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, namun tetap menghimbau agar segera mengambil ijasah.
- Bahwa terdakwa pernah menghimbau untuk pembayaran uang komite, terdakwa juga pernah meminta bantuan para wali kelas untuk membantu bendahara melakukan penagihan kepada siswa, dan data tunggakan diserahkan oleh bendahara, himbauan yang terdakwa sampaikan agar memudahkan pembayaran.
- Bahwa ada dokumen yang dibuat yaitu bendahara membuat rincian penerimaan dan tunggakan kemudian bendahara serahkan kepada guru wali kelas untuk membantu melakukan penagihan.
- Bahwa Tidak ada sanksi namun terdakwa selalu menghimbau agar siswa murid segera membayar uang komite dan terkadang para siswa meminta ijin untuk kembali ke kampung untuk mengambil uang dari orang tua.
- Bahwa terdakwa kurang tahu tentang hal itu tetapi wali kelas yang lebih mengetahui karena wali kelas yang memegang raport siswa. jika guru wali kelas menahan rapor siswa maka terlebih dahulu akan tunjukan nilai siswa kepada orang tua.
- Bahwa Berdasarkan keterangan saudara dalam pemeriksaan tertanggal 7 November 2022, poin 54, saudara menerangkan bahwa ***"Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite."*** Jawaban yang terdakwa gunakan adalah jawaban pada pemeriksaan hari ini
- Bahwa Pernah ada kejadian wali kelas hanya menunjukan nilai kepada siswa, terdakwa tidak mengingat secara pasti wali kelas siapa yang hanya menunjukan kepada siswa, kejadian tersebut terjadi biasanya saat kenaikan kelas, namun yang pasti waktunya lupa.
- Bahwa Terhadap tunggakan apakah sudah dibayar atau belum terdakwa tidak mengetahui karena terdakwa tidak menjabat sebagai kepala sekolah lagi hanya sebagai guru biasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 393 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;
5. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :
  - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koamite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
7. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
- 10.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
- 11.1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
- 12.1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 13.1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
- 14.3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite

Halaman 394 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;

15.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;

16.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;

17.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;

18. 2(dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;

19. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);

20.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;

21.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.

22.1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;

23.1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);

24.5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);

25.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;

26.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;

27.1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;.

28.1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);

29.4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).

Halaman 395 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
- 31.1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
- 32.1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.
- 33.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 34.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 35.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 36.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 37.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 38.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 39.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 40.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende,tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 41.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 396 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 43.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 44.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 45.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honoror provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 46.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 47.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 48.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 49.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 50.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 51.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 52.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 397 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- 54.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 55.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- 56.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 57.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 58.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 59.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 60.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 61.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 62.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 63.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 398 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 65.3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 66.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 67.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 68.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 69.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 70.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 71.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 72.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 73.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 74.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 75.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 399 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 76.2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
- 77.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 78.1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 79.1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 80.2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 81.2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 82.55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 83.7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 400 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 84.3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:
  - Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
  - Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 85.18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 86. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 87. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 88. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar ) nota poembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;
- 89. 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 91. 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- 92. 2 (dau) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 93. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 94. 27 (dua puluh tujuh ) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,-(satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- 95. 5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 401 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
97. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
98. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
99. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
100. 1(satu) lembar nota pembelian Flash Disck pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
101. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
102. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
105. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
106. 1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
107. 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
108. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
109. 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebsar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 402 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
111. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
112. 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
113. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawalan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
115. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
116. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
117. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
118. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
120. 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
121. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 403 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- lima ratus ribu rupiah);
126. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
127. 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
128. 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas photo peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
132. 3 (tiga ) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
133. 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
134. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi penguji ujian sekolah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
137. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 404 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
139. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
140. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
141. 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
142. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
143. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
144. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
145. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
146. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
147. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
148. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D Sebesar Rp. 1.050.000 ( satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
149. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
150. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta

Halaman 405 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;

151. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
152. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
153. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
154. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
155. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
156. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
157. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
158. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
159. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan

Halaman 406 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
160. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
161. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
162. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
163. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
164. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
165. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
166. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
167. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
169. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp. 1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
170. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
171. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
172. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
173. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
174. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021.
175. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT).
176. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;
177. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020

Halaman 408 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.
179. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;
180. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
181. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
182. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da Silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.
183. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
184. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
185. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
187. 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :
  - Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Januari 2021;
  - Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021
188. 1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;
189. 1 (satu ) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;
190. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;
191. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :

Halaman 409 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 januari 2021;
- Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021

192. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:

- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;

Halaman 410 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;

Halaman 411 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catridge sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.
193. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
194. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :

Halaman 412 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.
195. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020
196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;
197. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,
198. 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;
199. 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;
200. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,
201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
202. 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
203. 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penjajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;

Halaman 413 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 3 (tiga) lembar biaya insentif melebihi jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;
205. 4 (empat) lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
206. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;
207. 11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
208. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
209. 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;
210. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
211. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;
212. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
213. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
215. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
217. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
218. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
219. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
220. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sbesar Rp.150.000;
221. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
222. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;

Halaman 414 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;
224. 1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
225. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;
226. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
227. 1 (satu) lembar kwitansi nota makan
228. Satu bundel nota konsumsi;
229. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin fotocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
230. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
231. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
232. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
233. 1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
234. 1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
235. 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
236. 1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
237. 1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
238. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
239. 4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
240. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
241. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
242. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
243. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,
244. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,
245. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,

Halaman 415 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,
247. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
248. 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
249. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,
250. 1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
251. 1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,
252. 7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
253. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
254. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,
255. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
256. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
257. 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
258. 5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
259. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
  - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;
260. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :
- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
  - 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
261. 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
262. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 416 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;
264. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
265. 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;
266. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
267. 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
268. 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua ) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
269. 3(tiga) lembar nota DARI eliza);
270. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
271. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
272. 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
273. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;
274. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
275. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyokong sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
276. 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 417 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
278. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
279. 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
280. 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
281. 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
282. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
283. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
284. 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
285. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
286. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
288. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;

Halaman 418 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;
290. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
291. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
292. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020;
293. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.
294. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende.
295. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
296. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)
297. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
- (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
  - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
298. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
  - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

299. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram
300. 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
301. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
302. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
303. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
304. 1 (Satu) bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
  - 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Halaman 420 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;
305. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
306. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :

Halaman 421 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILLI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 422 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMELIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.
307. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
308. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
309. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
310. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
311. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
312. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
313. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
314. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
315. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
316. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 424 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
318. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
319. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
320. 1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
321. 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
322. 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
323. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
324. 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
325. 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
326. 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
327. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisoner BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
328. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
329. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
330. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
331. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
332. 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
333. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 425 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

334. 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
335. 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
336. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
337. 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah);
338. 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
339. 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
340. 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
341. 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
342. 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
343. 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
344. 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorer teknis SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
345. 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
346. (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
347. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;
348. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;

Halaman 426 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
351. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
352. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;
355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;
356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti berupa surat surat yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 427 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende membentuk Kepengurusan Komite SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 tanggal 03 Juli 2017 dengan masa jabatan komite sekolah selama 5 tahun. Struktur kepengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 yang dibentuk oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd adalah sebagai berikut:
  - Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
  - Sekretaris Komite: ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
  - Bendahara Komite: WENSESLAUS DERTA, S.pd.
- Bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd mengundang saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk datang ke SMKN 1 Ende kemudian mengumpulkan beberapa guru-guru dan langsung menunjuk saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i untuk menjadi Ketua Komite SMKN 1 Ende.
- Bahwa Jumlah Anggota Komite yang dibentuk hanya terdiri dari 3 orang sebagai pengurus inti tanpa adanya anggota komite lain dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidik dari SMK N 1 Ende. Dalam pembentukan anggota komite Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd melakukan rapat dengan para guru tanpa melibatkan saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku Ketua Komite. seharusnya minimal 5 orang anggota komite dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite merupakan tenaga Pendidikan dari SMK N 1 Ende yang bertentangan dengan Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite pada pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7, pasal 8;
- Bahwa Pengurus Komite yang telah ditetapkan tidak pernah membuat AD dan ART yang menjadi dasar dan tujuan kegiatan dari Komite SMK N 1 Ende.
- Bahwa Kemudian Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menyampaikan besaran uang komite yang harus dibayarkan, yaitu :
  - Pada TA. 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
  - Pada TA. 2020/2021, sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan
  - Pada TA. 2021/2022 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Pembayaran uang komite tersebut diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran yang dilakukan diawal bulan Juli s/d

Halaman 428 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan Januari s/d Juni tahun berjalan.

- Bahwa para siswa mengumpulkan uang komite kepada Wali kelas dari masing-masing kelas dan wali kelas akan menyeter kepada bendahara komite yaitu Saksi WENSLAUS DERTA atau para siswa juga bisa langsung mengumpulkan kepada bendahara komite.
- Bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Dari penjelasan diatas maka penggalangan dana yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori "pungutan".

- Bahwa seharusnya yang dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah pengurus komite sekolah, bukan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Saksi ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah dilibatkan dalam penggalangan dana sejak tahun 2019/2020 s/d dengan Desember 2022,
- Bahwa semua tata cara atau mekanisme ditentukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 End Bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende dilakukan tanpa adanya Proposal penggalangan dana, saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende tidak pernah membuat proposal penggalangan dana karena saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i tidak memiliki data jumlah murid dan program kerja sekolah.
- Bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa yaitu :
  - tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000.
  - tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000.
  - tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000.

Halaman 429 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan total penerimaan uang komite sebesar Rp. 6.080.470.000. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi sebagian disimpan dalam rekening pribadi saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd selaku bendahara komite;

- Bahwa dalam setiap penggunaan dana komite, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Ketua komite maupun kepada Sekretaris komite sekolah, serta Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite tidak pernah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada orang tua / wali siswa terkait dengan penggunaan dana komite.
- Bahwa terhadap beberapa siswa yang belum melunasi pembayaran uang komite, terdakwa Hermin GILDUS RANGGA, S.Pd pada saat apel Bersama guru-guru SMK N 1 Ende memberikan intruksi kepada guru-guru dan walikelas agar memberikan sanksi kepada siswa yang belum melunasi uang komite "Anak yang tidak membayar uang komite kami menghimbau untuk kembali kerumah mengambil uang dari orang tua, ketika tetap tidak membayar maka ada himbauan dan berdasarkan rapat guru wali kelas dan bersepakat untuk menahan rapor sampai melunasi keuangan komite
- Bahwa terhadap penyimpangan dalam penggunaan dana komite yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite yang memberikan keuntungan bagi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite dan orang lain yaitu:
- Bahwa terkait aliran Dana Komite dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite kepada Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, tanpa didukung oleh bukti penggunaan atau kwitansi dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku Bendahara komite mengakui tidak membuat pencatatan pada buku kas dan Terdakwa hanya mengakui sebagian atas penggunaan dana yang disampaikan Bendahara Komite untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa uraian perincian uang komite yang dilakukan oleh saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd

Halaman 430 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	Penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi Isi arisan pak albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk urusan bapak kecil kepsek yang meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi urus anak sambut baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangambo a	permintaan untuk keperluan pribadi beli sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar Listrik ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Anggapan uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	permintaan untuk antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk bayar utang beli babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi beli sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Robert yang ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	permintaan antar uang untuk modal main kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 431 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu ke Tangerang Katanya kasi Aweng 3 jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	antar untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya pinjam untuk isi arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi kerja kubur di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	permintaan untuk antar modal main kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	kupang	permintaan waktu belanja dengan istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba

Halaman 432 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan modal main kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya mau pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan uang 2 juta yang katanya Dana BOS pinjam untuk pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang yang katanya mau dikirim ke anaknya	Ambrosius More

Halaman 433 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	permintaan pinjaman untuk acara kedukaan keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi isi arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	rumah pak wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi (katanya isi arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi waktu UNBK hari pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi katanya mau kirim ke anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	rumah pak gildus	antar karena permintaan untuk isi arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 434 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71	15/05/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan modal main kartu dan keperluan pribadi yang lain	Wens yang antar langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan keperluan pribadi (katanya 2 juta untuk tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di ogan (tukang) untuk beli besi keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi (anggapannya uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	dealer, Jln el tari	permintaan pembelian motor aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar babi	Krispina Agnes Namba

Halaman 435 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan kerluan pribadi katanya piknik ke nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	perintah pengambilan uang di malam hari : 1 juta untuk keperluan pribadi	Mohamad Roman
				dan 1 juta dikasih kepek ke Sandi Matutina (kata saksi)	
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi katanya beli anting-anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk beli pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi ke Nita – Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 436 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi mau bayar listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
118	bulan tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk isi arisan pak wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung

Halaman 437 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah pengambilan untuk keperluan pribadi di rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan kepek) karena 2 Bendahara keluar kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang saku perjalanan dinas ke kupang persiapan ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi mobil pickup (Robert Roga yang ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	sekolah	Mengambil uang langsung dari Bendahara BOS, yang dimana uang itu	Ivony Sarlota
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di skolastika untuk merayakan HUT pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pembelian pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk hadir pesta nikah ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba
139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	

Halaman 438 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi	Agnes Mude
				BRI 002401035321500	
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
				Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Rosari M Wulandari (anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk cucu mau test tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk mau buka usaha bola guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Yovita Ida Tena	
				Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.28.15			Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.40.09			Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	
	jam 06.41.13			Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga	

Halaman 439 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	jam 06.42.11			Bank NTT 00402060041881	
154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk anggota koperasi kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan yang katanya bayar tukang gali pohon pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran bon KEPSEK di unit produksi sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan keuntungan bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang transportasi ke danau kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE- ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	

Halaman 440 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE- ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	pembelian tiket PHILOMENA PAO ENE- KOE	
		933.054.19 0			

- Bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada guru yang menggunakan dana komite;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Kripina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Kripina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Kripina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Kripina Agnes Namba
5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Kripina Agnes Namba
11	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA

Halaman 442 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



	24/06/2020	1.000.000	
	26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
TOTAL		39.325.598	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dinas P&K Prop. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain:

- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS	
2	Iuran Musyawah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	

- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021

No	Jenis Kegiatan	Ket
1	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	

- Bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

1. Pemenuhan standar kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
2. Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;
3. Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
4. Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada; RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
6. Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

- Bahwa Inspektorat Propinsi NTT FRANSISKUS BIN, SE, M.M menerangkan terdapat temuan bahwa tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 196.000.000,-



(seratus sembilan puluh enam juta rupiah) hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh Kepala Sekolah SMK N 1 Ende HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS.

- Bahwa berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh, para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.
- Bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAHDI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani, SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000

Halaman 445 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
	Total Keuangan yang di Setor		Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya 181.600.000,- karena ada 2 (dua) orang guru tidak mengembalikan yaitu Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd sebesar Rp. 9.000.000,- dan saksi. WENSESLAUS DERTA, S.Pd (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 5.400.000.

- Bahwa uang dana komite digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekola SMK N 1 Ende dan untuk keperluan pribadi saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Penuntutan dalam berkas terpisah) Sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA S.Pd selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite SMK N 1 Ende telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- ( Satu Miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah tersebut, sebagaimana perhitungan Hasil Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA. dengan rincian sebagai berikut:

**1. Terdapat selisih antara penerimaan hasil penggalangan rill dan laporan pertanggungjawaban dengan rincian sebagai berikut :**

- Penerimaan Hasil Penggalangan Komite Rp. 6.080.470.000,-
- Laporan Pertanggungjawaban Rp. 5.496.754.233,-
- Terdapat Selisih sebesar Rp. 583.715.767,-
- Terhadap Selisih sebesar Rp. 583.715.767,- Tidak dapat dipertanggungjawaban maka dapat dihitung sebagai kerugian Negara.

**2. Dari hasil uji petik oleh penyidik atas saran dari JPU, maka diperoleh Data pertanggungjawaban keuangan hasil penggalangan ditemukan LPJ yang tidak terbukti sebesar Rp. 1.155.824.384,- sebagai berikut :**

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :
  - LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
- Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan memperkaya orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

- Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
- Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
Total	Rp. 1.739.540.151,-

- Bahwa total jumlah Penerimaan Uang Komite tahun 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 6.080.470.000.** selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende (Penuntutan dalam berkas terpisah)
- Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:
  - Uang Tunai Rp 570.500.000,-
  - Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi silinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,-
  - 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,
  - Menggunakan uang untuk keperluan pribadi (bermain judi dan ke tempat hiburan malam)
  - Memerintahkan bendahara untuk membayar biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS dan memberikan pinjaman kepada orang lain menggunakan keuangan komite
- Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd
  - Uang Tunai Rp. 50.000.000, untuk pembelian sebidang tanah.
  - Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
  - sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
  - Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

Halaman 447 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative subsidairitas, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan ke Satu, Oleh karena Dakwaan kesatu berbentuk Subsidairitas. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;
6. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa rumusan unsur "Setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada, telah membuktikan bahwa Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA** adalah dalam kedudukannya sebagai selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, Nusa Tenggara Timur, dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan, dan dalam persidangan perkara a quo Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga karenanya terhadap Terdakwa, dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno dalam bukunya *“Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58 menyebutkan bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, melalui Perma No:1 Tahun 2020, telah memberikan petunjuk mengenai ketentuan pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dimana letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan di lakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan melihat pada kualitas subyek/pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka sesuai dengan Perma No: 1 Tahun 2020, rumusan tersebut sangat umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya, sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan dalam pasal

*Halaman 450 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yaitu “secara melawan hukum”. Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 sebagaimana dalam Dakwaan subsidair lebih bersifat khusus, dimana subyek/pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam “jabatan atau kedudukannya”;

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari pasal 2 ayat (1) dengan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam pasal 2 ayat(1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari pasal 2 ayat(1). Sehingga dalam hal ini berlaku adagium “*Lex specialis derogate legi generalis*”. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana terurai di atas, jabatan atau kedudukan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam kedudukannya selaku Kepala sekola SMK N 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS sebagai kepala sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 telah membentuk Kepengurusan Komite Sekola SMK N 1 Ende dengan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017 Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 tanpa adanya perpanjangan. Struktur pengurus komite tahun Anggaran 2017/2021 adalah sebagai berikut:

- Ketua Komite : Drs. ABRAHAM BADU, MS.i
- Sekretaris Komite : ALFONSIUS TARI SE, S.Sos.
- Bendahara Komite : WENSESLAUS DERTA, S.pd.

Halaman 451 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepengurusan Komite yang dibentuk oleh terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende tidak dilakukan secara akuntabel dan demokratis tetapi kepengurusan tersebut ditunjuk langsung oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan juga jumlah anggota komite SMK N 1 Ende hanya berjumlah 3 orang, dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara Komite merupakan tenaga pendidik dari sekolah yang bersangkutan yakni sebagai guru matematika disekolah SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite, yaitu :

- Pasal 4 ayat (2) *menyatakan bahwa “ Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang ”*
- Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b *yang menyatakan bahwa “ Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur:*
  - a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;*
  - b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;-*
- Pasal 6 ayat (1) *menyatakan bahwa “ Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa ”*

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS membentuk Komite sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017. Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021. Berdasarkan SK tersebut maka saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara komite telah menjadi bendahara komite dan mengelola keuangan komite selama kurang lebih 4 tahun mulai dari 2017 s/d 2021 Bulan Desember. hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang komite yang mengatur bahwa masa jabatan pengurus komite hanya selama 3 tahun.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menetapkan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 ditetapkan uang komite sekolah sebesar **Rp. 2.300.000,-** Pada TA. 2020/2021, ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-** dan Pada TA. 2021/2022 ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-**. Penetapan nominal atau besaran dari uang komite dilakukan oleh terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA tanpa sebelumnya diberitahukan kepada saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua komite. Pembayaran uang komite diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran,

Halaman 452 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan diawal bulan Juli-Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan januari-juni tahun berjalan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelasan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori sumbangan dan hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite.

Menimbang, bahwa kemudian yang seharusnya dapat melakukan penggalangan dana Komite adalah pengurus komite sekolah bukan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekola SMK N 1 Ende. Penggalangan dana tersebut juga harus disertai dengan proposal yang diketahui oleh Sekolah dan hasil penggalangan dana komite tersebut disimpan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah, serta dalam penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah. Akan tetapi dalam melakukan penggalangan dana komite tidak pernah dibuatkan proposal penggalangan dana. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi disimpan dalam rekening prbadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd dalam setiap penggunaan dana komite juga tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite:

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Halaman 453 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
  - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
  - b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
  - c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Menimbang, bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Bahwa dalam melakukan penggalangan dana komite tidak pernah dibuatkan proposal penggalangan dana. Uang hasil penggalangan dana disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (4) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite yang menyatakan bahwa "hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah".

Menimbang, bahwa hasil dari penggalangan dana komite tersebut oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS dan saksi WENSESLAUS DERTA dalam penggunaannya tidak pernah dimintakan persetujuan dari ketua komite, tidak pernah dipertanggungjawabkan secara transparan baik kepada komite sekolah ataupun kepada orang tua / wali siswa dan tidak pernah dilaporkan kepada komite sekolah. Uang komite tersebut oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS dan saksi WENSESLAUS DERTA digunakan untuk kepentingan pribadi dan beberapa kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah

Halaman 454 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



yang menyatakan bahwa Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:

- a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
- b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
- c. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS bersama dengan saksi WENSESLAUS DERTA menggunakan dana komite tidak sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan keterangan AHLI Dinas P&K Prov. NTT Dra. YOSEFINA MAI, M.Pd terdapat kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan menggunakan keuangan komite SMK N 1 Ende antara lain :

- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2019/2020
  - 1 Biaya Transportasi dan tunjangan jabatan bagi Guru PNS
  - 2 Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK
- Kegiatan yang tidak boleh menggunakan keuangan Komite Tahun Anggaran 2020/2021
  - 1 Rekreasi Kepala sekolah dan Guru

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (6) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite

Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:

- a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
- b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
- c. pengembangan sarana prasarana; dan
- d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, Nusa Tenggara Timur, dimana selanjutnya terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS membentuk Komite sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017. Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021 secara melawan hukum.





Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak tepat diterapkan perbuatan melawan hukum pasal 2 Ayat(1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 terkait kewenangan yang dimiliki terdakwa selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende dan oleh karenanya lebih tepat diterapkan pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, perbuatan terdakwa terkait unsur “penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana” yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi, secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan karenanya unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KHUP tidak terpenuhi, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang selanjutnya, yaitu Dakwaan Kesatu Subsidair dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.
6. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Halaman 456 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 2 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang, yang telah terpenuhi dalam Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada Dakwaan Subsidaire ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan pelaku yang telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan;



Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di muka persidangan kedudukan Terdakwa adalah selaku Kepala sekolah SMK N 1 Ende, Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menetapkan besaran uang komite yang harus dibayarkan, senyatanya menurut ketentuan yang seharusnya dibuatkan proposal penggalangan dana dan yang melakukan penggalangan dana Komite adalah pengurus komite sekolah bukan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende. Atas penggalangan dana tersebut seharusnya disetor dan disimpan pada 1(satu) rekening bersama komite sekolah dan sekolah serta dalam penggunaan hasil penggalangan dana komite bukan untuk keperluan pribadi terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Bendahara Komite, namun harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah.

Menimbang, bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000. Penerimaan Tahun Ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 2.182.220.000. Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.100.000. dengan sebesar Rp. 6.080.470.000. Bahwa dalam melakukan penggalangan dana komite tidak pernah dibuatkan proposal penggalangan dana. Uang hasil penggalangan dana disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara.

Menimbang, bahwa Aliran Dana Komite dari **Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS** (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku

Halaman 458 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara komite kepada **terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS** selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, tanpa didukung bukti kwitansi secara lengkap atau menyeluruh, yaitu

No	Tanggal	Besar Uang	Tempat	penggunaan	Saksi
1	08/06/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi Isi arisan pak albert	Krispina Agnes Namba
2	9/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk urusan bapak kecil kepek yang meninggal	Krispina Agnes Namba
3	18/06/2019	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi urus anak sambut baru	Krispina Agnes Namba
4	18/06/2019	9.000.000	Nangambo	permintaan untuk keperluan pribadi beli sapi	Marius F W Nobe
5	18/06/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
6	26/06/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar Listrik ke Om Dus	Krispina Agnes Namba
7	05/07/2019	40.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Anggapan uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
8	11/07/2019	1.500.000	Rumah Vanci	permintaan untuk antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
9	15/07/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk bayar utang beli babi Pak Amadeus	Krispina Agnes Namba
10	18/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi beli sepatu	Krispina Agnes Namba
11	22/07/2019	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
12	25/07/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
13	01/08/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Robert yang ambil)	Krispina Agnes Namba
14	07/08/2019	1.500.000	Rumah Pak Goris	permintaan antar uang untuk modal main kartu	Ambrosius More
15	08/08/2019	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
16	19/08/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
17	06/09/2019	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 459 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	09/09/2019	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
19	13/09/2019	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
20	18/09/2019	8.000.000	Ruang Bendahara	Waktu ke Tangerang Katanya kasi Aweng 3 jt	Krispina Agnes Namba
21	26/09/2019	2.000.000	Rumah Wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
22	27/09/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
23	01/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
24	02/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
25	03/10/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
26	10/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	antar untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
27	11/10/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
28	13/10/2019	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya pinjam untuk isi arisan	Ambrosius More
29	13/10/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
30	14/10/2019	3.400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi kerja kubur di Kampung	Krispina Agnes Namba
31	20/10/2019	1.500.000	Rumah Om Dus	permintaan untuk antar modal main kartu	Eusebius More Meto
32	24/10/2019	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
33	30/10/2019	1.500.000	kupang	permintaan waktu belanja dengan istrinya	Krispinus Pedang
34	4/11/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pribadi (Bayar Motor)	Krispina Agnes Namba
35	10/11/2019	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
36	11/11/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
37	20/11/2019	450.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
38	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
39	20/11/2020	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
40	21/11/2020	750.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 460 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	21/11/2020	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
42	9/12/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
43	12/12/2019	2.000.000	Rumah Vanci	Permintaan modal main kartu	Rustam
44	21/12/2019	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
45	24/12/2019	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang natalan	Eusebius More Meto
46	27/12/2019	1.000.000	Rumah Dus	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
47	29/12/2019	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang katanya mau pergi Ke So'a	Rustam
48	07/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi (Belah Mesin Motor)	Krispina Agnes Namba
49	15/01/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
50	21/01/2020	2.000.000	Rumah Pak Goris	Permintaan antar modal main kartu	Wens yang antar langsung
51	29/01/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan uang 2 juta yang katanya Dana BOS pinjam untuk pertemuan	Krispina Agnes Namba
52	06/02/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang yang katanya mau dikirim ke anaknya	Ambrosius More
53	07/02/2020	4.150.000	Ruang Bendahara	permintaan pinjaman untuk acara kedukaan keluarga	Krispina Agnes Namba
54	08/02/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi isi arisan	Krispina Agnes Namba
55	10/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
56	13/02/2020	4.000.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Ambrosius More
57	15/02/2020	2.000.000	rumah pak wens	Permintaan modal main kartu	Eusebius More Meto
58	16/02/2020	3.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi (katanya isi arisan)	Marius F W Nobe
59	21/02/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
60	03/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 461 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	10/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
62	16/03/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi waktu UNBK hari pertama	Krispina Agnes Namba
63	11/04/2020	1.500.000	rumah pak gildus	antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
64	16/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
65	25/04/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi katanya mau kirim ke anaknya	Krispina Agnes Namba
66	25/04/2020	2.000.000	Rumah Rustam	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam
67	26/04/2020	2.500.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
68	28/04/2020	1.000.000	rumah pak gildus	antar karena permintaan untuk isi arisan	Ambrosius More
69	29/04/2020	3.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
70	09/05/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
71	15/05/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar untuk penggunaan pribadi	Marius F W Nobe
72	04/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	Bayar pinjaman KEPSEK ke orang-tuanya Rustam	Rustam (TITIP)
73	16/06/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
74	9/06/2020	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
75	01/07/2020	5.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan modal main kartu dan keperluan pribadi yang lain	Wens yang antar langsung
76	04/07/2020	2.000.000	Rumah Om Dus	Permintaan antar modal main kartu	Rustam
77	06/07/2020	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan keperluan pribadi (katanya 2 juta untuk tetangganya)	Krispina Agnes Namba
78	06/07/2020	2.450.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di ogan (tukang) untuk beli besi keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
79	07/07/2020	1.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Marius F W Nobe
80	08/07/2020	2.500.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More

Halaman 462 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81	09/07/2020	50.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pribadi (anggapannya uang sisa tahun lalu)	Krispina Agnes Namba
82	30/07/2020	1.500.000	Rumah Vanci	Permintaan antar modal main kartu	Marius F W Nobe
83	01/08/2020	1.500.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
84	03/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
85	06/08/2020	2.000.000	rumah pak mario	Bayar pinjaman KEPSEK ke Pak Mario Awa	Mario Awa
86	21/08/2020	2.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More
87		26.500.000	dealer, jln el tari	permintaan pembelian motor aerox	
88	07/09/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi bayar babi	Krispina Agnes Namba
89	12/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan kerluan pribadi katanya piknik ke nangalala	Krispina Agnes Namba
90	17/09/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
91	02/10/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
92	16/10/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
93	26/10/2020	2.000.000	Sekolah	perintah pengambilan uang di malam hari : 1 juta untuk keperluan pribadi  dan 1 juta dikasih kepek ke Sandi Matutina (kata saksi)	Mohamad Roman
94	04/11/2020	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
95	18/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
96	28/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
97	15/12/2020	4.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi katanya beli anting-anting	Krispina Agnes Namba
98	19/12/2020	205.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk beli pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
99	28/12/2020	5.000.000	rumah pak gildus	permintaan antar uang untuk keperluan pribadi	Ambrosius More

Halaman 463 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	08/01/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi ke Nita - Maumere	Krispina Agnes Namba
101	19/01/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
102	27/01/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
103	02/02/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
104	11/02/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
105	15/02/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
106	07/03/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
107	09/03/2021	400.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
108	20/03/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
109	02/04/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
110	03/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
111	12/04/2021	1.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
112	17/04/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
113	26/04/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
114	01/05/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
115	06/06/2021	4.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
116	21/06/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi mau bayar listrik	Krispina Agnes Namba
117	24/06/2021	2.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
118	bulan tujuh 2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk isi arisan pak wens	Krispina Agnes Namba
119	15/07/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Christin S. Z. Ledewara	TRANSFER
120	16/07/2021	3.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang untuk pribadi KEPSEK lewat Jonatan Tasuib	TRANSFER
121	20/07/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba

Halaman 464 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122	24/07/2021	19.500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
123	24/07/2021	20.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
124	02/08/2021	2.000.000	Rumah Vanci	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
125	19/08/2021	2.000.000	Rumah Om Dus	permintaan pengantaran uang modal main kartu	Wens yang antar langsung
126	19/08/2021	7.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
127	20/08/2021	2.000.000	Sekolah	Perintah pengambilan untuk keperluan pribadi di rumah Bendahara	Maria Andriani Nona
128	01/09/2021	10.000.000	Ruang Bendahara	TITIP (Permintaan kepek) karena 2 Bendahara keluar kota	Agnes Mengi
129	11/09/2021	5.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang saku perjalanan dinas ke kupang persiapan ujian P3K	Krispina Agnes Namba
130	16/09/2021	1.500.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
131	20/09/2021	3.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
132	22/09/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	Pasang Pagar Besi mobil pickup (Robert Roga yang ambil)	Krispina Agnes Namba
133	Oktober 2021	5.000.000	sekolah	Mengambil uang langsung dari Bendahara BOS, yang dimana uang itu sebenarnya pengembalian pinjaman Dana BOS ke Dana Komite	Ivony Sariota
134	02/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	Pengiriman uang ke anaknya	TRANSFER
135	02/10/2021	500.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk keperluan pribadi	Krispina Agnes Namba
136	04/11/2021	2.500.000	Ruang Bendahara	permintaan kasi uang di skolastika untuk merayakakan HUT pribadi	Skolastika M Byre
137	25/11/2021	300.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk pembelian pulsa pribadi	Krispina Agnes Namba
138	25/11/2021	1.000.000	Ruang Bendahara	permintaan untuk hadir pesta nikah ke Sogo Roga	Krispina Agnes Namba

Halaman 465 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	15/09/2020	5.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
140	21/09/2020	10.000.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
141	25/09/2020	5.250.000	Bank Mandiri	transfer lewat no rekening saksi BRI 002401035321500	Agnes Mude
142	07/12/2020	22.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
143	07/10/2021	2.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
145	07/10/2021	1.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Rosari M Wulandari (anaknya) BCA 3141107788	
146	30/11/2020	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk investasi LTC	Krispina Agnes Namba
147	Oktober 2020	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk cucu mau test tentara	Krispina Agnes Namba
148	05/10/2019	15.000.000	Ruang Bendahara	Permintaan untuk mau buka usaha bola guling	Krispina Agnes Namba
149	14/07/2021	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Yovita Ida Tena Bank NTT 00402024455611	
150	30/08/2021 jam 06.28.15	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
151	30/08/2020 jam 06.40.09	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
152	30/08/2021 jam 06.41.13	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	
153	30/08/2021 jam 06.42.11	50.000.000	Bank Mandiri	transfer ke no rekening Hemin Gildus Rangga Bank NTT 00402060041881	

Halaman 466 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	01/04/2019	25.000.000	Ruang Bendahara	Pinjaman untuk masuk anggota koperasi kembang	Krispina Agnes Namba
155	05/07/2019	1.500.000	Ruang Bendahara	Pengambilan yang katanya bayar tukang gali pohon pisang	Krispina Agnes Namba
156	11/12/2019	2.000.000	Ruang Bendahara	Pembayaran bon KEPSEK di unit produksi sekolah	Krispina Agnes Namba
157	21/07/2020	10.000.000	Ruang Bendahara	Pengambilan keuntungan bangun WC Aula	Krispina Agnes Namba
158	29/02/2020	2.500.000	Ruang Bendahara	Permintaan uang transportasi ke danau kelimutu	Krispina Agnes Namba
158	11/11/2021	1.938.939	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan BPN-MOF	
159	31/10/2021	1.332.063	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA tujuan MOF-BPN	
160	10/09/2019	535.600	Traveloka	Pembelian tiket HERMIN GILDUS RANGGA KOE-ENDE	
161	27/07/2020	435.299	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
162	31/05/2021	547.600	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-ENE	
163	15/02/2020	2.068.786	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI KOE-SUB-SRG	
164	05/02/2020	367.484	Traveloka	Pembelian Tiket ROSARI MELISTRI WULANDARI ENE-KOE	
165	21/09/2021	539.473	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	
167	24/09/2021	512.737	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO KOE-ENE	
168	31/10/2021	1.332.511	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO MOF-BPN	
169	11/11/2021	1.938.536	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
170	11/11/2021	827.284	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO BPN-MOF	
171	21/09/2021	539.478	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO ENE-KOE	

Halaman 467 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	09/09/2019	2.658.800	Traveloka	Pembelian Tiket DELINA J.EBO,YOVITA IDA TENA	
173	24/09/2019	511.914	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
174	31/10/2021	1.332.661	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA MOF- BPN	
175	11/11/2021	1.939.358	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF (KENCEL)	
176	11/11/2021	827.931	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA BPN-MOF	
177	20/10/2019	664.187	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA ENE-KOE	
178	24/10/2019	602.297	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
179	25/10/2019	1.204.865	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE(KENCEL)	
180	26/10/2019	923.387	Traveloka	Pembelian tiket YOVITA IDA TENA KOE-ENE	
181	25/06/2019	601.845	Traveloka	pembelian tiket PHILOMENA PAO ENE-KOE	
Total		933.054.190			

Menimbang, bahwa terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende bersama dengan Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (Penuntutan dalam berkas terpisah) selaku bendahara komite memberikan pinjaman kepada guru yang menggunakan dana komite, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan terkait penggunaan dana komite dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite;

No	Nama	Hari/Tanggal	Besar Uang	Tempat dan Saksi
1	Abraham Badu	17/06/2019	5.000.000	Ruang Kepsek dan disaksikan oleh Kepsek Dan Krispina Agnes Namba
2	Fakhrudin Umar	18/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
3	Maria Yosefina Wawo	05/06/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
		26/08/2021	1.000.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Wenseslaus Derta
4	Yudhi Heriyanto		1.450.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba

Halaman 468 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Yosefina Hati Seran	12/03/2021	1.000.000	Ruang Bendahara yang bersangkutan sudah Pindah kupang
6	Emi Herawati	07/11/2020	1.000.000	Ruang Bendahara Transfer Uang Saku
7	Fulbertus A Wenggo	Jul-19	4.000.000	Kamar Life Hotel Surabaya disaksikan oleh Marius P W Nobe
8	Yuliana Mi	18/07/2019	1.000.000	Ruang Bendahara Kuitansi Pinjaman
9	Wahyuni	28/12/2020	1.000.000	Transfer
		20/05/2021	1.500.000	Rumah Bendahara disaksikan oleh Agnes Mengi
10.	Trisna Claudia Bona (siswa)	juli2021	1.100.000	Ruang Bendahara disaksikan oleh Krispina Agnes Namba
11.	ALBERTUS JAO NDU, S.Pd	26/06/2019	5.000.000	Lewat HERMIN GILDUS RANGGA,S.Pd
		17/07/2019	2.174.813	Pembelian tiket Ende kupang untuk 3 orang, istri dan keluarga yakni Verenanda kustla, petrus Prins aldinando dan Baltianus Feto wea Newa
		31/07/2019	1.850.784	Pembelian tiket kupang - Ende untuk 3 orang, ALBERTUS JAO NDU, VENERANDA KUSTIA DIANA WEA
		26/07/2019	636.100	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni MAGDALENA QUINSA NDU
		26/07/2019	615.466	Pembelian tiket Ende kupang untuk 1 orang, yakni ALBERTUS JAO NDU
		25/09/2019	492.181	Pembelian tiket Maumere - Kupang untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		30/09/2019	506.254	Pembelian tiket Kupang - Maumere untuk 1 orang, PETRUS PRINS ALDINANDO NDU EA
		24/06/2020	1.000.000	
		26/08/2020	2.000.000	Ambil di Anita
	TOTAL		39.325.598	

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Inspektorat tanggal 2 November 2020 didapatkan temuan dan rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh SMK N 1 Ende yaitu:

- Pemenuhan standar kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) serta sarpras pada SMK N 1 Ende belum memadai;
- Pengelolaan dana komite tidak berdasarkan kesepakatan bersama dan belum dipertanggungjawabkan;

Halaman 469 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- c) Terdapat biaya transportasi dan tunjangan jabatan guru PNS tahun 2020 yang tidak ekonomis senilai Rp.196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*);
- d) Laporan hasil bimbingan belajar para guru secara online tidak ada;
- e) RKAS T.A 2020 belum disahkan/belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) Terdapat kekurangan Salur Dana BOS tahap III Tahun Ajaran 2020/2021 senilai Rp.319.040.000 (tiga ratus sembilan belas juta empat puluh ribu rupiah); dan
- g) Pengadaan Barang dan Jasa tanpa Surat Perintah Kerja (SPK).

Menimbang, bahwa saksi FRANSISKUS BIN, SE, M.M selaku Auditor Madya pada Inspektorat Provinsi NTT mendapati temuan yaitu terdapat tunjangan transportasi dan jabatan bagi 48 orang guru PNS, pada SMK N 1 Ende, selama 6 bulan berturut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp.196.000.000,- (*seratus sembilan puluh enam juta rupiah*); hal tersebut bertentangan dengan Permendikbud RI 75 Tahun 2016, diakui oleh terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, dalam tanggapan tertulis mengakui temuan ini dan menyatakan bersedia memperbaiki pembiayaan untuk Transportasi dan tunjangan Jabatan guru serta tunjangan jam mengajar atau insentif sehingga penggunaan dana Komite lebih berpihak pada kegiatan belajar mengajar dan bersedia untuk mengembalikan keuangan yang telah diterima oleh para Guru PNS.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Guru-guru PNS sesuai data yang diperoleh bahwa para guru tidak mengembalikan keuangan tersebut namun diperintah oleh Kepala Sekolah untuk mengisi slip penyetoran ke nomor rekening BRI Ndururea nomor : 4651-01-010761-53-2, an. Dana Komite SMK N 1 Ende, dana tersebut yang disetorkan menggunakan dana Komite bukan berasal dari para guru PNS, setelah menyetor dan melaporkan ke Inspektorat Propinsi NTT kemudian menarik kembali keuangan untuk digunakan.

Menimbang, bahwa kemudian guru-guru SMK N 1 Ende telah mengembalikan uang Komite yang digunakan untuk menutup temuan dari inspektorat yang disetorkan ke rekening Komite sekolah yang baru an. Komite SMK N 1 Ende nomor rekening : 715-01-0201-020146-53-3, Bank BRI Cabang Ende dengan nama-nama sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA	TANGGAL SETOR	JUMLAH YANG HARUS DI SETOR	JUMLAH YANG SUDAH DI SETOR
1	Dra. Maria Angelina Byre	02/11/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
2	Drs.Polykarpus Oka	11/10/2022	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
3	Dra.Yuliana Satu	02/11/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
4	Dra. Runga Elfrida	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
5	Dra. Maria Yosefina Wawo	14/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
6	Dra. Paba Maria Karitas	05/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
7	Dra. A. Ahmad Solo	30/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
8	Dra. Maria Dolorosa Pada	05/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
9	Karina Kowe, S.Pd	11/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
10	Fakhrudin Umar, S.Pd	07/10/2022 dan 31 / 10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
11	Basilia Maria E. Ea, S.Pd	09/09/2022	Rp 3.100.000	Rp 3.100.000
12	Reineldis Yuli Astuti, S.Pd	04/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
13	Emi Erawati, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
14	Albertus Jao Ndu, S.Pd	05/09/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
15	Amadeus Goo Tori, S.Pd	04/10/2022	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
16	Nurhafni Hasan, S.Pd	07/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
17	Elisabeth D.E. Saekera, SE	25/08/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
18	Muhammad Rustam, S.Pd	06/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
19	Efrem Boni Kasa, S.Pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
20	Maria Cesilia Dhale, SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
21	Israti Maisarah Mahar, S.Pd	28/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
22	Cosmas Damianus Resi, S. Si	03/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000

Halaman 471 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Ahmad, S.Pdi	06/10/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
24	Nurhalimah Ali Kasim, S.Pd	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
25	Ana Maria Yulita, S.pd	07/10/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
26	Skolastika Kapi, SE	27/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
27	Maria Imakulata zane, S.Pd	12/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
28	Fitri Yani ,SS	28/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
29	Fabiola S. Ivony,SS	27/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
30	Jeni Martina Dubu, S.Pd	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
31	Hildegardis Dhue, S.Ag	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
32	Matheus We, S.Pd	11/10/2022	Rp 2.250.000	Rp 2.250.000
33	Rosalia Wonga, S.Ag	09/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
34	Yuliana Mi, S.Pd	05/09/2022	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
35	Agnes Mude, SE	23/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
36	Klementina Sina, S.Par	05/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
37	Muhammad Natsir Mbusa, SE	27/09/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
38	Melchior Kana	27/09/2022	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
39	Jeaelani Humris, S.Kom	07/10/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
40	Cut Mutia E. Ifo, ST	13/10/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
41	Wahyuni	13/10/2022	Rp 4.200.000	Rp 4.200.000
42	Felisia Agnes Mengi, S.Pd	27/09/2022	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
43	Epi Fania Jeloya	29/08/2022	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000
44	Skolastika A. Byre, S.Pd	29/09/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
45	Maria Fransiska Dua Ika, S.Ag	07/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
46	Yohanes Ratu Koten, S.Pd	06/10/2022	Rp 2.350.000	Rp 2.350.000
Total Keuangan yang di Setor			Rp 196.000.000	Rp 181.600.000

Namun yang dikembalikan hanya Rp.181.600.000,-(seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) karena ada 2 (dua) orang tidak mengembalikan yaitu

Halaman 472 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (Penuntutan dalam berkas terpisah) sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan komite dibuat tanpa didukung bukti kwitansi atas penggunaan uang komite, sehingga menimbulkan temuan Ahli atas penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kegiatan fiktif dan menguntungkan terdakwa dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS, guna kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;

Menimbang, bahwa jumlah Penerimaan uang komite yang bersumber dari siswa tahun ajaran 2019/2020 Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021 dengan total sebesar Rp.6.080.470.000. (enam milyar delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan seluruhnya dalam rekening bersama antara komite dan sekolah tetapi Sebagian disimpan dalam rekening pribadi yakni rekening atas nama Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS bendahara komite SMK N 1 Ende, Kemudian Uang tersebut atas perintah Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yaitu :

1. **Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:**

- Uang Tunai Rp 570.500.000,- (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasar keterangan saksi Wenseslaus Derta tanpa dukungan bukti kwitansi lengkap dan sebagian dibantah Terdakwa;
- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- 1 buah cincin seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

2. **Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (Penuntutan dalam nerkas terpisah):**

- Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah.

Halaman 473 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan bersama sama Terdakwa tanpa didukung bukti atas penggunaan uang komite;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah terkait dengan kewenangannya selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende, dimana Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS atau suatu Korporasi dan secara melawan hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana telah dipertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Ahli dan keterangan saksi serta adanya barang bukti sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende berdasarkan Surat Keputusan KEP.086.829/3810/X/PK/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BKD.013.1/1/234/PK-JS/X/2017 Tanggal 27 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permendikbud No 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Pasal 15 Kepala Sekolah memiliki tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS membentuk Komite Sekolah SMK N 1 Ende berdasarkan SK Nomor : 139.a/ I 21.27/ SMK.1/ 2017. Tentang Pembentukan dan Penetapan Pengurus Komite Sekolah SMK N 1 Ende Tahun Anggaran 2017/2021. Terdakwa menunjuk saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. selaku bendahara komite dengan alasan oleh karena telah menjadi bendahara komite dan mengelola keuangan komite selama kurang lebih 4 tahun mulai dari 2017 s/d 2021 Bulan Desember. Namun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 tentang komite yang mengatur bahwa masa jabatan pengurus komite hanya selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kepala sekolah menyalahgunakan kewenangannya telah menunjuk saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. selaku bendahara Komite merupakan tenaga pendidik dari sekolah yang bersangkutan yakni sebagai guru matematika disekolah SMK N 1 Ende. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) huruf a, b dan Pasal 6 ayat (1) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite, dalam ketentuan

*Halaman 475 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebutkan larangan pengurus komite yang dipilih dari pengajar sekolah bersangkutan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA melalui rapat dengan orang tua / wali siswa menetapkan besaran uang komite yang harus dibayarkan, Pada TA. 2019/2020 ditetapkan uang komite sekolah sebesar **Rp. 2.300.000,-** Pada TA. 2020/2021, ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-** dan Pada TA. 2021/2022 ditetapkan uang komite sebesar **Rp. 1.800.000,-**. Penetapan nominal atau besaran dari uang komite dilakukan oleh terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA tanpa sebelumnya diberitahukan kepada saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua komite. Pembayaran uang komite diwajibkan dan dilakukan secara bertahap yaitu diawal tahun ajaran, pembayaran dilakukan diawal bulan Juli-Desember tahun berjalan dan tahap berikutnya terhitung bulan januari-juni tahun berjalan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (4) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite menjelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dan pada ayat (5) menjelaskan bahwa Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dari penjelasan diatas bahwa penggalangan dana yang dilakukan oleh terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA masuk kedalam kategori sumbangan dan pengelolaannya tidak sesuai ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende menentukan besaran nilai uang komite dan melakukan penggalangan dana uang komite, yang seharusnya penggalangan dana Komite dilakukan oleh pengurus komite sekolah melalui saksi Drs. ABRAHAM BADU, MS.i selaku ketua Komite SMK N 1 Ende. Penggalangan dana tersebut dilakukan terdakwa tanpa disertai dengan proposal yang diketahui oleh Sekolah dan hasil penggalangan dana komite tersebut seharusnya dibukukan dan disetor pada rekening bersama komite sekolah dan sekolah, serta dalam penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapatkan persetujuan dari komite sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada komite sekolah. Uang hasil penggalangan dana komite juga tidak disimpan dalam

Halaman 476 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bersama komite dan sekolah tetapi disimpan dalam rekening pribadi atas nama saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. bendahara Komite atas perintah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA dan dalam setiap penggunaan dana komite tersebut juga tidak pernah memberitahukan kepada ketua komite maupun kepada sekretaris komite sekolah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang komite yaitu :

- 1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- 2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
- 3) Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
- 4) Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
- 5) Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
  - a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
  - b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
  - c. pengembangan sarana prasarana; dan
  - d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
- 6) Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
  - a. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
  - b. dipertanggungjawabkan secara transparan;
  - c. dan dilaporkan kepada Komite Sekolah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA bersama-sama dengan saksi WENSESLAUS DERTA selaku bendahara komite, adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende, dimana dalam fakta persidangan Terdakwa telah tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya, sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan, terkait dana komite dan hal yang demikian

Halaman 477 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dipertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1. Mengenai pengertian keuangan negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 UU No 17 tahun 2003, yang meliputi :

- 1). Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman.
- 2). Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa menurut AHLI Drs Siswo Sujantonto Dea, maka Pengelolaan Keuangan Komite sekolah pada SMK N 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, merupakan pungutan yang berasal dari masyarakat yang di lakukan oleh sebuah instansi yang di berikan/memperoleh otorisasi/ijin dari Pemerintah sebagai otoritas. Terkait dengan itu dengan demikian pungutan tersebut di atas (dana Komite Sekolah tahun pelajaran 2019/2020, 2020/2021 dan 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2022), merupakan pungutan yang di kategorikan sebagai Penerimaan Negara. Oleh karena itu penerimaan dimaksud merupakan bagian dari Keuangan Negara dan penggunaan Keuangan tersebut harus mengacu pada Permendikbud 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, dan berdasarkan aturan tersebut dana komite merupakan sumbangan;.

Menimbang, bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/ kekayaan ini dapat terdiantara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum. Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dari Kas Negara dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara.

Menimbang bahwa adanya beberapa hal yang dijadikan dasar pemikiran penggalangan uang komite sekolah merupakan keuangan negara antara lain undang undang tentang Pendidikan nasional menyatakan bahwa pendanaan pendidikan terdiri dari pendanaan yang berasal dari pemerintah, dan juga berasal dari masyarakat.

Menimbang, bahwa AHLI Drs Siswo Sujantonto Dea, berpendapat bilamana pembentukan keanggotaan dan pengurus komite bertentangan dengan ketentuan pasal 6 peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 75 tahun 2016, seharusnya Terdakwa selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende tidak berhak melakukan pungutan yang secara substansi merupakan unsur penerimaan (keuangan) negara, namun pengurus komite.

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata **“dapat”** menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, Ahli, terdakwa dan persesuaian barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak,;

Menimbang, bahwa Dari hasil uji petik yang dilakukan oleh ahli Angkutan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, maka ditemukan selisih sebesar Rp. 5.496.754.233, sebagai berikut :

- LPJ yang terbukti dapat diterima sebesar Rp. 4.340.929.849,-
- LPJ yang tidak terbukti hasil uji petik sebesar Rp. 1.155.824.384, sebagai berikut :

Halaman 479 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LPJ dengan nota belanja/ kwitansi dan laporan melaksanakan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan sebesar Rp. 772.968.784,- Dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara.
- LPJ fiktif sebesar Rp. 51.895.600,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara (belanja fiktif tidak ada)
- Terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan dan menguntungkan orang lain sebesar Rp. 330.960.000,- Dihitung sebagai kerugian keuangan Negara

Sehingga hasil perhitungan AHLI, pada tahun Ajaran 2019/2020/ Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Ajaran 2021/2022 sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

• Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
• Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.739.540.151,-</b>

Menimbang, bahwa Total Penerimaan Penggalangan Dana Komite Tahun 2019 s/d Desember 2021 Desember, terdapat selisih dana uang komite yang tidak ada pertanggungjawaban yaitu :

Tahun Penerimaan	Penerimaan	Laporan Pertanggungjawaban	Selisih
2019/2020	Rp. 2.732.150.000	Rp. 2.688.519.424	Rp. 43.630.576
2020/2021	Rp. 2.182.220.000	Rp. 1.903.915.715	Rp. 278.304.285
2021/2022	Rp. 1.166.100.000	Rp. 904.319.094	Rp. 261.780.906
<b>Total secara keseluruhan yang tidak ada pertanggungjawabannya</b>			<b>Rp. 583.715.767</b>

## DATA UJI PETIK

### TAHUN AJARAN 2019/2020

NO	JENIS KEGIATAN	LPJ	REEL	TIDAK DIPERT	FIKTIF	M. ORG LAIN
1	Gaji tenaga honorer, kesra dan tunjangan tugas tambahan	Rp1.217.000.000	Rp967.900.000	Rp53.100.000		196.000.000
2	Pas Foto peserta Ujian Nasional	Rp69.300.000	Rp69.300.000			

Halaman 480 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pembayaran siswa prestasi	Rp1.650.000	Rp1.050.000	Rp600.000		
4	Pembangunan Ruang Tata Niaga	Rp125.287.000	Rp103.590.200	Rp21.696.800		
5	Bayar sensor 11 Pohon	Rp11.000.000	Rp11.000.000			
6	Penataan Taman	Rp2.110.000	Rp2.110.000			
7	Uks & P3K	Rp1.220.000	Rp1.220.000			
8	Ret-ret dan Muhasabah	Rp122.450.000	Rp121.000.000	Rp1.450.000		
9	Tabloit dan surat kabar	Rp5.330.000	Rp5.330.000			
10	Pengembangan bakat siswa	Rp11.150.000	Rp8.450.000	Rp2.700.000		
11	Iuran Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah SMK	Rp4.000.000	Rp-			Rp4.000.000
12	Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp2.105.500	Rp2.105.500			
13	Perbaikan Kursi & Meja Siswa	Rp4.805.000	Rp4.805.000			
14	Perbaikan toilet Guru & Siswa	Rp2.644.000	Rp2.644.000			
15	Transportasi muat meja dan kursi	Rp100.000	Rp100.000			
16	Biaya Pengubah lagu Himne SMK	Rp600.000	Rp600.000			
17	Jasa pemasangan 1 pintu ruang kelas tata niaga & 12 jendela	Rp1.500.000	Rp1.500.000			
18	HUT SMK	Rp35.180.000	Rp35.180.000			
19	HUT Satpam	Rp750.000	Rp750.000			
20	Kegiatan Rohani	Rp1.050.000	Rp1.050.000			
21	Sewa sound sosialisasi radikalisme dari KODIM	Rp350.000	Rp350.000			
22	Kunjungan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Rp6.625.000	Rp6.625.000			
23	Uang Kedukaan Mantan Guru SMKNegeri 1 Ende AN. MIKAEL DEI	Rp1.000.000	Rp1.000.000			
24	Pengerjaan Rabat dan Tembok Penyokong RPL	Rp3.300.000	Rp3.300.000			
25	Pengerjaa Lantai Halaman Sekolah	Rp5.700.000	Rp5.700.000			
26	Instalasi Air Bersih	Rp4.827.000	Rp4.827.000			
27	Pengadaan Perlengkapan Barang (sarana dan Prasarana)	Rp1.558.000	Rp1.558.000			
28	Krans bunga	Rp1.670.000	Rp1.670.000			
29	Pengadaan 1 Buah Flas disk 16 GB untuk Kegiatan Pramuka	Rp130.000	Rp130.000			
30	Pengadaan Senter Penjaga Malam	Rp450.000	Rp450.000			
31	Pemasangan Finger Print	Rp200.000	Rp200.000			
32	Pembelian 1 Buah Bola Volly dan Net	Rp900.000	Rp900.000			
33	Pengadaan Lampu	Rp1.513.000	Rp1.513.000			
34	Pemasangan Trali Jendela	Rp6.200.000	Rp6.200.000			
35	Pengadaan Meubeler tahun 2018/2019	Rp96.000.000	Rp96.000.000			
36	Persiapan Simulasi UNBK	Rp300.000	Rp300.000			
37	Konsumsi Pemeriksaan Bahan Ujian Naik Kelas	Rp3.800.000	Rp3.800.000			
38	Supervisi Mutu program OTKP	Rp1.444.500	Rp1.444.500			

Halaman 481 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	Upah kerja Pembangunan 2 ruang RPS	Rp130.000.000	Rp-			Rp130.000.000
40	Maintenance Komputer Lab Persiapan UNBK	Rp51.145.600	Rp-		Rp51.145.600	
41	Pembelian Computer 10 Unit	Rp80.675.000	Rp80.675.000			
42	Biaya Rapat guru dan Pegawai	Rp18.860.000	Rp18.860.000			
43	Pengadaan kelengkapan cleaning Service	Rp860.000	Rp860.000			
44	Pulsa Data operator Operasional sekolah	Rp3.216.000	Rp-	Rp3.216.000		
45	Tamu sekolah	Rp6.472.000	Rp6.455.000	Rp17.000		
46	ATK Komite	Rp2.229.500	Rp2.079.500	Rp150.000		
47	Konsumsi Pangan Lokal dgn Kadis P dan K Prov NTT dan MKKS/SMA	Rp2.000.000	Rp2.000.000			
48	Biaya Konsumsi Persiapan Sebelum UNBK 2020	Rp2.100.000	Rp2.100.000			
49	Konsumsi Penguji Ujian sekolah praktik kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp4.725.000	Rp4.725.000			
50	Konsumsi Penyusun Soal Ujian Teori Kelas XII Tahun ajaran 2019/2020	Rp5.220.000	Rp5.220.000			
51	Konsumsi Panitia Proktor dan teknisi UNBK Perhari tahun pelajaran 2019/2020	Rp2.850.000	Rp2.850.000			
52	Kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki untuk mengikuti turnamen antar pelajar tingkat SMA/MA/SMK Mutmainah Cup X tahun 2019	Rp5.340.000	Rp5.340.000			
53	Perjalanan Dnas	Rp92.970.524	Rp92.970.524			
54	Transportasi pengantaran Siswa PLK ke Kelitembu	Rp1.000.000	Rp1.000.000			
55	Transportasi untuk 2 orang tentara yang memberikan materi PPDP untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah	Rp500.000	Rp500.000			
56	Pembayaran Mobil Raider Kepolisian Pengawalan Erobik MPLS sekolah.	Rp500.000	Rp500.000			
57	Jasa sound Sistem kegiatan MPLs	Rp300.000	Rp300.000			
58	Pembayaran Transportasi untuk 6 orang nara sumber (dudi),Pengawas, korwas dan Pemateri	Rp1.350.000	Rp1.350.000			
59	Pembelian 1 buah bola kaki kassa	Rp162.000	Rp162.000			
60	Kontribusi dari SMK Negeri 1 untuk kunjungan kadis PPO Prov NTT	Rp500.000	Rp500.000			
61	Pembayaran pemeriksaan untuk siswa an. ALBERTUS VIANTONIUS TOLO	Rp129.800	Rp129.800			
62	Pembelian 15 Dos air Kelimutu untuk kegiatan hari Pramuka	Rp285.000	Rp285.000			
63	Pembelian 1 cup lens 18.55	Rp80.000	Rp-	Rp80.000		
64	Lanjutan Pembangunan Aula	Rp502.127.000	Rp398.663.000	Rp103.464.000		
65	Penjilitan istimewa laminasi 4 buku	Rp100.000	Rp100.000			
66	Jilid laminasi 1 buku ukuran F4	Rp30.000	Rp30.000			
67	Pengadaan 2 baliho	Rp310.000	Rp310.000			

Halaman 482 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Pengadaan 1 Spanduk	Rp100.000	Rp100.000			
69	Penghargaan Purna bakti guru	Rp8.500.000	Rp8.500.000			
70	Sumbangan duka orang tua dari ketua komite	Rp3.000.000	Rp3.000.000			
71	Pengecetan ruang Kepala Sekolah	Rp1.683.000	Rp1.683.000			
72	Biaya pengobatan siswa yang celaka	Rp2.000.000	Rp-	Rp2.000.000		
73	Pembayaran BON Tamu Sekolah Unit Produksi	Rp2.000.000	Rp-	Rp2.000.000		
TOTAL JUMLAH		Rp2.688.519.424	Rp2.116.900.024	Rp190.473.800	Rp51.145.600	Rp330.000.000

PENERIMAAN TAHUN 2019/2020	Rp2.732.150.000	
TOTAL PERTANGGUNG JAWABAN	Rp2.688.519.424	
SELISIH ANTARA RAB DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Rp43.630.576	43.630.576
SELISIH TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN SETELAH UJI PETIK PERTANGGUNG	Rp190.473.800	190.473.800
MEMPERKAYA ORANG LAIN SETELAH UJI PETIK	Rp330.000.000	330.000.000
FIKTIF	Rp51.145.600	51.145.600
KERUGIAN SETELAH UJI PETIK	Rp571.619.400	571.619.400
TOTAL KERUGIAN PENJUMLAHAN UJI PETIK DAN SELISIH RAB	Rp615.249.976	615.249.976

## DATA UJI PETIK

Jenis Kegiatan	LPJ	Awal		Perubahan		Keterangan
		Dibuktikan	Tidak Dibuktikan	Dibuktikan	Tidak Dibuktikan	
2019/2020						
Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	2.105.500	1.889.500	216.000	2.105.500	-	Selisih
Instalasi Air Bersih	4.827.000	4.826.500	500	4.827.000		Selisih

Halaman 483 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamu sekolah	6.472.000	6.472.000	-	6.455.000	17.000	Selisih
Perjalanan Dinas	92.970.524	82.264.983	10.705.541	92.970.524	-	Selisih
<b>Total</b>	<b>106.375.024</b>	<b>95.452.983</b>	<b>10.922.041</b>	<b>106.358.024</b>	<b>17.000</b>	
<b>2020/2021</b>						
Pembayaran Kesra PNS	66.200.000	32.450.000	33.750.000	32.000.000	34.200.000	Selisih
Pemberitaan dimedia	2.900.000	2.900.000			2.900.000	Selisih
Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	2.490.000	2.480.000	10.000	1.550.000	940.000	Selisih
Pembelian 10 baju merah maron	300.000	300.000			300.000	Selisih
ATK Komite	13.305.000	13.212.500	92.500	13.305.000		Selisih
Pembelian baliho dan stempel	620.000	620.000	-	560.000	60.000	Selisih
Bayar kekas propinsi	7.500.000	7.500.000	-		7.500.000	Selisih
Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	3.250.000		3.250.000	3.250.000	-	Selisih
<b>Total</b>	<b>96.565.000</b>	<b>59.462.500</b>	<b>37.102.500</b>	<b>50.665.000</b>	<b>45.900.000</b>	
<b>2021/2022</b>						
Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	5.000.000	5.000.000	-	3.500.000	1.500.000	Selisih
Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	3.600.000	3.300.000	300.000	3.600.000	-	Selisih
pengadaan alat kesehatan	68.895.000	54.895.590	13.999.410	47.549.600	21.345.400	Selisih
Pengadaan 1 galon matex	115.000	115.000	-	-	115.000	Selisih
Tamu sekolah	7.794.000	7.794.000	-	7.605.416	188.584	Selisih
ATK komite	6.350.500	6.350.500	-	6.278.500	72.000	Selisih
Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
Pembayaran dana duka guru (4 orang)	8.550.000	8.550.000	-	-	8.550.000	Selisih

Halaman 484 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran sumbangan nikah	1.425.000	1.425.000	-	-	1.425.000	Selisih
Instalasi listrik 4 ruang kelas ( Tes P3k)	40.000.000	11.664.000	28.336.000	12.975.000	27.025.000	Selisih
Pengerjaan tembok belakang RPS	45.000.000	22.724.000	22.276.000	30.861.000	14.139.000	Selisih
Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	2.000.000	2.000.000	-	-	2.000.000	Selisih
Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	1.518.000	1.518.000	-	-	1.518.000	Selisih
<b>Total</b>	<b>192.247.500</b>	<b>127.336.090</b>	<b>64.911.410</b>	<b>112.369.516</b>	<b>79.877.984</b>	

## DATA UJI PETIK

TAHUN AJARAN 2020/2021

NO	JENIS KEGIATAN	LPJ	REEL	TIDAK DIPERT	FIKTIF	M. ORG LAIN
1	Pembayaran Honor Komite	Rp411.750.000	386.750.000	Rp25.000.000		
2	Pembayaran Honor Teknisi	Rp28.100.000	27.000.000	Rp1.100.000		
3	Honor Operator Dapodik	Rp19.500.000	18.000.000	Rp1.500.000		
4	Pembayaran Kesra PNS	Rp66.200.000	32.000.000	Rp34.200.000		
5	Pembayaran Lembur PNS dan lembur dalam jabatan	Rp164.150.000	164.150.000			
6	Perjalanan Dinas Guru Pegawai	Rp80.138.433	77.438.433	Rp2.700.000		
7	Penulisan Ijasah	Rp13.800.000	13.800.000			
8	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun Pelajaran 2019/2020	Rp17.100.000	17.100.000			

Halaman 485 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Pembayaran Kelebihan jam mengajar Tahun Pelajaran 2020/2021	Rp13.725.000	13.725.000			
10	Pembayaran Honor Imput kwitansi penerimaan dana komite	Rp19.500.000	19.500.000			
11	Pembelian alat Perabot pendukung	Rp5.328.000	5.328.000			
12	Konsumsi panitia praktek kerja lapangan penajakan dan pengantaran	Rp2.100.000	2.100.000			
13	Konsumsi pemasangan jaringan internet penilaian akhir semester	Rp1.995.000	1.995.000			
14	Peringatan Hari Pancasila	Rp14.775.000	14.775.000			
15	Rapat dewan guru	Rp20.585.000	20.585.000			
16	Pemberitaan dimedia	Rp2.900.000		Rp2.900.000		
17	Pembayaran Tabloid dan Majalah Flores Pos	Rp580.000	580.000			
18	Pembayaran Tabloid dan Majalah Pos Kupang	Rp840.000	840.000			
19	Peringatan Hari guru	Rp8.550.000	8.550.000			
20	Lembur Penggandaan soal ujian	Rp2.000.000	2.000.000			
21	Lembur Persiapan kedatangan Inspektorat	Rp4.200.000	4.200.000			
22	Konsumsi Kedatangan inspektorat	Rp4.000.000	4.000.000			
23	Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp2.490.000	1.550.000	Rp940.000		
24	Kunjungan Kepala dinas propinsi NTT	Rp9.100.000	5.100.000	Rp4.000.000		
25	Biaya penebangan pohon	Rp2.000.000	2.000.000			
26	Jasa pengerjaan Tower Penjaga	Rp2.500.000	2.500.000			
27	Konsumsi Ujian Semester Ganjil	Rp11.250.000	11.250.000			
28	Pembelian alat kesehatan	Rp8.089.000	4.378.000	Rp3.711.000		

Halaman 486 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Pembayaran bimbingan belajar sore siswa kelas XII 2019/2020	Rp21.350.000	21.350.000			
30	Transportasi Maulid di Anaraja	Rp500.000		Rp500.000		
31	Pembelian 6 buah baju kaos satpam	Rp300.000	300.000			
32	Rekreasi Kepala sekolah dan Guru	Rp960.000				Rp960.000
33	Pembayaran tabloit expo	Rp240.000	240.000			
34	Pengadaan kostum Ola raga guru pembina	Rp19.200.000	19.200.000			
35	Dana Sharing PPDP 2020/2021	Rp38.660.000	38.660.000			
36	Sumbangan duka untuk siswa meninggal	Rp1.100.000	1.100.000			
37	Pelaksanaan IHT Kerja SMK Negeri 1 Ende tahun 2020	Rp23.430.000	23.430.000			
38	Pembelian kostum dan satu bola volly	Rp875.000	875.000			
39	Perbaikan kursi meja	Rp2.000.000	2.000.000			
40	Beli 2 Bendera, umbul - umbul dan tali rafia	Rp80.000	80.000			
41	Sewa camera canon	Rp100.000	100.000			
42	Jilid istimewa dokumen kurikulum	Rp150.000	150.000			
43	Pengadaan kipas angin berdiri 10 buah	Rp6.000.000	6.000.000			
44	Beli facesil 17 buah	Rp340.000	340.000			
45	Kegiatan Drumband Pelangi Nusantara	Rp15.958.000	12.468.000	Rp3.490.000		
46	Pembelian mesin foto copy canon tipe 5075	Rp40.000.000	40.000.000			
47	Sewa molen cor tiang aula	Rp5.000.000	5.000.000			
48	Bayar utang bambu untuk pembangunan aula 200 batang	Rp5.000.000	5.000.000			

Halaman 487 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Sewa molen cor tiang induk dan dek ruang. Ruang praktek siswa	Rp6.000.000	6.000.000			
50	Kontribusi kegiatan pendampingan RKAS BOS	Rp750.000			Rp750.000	
51	Service Laptop Thosiba	Rp500.000	500.000			
52	Drum band penjeputan gubernur dan rombongan	Rp1.981.000	1.981.000			
53	Pembelian 1 buah tendon	Rp1.300.000	1.300.000			
54	Jasa Konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp15.000.000	15.000.000			
55	Jasa konsultan gambar wc aula	Rp12.000.000	12.000.000			
56	Pembayaran sisa hutang pembelian batako pembangunan aula	Rp43.800.000	43.800.000			
57	Pengadaan meubeler kursi dan meja siswa 2019/2020	Rp96.000.000	96.000.000			
58	Bayar sisa pembelian pasir kerja aula 10 rit	Rp6.000.000	6.000.000			
59	Bayar sisa pembeian batu fondasi kerja aula	Rp4.800.000	4.800.000			
60	Bayar sisa pembelian kerikil kerja aula	Rp11.250.000	11.250.000			
61	Beli peta Kab. Ende 2 buah	Rp800.000	800.000			
62	Bayar sisa utang jasa tukang pengerjaan aula	Rp195.000.000		Rp195.000.000		
63	Jasa konsultan pembuatan revisi laporan RPS	Rp1.750.000	1.750.000			
64	Biaya pengadaan alat jaringan internisti dan pemasangan	Rp1.500.000	1.500.000			
65	Pembelian 10 baju merah maron	Rp300.000		Rp300.000		
66	Pembelian papan dan kayu usuk	Rp12.200.000	12.200.000			
67	lembur tanda tangan ijasah	Rp3.000.000		Rp3.000.000		

Halaman 488 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	Pembelian 1 buah printer canon MP 207	Rp1.200.000	1.200.000			
69	Pembelian 1 buah dinamo air	Rp5.500.000	5.500.000			
70	Bimtek persiapan akreditasi	Rp5.850.000	5.850.000			
71	Pembelian bendera merah putih dan tutwuri handayani	Rp500.000	500.000			
72	ATK Komite	Rp13.305.000	Rp13.305.000			
73	Tamu sekolah	Rp21.221.482	21.221.482			
74	Pembelian super sil pembersih lantai	Rp2.250.000	2.250.000			
75	Pembayaran hutang tali ijuk	Rp1.000.000	1.000.000			
76	Biaya pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu LED aula dan sekolah	Rp25.000.000	25.000.000			
77	Pembelian lampu LED nama usia dan nama sekolah	Rp35.000.000	35.000.000			
78	Pembelian 1 unit server	Rp20.000.000	20.000.000			
79	Pembelian 10 unit Komputer	Rp37.500.000	37.500.000			
80	Biaya pengiriman server dan komputer	Rp572.800	572.800			
81	Latihan paskibraka	Rp200.000	200.000			
82	Pembelian bola lampu philis	Rp9.474.000	9.474.000			
83	Pembelian pulsa data operator dapodik	Rp621.000	621.000			
84	Pembelian baliho dan stempel	Rp620.000	560.000	Rp60.000		
85	Pembelian karangan bunga (kedukaan)	Rp200.000	200.000			
86	Transportasi guru pendamping latihan Volly	Rp4.400.000	2.400.000	Rp2.000.000		
87	Biaya snack dan aqua latihan Voly	Rp4.800.000	2.400.000	Rp2.400.000		
88	Honor Guru tamu Karate	Rp9.600.000	9.600.000			

Halaman 489 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89	Biaya transportasi pembelian umbul - umbul dan bambo	Rp200.000	200.000			
90	Bahan bakar mesin potong rumput	Rp600.000	400.000	Rp200.000		
91	Pembelian tangki air	Rp120.000	120.000			
92	Pembelian karung	Rp67.000	67.000			
93	Biaya administrasi bantuan sumur bor	Rp5.000.000		Rp5.000.000		
94	Biaya Ulang Tahun Sekolah	Rp15.000.000	15.000.000			
95	Biaya jaringan perbaikan Telkom	Rp4.400.000		Rp4.400.000		
96	Bayar kekas propinsi	Rp7.500.000		Rp7.500.000		
97	Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	Rp3.250.000	3.250.000			
98	Transportasi Ende - Lantuka ( Bencana Adonara)	Rp4.800.000	4.800.000			
99	Transportasi laut Lantuka - adonara	Rp2.000.000	2.000.000			
100	Transportasi darat dari Adonara ke titik bencana. Sering dana komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word Kls XII dan kegiatan lomba	Rp1.000.000	1.000.000			
101	Sering dana komite untuk kegiatan PKL dan bentuk Prock Word Kls XII dan kegiatan lomba Kompetensi siswa antar kelas dalam program keahlian	Rp14.000.000		Rp14.000.000		
102	Instalasi Listrik ruang tata niaga lama	Rp2.520.000	300.000	Rp2.220.000		
103	Pengadaan foto siswa kelas XII 382 oran @ 25.000	Rp9.550.000		Rp9.550.000		
104	Pembayaran hutang jasa konsultan aula	Rp51.000.000	51.000.000			
105	Pembangunan Tembok Selatan depan aula	Rp25.000.000	25.000.000			

Halaman 490 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	HUT sekolah	Rp15.000.000		Rp15.000.000		
107	Konsumsi Work Shop	Rp5.300.000		Rp5.300.000		
108	Instalasi Listrik ruang TN lama	Rp2.520.000		Rp2.520.000		
109	Instalasi Listrik Ruang Kepsek Bendahara dan Kurikulum	Rp3.855.000	2.000.000	Rp1.855.000		

<b>PENERIMAAN TAHUN 2020/2021</b>	<b>Rp2.182.220.000</b>
<b>TOTAL PERTANGGUNG JAWABAN</b>	<b>Rp1.903.915.715</b>
<b>SELISIH ANTARA RAB DAN PERTANGGUNGJAWABAN</b>	<b>Rp278.304.285</b>
<b>SELISIH TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SETELAH UJI PETIK PERTANGGUNG</b>	<b>Rp350.346.000</b>
<b>MEMPERKAYA ORANG LAIN SETELAH UJI PETIK</b>	<b>Rp960.000</b>
<b>FIKTIF</b>	<b>Rp750.000</b>
<b>TOTAL KERUGIAN SETELAH UJI PETIK</b>	<b>Rp352.056.000</b>
<b>TOTAL KERUGIAN PENJUMLAHAN UJI PETIK DAN SELISIH RAB</b>	<b>Rp630.360.285</b>

DATA UJI PETIK						
TAHUN AJARAN 2021/2022						
NO	JENIS KEGIATAN	LPJ	REEL	TIDAK DIPERT	FIKTIF	M. ORG LAIN
1	Pengadaan golamba	Rp18.000.000	18.000.000			
2	Sumbangan untuk keg.penguksuhan pengurus PGRI Kec. Ende Timur 2021	Rp350.000	350.000			
3	Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp5.000.000	3.500.000	Rp1.500.000		
4	Panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama jalan mbongawani	Rp5.000.000	5.000.000			
5	Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	Rp3.600.000	3.600.000			
6	Pembelian lampu philis spiral	Rp7.600.000	7.570.000	Rp30.000		
7	Pelunasan jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor dan ruang guru	Rp32.000.000		Rp32.000.000		
8	Pelunasan jasa konsultan gambar wc aula	Rp10.000.000		Rp10.000.000		
9	Pembelian cet untuk ruang kelas	Rp1.832.000	1.832.000			
10	insentif team gugus covid	Rp5.000.000	5.000.000			
11	Persiapan perlengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja kepek	Rp1.175.000	1.175.000			
12	Publikasi media	Rp3.000.000	3.000.000			

Halaman 491 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKPg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	HUT Sekolah	Rp7.750.000	7.750.000			
14	Penelusuran tamatan	Rp1.000.000	1.000.000			
15	Lembur persiapan ujian semester ganjil	Rp1.070.000		Rp1.070.000		
16	Cetak dan penulisan ijasah tahun pelajaran 2020/2021	Rp11.370.000	11.370.000			
17	Pembelian girden ruang ujian P3K	Rp2.500.000	2.500.000			
18	pembelian bensin poting rumput	Rp400.000	400.000			
19	Lembur penggandaan dan pengepakan soal ujian semester ganjil	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
20	Pembayaran majalah flores pos	Rp660.000	660.000			
21	Biaya rapat guru dan pegawai	Rp5.850.000		Rp5.850.000		
22	Pembayaran majalah flores pos	Rp350.000	350.000			
23	Pembayaran majalah Flobamora	Rp135.000	135.000			
24	Snack dan konsumsi lembur persiapan bahan magang calon pengawas	Rp2.700.000		Rp2.700.000		
25	Pembelian 1 buah tendon untuk SMEA lama	Rp1.220.000	1.220.000			
26	Biaya honorer atau lembur panitia PKL	Rp29.545.000	29.545.000			
27	Lembur rancang bangun lab. Computer TKJ	Rp2.850.000		Rp2.850.000		
28	Konsumsi kegiatan Vaksinasi SMK negeri 1 Ende	Rp11.480.000	11.480.000			
29	Honor input kwitansi penerimaan semester ganjil	Rp10.200.000	10.200.000			
30	PPDB	Rp70.060.000		Rp70.060.000		
31	Konsumsi kegiatan seleksi kompetensi P3K GURU di SMK Negeri 1 Ende	Rp14.000.000	14.000.000			
32	Insentif panitia seleksi ( panitia non propinsi)	Rp7.360.000	7.360.000			
33	Lembur pengisian kuisioner BPK	Rp2.553.000	2.553.000			
34	Pengadaan kursi 69 buah	Rp25.875.000	25.875.000			
35	Konsumsi rapat persiapan pengisian kuisioner BPK	Rp630.000	630.000			
36	Service laptop dan printer	Rp800.000	800.000			
37	Snack makan ujian	Rp610.000	610.000			
38	Snack dan konsumsi peringatan hari guru	Rp4.550.000	4.550.000			
39	Pembelian baju olaraga guru	Rp7.200.000	7.200.000			
40	pembelian baterai LPE 8 dan memori sandisk	Rp460.000	460.000			
41	Snack Pemilihan pengurus osis	Rp340.000	340.000			
42	Pembersihan lokasi tembok belakang sekolah	Rp150.000	150.000			
43	Pembuatan taman	Rp15.000.000	15.000.000			
44	pengadaan alat kesehatan	Rp68.895.000	47.549.600	Rp21.345.400		
45	Kegiatan Teacer study	Rp1.226.000	1.226.000			

Halaman 492 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	pembelian obat - obatan gallon dan dispenser	Rp1.800.000	1.800.000			
47	Sewa tenda ujian P3K selama 5 hari	Rp1.500.000	1.500.000			
48	Biaya pengawalan siswa PKL tujuan ke kab. Nangakeo	Rp1.000.000	1.000.000			
49	Ongkos kerja pemasang kloset dan shower di ruang WC kepala Sekolah	Rp2.000.000	2.000.000			
50	Bayar orang jaga material di SMEA lama	Rp1.000.000		Rp1.000.000		
51	Biaya pengawasan kerja tembok sekolah dana BOS	Rp100.000	100.000			
52	Pembayaran honor komite selama 6 bulan tahun 2021/2022	Rp228.400.000	228.400.000			
53	Pembayaran operator dapodik	Rp6.500.000	6.500.000			
54	Pembayaran honor teknisi	Rp12.300.000	12.300.000			
55	Pembelian pembersih lantai super sil	Rp3.500.000	3.500.000			
56	Transportasi guru pendamping latihan volly	Rp2.400.000	2.400.000			
57	Biaya permen dan aqua latihan volly	Rp1.200.000	1.200.000			
58	Honor guru tamu karate	Rp4.800.000	4.800.000			
59	Biaya permen dan aqua latihan karate	Rp1.200.000	1.200.000			
60	Pembelian 1 buah krans bunga	Rp350.000	350.000			
61	Pengadaan 1 shower closet	Rp300.000	300.000			
62	Pengadaan closet duduk	Rp1.005.000	1.005.000			
63	Pengadaan 1 galon matex	Rp115.000		Rp115.000		
64	Pembelian 5 buah pisau potong rumput	Rp500.000	500.000			
65	Tamu sekolah	Rp7.794.000	7.605.416	Rp188.584		
66	ATK komite	Rp6.350.500	6.278.500	Rp72.000		
67	Perjalanan dinas	Rp74.854.594	74.854.594			
68	Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
69	Pembayaran dana duka guru (4 orang)	Rp8.550.000		Rp8.550.000		
70	Pembayaran sumbangan nikah	Rp1.425.000		Rp1.425.000		
71	Instalasi listrik 4 ruang kelas ( Tes P3k)	Rp40.000.000	12.975.000	Rp27.025.000		
72	Pengerjaan tembok belakang RPS	Rp45.000.000	30.861.000	Rp14.139.000		
73	Bangun penyaringan kamar wc	Rp10.000.000		Rp10.000.000		
74	Lembur tanda tangan laporan pendidikan	Rp3.000.000		Rp3.000.000		
75	lembur tanda tangan ijasah	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
76	Pembayaran tamu sekolah di unit produksi	Rp2.000.000		Rp2.000.000		
77	Pinjaman para guru	Rp6.000.000		Rp6.000.000		
78	Pengerjaan pintu dan jendela ruang kelas di bawah aula	Rp16.000.000	16.000.000			
79	Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp2.000.000		Rp2.000.000		

Halaman 493 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNkpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	Sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI Kec., Ende Timur 2021	Rp350.000		Rp350.000		
81	Pembayaran bambu untuk pembangunan tembok di lokasi SMEA lama	Rp500.000		Rp500.000		
82	Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	Rp1.518.000		Rp1.518.000		
83	Pembelian Papan Cor Kemiri 10 lembar	Rp800.000	800.000			
84	Pembelian 2 buah alcare termometer	Rp861.000		Rp861.000		
TOTAL JUMLAH		Rp904.319.094	672.170.110	Rp232.148.984	Rp-	Rp-

PENERIMAAN TAHUN 2021/2022	Rp1.166.100.000
TOTAL PERTANGGUNG JAWABAN	Rp904.319.094
SELISIH ANTARA RAB DAN PERTANGGUNGJAWABAN	Rp261.780.906
SELISIH TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SETELAH UJI PETIK PERTANGGUNG	Rp232.148.984
MEMPERKAYA ORANG LAIN SETELAH UJI PETIK	Rp-
FIKTIF	Rp-
TOTAL KERUGIAN SETELAH UJI PETIK	Rp232.148.984
TOTAL KERUGIAN PENJUMLAHAN UJI PETIK DAN SELISIH RAB	Rp493.929.890

Data Pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan(tulisan merah dalam table)

Tahun 2019/2020	Realisasi	Pelaksanaan	selisih
Perbaikan Lab. Prog. Adm. Perkantoran	Rp2.105.500	Rp2.105.500	
Instalasi Air Bersih	Rp4.827.000	Rp4.827.000	
Tamu sekolah	Rp6.472.000	Rp6.455.000	Rp17.000
Perjalanan Dinas	Rp92.970.524	Rp92.970.524	
Total	Rp106.375.024	Rp106.358.024	Rp17.000

## Tahun 2020/2021

Pembayaran Kesra PNS	Rp66.200.000	32.000.000	Rp34.200.000
Pemberitaan dimedia	Rp2.900.000		Rp2.900.000
Konsumsi dan snack pengerjaan bak air	Rp2.490.000	1.550.000	Rp940.000
Pembelian 10 baju merah maron	Rp300.000		Rp300.000

Halaman 494 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Komite	Rp13.305.000	Rp13.305.000	
Pembelian baliho dan stempel	Rp620.000	560.000	Rp60.000
Bayar kekas propinsi	Rp7.500.000		Rp7.500.000
Konsumsi selama 3 hari 22 orang guru dan siswa (bencana Adonara)	Rp3.250.000	3.250.000	
<b>Total</b>	<b>Rp96.565.000</b>	<b>Rp50.665.000</b>	<b>Rp45.900.000</b>

## Tahun 2021/2022

Sensor belah pohon dan pengalihan akar pohon	Rp5.000.000	3.500.000	Rp1.500.000
Pembelian material untuk pembangunan pagar di SMEA lama jln mbongawani	Rp3.600.000	3.600.000	
pengadaan alat kesehatan	Rp68.895.000	47.549.600	Rp21.345.400
Pengadaan 1 galon matex	Rp115.000		Rp115.000
Tamu sekolah	Rp7.794.000	7.605.416	Rp188.584
ATK komite	Rp6.350.500	6.278.500	Rp72.000
Ongkos kerja pemasangan sower dan kloset	Rp2.000.000		Rp2.000.000
Pembayaran dana duka guru (4 orang)	Rp8.550.000		Rp8.550.000
Pembayaran sumbangan nikah	Rp1.425.000		Rp1.425.000
Instalasi listrik 4 ruang kelas ( Tes P3k)	Rp40.000.000	12.975.000	Rp27.025.000
Pengerjaan tembok belakang RPS	Rp45.000.000	30.861.000	Rp14.139.000
Operasional kedatangan pegawai dinas propinsi	Rp2.000.000		Rp2.000.000
Instalasi jaringan pipa dari mesin pompa	Rp1.518.000		Rp1.518.000
<b>Total</b>	<b>Rp192.247.500</b>	<b>Rp112.369.516</b>	<b>Rp79.877.984</b>

Menimbang, bahwa kerugian Keuangan Negara berdasarkan perhitungan Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, sebesar Rp. 1.739.540.151 merupakan tanggungjawab Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penitipan uang pada penyidik senilai Rp. 222.550.000; (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

Halaman 495 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian tunjangan transportasi dan jabatan bagi 46 orang guru PNS, Rp. 181.600.000; (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui saksi ALBERTUS JAO NDU,SPd
- Pengembalian Pinjaman Saksi ALBERTHUS JAO NDU,SPd sebesar Rp. 14.300.000; (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah)
- Penyerahan sisa Kas Dana Komite dari Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd kepada Bendahara EPHIFANIA JELOYA, S.Pd., sebesar Rp. 11.000.000; (sebelas juta rupiah)
- Pengembalian Pinjaman dari Dana Komite oleh WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 15.650.000; (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Atas penitipan uang tersebut selanjutnya disita dan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penitipan uang pada penyidik senilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende, selanjutnya atas uang tersebut disita dan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara;

Bahwa Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende bersama sama Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende telah menyalahgunakan dana komite periode 2019/2020 s/d 2021/2022 sebagian untuk kepentingan pribadi Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku kepala sekolah SMK N 1 Ende dan Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS selaku bendahara komite SMK N 1 Ende yaitu :

## 1. Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS:

- Uang Tunai Rp 570.500.000,- (lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasar keterangan saksi Wenseslaus Derta;
- Membeli 1 Unit motor Sepeda Motor Merek Yamaha Aerox isi selinder 155 CC warna merah nomor polisi : EB 4678 AK, dengan harga sekitar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
- 1 buah cincin kepala MP grombol perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

## 2. Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS (Penuntutan dalam nerkas terpisah):

- Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebidang tanah.

Halaman 496 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



- Memberikan pinjaman uang komite kepada beberapa guru dan tenaga kontrak.
- sebagian uang digunakan untuk kepentingan pribadi bersenang-senang ke tempat hiburan malam dan bermain judi.
- Beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti milik saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS dan Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, yang telah dilakukan oleh Penyidik yang yaitu berupa :

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P dan 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox :
  - warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238 dan
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
  - 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 atas 1(satu) cincin kepala MP grombol perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram,

Selanjutnya atas seluruh barang barang milik terdakwa tersebut yang dibeli semasa tahun 2019 sampai Akhir Desember 2021, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian atas kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam pasal 6 menyebutkan: “Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dan saksi

Halaman 497 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



WENSESLAUS DERTA, S.Pd. bendahara Komite dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis hakim sependapat dengan perhitungan Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, atas kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.739.540.151, selanjutnya setelah dikurangkan dengan titipan uang pada penyidik yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 272.550.000; (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian negara senilai Rp. 1.466.990.151 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.466.990.151 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan terdakwa dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK atas penggunaan sumbangan komite untuk keperluan pribadi dan bertentangan dengan Undang Undang dan tidak didukung oleh bukti penggunaan dan tanpa pertanggungjawaban kepada pengurus komite, maka sudah semestinya merupakan tanggungjawab Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas penggunaan dana komite;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende berperan selaku Pelaku(dader) bersama-sama dengan Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende dan Saksi saksi lain pada saat penggalangan dan pengelolaan dana Komite Sekolah SMK N 1 Ende tahun ajaran 2019/2020, 2020/2021, Akhie Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa selaku DADER pelaku perbuatan pidana secara bersama sama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara Komite dan Guru Guru SMK N 1 Ende yang menggalang dana komite tahun anggaran 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 tanpa melalui rapat dengan pengurus komite dan orang tua murid dan mempergunakannya tidak sesuai peruntukannya dan untuk kepentingan pribadi tanpa melibatkan Pengurus Komite, telah terbukti secara hukum telah melanggar ketentuan peraturan perundangan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, telah pula melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, diawali Terdakwa yang menunjuk Pengurus Komite dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd pengajar pada SMK N 1 Ende selaku bendahara Komite secara melawan hukum, yang memiliki cacat formil, tidak melakukan pencatatan pada buku kas dan tidak menyetorkan uang komite yang dihipun pada rekening bersama dan disetorkan pada rekening pribadi dan mempergunakan dana komite atas perintah terdakwa tanpa terlebih dahulu membuat RKAS dan mempergunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd selaku bendahara Komite serta meminjamkan pegawai dan guru guru pada SMK N 1 Ende dan sebagai akibat dari perbuatan yang demikian tersebut, telah melanggar serangkaian ketentuan perundangan yang berlaku, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut merupakan sebuah rangkaian perbuatan, serta didapati adanya kerja sama yang erat dan intens, diantara keduanya;

Halaman 499 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan unsur di atas, telah mengakibatkan adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 7. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (Voorgezette handeling) harus memenuhi syarat yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang, kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama dan ketiga jangka waktu tertentu (jarak waktunya tidak terlalu lama.).

Menimbang, bahwa pembayaran sudah ditentukan oleh kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA bahwa pembayaran secara bertahap untuk tahun ajaran 2019/2020 tahap pertama dari bulan Juli sampai dengan Desember bulan berjalan di bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 ( satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap kedua dibayarkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni bayarkan Sebesar Rp.1.150.000 (satu juta lima seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan bulan desember 2021 besaran di tentukan juga oleh Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk Tahap pertama sebesar Rp. 1.000.000,- dan tahap kedua sebesar Rp. 800.000,-

Menimbang, bahwa pada tahun ajaran 2019 /2020, tahun ajaran 2020/2021 dan tahun Desember 2021 tidak pernah dilakukan rapat khusus terkait dengan pembahasan besaran uang komite tidak pernah dilaksanakan hanya saja pada saat pembagian rapot pada bulan Juni tahun ajaran disampaikan oleh kepala Sekolah an. HERMIN GILDUS RANGGA,S.P.bahwa besaran uang komite pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.300.000 dan pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 1.800.000.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerimaan keuangan komite tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 2.732.150.000, sedangkan total pengeluaran sebesar Rp. 2.688.519.424,- terjadi selisih antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp. 43.630.576,-. Bahwa selisih uang tersebut Rp. 43.630.576, karena digunakan untuk kepentingan pribadi namun perlu Saksi jelaskan bahwa selain Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi ada juga Saksi

*Halaman 500 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan pada Kepala Sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, bersama pak ALBERTUS JAO NDU, S.Pd lebih besar, dapat Saksi rincikan sebagai berikut :

1. HERMIN GILDUS RANGGA Rp. 246.150.000
2. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd Rp. 14.275.598
3. Saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 20.000.000,-

Total yang tidak bisa dipertanggung jawabkan di tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.280.425.598,-

Menimbang, bahwa sebenarnya pertanggungjawaban tahun ajaran 2019/2020 terdapat selisih sebesar Rp. 280.425.598, namun keuangan komite tahun ajaran 2020/2021, yang sudah masuk lebih awal diantara bulan April-Juni 2020, sehingga menutupi penggunaan item kegiatan tahun ajaran 2019/2020, hal ini dilakukan oleh Terdakwa bersama sama saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan penggalangan dana dan pengelolaannya atas seluruh dana komite sejak tahun anggaran 2019/2020,2020/2021,2021/2022, sebagai suatu rangkaian perbuatan dan berlanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Bendahara Komite juga melakukan kesalahan berulang ulang atas perhitungan dan pertanggungjawaban sehingga menjadi tanggung jawab Saksi selaku bendahara atas kerugian keuangan tersebut sebesar Rp. 53.100.000,-, uang telah diterima oleh mereka namun untuk tanda tangan dalam bukti penerimaan banyak tidak tanda tangan karena banyak yang sudah menerima uang terlebih dahulu sebelum diterbitkan bukti penerimaan, kemudian ada juga yang membantu mengambil uang dari rekan kerja.

Menimbang, bahwa kegiatan Ret-Ret dilaksanakan tanggal 27 November 2019, koordinator Pak. ALBERTUS JAO NDU, S.Pd wakil Kepala Sekolah bertempat di Kematabor Mataloko, Jadi total pengeluaran untuk kegiatan Ret-Ret Mushabah dan Mushabah adalah sebesar Rp. 121.000.000 dan terjadi selisih tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp. 1.450.000 dan yang bertanggung jawab adalah Saksi sendiri selaku bendahara komite.

Menimbang, bahwa total kerugian antara selisih pertanggung jawaban dan penerimaan sebesar Rp.43.630.576 kemudian dilakukan uji petik atas pertanggungjawaban yang diserahkan maka terdapat kerugian pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp. 386.524.441, dan kerugian lain yaitu uang transportasi dan tunjangan jabatan PNS / kesra yang bayarkan kepada Guru dan pegawai PNS sebanyak 48 Orang yaitu sebesar Rp. 196.000.000- sehingga total kerugian yang ditemukan setelah dilakukan penjumlahan uji petik dan selisih pada pertanggung jawaban sebesar Rp. 626.155,017.

Halaman 501 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2019/2020 sebesar 386.524.441,- Dapat Saksi jelaskan terkait pengelompokan kerugian adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepentingan/memperkaya orang lain Sebesar Rp. 134.000.000.
2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan Rp.201.378.841
3. Kwitansi Fiktif Sebesar Rp. 51.145.000.

Bahwa terkait dengan uang Rp. 201.378.841, dapat dijelaskan oleh Saksi Bendahara Komite bahwa uang tersebut untuk kepentingan Saksi pribadi sehari-hari makan dan minum dan ada juga pengeluaran yang Saksi gunakan untuk kepentingan komite sekolah namun tidak ada bukti kwitansi/catatan yang bisa Saksi tunjukkan.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Saksi terdahulu bahwa pembangunan gedung Aula sebesar Rp. 502.127.000, sesuai RAB yang Saksi serahkan, namun biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan pembayaran hutang pada saat pengerjaan bangunan gedung Aula pada tahap sebelumnya, hanya saja Saksi tidak bisa mempertanggung jawabkan apakah biaya sebesar Rp. 4.800.000,- tersebut masuk dalam tahap pengerjaan gedung aula di tahun berapa, yang jelasnya pada periode tahun 2020/2021, tidak ada pengerjaan lagi dan biaya tersebut dibayar tersendiri diluar dari biaya sebesar Rp. 502.127.000,- (Lima Ratus Dua Juta seratus Dua puluh Tujuh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Bendahara Komite menerangkan terkait dengan 2 (dua) kegiatan shering proyek work tersebut tidak ada kwitansi penyerahan dari Saksi kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA, namun uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA dihadapan panitia kegiatan, selanjutnya kepala sekolah yang merancang besaran insentif yang diberikan kepada masing-masing panitia kegiatan tersebut namun tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban pada tahun ajaran 2020/2021 dimana total penerimaan sebesar Rp. 2.182.220.000, dan total pengeluaran sebesar Rp. 1.903.915.715 dimana diperoleh selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp 278.304.285 dan dari hasil uji petik terdapat kerugian lain sebesar Rp. 341.548.500, jika demikian saudara dimohon untuk merincikan kerugian lain setelah dilakukan uji petik total kerugian lain. Jadi total kerugian antara selisih RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp.278.304.285 dan hasil selisih uji petik data pertanggungjawaban sebesar Rp. 344.258.500 jadi total kerugian setelah dilakukan uji petik dan selisih pada

Halaman 502 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban sebesar Rp. 621.562.785. Terkait dengan keterangan saudara diatas bahwa total kerugian hasil uji petik pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp 341.548.500,- rincian pengelompokan kerugian sebagai berikut “ Untuk kepentingan/memperkaya orang lain (terdakwa) Sebesar Rp. 194.433.500 Untuk Kepentingan Pribadi Saksi Bendahara Komite adalah sebesar Rp.147.115.000.

Menimbang, bahwa total nilai kerugian pada tahun jaran 2020/2021 yang tidak bisa Saksi pertanggung jawaban setelah dilakukan uji petik ditambah dengan kerugian lain diluar dari pertanggung jawaban yakni bahwa selisih antara RAB dan pertanggungjawaban sebesar Rp. 278.304.285,- dan kerugian setelah dilakukan uji petik adalah sebesar Rp 344.258.500 sehingga total kerugian pada tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp. 621.562.78

Menimbang, bahwa dari pembayaran uang komite dari tahun ajaran 2019/2020 s/d 2021/2022 terdapat aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Tahun Penerimaan	Penerimaan	Laporan Pertanggungjawaban	Selisih
2019/2020	Rp. 2.732.150.000	Rp. 2.688.519.424	Rp. 43.630.576
2020/2021	Rp. 2.182.220.000	Rp . 1.903.915.715	Rp. 278.304.285
2021/2022	Rp. 1.166.100.000	Rp. 904.319.094	Rp. 261.780.906
Total secara keseluruhan yang tidak ada pertanggungjawaban			Rp. 583.715.767

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk, dan Barang Bukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur delik diatas maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende bersama saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku Bendahara komite SMK N 1 Ende dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. maka dalam unsur ini menunjuk kepada terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende** yang memiliki kemampuan bertanggung jawab terkait dengan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Komite SMK N 1 Ende yang dilakukan sejak tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2021

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang

Halaman 503 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut<sup>4</sup> telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti atas diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas tindak pidana korupsi terdakwa dikenakan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum pidana, dan juga dikenakan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti, yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Akuntan Publik DR. RICHARD IZAAC RISAMBESSY, MS. CPA.CA.CPI, sejak tahun 2019/2020, Tahun Ajaran 2020/2021 dan sampai dengan bulan Desember 2021, terdapat kerugian Keuangan Negara Sebesar Rp. 1.739.540.151,- dengan rincian sebagai berikut :

• Selisih RAPBS dan LPJ	Rp. 583.715.767,-
• Selisih LPJ dan hasil uji petik	<u>Rp. 1.155.824.384,-</u>
Total	<b>Rp. 1.739.540.151,-</b>

Menimbang, bahwa atas kerugian negara sebesar Rp. 1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) setelah dikurangkan dengan titipan uang pada penyidik yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 272.550.000; (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian negara senilai Rp. 1.466.990.151 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) merupakan tanggungjawab Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. bendahara Komite atas pengembalian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp. 1.466.990.151 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) oelh karena terdakwa dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd.

Halaman 504 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah mempergunakan dana komite untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dibuat pembukuan dan laporan kepada komite sekolah serta tidak ada bukti pendukung kwitansi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait besarnya masing masing tanggungjawab Terdakwa dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd. atas pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Komite SMK N 1 Ende tidak melalui mekanisme, pengurus komite tidak dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa, Ketua Komite, Sekretaris, dan Bendahara yang dipilih tidak melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
2. Keanggota pengurus komite seharusnya beranggotakan paling banyak 15 (lima belas) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang namun fakta yang terjadi bahwa komite SMK N 1 Ende hanya terdiri dari 3 (tiga) orang pengurus saja yaitu Ketua sdr. Drs. ABRAHAM BADU, M.Si, Sekretaris Sdr. ALFONSIUS TARI, SE dan Bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd.
3. Dalam ketentuan bahwa pengurus komite tidak dapat berasal dari Tenaga pendidik Kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan atau penyelenggara sekolah yang bersangkutan namun fakta yang ditemukan bahwa Kepala Sekolah SMK N 1 Ende sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, menetapkan bendahara sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd tidak sesuai ketentuan yakni sdr. WENSESLAUS DERTA, S.Pd adalah salah satu guru PNS/tenaga pendidik mata pelajaran Matematika pada SMK N 1 Ende.
4. Dalam ketentuan Permendikbud 75 Tahun 2016 Pasal 7 angka (3) menjelaskan bahwa komite sekolah yang ditetapkan harus menyusun Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) namun fakta yang ditemukan bahwa pengurus komite SMK N 1 Ende tidak membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
5. Bahwa dalam ketentuan, Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana guna menutupi kekurangan satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana prasarana, namun fakta yang ditemukan bahwa sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende

Halaman 505 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



hasil penggalangan dari orang tua wali siswa digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain.

6. Hasil penggalangan dapat digunakan secara wajar setelah mendapat persetujuan dari orang tua wali, dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite sekolah namun fakta yang terjadi sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan secara tidak wajar dan pengelolaan tidak transparan, Ketua Komite dan Sekretaris komite SMK N 1 Ende tidak dilibatkan dalam pengelolaan penggunaan keuangan komite, kemudian penggunaan keuangan komite tidak pernah disampaikan baik itu laporan lisan maupun secara tertulis kepada Komite sekolah.
7. Sebagian keuangan komite SMK N 1 Ende digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah sdr. HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd, dan Bendahara Komite saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA 4 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, dibebankan kepada pihak-pihak yang memperoleh atau menikmati hasil dari tindak pidana korupsinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum terdakwa dan saksi tidak dapat membuktikan secara riil besaran uang yang dibantah dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan saksi bertanggungjawab atas kerugian keuangan negara tersebut sebesar Rp. 1.466.990.151(satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) dan oleh karenanya terhadap besaran uang pengganti sebesar Rp. 1.466.990.151(satu milyar empat ratus enam puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) dijatuhkan secara proporsional sesuai peran terdakwa selaku kepala sekolah dan saksi, WENSESLAUS DERTA, S.Pd selaku bendahara komite yaitu :

1. Terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS selaku Kepala Sekolah SMK N 1 Ende bertanggungjawab sebesar Rp. 733.495.075,5 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima )
2. Saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd selaku bendahara komite SMK N 1 Ende bertanggungjawab sebesar Rp. 733.495.075,5 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima )

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar,

*Halaman 506 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas pada pokoknya Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang mendalilkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan, mempertimbangkan pula Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai kategori, dampak dan aspek dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian sedang yaitu Rp. 1.739.540.151,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah) (vide Pasal 6 ayat (2) huruf c;

Halaman 507 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan rendah, karena mempunyai memiliki Pengetahuan yang rendah atas tindak pidana yang dilakukannya terhadap dana komite berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (vide pasal 10 huruf a);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur;
- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan tinggi karena nilai pengembalian kerugian negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10 %(vide pasal 10 huruf c );

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini, yaitu nomor 1 s/d 356 masih diperlukan untuk pemeriksaan saksi WENSESLAUS DERTA, S.Pd (terdakwa dalam perkara terpisah), maka Majelis Hakim berketetapan seluruh barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringkankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, dikaitkan fakta hukum dalam persidangan serta Perma No. 1 Tahun 2020 tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut sudahlah setimpal dengan perbuatannya, di samping itu juga untuk memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri. sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana sejenis atau tidak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS**, tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa **HERMIN GILDUS RANGGA, S.Pd Alias GILDUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut , sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Pemuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000;

Halaman 509 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.733.495.075,5 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah koma lima );

Dengan memperhitungkan sejumlah uang dan barang bukti yang telah disita penyidik Berupa :

- Pengembalian tunjangan transportasi dan jabatan bagi 46 orang guru PNS, Rp. 181.600.000 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Pengembalian Pinjaman Saksi ALBERTHUS JAO NDU,SPd sebesar Rp. 14.300.000 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Penyerahan sisa Kas Dana Komite dari Bendahara WENSESLAUS DERTA, S.Pd kepada Bendahara EPHIFANIA JELOYA, S.Pd., sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- Pengembalian Pinjaman dari Dana Komite oleh WENSESLAUS DERTA, S.Pd Rp. 15.650.000 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- penitipan uang senilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dari saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P dan 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox :
  - warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238 dan
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
  - 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 atas 1(satu) cincin kepala MP grombol perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram,

Terhadap total penitipan uang sejumlah Rp 272.550.000; (duaratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita oleh Penyidik dan tersebut diatas, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, dan juga atas barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk negara selanjutnya diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atas terdakwa HERMIN GILDUS RANGGA dan saksi WENSESLAUS DERTA, S.pd. Alias WENS;

Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka kepada Terpidana dijatuhi pidana Penjara selama **1(satu) Tahun**; ;

## 8. Menetapkan Barang Bukti

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satelit C55t-B5249 dengan nomor seri XE155868P;
2. 1 (satu) set alat cas Laptop Toshiba;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox warna merah dengan nomor polisi EB 4678 AK, nomor rangka MH3SG4610LJ303443, nomor mesin G3J1E-0499740;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Aerox, dimana pada bagian kepala kunci berwarna hitam dan pada bagian batang kunci berwarna silver chrome dengan nomor kunci A3961238;
5. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nomor 05236888, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atas nama HELMIN GILDUS RANGGA;
7. 1 (satu) lembar nota penerimaan pembelian kendaraan bermotor pada Dealer Yamaha Yes Ende, tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor 12245-22-01-003390-1, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA pada Kantor Pegadaian Unit Paupire, tanggal 05 Juli 2022 dengan keterangan barang jaminan berupa "satu

Halaman 511 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
9. 1 (satu) "cincin kepala MP grombol ditaksir perhiasan emas 16 karat, berat 13.6/13.0 gram.
  10. 500 (lima ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  11. 286 (dua ratus delapan puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
  12. 3368 (tiga ribu tiga ratus enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.168.400.000,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
  13. Uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian :
    - 68 (enam puluh delapan) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
    - 76 (tujuh puluh enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  14. Pengembalian biaya transportasi dan tunjangan jabatan Guru PNS, sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
    - 204 (dua ratus empat) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
    - 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  15. Pengembalian uang pinjaman Komite sebesar Rp.15.650.000,- (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
    - (dua ratus tiga belas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebesar Rp.10.650.000,- (sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
    - 50 (lima puluh) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
  16. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Komite Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende, tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 512 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1(satu) lembar Kwitansi penyerahan Uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), tanggal 31 Desember 2021;
18. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022;
19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Ende, Nomor : 027/SMK.1/KP/III/2022 tentang Pengangkatan Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Ende Tahun 2022, tanggal 05 Januari 2022 atas nama EPHIFANIA JELOYA, S.Pd.
20. 3 (tiga) lembar surat keputusan kepala SMK Negeri 1 Ende, nomor : 139.a/I 21.27/SMK.1/2017 tentang pembentukan dan penetapan pengurus komite sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2021;
21. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2019/2020;
22. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2019/2020;
23. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2019/2020;
24. 2 (dua) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020;
25. 3 (tiga) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2019/2020 (tanpa di tandatangi oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
26. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2020/2021;
27. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2020/2021.
28. 1(satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2020/2021;
29. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2020/2021, tanggal 06 Agustus 2020. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
30. 5 (lima) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2020/2021, tanggal 20 Juli 2020 (tanpa di tandatangi oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite);
31. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas X tahun pelajaran 2021/2022;

Halaman 513 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XI tahun pelajaran 2021/2022;
33. 1 (satu) bundel Rekapitulasi keuangan komite kelas XII tahun pelajaran 2021/2022;.
34. 1 (satu) lembar rencana anggaran pendapatan dan belanja komite sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2021/2022, tanggal 05 Juli 2021. (tanpa ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan ketua komite);
35. 4 (empat) lembar laporan pertanggung jawaban keuangan komite SMK Negeri 1 Ende tahun pelajaran 2021/2022.(tanpa di tandatangani oleh Kepala sekolah, Ketua Komite dan Bendahara komite).
36. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening : 4651-01-010761-53-2, atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende.
37. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening : 181-00-0030703-4, atas nama WENSESLAUS DERTA.
38. 1 (satu) buah Buku rekening tabungan Bank BNI dengan nomor rekening : 0553472269, atas nama WENSESLAUS DERTA.
39. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Juli tahun 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
40. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 16 Juli 2019, sebesar Rp.38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
41. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
42. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende,tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
43. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende tanggal 20 agustus 2019 sebesar Rp.33.300.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
44. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 01 Agustus 2019, sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 514 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
46. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Agustus 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
47. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
48. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 30 september 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
49. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende bulan September 2019, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
51. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan Tunjangan jabatan PNS dan Honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende bulan Oktober 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
52. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende tanggal 19 Oktober 2019, (Tanpa tanda tangan Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA) dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, Bulan September 2019 tanggal 20 Oktober 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
55. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan November 2019, tanggal 10 November 2019 sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 515 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan November 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
57. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
58. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
59. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran transportasi dan tunjangan jabatan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Desember 2019, sebesar Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
60. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Desember 2019, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
61. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
62. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 21 Desember 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
63. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Januari 2020, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
64. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Januari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
65. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
66. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Februari 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
68. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
69. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Februari 2020, tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
70. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 11 Juli 2020 sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
71. 3 (tiga) lembar Daftar Pembayaran Transportasi dan tunjangan jabatan honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Maret 2020, dengan total sebesar Rp.77.700.000,- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
72. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
73. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Maret 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
74. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan April 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan April 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
77. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan April 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
78. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, sebesar Rp.31.900.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 517 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Mei 2020, dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
80. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 september 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
81. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Mei 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
82. 2 (dua) lembar Daftar Pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan honorer provinsi SMK Negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, sebesar Rp.33.150.000,- (tiga puluh tiga seratus lima puluh ribu rupiah);
83. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran honorer Komite SMK Negeri 1 Ende bulan Juni 2020, tanggal 20 Juni 2020 dengan total sebesar Rp.24.700.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
84. 1 (satu) lembar daftar pembayaran Insentif teknisi sekolah SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
85. 1 (satu) lembar daftar pembayaran tunjangan operator Dapodik SMK negeri 1 Ende Bulan Juni 2020, tanggal 05 September 2020 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
86. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran, dengan rincian :
- Pembayaran persiapan siswa dan guru di Kematabor mataloko (ret-ret) sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
  - Pembayaran kegiatan Mohasabah, pada tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
87. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran dana purnabakti guru sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
88. 55 (lima puluh lima) lembar Nota pembelian persiapan tamu sekolah sebesar Rp. 6.427.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
89. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran pembangunan ruang tata niaga sebesar Rp.21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan rincian pembayaran sebagai berikut :
- Pembayaran 4 truck pasir untuk pembangunan ruang Kepro tata niaga, tanggal 20 Juli 2019 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 518 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian 1 (satu) kubik kayu tanggal 06 Agustus 2019 sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Panjar tukang ruang taata niaga, tanggal 27 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Panjar jasa tukang pengerjaan ruangan tata niaga SMKN 1 Ende, tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Ongkos kerja tukang ruang tata niaga, tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembayaran 1 (satu) truck pasir, tanggal 23 September 2019 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 90. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan tembok penyokong sebesar Rp.3.300.000,- dengan rincian:
  - Pembayaran pengerjaan rabat dan tembok penyokong Rp.1.700.00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2019;
  - Pembayaran 2 reit pasir, tanggal 08 Oktober 2019 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran 2 (dua) reit batu dan 1 (satu) reit batako, tanggal 27 Juli 2019 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 91. 18 (delapan belas) lembar nota pembelian ATK sebesar Rp.2.079.500. (dua juta tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- 92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Hut satpam tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 93. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang kedukaan bapak MIKAEL DEI, tanggal 08 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 94. 4 (empat) kwitansi pembayaran, beserta 1 (lembar ) nota pembelian dengan total sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran biaya kunjungan Kadis P&K Provinsi NTT;
- 95. 11 (sebelas) lembar nota pembelian giat Pengecetan ruang kepala sekolah sebesar Rp.1.683.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- 96. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 519 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 3 (tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar nota pembelian dalam rangka kegiatan kerohanian dengan total sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
98. 2 (dua) lembar kwitansi beserta 1 (satu) lembar nota pembelian Pengerjaan Lantai Halaman Sekolah dengan total sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
99. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi biaya instalasi air bersih sebesar Rp.4.827.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
100. 27 (dua puluh tujuh) lembar Nota pembelian pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp.1.558.000,- (satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
101. 5 (lima) lembar nota pembelian karangan bunga sebesar Rp.1.670.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
102. 1 (satu) lembar nota pembelian senter jaga malam sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
103. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemasangan Fenger print pada tanggal 06 Januari 2020 sebesar Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
104. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) buah bola Voly dan 1 (satu) buah Net pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
105. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu dan kabel sebesar Rp.1.513.000,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah);
106. 1 (satu) lembar nota pembelian Flash Disck pada tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
107. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan trail jendela sebanyak 18 buah pada tanggal 13 Agustus 2019 sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
108. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sensor 7 pohon sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
109. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan mobile kursi dan meja pada tanggal 12 agustus 2019 sebesar Rp.96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah);
110. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran iuran MKKS SMK ngeri 1 Ende, tanggal 05 Desember 2019 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 520 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi copy File CCTV tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
112. 1 (lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar nota pembelian biaya pemeriksaan ujian kenaikan kelas tanggal 11 Juni 2019 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
113. 2 (dua) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya supervise program OTKP sebesar Rp.1.444.500,- (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).'
114. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer pada tanggal 05 Juli 2019, sebesar Rp.80.675.000,- (delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
115. 9 (Sembilan) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya konsumsi rapat dewan guru sebesar Rp.18.860.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
116. 8 (delapan) lembar Nota pembelian perlengkapan cleaning service sebesar Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
117. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi pembayaran biaya pengembangan bakat siswa sebesar Rp.8.450.000,- (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
118. 4 (empat) lembar RAB perbaikan kursi dan meja belajar siswa sebesar Rp.4.805.000,- (empat juta delapan ratus lima ribu rupiah);
119. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pemberian materi PBB tanggal 07 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
120. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengawasan mobile rider kepolisian saat aerobik tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
121. 5 (lima) lembar nota pembelian dan 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya perbaikan Toilet guru dan siswa sebesar Rp.2.644.000,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
122. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengubah lagu SMK negeri 1 Ende, tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
123. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pemasangan pintu ruang tata niaga dan 12 jendela ruang kelas, tanggal 12 November 2019 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
124. 7 (tujuh) lembar kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian dan 1 (satu) lembar RAB biaya ulang tahun SMK Negeri 1

Halaman 521 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ende sebesar Rp.35.180.000,- (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
125. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi pangan local tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
126. 1 (satu) lembar nota belanja dan 1 (satu) lembar RAB konsumsi persiapan UNBK sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
127. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengantar siswa PKL tanggal 03 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
128. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound system tanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
129. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi pengawas korwas dan pemateri tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
130. 1 (satu) lembar nota belanja Roxy swalayan pembelian Bola kaki tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah);
131. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kunjungan Kadis PPO Provinsi NTT pada tanggal 12 Januari 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
132. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran biaya Poliklinik Inflasi rawat darurat tanggal 08 November 2019 sebesar Rp.119.800,- (seratus Sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
133. 1 (satu) lembar nota belanja Aqua saat hari pramuka tanggal 14 Agustus 2019 sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
134. 2 (dua) lembar nota belanja jilid Istimewa sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) lembar nota biaya pengadaan spanduk, tanggal 26 November 2021 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) lembar nota pembelian baliho pada tanggal 20 November 2019 sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
137. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pas foto peserta ujian Nasional tanggal 14 Januari 2020 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
138. 3 (tiga ) lembar daftar nama pembayaran siswa berprestasi sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 522 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar RAB rencana kegiatan Ekstrakurikuler Bola kaki tanggal 15 November 2019 sebesar Rp.5.340.000,- (lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
140. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi penguji ujian sekoalah tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
141. 1 (satu) lembar RAB biaya konsumsi panitia UNBK tanggal 14 Maret 2020 sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
142. 1 (satu) lembar RAB konsumsi penyusunan soal ujian sekolah pada tanggal 20 Februari 2020 sebesar Rp.5.220.000,- (lima juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
143. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga, pot bunga dan bunga hidup sebesar Rp.2.110.000,- (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);
144. 1 (satu) kwitansi pembayaran transportasi muat meja dan kursi pada tanggal 25 September 2019 sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
145. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran majalah Tabloid sebesar Rp.5.330.000,- (lima juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
146. 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran UKS/P3K sebesar Rp.1.219.600,- (satu juta dua ratus Sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
147. 32 (tiga puluh dua lembar) kwitansi pembayaran uang saku dan 33 (tiga puluh tiga) lembar print out ticket Traveloka giat perjalanan Dinas sebesar Rp. 82,262,983,- (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
148. 14 (empat belas) lembar nota pembelian perbaikan Lab Administrasi perkantoran sebesar Rp.2.105.000,- (dua juta seratus lima ribu rupiah);
149. 13 (tiga belas) lembar kwitansi pembayaran dan 7 (tujuh) lembar Nota pembelian untuk pembangunan Aula SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.85.410.000,- (delapan puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
150. 2 (dua) lembar Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Komite Sekolah (RAPBS) SMK Negeri 1 Ende tahun 2019/2020.
151. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6.000, dari bapak WENSESLAUS DERTA (pembeli), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 523 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), untuk pembayaran uang muka (DP) Pembelian Tanah yang berukuran luas 210 m2 di Jalan Marilonga Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende, tanggal 11 Oktober 2019;

152. 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 10.000 diterima dari bapak NOBERTUS H. P. DASILVA (Penjual), uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran pengembalian uang muka pembayaran pembelian tanah hasil kesepakatan bersama ttg pembatalan. Tanggal 12 Agustus 2022;
153. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembatalan Pembelian Tanah bermaterai 10.000, tanggal 11 Agustus 2022, yang bertanda tangan Pihak Pertama Nobertus H.P. Da silva, pihak kedua Wenseslaus Derta.
154. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran peta kabupaten Ende sebesar Rp.800.000;
155. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Mobiler kursi/meja siswa sebesar Rp.50.000.000,
156. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan pembuatan RPS sebesar Rp.1.750.000;
157. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengadaan alat jaringan Internet sebesar Rp.1.500.000;
158. 2 (dua) lembar Nota Pembelian dengan rincian :
- Pembelian Bendera Merah putih sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 januari 2021;
  - Pembelian Bendera Tut Wuri sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021.
- 159.1 (satu) lembar nota pembelian dynamo air pada CV. Bogasari;
- 160.1 (satu ) lembar Nota pembelian kayu usuk sebesar Rp.12.200.000;
161. 1 (satu) lembar nota pembelian printer Canon sebesar Rp.1.200.000;
162. 2 (dua) lembar nota biaya konsumsi Bimtek persiapan Akreditasi dengan rincian :
- Nota pembelian snack sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 januari 2021;
  - Nota pembelian nasi Bungkus sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021
163. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran beserta 34 (tiga puluh empat) lembar nota pembelian ATK Komite dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 13 januari 2021;
- 1 (satu) lembar struk pembelian sebesar Rp.173.500,- (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tanggal 12 januari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian bantal stempel dan tinta stempel sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 30 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 10 lembar materai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 24 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Kertas F4 2 rim sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku kwitansi, map biasa, dan Flakban hita sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah), tanggal 10 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 8 lembar materai sebesar Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah), tanggal 23 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 24 maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah gelpen sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin sebesar Rp.29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 20 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buku kwitansi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian anak Hekter, pisau cater, lakban hitam dan amplop sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 100 lembar fotocopy sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), tanggal 20 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 lusin bolpoin tizo sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 botol tinta canon sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 17 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop kecil dan amplop besar sebesar Rp.21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah), tanggal 10 September 2020;

Halaman 525 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak amplop besar sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tanggal 15 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah baterai sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian buku notes sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), tanggal 12 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian amplop panjang sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), tanggal 14 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 12 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak kertas buffalo sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), tanggal 05 November 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 catridge canon sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 17 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 botol tinta dan 2 buah catridge sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 22 Maret 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran Photocopy 300 lembar beserta 3 pak amplop sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian Catridge Printer Epson beserta tinta sebesar Rp.2.005.000,- (dua juta lima ribu rupiah), tanggal 11 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian catridge Epson sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 11 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1 pak bolpoin beserta 2 botol tinta Epson sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 2 buah bolpoin snowman, 2 rim kertas HVS, 2 botol tinta canon sebesar Rp.329.000,- (tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran fotocopy 500 lembar, beserta 5 pak amplop sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), tanggal 08 Desember 2020;

Halaman 526 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge Epson, 2 rim kertas F4, dan 1 pak amplop sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 05 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran 600 lembar fotocopy dan 6 pak amplop sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 10 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 botol tinta canon beserta 2 rim kertas HVS sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 20 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 10 buah baju siswa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 12 Januari 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Catridge sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 10 rim kertas HVS dan 2 buah catridge canon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 30 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 buah catridge Epson beserta 4 botol tinta sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 rim kertas HVS beserta 3 buku kwitansi sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), tanggal 04 Agustus 2020.
164. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tulis dan cetak ijasah sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 05 September 2020;
165. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran dan 2 (dua) lembar nota pembelian untuk acara HUT guru dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi hari guru sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;

Halaman 527 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa sound sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran media masa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pemberitaan media masa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 150 bungkus nasi ayam sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 24 November 2020;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 50 dos snack sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), tanggal 25 November 2020.
166. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar potong rumput dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2020;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bahan bakar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 10 September 2020
167. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 39 (tiga puluh Sembilan) lembar nota pembelian alat pendukung sarpras sebesar Rp.5.328.000;
168. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran surat kabar pos kupang sebesar Rp.840.000,
169. 4 (empat) lembar kwitansi dan 3 (tiga) lembar nota biaya konsumsi kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.000.000;
170. 9 (sembilan) lembar nota pembelian untuk biaya lembur kedatangan Inspektorat Prov. NTT sebesar Rp.4.200.000;
171. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran Flores Pos sebesar Rp.580.000,
172. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran beserta 1 (satu) lembar surat tugas transportasi 5 orang guru giat sosialisasi SKP Online sebesar Rp.250.000;
173. 1 (satu) lembar RAB kebutuhan alat pemasangan jaringan Internet penilaian akhir smester (PAS) dengan system daring SMK negeri 1 Ende tahun anggaran 2020/2021, sebesar Rp.1.995.000;
174. 1 (satu) lembar RAB konsumsi panitia PKL penajakan dan pengantaran 08 Juni 2021 SMK Negeri 1 Ende tahun 2021, sebesar Rp.2.100.000;
175. 3 (tiga) lembar biaya insentif kelebiha jam mengajar tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.13.725.000;

Halaman 528 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 4 (empat) lembar daftar pembayaran honor input kwitansi penerimaan smester ganjil tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.19.500.000;
177. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran Honor Komite sebesar Rp.386.750.000;
178. 11 (sebelas) lembar daftar pembayaran lembur PNS dalam jabatan tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.164.150.000;
179. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran insentif teknisi sekolah SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.27.000.000;
180. 2 (dua) lembar daftar pembayaran tunjangan tugas tambahan PNS dan Non PNS Provinsi bulan Juli 2020 sebesar Rp.32.450.000;
181. 12 (dua belas) lembar daftar pembayaran tunjangan Operator Dapodik SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.18.000.000;
182. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penebangan pohon sebesar Rp.2.000.000;
183. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa pengerjaan tower penjaga sebesar Rp.2.500.000;
184. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran enam baju kaos satpam sebesar Rp.300.000;
185. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi ujian smester ganjil selama 12 hari sebesar Rp.11.250.000;
186. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan kedukaan meninggal siswa an. EMANUEL WUNU sebesar Rp.1.100.000;
187. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana sering PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebesar Rp.38.660.000;
188. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 17 face shield untuk para suster sebesar Rp.340.000;
189. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 2 bendera umbul;
190. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar perbaikan kursi meja sebesar Rp.2.000.000;
191. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jilid istimewa dokumen kurikulum 4 rangkap sebesar Rp.150.000;
192. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar rencana rehabilitasi kantor dan ruang guru sebesar Rp.15.000.000;
193. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar kamar mandi/WC aula lantai 2 sebesar Rp.12.000.000;
194. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kontribusi kegiatan finalisasi RKS Bos sebesar Rp.750.000;

Halaman 529 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. 1 (satu) lembar kwitansi sewa molen cor sebesar Rp.6.000.000;
196. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang bambu untuk pembangunan aula sebesar Rp.5.000.000;
197. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran molen cor tiang aula (utang) sebesar Rp.5.000.000;
198. 1 (satu) lembar kwitansi nota makan
199. Satu bundel nota konsumsi;
200. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 unit mesin fotocopy canon type 5075 sebesar Rp.40.000.000,
201. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tabloid sebesar Rp.240.000;
202. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran service komputer sebesar Rp.500.000;
203. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah tandon air sebesar Rp.1.300.000;
204. 1 (satu) lembar nota pembelian kostu olahraga pembina sebesar Rp.19.200.000;
205. 1 (satu) lembar nota pembelian untuk biaya piknik guru SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.960.000;
206. 1 (satu) lembar nota pembelian kipas angin berdiri 10 buah sebesar Rp.6.000.000;
207. 1 (satu) lembar nota pembayaran sewa kamera sebesar Rp.100.000;
208. 1 (satu) lembar nota pembelian 11 set kostum dan 1 buah bola Voly sebesar Rp.875.000;
209. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran transportasi kegiatan Drumband sebesar Rp.12.468.000;
210. 4 (empat) lembar daftar biaya bimbingan belajar / diklat sore mata pelajaran ujian nasional (UN) SMK Negeri 1 Ende tahun ajaran 2019/2020 sebesar Rp.23.350.000;
211. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran snack dan air latihan bola voli sebesar Rp.4.800.000;
212. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran guru honor karate sebesar Rp.9.600.000;
213. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran transportasi dan umbul
214. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengerjaan rumah dan pemasangan papan nama lampu Let aula sekolah sebesar Rp.25.000.000,

Halaman 530 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran HUT sekolah sebesar Rp.15.000.000,
216. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tali ijuk 50 rol sebesar Rp.1.000.000,
217. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran utang jasa konsultan pembangunan aula sebesar Rp.51.000.000,
218. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 Kodi karung kuning sebesar Rp.67.000.000,
219. 1 (satu) lembar nota pembelian karangan bunga duka sebesar Rp.200.000,
220. 1 (satu) lembar nota pembelian 3 jirigen pembersih lantai Top Ron sebesar Rp.2.250.000,
221. 1 (satu) lembar nota pembelian Snack untuk latihan paskibraka sebesar Rp.200.000,
222. 1 (satu) lembar nota pembelian air tangki sebesar Rp.120.000,
223. 7 (tujuh) lembar nota pembelian konsumsi untuk rapat dewan guru sebesar Rp.20.585.000,
224. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi giat lembur pengadaan soal ujian sebesar Rp.2.000.000,
225. 4 (empat) lembar nota pembelian bola lampu sebesar Rp.9.474.000,
226. 1 (satu) lembar nota pembelian 10 unit computer sebesar Rp.37.500.000,
227. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 unit server sebesar Rp.20.000.000,
228. 1 (satu) lembar nota pembayaran jasa ongkir surabaya
229. 5 (lima) lembar nota pembelian stempel dan Baliho sebesar Rp.620.000,
230. Dana lomba hari ulang tahun pancasila yang ke-76 SMK negeri 1 Ende sebesar Rp.14.775.000,-(empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar surat permohonan dana panitia lomba hari ulang tahun pancasila ke-76, tanggal 27 Mei 2021;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi sebesar Rp.6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 01 Juni 2021;
  - 2 (dua) lembar daftar penerima insentif panitia lomba hari lahir pancasila, tanggal 01 Juni 2021;
231. Biaya tamu sekolah sebesar Rp.21.221.482,- (dua puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian :

Halaman 531 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192 (seratus Sembilan puluh dua) lembar nota belanja barang-barang persiapan kedatangan tamu;
- 16 (enam belas) lembar struk pembelian.
- 232. 2 (dua) lembar nota pembelian lampu LED dengan total sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 233. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sisa pembelian pasir sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
- 234. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian krikil sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 08 Agustus 2020;
- 235. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sisa pembelian batu sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 17 Juli 2020;
- 236. 1 (satu) lembar nota pembelian 127 Kotak snack sebesar Rp.1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), tanggal 13 Juli 2020;
- 237. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran snack peserta Drum band penjemputan Gubernur sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 26 Mei 2021;
- 238. 20 (Sembilan belas) lembar Kwitansi pembayaran beserta 29 (dua puluh delapan) lembar print out Tiket Traveloka sebesar Rp.82.906.833,- (delapan puluh dua juta Sembilan ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- 239. 3(tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua ) lembar Nota pembelian snack dan selendang sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);
- 240. 3(tiga) lembar nota DARI eliza;
- 241. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya perbaikan instalasi listrik sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 Oktober 2020;
- 242. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran transportasi guru pendamping Voly sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 243. 16 (enam belas) lembar nota pembelian Konsumsi Pekerjaan bak Air sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 244. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran biaya pemasangan instalasi listrik rang kepala sekolah sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah), tanggal 08 Juli 2020;

Halaman 532 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran hutang batako sebesar Rp.43.800.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
246. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian dalam rangka pekerjaan tembok penyangkang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
247. 2 (dua) lembar RAB sebesar Rp.4.711.00,- (empat juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian alat kesehatan sebesar Rp.4.378.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
248. 57 (lima puluh tujuh) lembar Bukti print out laporan transaksi Bank Mandiri atas nama WENSESLAUS DERTA periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
249. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BRI atas nama Dana Komite SMK Negeri 1 Ende periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
250. 189 (seratus delapan puluh sembilan) lembar bukti print out laporan transaksi Bank BNI atas nama WENSESLAUS DERTA, periode transaksi 1 Juli 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
251. 6 (enam) lembar Rekapitulasi Biaya kelebihan jam mengajar pembagian tugas guru dalam proses pendidikan dan pelatihan tahun pelajaran 2019/2020 sebesar Rp.17.100.000,- (tujuh belas juta seratus ribu rupiah);
252. 13 (tiga belas) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tahun 2019;
253. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.941.565.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
254. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) Rehabilitasi ruang kantor sekolah SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
255. 24 (dua puluh empat) lembar Gambar rencana pekerjaan pembangunan pembangunan jamban siswa /guru dan sanitasi SMK Negeri 1 Ende tahun anggaran 2020;
256. 1 (satu) lembar laporan rekapitulasi anggaran pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan sebesar Rp.353.527.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 533 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257. 2 (dua) lembar laporan Engineering Estimate (EE) pembangunan jamban samping aula SMK Negeri 1 Ende tanpa tanda tangan;
258. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap I gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 11 Juli 2019;
259. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap II gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), tanggal 20 September 2019;
260. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap III gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 04 November 2019;
261. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap IV gambar rencana pekerjaan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 19 Desember 2019;
262. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tahap V gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tanggal 10 Januari 2020;
263. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lunas gambar rencana pekerjaan lanjutan lantai I aula SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 17 Februari 2020.
264. 14 (empat belas) lembar Kwitansi pembayaran biaya akomodasi dan transportasi guru beserta 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti pembelian tiket pesawat;
265. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi penelusuran tamatan T.A. 2021/2022 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
266. 2 (dua) lembar nota pembelian konsumsi beserta 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Sound untuk biaya HUT Sekolah, sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
267. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran biaya publikasi media, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
268. Satu bundel nota pembelian beserta 1 (satu) lembar RAB untuk persiapan kelengkapan dokumen sekolah dalam rangka penilaian kinerja Kepala sekolah tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Insentif tim gugus Covid, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 534 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian Cat, sebesar Rp.1.832.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar WC Aula sekolah, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran jasa konsultan gambar perencanaan rehabilitasi kantor sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- 2 (dua) lembar nota pembelian lampu, sebesar Rp.7.570.000,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembelian material untuk pembangunan pagar, sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar tukang pengerjaan tembok lokasi SMEA lama, sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya sensor pohon, sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pengadaan Gong sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sumbangan untuk kegiatan pengukuhan pengurus PGRI, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB biaya lembur panitia PKL tahun 2021, sebesar Rp.29.545.000,- (dua puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar RAB lembur rancang bangun Lab Komputer TKJ tahun 2021/2022, sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar RAB Konsumsi giat Vaksinasi SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.11.480.000,- (sebelas juta empat empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar daftar pembayaran Honor input kwitansi penerimaan Smester ganjil tahun ajaran 2021/2022, sebesar Rp.10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dan 1 (satu) lembar nota pembelian gorden ruang ujian P3K, sebesar Rp.9.610.000,- (Sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 535 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran Koran Flores Pos dari bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2021, sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembelian warta Flobamora, sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Tandon dank ran sebesar Rp.1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Koran pos kupang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar kwitansi beserta 2 (dua) lembar nota untuk biaya potong rumput, sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi biaya cetak dan penulisan ijasah, sebesar Rp.11.370.000,- (sebelas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - 30 (tiga puluh) lembar kwitansi beserta 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian untuk biaya pembangunan aula;
269. 1 (satu) lembar nota pembelian Box masker, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tanggal 09 September 2021;
270. Pembayaran uang komite SMK negeri 1 Ende, dengan rincian :
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FEMILDA AGUSTINA BHITO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YORDINHAYUS BILI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELFRIDA NOE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 18 Desember 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FALENTINUS MEO MUGA sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISTINA KRISARAGO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA MAJO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;

Halaman 536 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELEGENIA RUTH WANGGE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LOUISYA RATU MONE LEDO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari OKTAVIANUS SA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ELISABETH RUWINA MBEYO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 15 November 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari AGNES JULIANTI sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ANTONIA RONA sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), tanggal 20 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari HUBERTUS JAE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari ALFONSIUS K. KESU sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SISILIA INE UTA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 22 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANA BERNADETHA BUNGA sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari LUSIA SUE sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari YOHANES MARI BA'I LETA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;

Halaman 537 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari FREDOFIUTUS KAPO API sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari SERGIUS LAKA NAWA sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA PUTRIANA PANO KEDE sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari BENEDIKTUS KARTINO ABA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KARMELIA AYATI ASFES sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PAULINA PIA DEDE DU sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari EFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARINA HARU sebesar Rp.00.000,- (dua ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari PRILIS YUBENSER sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA AFIANI KEWA BADIN sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari KRISANTUS JEMIAH sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang diterima dari MARIA YASINTA SERO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tanggal 07 Juli 2021.

Halaman 538 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271. 9 (Sembilan) lembar kwitansi pembayaran biaya transportasi beserta 4 (empat) lembar hasil dokumentasi siswa ke lokasi Bencana adonara, sebesar Rp.11.050.000,- (sebelas juta lima puluh ribu rupiah);
272. 14 (empat belas) lembar kwitansi beserta 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi biaya pengerjaan ruang TN sebesar Rp.67.272.500,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
273. 90 (Sembilan puluh) lembar nota pembelian untuk biaya tamu sekolah sebesar Rp.7.794.000,- (tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
274. 1 (satu) lembar kwitansi beserta 30 (tiga puluh) lembar nota pembelian untuk ATK, sebesar Rp.6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
275. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pekerjaan daun jendela ruang Aula lantai I sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
276. 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran beserta 2 (dua) lembar nota pembelian bunga untuk pengerjaan taman sekolah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
277. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa tenda ujian P3K sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
278. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawasan kerja tembok sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
279. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos kerja pemasangan kloset dan shower, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
280. 1 (satu) lembar memo dari Kepala sekolah HERMIN GILDUS RANGGA untuk pembelian obat-obatan dan dispenser, sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
281. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pengawalan siswa PKL, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
282. 1 (satu) lembar nota biaya pembersihan lokasi sekolah, sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
283. 1 (satu) lembar nota pembelian snack untuk kegiatan pemilihan pengurus osis, sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
284. 1 (satu) lembar nota pembelian baterai LPE dan memori Sandisk, sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);
285. 1 (satu) lembar nota pembelian kostum olah raga guru, sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 539 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 2 (dua) lembar nota pembelian snack dan konsumsi giat peringatan hari guru, sebesar Rp.4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
287. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran snack makan ujian sebesar Rp.610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);
288. 1 (satu) lembar nota pembayaran service laptop dan computer, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
289. 1 (satu) lembar nota pembelian konsumsi nasi ayam sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
290. 1 (satu) lembar nota pembayaran pengadaan kursi 69 buah, sebesar Rp.25.875.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
291. 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi lembur pengisian Kuisoneer BPK, sebesar Rp.2.553.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
292. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya insentif panitia seleksi sebesar Rp.7.360.000,- (tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
293. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya pembelian aqua dan permen untuk giat latih karate, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
294. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya guru pendamping latihan Voly, sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
295. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran biaya honor guru tamu karate, sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
296. 1 (satu) lembar nota pembelian shower closet, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
297. 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran pembelian permen dan aqua latihan Voly selama 6 bulan, sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
298. 1 (satu) buah nota pembelian kloset duduk, sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah);
299. 1 (satu) lembar nota pembelian papan cor kemiri sebanyak 10 lembar, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
300. 1 (satu) lembar nota pembelian 1 buah krans bunga, sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
301. 1 (satu) lembar nota pembelian pisau potong rumput, sebesar Rp.500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 540 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. 17 (tujuh belas) lembar nota pembelian barang-barang untuk instalasi listrik, sebesar Rp.18.472.000,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
303. 11 (sebelas) lembar kwitansi beserta 9 (Sembilan) lembar nota pembelian bahan pengerjaan tembok RPS sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
304. 4 (empat) lembar kwitansi beserta 3 (tiga) lembar nota pembelian konsumsi kegiatan seleksi P3K, sebesar Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
305. 3 (tiga) lembar nota beserta 2 (dua) lembar RAB kegiatan Teacher study SMK negeri 1 Ende tahun 2021/2022, sebesar Rp.1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
306. 6 (enam) lembar daftar pembayaran honor komite SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.228.400.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
307. 1 (satu) lembar nota pembelian pembersih lantai supersilk sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
308. 6 (enam) lembar daftar pembayaran Honorar teknisi SMK negeri 1 Ende periode bulan Juli sampai dengan Desember 2021, sebesar Rp.12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
309. 6 (enam) lembar daftar pembayaran operator Dapodik SMK negeri 1 Ende, periode bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2021, sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
310. (tiga) lembar nota pembelian beserta 5 (lima) lembar Faktur penjualan alat kesehatan sebesar Rp.54.895.590,- (lima puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
311. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 007/I.21.27/SMK.1/KU/2021, Tanggal 24 Juni 2021;
312. 1 (satu) lembar Fotocopy surat edaran besaran uang komite dengan nomor : 139/I.21.27/SMK.1/KU/2019, Tanggal 24 Juni 2019;
313. 30 (tiga puluh) lembar Fotocopy gambar rencana pembangunan ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende;
314. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;

Halaman 541 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende tanpa ditandatangani, Bulan November 2018;
316. 1 (satu) lembar Fotocopy Rekapitulasi Dana Sering pembangunan 2 (dua) ruang praktek siswa SMK Negeri 1 Ende, sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
317. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Valentinus Napa kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
318. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari Bernadeta Ceriana Mbeo kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas XID sebesar Rp. 1.800.000. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
319. 4 (empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FAUPILIA MBAGHO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
320. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FREDERIKUS LAKA kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
321. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari FULGENSIUS GELI kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
322. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari BENEDIKTUS KARTINO ABA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;
323. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA RITA kelas X D sebesar Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

Halaman 542 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





324. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANDREAS NDOLU kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
325. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ANGELINA MINUNG kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
326. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari EUFRASIA GLADISTA SALOMY WA'U kelas X D sebesar Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
327. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari IVONISIA NO'O kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
328. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KAROLINA YASTIKA NUMUT kelas X D sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
329. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari KRISTINA VANESA KEMBA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
330. 6 (Enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari LUT MARIA ASOH kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
331. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA KALUDIA KARA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
332. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SRI NINGSIH DEI kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu

Halaman 543 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg



juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

333. 8 (delapan) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA RINDIANI NIKSA RUE kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

334. 4 (Empat) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA SUSANTI SITI kelas X D sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

335. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARIA YUSTINA DENO kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;

336. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MARLINA HARO kelas X D sebesar Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

337. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari MONIKA ELTIANA BONA kelas X D sebesar Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

338. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PATRISIA LORENSIA GINA kelas X D sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;

339. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PAULINA YASINTA SERE kelas X D sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun ajaran 2020/2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PLASIDIAS LUSIA MBENA kelas X D sebesar Rp. 200.000 (Dua ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
341. 5 (lima ) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari PRUDENSIA APRIYANTI WEA kelas X D sebesar Rp.1.850.000 (Satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
342. 7 (tujuh) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RESTIANA REGINA NONA kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Sat juta delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
343. 2 (dua) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari RIKARDUS WAKE SARE kelas X D sebesar Rp. 800.000 (Delapan ratus ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
344. 11 (sebelas) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari ROSALINDA SOFIA KOJA kelas X D sebesar Rp. 1.350.000 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021;
345. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SIMPORIANUS M AYUB kelas X D sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratu ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020;
346. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran uang komite SMK Negeri 1 Ende dari SISILIA NONA WATU kelas X D sebesar Rp. 1.800.000 (Satu juta delapn ratus ribu rupiiah) dan kelas X1 D sebesar Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun ajaran 2019/2020 dan tahun jaran 2020/2021.
347. 1 (satu) Bundel laporan pertanggung jawaban kegiatan IN HOUSE TRAINING (IHT)
348. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan Manajemen Bos dan Dana Komite di SMK Negeri 1 Ende;
349. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir pernyataan beserta bukti pengembalian dana Komite tahun 2020.

Halaman 545 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



350. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran konsumsi panitia Lokal seleksi guru ASN/P3K tahap I tahun 2021, Pada SMK Negeri 1 Ende sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), pada tanggal 16 September 2021.
351. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanda bukti penarikan uang pada Bank BRI sebesar Rp.182.700.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Komite SMKN 1 Ende.
352. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 7155-01-020146-53-3, atas nama Komite SMKN 1 Ende;
353. 1 (satu) buah buku rekening Bank NTT dengan nomor rekening : 1007513317, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA;
354. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor : BKD.013.1/I/234/PK-JS/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017 tentang pengukuhan Pegawai Negeri Sipil (Guru) atas nama HERMIN GILDUS RANGGA yang diberikan tugas tambahan dalam jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ende;
355. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Ende nomor : KEP.086.829/3810/X/PK/2015, Tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil atas nama HERMIN GILDUS RANGGA sebagai pelaksana tugas Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ende;
356. 25 (dua puluh lima) lembar print out Buku Rekening bank NTT dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2021, atas nama HERMIN GILDUS RANGGA.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan Terdakwa WENSESLAUS DERTA, S.Pd ;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino,S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lizbet Adelina, S.H., dan Mike Priyantini masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusak Ndaumanu,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lizbet Adelina, S.H.,**

**Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H.**

**Mike Priyantini, SH.,**

Panitera Pengganti,

**Yusak Ndaumanu, S.H.**

Halaman 547 dari 547 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2023/PNKpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)